

REFORMASI

&

JATUHINYA

SOEHARTO

BASUKI AGUS SUPARNO



REFORMASI DAN JATUHNYA SOEHARTO

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REFORMASI DAN JATUHNYA SOEHARTO

BASUKI AGUS SUPARNO



Reformasi dan Jatuhnya Soeharto

Copyright © 2012, Basuki Agus Suparno

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, Februari 2012
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

KMN: 20205120010

Perancang sampul: A Novi Rahmawanta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

x + 238 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-979-709-624-3

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Victory Jaya Abadi



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis.....	Vii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Sejarah Perubahan di Indonesia	15
Bab 3 Karakteristik Legitimasi Orde Baru.....	47
Bab 4 Retorika dan Reformasi85
Bab 5 Reformasi: Pertarungan Bahasa Politik	113
Bab 6 Drama Jatuhnya Soeharto	175
Bab 7 Penutup.....	209
Indeks.....	219
Daftar Pustaka	227
Tentang Penulis	239



PENGANTAR PENULIS

Ada baiknya, sesaat, untuk bertanya: Apa yang sudah dihasilkan oleh reformasi, setelah 14 tahun lebih berlalu? Apakah agenda reformasi sepenuhnya telah dipenuhi sebagaimana janji-janji yang muncul dalam sebuah gerakan sosial yang katanya ditujukan untuk menghapus kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagai akar permasalahan yang paling krusial di negeri ini?

Ke manakah mereka dulu yang menyuarakan begitu lantang tentang reformasi? Apakah kalau memang reformasi telah membawa kebaikan, lantas apakah kebaikan itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan masa lalu? Demikian sebaliknya, apakah bila reformasi membawa kondisi yang lebih buruk, maka keburukan itu juga merupakan kesalahan masa lalu? Tidakkah itu sebagai ketidakbecusan kita di dalam mengelola bangsa dan negara ini? Ataukah menjadi bagian cara kita

untuk mencari kesalahan orang lain atas ketidakmampuan itu?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah, yang dikaji dan berusaha dipaparkan dalam buku *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Buku ini berusaha memaparkan adanya pertarungan kepentingan yang terwujud dalam penggunaan bahasa politik dari aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya yang mengatasnamakan reformasi.

Buku ini merupakan penulisan ulang dari disertasi yang penulis tulis beberapa waktu lalu. Dengan demikian, karya ini merupakan karya yang dihasilkan dari praktik-praktik diskursif ilmiah karena mendapatkan kritik, saran, dan perbaikan dari berbagai pihak dalam masyarakat ilmiah itu.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam mewujudkan karya ini dan yang telah memberi kesempatan untuk berinteraksi penuh makna dan kaya yang membekas itu dalam komunitas ilmiah dan akademik baik komunitas ilmiah di Salemba UI, komunitas ilmiah Babarsari UPN Yogyakarta atau pun komunitas ilmiah Kentingan UNS Solo.

Penulis mengucapkan terima kasih atas saran, kritik dan perbaikan kepada Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.; Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.; Prof. Andre Hardjana, Ph.D.; Prof. Dr. Harsono Suwardi; Prof. Dr. Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi; Prof. Aloys Agus Nugroho, Ph.D.; Prof. Dedy Nur Hidayat, Ph.D. (alm); Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D.; Dr. Pinckey Triputra; Dr. Sunarto; Eduard Lukman, M.A., dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga kebaikan-kebaikan itu memberi kemanfaatan bagi kepentingan kemanusiaan secara utuh dan keseluruhan, bangsa serta negara.

Diskusi dan pencermatan yang menarik juga penulis peroleh secara hangat dari Prof. Ichlasul Amal, Ph.D.; Dr. Ir. Akbar Tanjung, Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, Rama Pratama, Widi Aswindi, dan Mudrick Sangidoe yang memberi penjelasan dari perspektif mereka tentang reformasi. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas diskusi-diskusi yang mereka telah sampaikan itu.

Bagian terpenting karya ini adalah dukungan dari istri tercinta Erni Indriyastuti yang telah merelakan penulis, untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral di Jakarta. Pengorbanan dan dukungan itu begitu berharga dan pantas kiranya bila buku ini pun didedikasikan bagi pengorbanan dan kerelaan itu.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah memberi dukungan finansial dan administratif serta kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan doktoral ini. Kepada Ketua Program Studi Basuki M.Si. dan semua kolega yang telah memberi dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih. Buku ini penulis harapkan sebagai wujud sumbangsih pengabdian bagi lembaga pendidikan di mana penulis bergelut di dalamnya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Buku Kompas yang telah bersedia menerbitkan disertasi ini ke dalam bentuk buku. Atas dukungan Bapak St Sularto jualah, buku ini dapat terbit, karenanya, penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Kiranya, dengan terbitnya buku ini, akan menjadi kebaikan bersama bagi majunya bangsa dan negara kita-Indonesia. Amin. ❖

Sragen, Februari 2012



BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah menjadi bagian masa lalu, bagian dari perjalanan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi tahun 1945. Seperti pula momentum sebelumnya, reformasi adalah bagian sejarah dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Sejumlah peristiwa seperti pendudukan gedung DPR/MPR, insiden Trisakti, dan Semanggi, pengunduran diri Presiden Soeharto, aksi penjarahan dan kerusuhan, pernyataan 14 menteri yang tidak bersedia lagi duduk dalam Kabinet Reformasi dan sebagainya, adalah realitas sejarah.

Namun seperti dikatakan Taufik Abdullah (2006: xxxiii)—semua peristiwa sejarah sebagai *historie recite* itu adalah terbuka bagi rekonstruksi yang sering merefleksikan keinginan untuk membenarkan atau menyalahkan. Dalam

pengertian *historie recite* itu, pemaknaan (*interpretation*) menjadi sangat berharga.

Sejak awal, gerakan reformasi telah dimaknai berbeda-beda antara lain mencakup desain negara ideal, slogan klise ataupun sebatas ekspresi pikiran seseorang. Ada yang berpendapat bahwa reformasi tidak identik dengan pergantian individu melainkan berkaitan dengan sistem dan struktur.

Dari semua itu, masing-masing memberi tekanan pada aspek-aspek tertentu, sebagian sama, tetapi sebagian yang lain saling bertolak belakang. Meskipun objek sosialnya sama (reformasi), dalam kenyataannya terdapat perbedaan pemikiran yang kontradiktif.

Meminjam istilah George Herbert Mead, kapasitas itu disebut sebagai "taking the role of the other" (Turner, 1998:361). Meskipun, menurut Jakob Oetama (dalam Sulastomo, 2003), semua yang muncul itu merupakan pemahaman yang kurang lengkap. Keadaan "amburadul" yang menyertai Reformasi, sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman parsial terhadap reformasi.

Seperti yang kita ketahui, reformasi sebagai gerakan politik telah membuat Soeharto mundur dan sukses menempatkan Soeharto sebagai *a device that unifies all those who share the same enemy*. Namun, banyak pihak yang menyatakannya sebagai gerakan yang gagal membawa perubahan yang lebih baik sebagaimana dijanjikan.

Pada sisi lain, mereka juga dihadapkan bagaimana gerakan ini dapat disterilkan dari aktor-aktor oportunist yang semata-mata hanya menginginkan posisi sebagai akibat perubahan konfigurasi struktur sosial, ekonomi dan politik baik yang berasal dari aktor lama ataupun yang amatiran yang akan memengaruhi corak jalannya reformasi itu sendiri.

Bahkan sejak awal, aktor-aktor yang dikenal sebagai tokoh reformis telah terfragmentasi menjelang Pemilihan Umum tahun 1999.¹ Masing-masing disibukkan dengan kegiatan membangun popularitas guna memperoleh dukungan dan afialisasi kepentingan.

Pertarungan pernyataan dan aksi politik yang menunjukkan fragmentasi justru tampak pada tahap yang sangat prematur. Pergeseran sikap juga terjadi pada elite-elite politik, misalnya melunaknya sikap mereka terhadap pemerintahan transisi, yang tidak seperti yang diperlihatkan ketika Presiden Soeharto masih berkuasa.

Setelah berlangsung lebih 10 tahun, reformasi masih menyisakan masalah-masalah krusial. Ignas Kleden menyatakan bahwa politik Indonesia sesudah dan sebelum reformasi tidak mengalami perubahan apa pun. Bahkan reformasi telah mandek secara prematur.

Masyarakat menjadi bingung dan tidak mampu lagi membedakan siapa tokoh reformis sejati dan gadungan (Indrawati, 2000). Ditambah dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa yang menuliskan bahwa reformasi telah mati suri² dan reformasi Indonesia tanpa konsep.³

Perjuangan reformasi itu sendiri sering dipahami dalam konstelasi kekuasaan yang sentralistik, pengaruh kekuatan ekonomi global dan isu-isu hak asasi manusia (HAM), pemerintahan yang bersih, masyarakat madani, persoalan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kroni. Reformasi sering dibicarakan dalam bingkai kehidupan politik dan sosial ekonomi sebagai bentuk koreksi dan sekaligus perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Jadi, tidak semuanya, mereka menyatakan sesuatu secara jujur dan terbuka. Setiap orang dapat menyembunyikan

1 *Kompas*, 22 Mei 2004

2 *Sinar Harapan*, 21 Mei 2003

3 *Bali Pos*, 26 Maret 2003

tujuan dan kepentingan di balik apa yang dinyatakan ideal. Orang dapat bersembunyi di balik pernyataan-pernyataan manis dan tajamnya (Griffin, 2000: 289).

Banyak pihak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi untuk mewujudkan motivasi dari pilihan-pilihan yang tersedia, apakah mereka sebagai mahasiswa, akademisi, birokrat, teknokrat, militer, ekonom, praktisi hukum, pelaku komunikasi, pengusaha, buruh atau siapa pun.

Karena perasaan dan moralisasi, semua kebijakan yang telah dicapai Orde Baru diserang. Bersamaan itu, mereka menempatkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kroni sebagai sasaran kesalahan dan Orde Baru sebagai akar penyebab dari semua prahara yang terjadi.

Mereka menyuarakan pembatasan jabatan presiden, pemerintahan yang bersih, penghapusan Dwifungsi ABRI, penghapusan monopoli dan poteksionisme. Mereka mencitrakan diri sebagai pihak yang tidak memiliki andil terhadap kesalahan meskipun pernah berada di dalam kebijakan tersebut atau menikmati hasil panjang dari proses pembangunan itu.

Dengan demikian, melalui istilah reformasi, banyak pihak melakukan politisasi komunikasi. Umumnya seseorang berkecenderungan menghindari tanggung jawab. Kedua, cenderung mencari kondisi ideal dan pada akhirnya mencari posisi yang lebih tinggi dengan merendahkan pihak lain.

Masing-masing berusaha meminggirkan wacana lain, dengan melakukan legitimasi dan delegitimasi; menyerang dan menyalahkan; meyakinkan dan memengaruhi; mempertahankan dan mendorong; dan diikuti dengan aksi-aksi tertentu yang menggambarkan adanya kekuatan yang membentuk iklim wacana (*the climate opinion*).

Dalam situasi itu, banyak istilah yang tidak hanya berusaha mensubstitusi istilah-istilah melainkan istilah itu

dipakai untuk menyerang. Lebih dari itu istilah-istilah tersebut dipakai untuk menstransedensikan, menggantikan (*replacement*), atau mengondensasikan istilah-istilah lama untuk mendapatkan keuntungan dari situasi krisis. Iklim opini ini tidak sebatas perdebatan tentang reformasi, melainkan secara terbuka ingin mengganti tokoh-tokoh lama dan sistem Orde Baru yang dinilai telah mengalami kebangkrutan.

Dalam konteks gerakan sosial, kesuksesan dicapai dikarenakan menggunakan taktik motivasional dengan menempatkan tatanan ideal, surga, dan masyarakat utopia (Payne, 1990:350). Namun gerakan sosial, sering menimbulkan kefrustrasian karena memicu ketidakpastian. awal lebih ditentukan oleh kebutuhan psikologis massa sesaat karena tidak puas terhadap situasi yang menimbulkan krisis.

Dari sini, dengan mudah orang mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab krisis sebagai sesuatu yang tidak ideal, lebih buruk, mengekang, represif, dan diktaktor yang korup. Komunikasi semacam ini, lebih sebagai arena retorik yang cenderung bersifat emosional daripada pembicaraan yang matang dan konstruktif.

Sejak awal, gerakan reformasi mempersoalkan praktik kekuasaan rezim Orde Baru. Di bidang ekonomi, implementasi yang dijalankan dinilai sebagai kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) (Kunio, 1986). Deregulasi dan debirokratisasi yang semestinya diarahkan untuk menangkap kekuatan ekonomi pasar, justru menjadi jalan bagi berbagai kepentingan sempit rente ekonomi seperti privilese, monopoli, kolusi, nepotisme, dan korupsi.⁴

Kekuasaan rezim Orde Baru sering digambarkan sebagai negara birokratik (*bureaucratic polity*) dalam arti sekelompok

4 *Suara Pembaharuan*, 8 Mei 1998

elite politik mengendalikan pengambilan keputusan yang ada. Masyarakat diikutsertakan, tetapi terbatas pada implementasi dari keputusan politik (Jackson and Pye, 1978); negara otoritarian yang korporatis (*authoritarian corporatism*) (Robinson, 1993), negara pejabat (Ruth Mcvey, 1982), dan negara neopatrimonialisme (Harold Crouch, 1968). Keterlibatan militer yang dominan dalam pemerintahan, adalah sisi lain yang digugat karena ada yang melihat supremasi sipil atas militer adalah aspek kunci demokrasi (Crawford and Hermawan, 2002).

Di tengah situasi sulitnya memperoleh konsensus atas reformasi, dengan himpitan ekonomi semakin berat, memaksa pemerintah menoleh pada paket bantuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Keputusan ini menjadi jalan bagi kepentingan pasar bebas untuk melakukan reformasi struktural secara radikal yang tampaknya memang sejak lama dinantikan (Timo Kivimaki, 2000).

Dalam hubungan itu pemerintah harus melakukan kompromi terhadap banyak hal seperti melepaskan pengelolaan tata niaga kedelai, bawang putih, gandum, terigu, cengkeh, dan sebagainya. Tolok ukur dan evaluasi tersebut dikontrol oleh negara-negara kreditor. Lingkupnya mencakup bidang-bidang yang sangat luas, tidak hanya pada sektor finansial dan perbankan, melainkan termasuk sektor energi, pertanian, perdagangan, industri, dan kehutanan.

Sulastomo (2003:44) mengatakan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi aktor-aktor internasional untuk terlibat dalam proses reformasi politik di Indonesia. "Governance reform" telah menjadi prioritas tertinggi bagi agen-agen bilateral dan multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF, dan UNDP (Crawford dan Hermawan, 2002).

Sementara IMF sendiri telah gagal mengantisipasi konsekuensi dari nasihatnya terhadap stabilitas sosial dan politik. Dengan menekankan privatitas secara cepat terhadap negara berkembang, IMF mengabaikan dampak negatif distribusi kekayaan, tidak mempedulikan kebutuhan pokok sosial yang paling mendasar, memaksa pejabat-pejabat negara berkembang melanggar kontrak sosial dan menenggelamkan legitimasi banyak pemerintah (Rais, 2008; Stiglitz, 2002).

Padahal sejak tahun 1970 sampai 1990-an, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun mencapai 7 persen (Berg, 1999). Bahkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, dan Thailand dikategorikan sebagai *High Performing East Asian Economics* (McGillivray dan Morrissey, 1999:4). Namun dengan terjadinya devaluasi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan bahkan negatif, dan kini belum pernah kembali ke posisi semula yang pernah dicapai pada masa rezim Orde Baru.

Jadi, reformasi memicu terjadinya kontestasi kepentingan yang luas. Situasi itu menunjukkan upaya berbagai pihak untuk meyakinkan gagasan reformasi perlu dilakukan, yang tidak lain, menuntut pergantian kekuasaan itu sendiri. Dalam kancah itu, seseorang bisa mendapat predikat sebagai reformis atau *status quo*. Reformasi ini telah memunculkan perdebatan dan argumen yang memicu suatu kontroversi dan kisah besar dalam sejarah kekuasaan di Indonesia yang mempertanyakan tentang fakta, nilai dan kebijakan (Vancil, 1993:26).

Ini terjadi karena tidak satu pun dari diri seseorang yang mampu membebaskan sepenuhnya dari masalah yang berkaitan dengan usahanya untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dalam lingkup yang luas di mana

kenyataan tampak tidak pernah lengkap dan pasti (Vancil, 1993).

Sebagai situasi, kontestasi akan memperlihatkan bagaimana isu, menjadi forum yang memperlihatkan berbagai perspektif yang berbeda saling bersaing. Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi.

Kedua, mencakup pro dan kontra, yang memberikan opini. Identifikasi terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok sangat vital untuk memahami karakteristik perubahan yang ditawarkan dan dukungan terhadap argumen yang diberikan termasuk memahami kelompok-kelompok yang mempertahankan *status quo* dan siapa-siapa yang membelot.

Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi. Ini berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif isu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kebijakan. Perhatian terhadap sebab-sebab kontroversi memberikan dasar apakah yang diperdebatkan berada pada soal nilai (*value*), soal fakta (*fact*) ataukah soal kebijakan (*policy*).

Keempat, mencermati karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan di dalam kontestasi tersebut. Untuk hal ini, mesti meneliti sejumlah situasi guna melihat tindakan-tindakan yang dilakukan (Burke, 1966:29). Di dalam situasi-situasi yang berbeda, kita bisa melihat berbagai masalah dari sumber motivasi tindakan yang berbeda.

Misalnya, bagaimana Harmoko berperilaku di dalam situasi ke situasi di dalam menghadapi tekanan dan tuntutan. Demikian pula perilaku-perilaku yang lain seperti

Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Akbar Tanjung, dan termasuk perilaku Presiden Soeharto sendiri.

Aspek bahasa di dalam gerakan reformasi adalah sesuatu yang penting karena ia merupakan *the art of delivery* sehingga tampak siapa-siapa yang berbicara manis kemudian pahit, siapa yang bicara pahit tetapi tetap pahit dan siapa-siapa yang bicara pahit kemudian manis. Karakter-karakter ini mengungkapkan tindakan-tindakan utama di dalam cara yang berbeda-beda yang menunjukkan motif-motif kepentingan yang berbeda.

Untuk mengungkapkan hal itu, jalan yang ditempuh di dalam tulisan buku ini adalah meneliti jejak-jejak komunikasi sebagai *genetic marker* sebagai bentuk-bentuk komunikasi yang ditinggalkan. Alasan pokoknya adalah aktivitas politik tidak dapat dipahami dengan baik tanpa jejak-jejak komunikasi. Sedangkan untuk mendapatkan jejak komunikasi itu yang paling memungkinkan adalah melalui media pemberitaan (baca: *Kompas*) yang merupakan forum utama bagi komunikasi politik dalam demokrasi modern seperti sekarang (Rodney, 1989).

Forum ini merupakan sebuah arena di mana pemuatan berita-berita yang bernilai tersebut mencerminkan konflik-konflik politik atau informasi tersebut memberikan referensi umum terhadap sisi-sisi yang berbeda yang menghubungkan sekuen-sekuen dari pikiran dan tindakan-tindakan mereka.

Isu muncul melalui peristiwa-peristiwa. Definisi isu adalah produk yang timbul dari orientasi utama atas perkembangan kejadian yang ada. Isu tergantung pada bagaimana dan seberapa abstrak prinsip-prinsip yang ada, seberapa kompleks konflik yang muncul atau kondisi-kondisi yang berkelanjutan yang mengkristal menjadi peristiwa yang bernilai.

Jadi, isu muncul secara publik tidak sebagai topik-topik yang otonom bagi sebuah perdebatan, melainkan melekat di dalam perdebatan dan secara sekunder berada pada pelaporan-pelaporan konflik yang menunjukkan pengaruh kekuasaan tertentu yang bekerja di dalamnya. Posisi kontroversi politik kadang-kadang mencakup oposisi yang mengadopsi perbedaan-perbedaan retorika yang sangat tajam.

Ada sebuah penyaringan yang pervasif di dalam pelaporan kontroversi terhadap penekanan peristiwa yang berat dan sulit; terhadap kualitas kepentingan drama manusia, penekanan pada relevansi nyata dan langsung terhadap masyarakat, landasan moral dan hal-hal yang kompleks lainnya.

Dengan demikian, format berita dan informasi sering disajikan dalam kalimat-kalimat yang tajam, pernyataan-pernyataan pendek yang humanis, dan drama yang juga disesuaikan dengan pernyataan tajam yang menyerang, lebih dari sekadar dalam bentuknya sebagai eksposisi, mendiskreditkan lawan-lawan politik serta lebih dari sekadar argumentasi terhadap prioritas-prioritas tertentu yang dikompetisikan (Rodney, 1989).

Dengan begitu, tulisan hasil penelitian ini berusaha mengungkapkan kenapa reformasi sedemikian kontroversial dan banyak yang menyatakannya sebagai gerakan yang kehilangan esensinya. Pusat perhatiannya terletak pada bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi, seperti pernyataan, argumen, pendapat, dan tulisan yang merefleksikan pemikiran para tokoh tentang reformasi khususnya yang terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 1998.

Selain hal itu, gerakan reformasi di Indonesia telah menimbulkan minat banyak ilmuwan dan ahli dalam melakukan penelitian di seputar kontroversi reformasi. Riset

yang dilakukan Paulus Sulasdi (2001-UI) melihat konstruksi pemikiran surat kabar *Kompas* tentang reformasi dengan mendasarkan pada tajuk rencana selama masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dari bulan Mei 1998 sampai Oktober 1999.

Dedy N. Hidayat (2002) melakukan studi yang menunjukkan bahwa proses rumor media massa dan transformasi struktural ekonomi membentuk deligitimasi rezim Orde baru. Andrew Jakubowicz dan Rod Palmer (2002) melakukan studi tentang pemingkakan yang dilakukan media di Australia yang menjelaskan kejatuhan Presiden Soeharto.

Tahun 1997 dijadikan titik tolak karena pada tahun itu krisis moneter telah mulai kelihatan dan diskursus mengenai perubahan (reformasi) dibicarakan secara luas dan terbuka. Rentang dari tahun 1997 sampai 1998 itu sendiri ditandai dengan kemelut politik, seperti yang dikatakan O'Rourke ((2002) penuh dengan intrik, tragedi, misteri, dan kekacauan.

Sumber data utama yang dipakai adalah harian *Kompas* selama dua tahun tersebut yang mengidentifikasi jejak-jejak komunikasi yang terekam di dalamnya yang menyatakan dan berpendirian tentang reformasi. Data ini didukung dengan data-data sekunder lainnya, baik artikel, sumber-sumber literatur, publikasi, dokumen-dokumen tertentu yang relevan, serta wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang pernah memiliki keterlibatan di dalam gerakan reformasi yang berasal dari berbagai kalangan seperti aktivis, partai politik, pejabat pemerintah, dan akademisi.

Pokok dan Akar Masalah

Masalah-masalah dasar yang ingin dibahas di dalam buku ini mencakup: "Bagaimana kontestasi makna reformasi dalam dramatisme politik di Indonesia pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998 dan bagaimana aktor-aktor politik mengambil peran dalam tindakan komunikasi politik mereka dalam gerakan reformasi tersebut".

Dua pertanyaan itu dijadikan dasar untuk mengungkapkan berbagai situasi yang menjustifikasi reformasi sebagai pertimbangan moral mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya. Posisi ini penting untuk menggambarkan tingkat kejernihan di dalam masing-masing kelompok dan kepentingan ketika memandang dirinya sebagai seorang reformis. Sekaligus memperlihatkan lingkup yang luas dari apa yang ditawarkan di dalam gerakan reformasi dan apa yang dipertahankan di dalam memelihara kesinambungan kekuasaan.

Orientasi Analisis

Sasaran tulisan ini bermaksud menganalisis situasi dan kondisi persaingan yang terjadi terhadap makna reformasi, keterlibatan berbagai aktor politik dalam berkomunikasi terhadap gagasan tersebut, yang memperlihatkan bagaimana mereka mengedepankan pemikiran, meminggirkan pemikiran, atau pun mempertahankan dan menyerang pemikiran yang lain.

Analisis ini mengasumsikan bahwa aktor-aktor yang terlibat di dalam gerakan reformasi memilih di antara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang dipakai untuk menjelaskan kejadian-kejadian. Mereka menggunakan naratif komunikasi sebagai cara menyusun dan menyajikan pandangan terhadap realitas melalui deskripsi sebuah situasi yang mencakup karakter, tindakan, dan konteks.

Ia adalah bingkai terhadap pengalaman yang berfungsi sebagai argumen terhadap pandangan dan digunakan untuk memahami peristiwa melalui cara-cara tertentu. Peristiwa dan tindakan dari aktor-aktor reformasi mencerminkan sesuatu yang logis atau menjelaskan apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang membuat terjadi serta bagaimana seharusnya merespons peristiwa-peristiwa yang mengelilinginya.

Orientasi analisis bertumpu pada cerita-cerita di seputar gerakan reformasi yang melihat siapa mengatakan apa, dan bagaimana. Jelas, di dalam analisis ini menjelaskan unsur-unsur tindakan, aktor-aktor, tujuan, konteks atau setting sosial dan instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingannya. Di dalamnya terjadi pertarungan terhadap bahasa-bahasa politik, pasti terdapat zona makna yang berbeda dari individu satu dengan individu yang lain. Tema narasi komunikasi dalam reformasi pasti terbingkai oleh tema narasi komunikasi yang lain, yang dapat dijadikan acuan untuk menilai tindakan dan karakter dari sebuah tindakan. ❖



BAB 2

SEJARAH PERUBAHAN DI INDONESIA

Kontinuitas Sejarah

Bangsa Indonesia dalam memandang diri sebagai entitas negara bangsa (*nation-state*), masih belum tuntas hingga sekarang terutama dalam usahanya mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam usaha itu, tantangan yang dihadapi, dan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul, mengakibatkan selalu diperlukan penyesuaian. Ini diperlukan agar sistem politik yang ada tetap terjaga dan berkesinambungan dalam mengelola mekanisme sistem *input* dan *output* terhadap dinamika perubahan lingkungan yang dihadapi (Isaak, 1981:279-280).

Perubahan dan penyesuaian menjadi sangat wajar dilakukan. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara bangsa, perubahan-perubahan tersebut hampir tidak dapat dihindarkan. Ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaannya, negara bahkan tidak mempunyai pemerintahan atau pun sebuah ketentaraan (Said, 1993:22).

Dalam masa transisi itu, negara masih dalam rangka mencari bentuk (Gaffar, 1999:54). Bangsa-bangsa baru tengah berada dalam perubahan sosial yang membuat pembangunan bangsa dan pembangunan material menjadi masalah-masalah yang terkait (Andrain, 1992:355).

Satu sisi, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, namun di dalam kemerdekaan itu sesungguhnya memerlukan persyaratan dan kebutuhan lain seperti: siapa presiden dan wakilnya; konstitusi yang mau diberlakukan; lembaga militer yang akan dibentuk; sistem perekonomian yang mau dianut dan lain-lain yang terkait dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara.

Dalam situasi itu, kerap kali muncul perbedaan pandangan terkait idealisme, yakni seperti apa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini akan dijalankan. Di dalam sejarahnya, NKRI pernah dalam kondisi darurat (Pemerintah Darurat Republik Indonesia); diguncang pemberontakan; terpuruk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat); dan mempraktikkan demokrasi yang sangat liberal (Gonggong, 2006:xi).

NKRI juga pernah terjebak pelaksanaan demokrasi terpimpin yang bertumpu pada ajaran dan kharisma Presiden Soekarno yang menempatkannya sebagai Panglima Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden seumur hidup melalui sebuah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Serangkaian kejadian, memerlukan tindakan transformatif sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Kenyataan, perbedaan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman dalam menyikapi agresi militer Belanda kedua. Konstituante dibubarkan. Pertentangan Mayor Jenderal Soeharto dengan Presiden Soekarno soal pembubaran

PKI (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989) serta konflik militer dan pemerintah dari situasi ke situasi (Said, 2006).

Belum termasuk gerakan-gerakan revolusioner yang gagal seperti pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan DI/TII yang baru mereda tahun 1962, Republik Maluku Selatan (RMS), dan G30S/PKI.

Sejarah mencatat penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan yang eksploitatif dan monopoli. Praktik kekuasaan yang mengarah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di mana pemerintah melakukan intervensi terhadap sistem perekonomian, justru terjebak pada perebutan dan pencarian hak-hak khusus di sekitar Soeharto.

Karena itu, tidak mustahil muncul perubahan-perubahan paradigmatik dalam mengelola pemerintahan seperti peralihan dari sistem kolonial ke dalam sistem republik. Dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila dan dari demokrasi Pancasila kembali ke demokrasi liberal seperti yang kita rasakan sekarang.

Meskipun begitu, pergolakan politik pada masa-masa awal, masih berkisar pada persoalan interaksi antara partai-partai politik, militer, parlemen, dan kabinet. Sementara institusi politik lain belum berfungsi. Tingkat perekonomian Indonesia pada masa itu juga masih sederhana sehingga persoalan membentuk kebijakan dan implementasinya belum rumit seperti sekarang (Gaffar, 1999).

Secara hakiki apa yang menjadi tuntutan reformasi pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998, sebenarnya bukan persoalan baru. Gugatan terhadap Dwifungsi ABRI misalnya, merupakan gugatan yang mempersoalkan hubungan sipil dan militer terutama peran militer dalam kehidupan sosial politik.

Hubungan sipil dan militer, telah menjadi pemikiran serius. Dilema itu terletak pada apakah perannya terbatas pada pertahanan dan keamanan, atau peran tersebut menjangkau kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara ada pandangan bahwa supremasi sipil atas militer sebagai esensi dari nilai demokrasi.

Jenderal A.H. Nasution pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat, Vietnam, Aljazair, dan Yugoslavia telah begitu beruntung bahwa selama perang kemerdekaan, kepemimpinan politik dan militer mereka berada pada tangan yang sama. Mereka tidak mempunyai dualisme abadi seperti yang kita lakukan selama perjuangan kemerdekaan (Nasution, 1983: 32; Said, 2006:35). Keterlibatan tentara dalam politik sejak awal dapat dipandang sesuatu yang unik. Di Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dibentuk oleh pemerintah atau oleh partai politik. Namun mereka menciptakan ketentaraannya sendiri (*a self-created army*).

Dikarenakan pemerintah tidak memberi petunjuk yang layak, militer kemudian memilih panglima besarnya sendiri. Orang yang dipilih (Jenderal Besar Sudirman) pada akhirnya lebih memberikan komitmen terhadap pasukan dan tentaranya ketimbang memberikan komitmen terhadap pemerintah. Peran tentara untuk berbagai alasan akan dikontrol walaupun tidak pernah berhasil (Said, 1993: 3). Sikap keras militer terhadap pemerintah dapat diperlihatkan pada peristiwa 17 Oktober tahun 1952, di mana militer mengarahkan moncong meriamnya ke arah Istana (Aly, 2002).

Akar masalah ini memperlihatkan pertalian antara kehidupan militer dan politik. Konsep Dwifungsi ABRI sejatinya, tidak dapat dipisahkan dari pandangan tersebut yang dirumuskan sebagai jalan tengah antara peran pertahanan keamanan dan peran sosial politik tentara.

Nasution menjelaskan bahwa militer tidak hanya sebagai alat sipil (*civilian tool*) seperti negara-negara Barat atau pun sebagai sebuah rezim militer yang mendominasi kekuasaan negara. Ia merupakan satu dari kekuatan yang ada, sebagai kekuatan rakyat yang bekerja sama dengan kekuatan rakyat lainnya (Said, 2006:13-14). Dalam implementasinya, militer di masa Orde Baru lebih dari sekadar kekuatan pertahanan keamanan, namun ia mempunyai kedudukan yang strategis yakni sebagai stabilitasator dan dinamisator dalam pembangunan (Honna, 2002:5).

Praktik yang terlalu dominan dan bersifat militeristik inilah yang kemudian digugat. Peran sosial dan politik militer yang sangat jauh itu telah menimbulkan dampak negatif bagi sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Pandangan paradigmatik terhadap pemerintahan pun, menunjukkan perubahan dan penyesuaian. Dalam sistem pemerintahan yang paling demokratis pun, akan menghadapi masalah sama: Siapa yang akan menjalankan pemerintahan dan kepentingan siapa yang seharusnya pemerintah berikan ketika masyarakat memiliki preferensi yang berbeda-beda (Lijphart, 1999).

Belum lagi, apakah kekuasaan eksekutif dalam kabinet mencerminkan satu partai politik atau merupakan kekuasaan koalisi berbagai partai politik. Belum pula dihadapkan corak hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif atau sebaliknya?

Dilema tersebut juga terjadi terhadap sistem ekonomi. Dalam pandangan Presiden Soekarno, demokrasi politik saja, belum cukup untuk dapat menyelamatkan rakyat. Selain ada demokrasi politik harus ada demokrasi ekonomi (Pamungkas, 1999: 9).

Hatta memberi istilah demokrasi ekonomi bagi konsep politik perekonomian Indonesia. Usaha pencapaian demokrasi ekonomi harus merupakan kewajiban sosial dan moral seluruh bangsa. Hakikat kedaulatan ekonomi adalah sistem ekonomi di mana pemerintah mempunyai peran memimpin perekonomian menuju kedaulatan ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang menjurus pada *free fight liberalism* di mana kepentingan rakyat banyak dirugikan atau ditindas oleh mereka yang duduk dalam tampuk kekuasaan ekonomi.

Dengan prinsip itu, pesan konstitusi itu sangat jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kemakmuran rakyat yang harus dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di dalam prinsip ekonomi yang bersifat universal, perlu ditata dengan politik perekonomian yang mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di sini, intervensi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Intervensi ini tidak diarahkan untuk memunculkan praktik perekonomian semu, menjamurnya korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli, dan proteksi yang salah, yang lambat laun mereduksi fungsi dan tugas negara dan pemerintah sebagaimana mestinya. Inilah pesan konstitusional agar pergeseran-pergeseran yang terjadi, tidak menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tuntutan reformasi juga bersinggungan dengan soal tersebut. Apalagi pikiran-pikiran dalam sistem perekonomian liberal mendapatkan momentum bahwa keterlibatan pemerintah yang terlalu dalam terhadap ekonomi suatu negara, menjadikan sistem perekonomian menjadi rapuh.

Para penganut pasar bebas sering berpendapat bahwa perdagangan ekonomi mesti melalui mekanisme pasar yang ditentukan sepenuhnya oleh *interplay* antara permintaan dan persediaan (Ranney, 1987:185). Praktik ini kemudian dikait-kaitkan dengan *good governance* yang bermaksud meminimalisir peran pemerintah terhadap sistem perekonomian.

Sekalipun ekonomi pasar tampak memberi penampilan positif bagi demokratisasi politik, ada pandangan bahwa prinsip ekonomi liberal justru mengakibatkan kedaulatan ekonomi negara mengalami erosi. Hubungan antara IMF dan pemerintah di era tahun 1997 sampai 1998, telah memunculkan perdebatan antara kedaulatan negara dan ekonomi pada satu sisi, sedangkan di sisi lain perdebatan antara hukum mekanisme pasar dan demokratisasi politik.

Secara empiris, dalam sistem ekonomi apa pun selalu ada kesenjangan. Sistem ekonomi pasar bebas pun tak luput dari hal ini, memiliki celah dan kesenjangan yang dapat menjadikan sistem bekerja secara tidak jujur. Para ekonom memahami bahwa tidak ada mekanisme pasar yang bekerja secara sempurna dengan prinsip-prinsip pasar bebas. Meskipun dunia mengenal pasar bebas, ini tidak berarti menghasilkan pasar yang efisien.

Ada empat hal yang mesti dipertimbangkan. Pertama, mekanisme pasar tidak bekerja sempurna yang semata-mata ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Kedua, meskipun mekanisme pasar dapat bekerja secara sempurna, belum tentu memberi hasil yang paling baik. Ketiga, pasar bebas tidak selalu memberikan laju pertumbuhan yang tinggi. Keempat, pasar bebas tidak menutup konflik antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (Pamungkas, 1996:100)

Josep E. Stiglitz (2002) meyakini bahwa mekanisme pasar tidak pernah bergerak sempurna. Di dalam sistem ekonomi pasar bebas itu, terbuka kemungkinan terjadinya asimetris informasi sehingga bagi mereka yang mendapatkan informasi lebih awal cenderung menguasai dan menentukan pasar.

Dalam pandangan Stiglitz, arsitektur keuangan global belum memiliki instrumen yang mampu bekerja secara efektif untuk menanggulangi kerentanan sistem keuangan dunia. Krisis yang melanda kawasan Asia dan Amerika Latin, lebih disebabkan oleh faktor ini. Peningkatan transaksi spekulatif dengan sendirinya merupakan bahaya laten terhadap stabilitas keuangan semua negara di dunia (Baswir, 2006:7).

Sampai pada permasalahan problematik ini, sebenarnya hendak dikatakan bahwa masalah-masalah tersebut di dalam konstelasi kehidupan politik dan ketatanegaraan, merupakan masalah yang bersifat perenial. Bahkan akar kesejarahan, landasan, prinsipal, aturan dan tipe-tipe ideal soal bagaimana negara dijalankan, telah menjadi diskursus dan kajian-kajian jauh sebelumnya, yang jejak-jejaknya dapat ditelusuri dari pemikiran-pemikiran pendahulu pendiri negara ini seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, H. Agus Salim, dan lainnya.

Karena itu, transformasi sosial terpenting awal bagi bangsa Indonesia adalah keberanian untuk memproklamasikan diri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai fakta politis dan sosiologis jelas merupakan titik perubahan dan reformasi yang mendefinisikan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka.

Sementara sebelumnya, Indonesia terpecah-pecah dalam gerakan kedaerahan dalam menghadapi imperialisme

dan kolonialisme. Noktah perubahan dan transformasi sosial itu dapat dilihat dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, Budi Utomo tahun 1908, Kemerdekaan 17 Agustus 1945, peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan seterusnya.

Dari tahap awal sampai sekarang, entitas negara bangsa terus mengalami dialektika pasang surut. Bahwa satu kejadian dengan kejadian yang lain, bukan saja merupakan mata rantai yang menunjukkan upaya terus-menerus, namun juga menunjukkan proses perubahan, adaptasi, dan transformasi terhadap kondisi-kondisi aktual itu sendiri, yang mencerminkan adanya peluang, kesempatan, harapan, dan cita-cita.

Untuk itulah analisis ini ditujukan untuk dua tujuan. Pertama, mempertalikan rangkaian sejarah perubahan dengan tuntutan-tuntutan dalam reformasi di Indonesia pada periode tahun 1997 sampai 1998. Dengan cara ini, setidaknya akan memberi implikasi yang lebih bernilai yang dipakai untuk memantapkan kapasitas negara bangsa dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Dalam pandangan penulis, mempertalikan aspek historis dalam fase-fase perubahan di Indonesia, betapapun dilakukan dengan sangat terbatas, akan memberi nilai yang lebih berharga, bila hanya menyajikannya sebatas situasi reformasi sebagai gerakan perubahan dan bentuk-bentuk komunikasi politik pada periode tahun 1997 sampai 1998 saja.

Setiap fase sejarah selalu membutuhkan penyesuaian dan perubahan, khususnya kebutuhan pada tatanan ideal yang diselaraskan dengan perubahan yang terjadi bagi kepentingan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Dalam perubahan dan penyesuaian itu, setidaknya ada dua segi yang krusial. Pertama segi manajerial yang bersifat teknis, yakni bagaimana melakukan perencanaan dan pelak-

sanaannya. Segi kedua, segi perseptual, yakni sisi komunikasi yang dibutuhkan untuk mengontrol situasi.

Bersamaan dengan itu, akan tumbuh kapasitas yang kuat dalam membedakan tuntutan yang bersifat mendasar dan substansial serta tuntutan yang sifatnya teknis tanpa harus merusak landasan yang memang telah diletakkan sebelumnya apalagi yang artifisial. Ini penting, agar tuntutan dan/atau perubahan-perubahan yang dilakukan, tidak mengalami berbagai kontradiksi yang membingungkan.

Di dalam perubahan selalu terdapat dimensi komunikasi yang memperlihatkan setiap aktor berperan memberi pandangan dan argumen terhadap kejadian-kejadian yang dihadapi. Dalam situasi itu, komunikasi menjadi penting guna memastikan apa yang dipikirkan dan dikehendaki sejalan dengan kemampuan untuk mengontrol kondisi tertentu. Hal yang bernilai di sini adalah tingkat keberhasilan untuk melakukan perubahan ditentukan oleh kapasitas dan kelengkapan dalam merumuskan dan mengartikulasikan perubahan yang tecermin dalam tindakan komunikasi para pelakunya.

Sejarah sebuah bangsa adalah sejarah komunikasi di mana aktor-aktor yang signifikan memperlihatkan pemikiran dan tindakannya yang tecermin di dalam bentuk-bentuk komunikasi yang pernah dinyatakan. Setiap fase sejarah mempunyai narasi komunikasi sendiri-sendiri yang menarik untuk dikaji.

Dari Orde Lama ke Orde Baru: Segi Komunikasi

Euforia perubahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru menunjukkan bahwa Orde Baru merupakan era baru dan harapan baru. Ini kondisi alamiah dan sangat wajar, ketika perjuangan untuk melakukan perubahan, mencapai puncaknya yang dirayakan sebagai kemenangan.

Gejala semacam ini dapat dicermati melalui momentum yang dinilai sebagai *turning point* dalam perjalanan sejarah bangsa seperti lahirnya Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lahirnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi.

Di samping bentuk komunikasi yang berciri pujian dan harapan, hampir bersamaan muncul bentuk komunikasi cacian dan makian, di setiap kejadian yang berkarakteristik gerakan sosial dan revolusi. Misalnya, di dalam kesatuan aksi yang muncul pada saat itu, ribuan orang membawa spanduk-spanduk. Mereka meneriakkan tuntutan yang juga tidak lepas dari makian: "Bubarkan PKI! Gantung Aidit! PKI anti Tuhan! PKI biadab! Gantung PKI dan begundal-begundalnya! (Dwipayana dan Ramadhan, 1996:139).

Sangat jelas bahwa situasi krisis memberikan kekuatan bagi bentuk komunikasi persuasif dan retorik, baik yang diposisikan untuk mempertahankan kedudukan ataupun untuk menjatuhkan kekuasaan.

Meluapnya harapan, setidaknya pada tahun awal kelahiran Orde Baru, terlihat dari pernyataan yang berkembang. Ulama seperti Buya Hamka memberi pelabelan terhadap perubahan tersebut sebagai "angin baru telah bertiup", "tuntutan dan penentangan terhadap kezaliman telah bangkit", dan "zaman telah berubah".

Bung Tomo mengatakan bahwa Angkatan '66 berjuang dengan keberanian, kecerdasan, kesadaran politik, dan motif yang murni. Dengan semua itu, Angkatan '66 memberi arah baru pada sejarah nasional Indonesia (Aly, 2002).

Harapan dan kegembiraan juga terlihat pada apa yang disampaikan Petrus Kanisius Ojong. Ia menyatakan bahwa sejarah nasional Indonesia mengalami suatu *turning point*, suatu penyimpangan dari pola lama ke era baru. Menurutnya,

turning point itu adalah saat sadarnya rakyat Indonesia akan hak demokrasi dan saat dewasanya bangsa Indonesia (Aly, 2002:xvi).

Transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan semakin mudahnya pemerintahan yang bertumpu pada kharisma Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin. Bagi Mohammad Hatta, prioritas utama setelah bangsa Indonesia merdeka adalah melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sebaliknya, bagi Soekarno, revolusi dianggap baru mulai. Dalam keyakinan itu, ia berusaha mendapatkan pengaruh politik yang lebih luas untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama yang membawa bentuk pelaksanaan pemerintah yang kuat.

Melalui pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengembangkan konsep dan ajaran seperti USDEK-U (Undang-Undang Dasar 1945), S (Sosialisme Indonesia), D (Demokrasi Terpimpin), E (Ekonomi Terpimpin), dan K (Kepribadian Indonesia); dan Nas-A-Kom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai bagian esensial dari kebijakan, kegiatan komunikasi politik dan propagandanya (Gonggong, 2002).

Untuk menunjukkan kekompakan partai politik dan perbedaan ideologi, ia mensimbolkan dengan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Sedangkan untuk menyebarkan ide tersebut, dibentuklah Badan Pembina Jiwa Revolusi sebagai badan indoktriner terhadap ajaran yang diprogram dalam ceramah-ceramah bagi kader yang berpotensi menjadi pemimpin (Gonggong, 2002).

Langkah ini sebagai teknik melanggengkan kekuasaan: "*ideological states apparatus*" yakni menggunakan

instrumen nonrepresif-tindakan komunikasi bagi pesan-pesan politik dan ideologi untuk mensahkan penerapan kekuasaan. Cara ini mereproduksi entitas-entitas komunikasi dengan lebih besar dan halus di dalam kegiatan-kegiatan komunikasi yang memperlihatkan seolah-olah konsep dan ajaran ideologinya sebagai sesuatu yang normal (Littlejohn, 2002:211).

Dari waktu ke waktu, dalam sistem demokrasi terpimpin, situasinya menjadi semakin revolusioner. Ketika negara federasi baru Malaysia terbentuk, dipandang sebagai proyek neokolonialisme. Lahirlah isu Kogam (Komando Ganyang Malaysia) dan "ganyang" Malaysia yang memiliki arti konfrontatif.

Sepanjang tahun 1965 sampai 1967, terlihat betapa kontroversial dan rumitnya perbedaan pendapat dan kepentingan baik orang per orang atau pun dengan elemen-elemen kekuatan sosial dan politik. Pertentangan itu terjadi di mana-mana.

Dengan posisinya yang kuat, Presiden Soekarno mempunyai keyakinan dapat menyelesaikan usaha-usaha besar bangsa. Dengan langkah tersebut, ia telah membuka pintu bagi dirinya untuk mempertahankan kekuasaan dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang otoriter (Gonggong, 2002). Gaffar (1999) menyebut bahwa sejarah otoritarianisme di Indonesia bermula dari sistem Demokrasi Terpimpin yang menempatkan Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata serta presiden seumur hidup (Dienaputra, 2000:161).

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin sebagai arena politik yang tercipta, hubungan manusia sebagai manusia komunikasi (*symbol using animal*) dengan manusia politik (*zoon politicon*) dan manusia rasional (*rational animal*),

diperlihatkan secara nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan yang sangat sengit.

Apalagi retorika dan persuasi provokatif telah membungkus kegiatan-kegiatan agitatif yang menelan banyak korban termasuk sejumlah jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Di tengah situasi revolusioner yang telah diciptakan PKI dan pengaruh pidato-pidato Presiden Soekarno, situasi terasa mencekam, penuh ketakutan dan kekuatiran. Dalam pertemuan-pertemuan massa yang dilakukan PKI, slogan "Ganyang Kabir (Kapitalis Birokrat)" setan kota, antek nekolim, antek Inggris Amerika, dan kontra revolusi sering diteriakkan.

Pertentangan antara PKI dan TNI semakin tajam khususnya dengan Angkatan Darat yang satu sama lain berusaha merapat ke Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Sementara Soekarno menuntut loyalitas dengan menjustifikasi agar semangat revolusi berjalan sesuai dengan kaidah yang menjadi jalan pikirannya.

PKI sendiri telah jauh berhasil mendapat posisi strategis karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno. Tanda keunggulan ini sangat jelas pada pertengahan tahun 1965. Dalam gerakannya, PKI begitu ofensif dan berhasil menciptakan situasi psikologis terhadap iklim dan wacana komunikasi politik terhadap kelompok politik lain.

Siapa yang berseberangan dapat merasa kuatir dan takut apabila mereka terstigma dengan sebutan komunisto fobia, kontrarevolusioner, anti-Nasakom, antek Nekolim dan aneka pelabelan tertentu seperti kapitalis birokrat, setan kota, setan desa, dan sebagainya.

Karena tertarik pada simbolisme revolusi dan menggemari tamsil dan retorika Marxis, Soekarno dan PKI tampaknya berbicara dalam bahasa yang sama (Aly, 2002:59). Dalam kapasitasnya sebagai orator, Soekarno

telah menjadikan gagasan revolusi, Usdek, Manipol, dan Nasakomnya sebagai sumber inspirasi dalam komunikasi politiknya.

Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964 Presiden Soekarno memperingatkan. Menurutnya: "Siapa anti-Nasakom, ia tidak progresif. Siapa anti-Nasakom, sebenarnya memincangkan revolusi, dan mencampakkan revolusi. Siapa anti-Nasakom, tidak penuh revolusioner, bahkan historis kontrarevolusioner (Aly, 2002:61). *Harian Rakyat* (4 September 1965) menyerang para perwira tentara dalam pola maling teriak maling yang menuduh seakan-akan melakukan kup.

Dipa Nusantara Aidit pada tanggal 9 September 1965 menegaskan, "Kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kaum revolusioner adalah bagaikan bidan dari bayi masyarakat baru itu. Sang bayi itu pasti lahir dan kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar."

Pada kesempatan lain di depan Sidang Nasional SOBSI, Aidit mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana dapat memotong kanker dalam masyarakat, yakni setan kota. Jika revolusi mau tumbuh subur, kaum dinasti ekonomi, kapbir, dan setan kota dari segenap aparatur politik dan ekonomi harus disingkirkan.

Akumulasi pernyataan keras dari tokoh-tokoh PKI terutama Aidit serta apa yang menjadi hitam putih di dalam pernyataan dan pidatonya, ibarat noktah opini yang sangat kuat bahwa PKI adalah otak gerakan makar tanggal 30 September 1965.

Di dalam editorial *Harian Rakyat* itu dikatakan: "Dengan menggaruk kekayaan negara, setan-setan kota ini mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman

mati di muka umum. Soalnya tinggal pelaksanaan saja. Tuntutan adil rakyat pasti berhasil.” (Aly, 2002:137).

Apa yang dikatakan Presiden Soekarno, dan tokoh-tokoh PKI itu dapat berfungsi memisahkan (*divide*) dan menyatukan (*unite*) kelompok-kelompok masyarakat, siapa yang prorevolusioner dan siapa yang kontrarevolusioner. Kondisi masyarakat menjadi terbelah dan menjadikan kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak sepaham dan sejalan dengan ajaran tersebut, memilih diam.

Situasi politik mematangkan pelabelan dan pelabelan ini menjadi efektif karena banyak pihak yang tidak berani menunjukkan penentangannya terhadap ajaran dan manifesto politik serta keberadaan PKI karena khawatir dicap sebagai komunisme fobia, antek nekolim atau cap-cap lainnya yang agitatif.

Ada kebisuan sebagai tanda takut terhadap risiko yang mungkin dialami ketika seseorang melakukan perlawanan dan kritik terhadap wacana dominan. Ini tidak hanya menjadi monopoli kelompok politik Islam, tetapi juga dialami oleh Partai Katholik.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, orang-orang seperti Sutan Sjahrir, Mochtar Lubis, Mohammad Natsir, Hamka, dan sejumlah tokoh lain dipenjarakan tanpa proses hukum yang lazim (Aly, 2002:xiv). Demikian pula Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan pada bulan Agustus 1966.

Jelas, terdapat kesimpangsiuran informasi dari berbagai situasi yang sebenarnya mencerminkan pertarungan komunikasi. Misalnya, kesimpangsiuran ketidakberadaan Presiden Soekarno pascaperistiwa 30 September. Isu tentang Dewan Jenderal dan kudeta yang akan dilakukan Angkatan Darat. Isu tentang Dewan Revolusi Indonesia.

Di dalam isu pokok terdapat isu-isu lain yang membingkai seperti isu AURI akan melakukan pengeboman ke markas Kostrad; keterlibatan AURI dalam penculikan; laskar Pemuda Rakyat yang latihan di sekitar Pangkalan Halim; kepemilikan senjata api Pemuda Rakyat; kontroversi pandangan Presiden Soekarno bahwa kejadian tersebut sebagai hal yang biasa dalam sebuah revolusi.

Banyak peneliti yang mengajukan argumen tentang siapa yang menjadi dalang peristiwa tersebut (Beise, 2004; Dake, 2006; Soebadrio, 2001; Sembiring dan Sutedja, 2004). Bahkan ada yang berpendapat bahwa teori dalang dalam rangkaian peristiwa 30 September itu harus ditinggalkan, karena peristiwa ini sepenuhnya terisi konspirasi melawan konspirasi dalam rangka pertarungan kekuasaan untuk kekuasaan (Aly, 2002).

Untuk itu, tujuan menempatkan Peristiwa 30 September 1965 dalam paparan ini, sebagai alasan paling dramatis yang memicu terjadinya gerakan perubahan menentang Presiden Soekarno. Dalam perspektif komunikasi, setiap kejadian selalu dibingkai oleh kejadian lain yang mempunyai narasi dan isi komunikasi yang berbeda serta memiliki tujuan komunikasi yang berbeda pula.

Terhadap Gerakan 30 September 1965 itu, pertama, ada asumsi bahwa beragamnya insinuasasi dan informasi yang saling silang, kekacauan antara kepentingan personal dan politik, menjadikan isu Dewan Jenderal dibiarkan berkembang, antara ada dan tiada.

Kedua, ada kerumitan terhadap isu Dewan Jenderal yang berdekatan dengan sikap Angkatan Darat yang menolak usulan Soekarno dan PKI tentang angkatan kelima. Isu ini, satu sama lain dalam batas-batas tertentu, sulit untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Pertama ada yang mengetahui isu itu, tetapi diam. Seseorang

sebenarnya telah mempunyai informasi yang cukup, tetapi karena untuk kepentingan tertentu ia memiliki sikap hati-hati. Ia dapat berada di dalam kepentingan rencana itu atau di luar rencana.

Seseorang dapat mempunyai pengetahuan bahwa isu merupakan bukti ke dalam dua bentuk, yakni Dewan Jenderal itu ada atau sebaliknya bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada. Isu dapat digunakan untuk meyakinkan perlunya tindakan berdasarkan pada spekulasi tertentu baik sebagai kawan ataupun sebagai lawan.

Kedua, ada yang mengetahui isu, tetapi ia tidak begitu yakin dan percaya. Dari posisi ini, seseorang dapat bersikap apatis atau mencoba mencari jawabannya. Karenanya, ia akan mengabarkan kepada orang-orang yang dianggap perlu tahu dan mengetahuinya. Ia bahkan mengabarkan hal ini kepada sembarang orang.

Dari asumsi-asumsi itu, seseorang sangat longgar untuk bertemu dan berinteraksi satu dengan yang lain, memancing dan menjajagi kemungkinan guna menentukan posisi masing-masing. Pola interaksi yang baur dapat berangkat dari asumsi dan kecurigaan tertentu.

Hendak ditegaskan bahwa pertemuan dan pembicaraan orang per orang, tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar bahwa orang itu terlibat atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa 30 September 1965. Pertemuan-pertemuan semacam ini terlihat sangat terbuka, tanpa mengetahui bagaimana memperkirakan tindakan seseorang terhadap isu tersebut.

Banyak tokoh dalam kekuasaan negara dan politik, merasakan suasana tidak enak itu (Aly, 2002:113). Ini disebabkan bukan karena tidak tersedianya informasi yang cukup. Namun kualitas informasi dan komunikasi itu tidak dapat dirujuk pada sumber-sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya.

Mereka mengetahui banyak hal yang berbahaya berdasarkan sejumlah informasi yang sebenarnya mereka telah terima jauh sebelumnya. Letnan Jenderal A. Yani mengeluhkan hal ini dalam sebuah *briefing* panjang yang ditujukan pada ibu-ibu anggota Persit (Persatuan Istri Tentara). Ia memberi gambaran terhadap suhu politik yang sedang memanas, dan tuduhan kelompok politik kiri terhadap angkatan darat. Pada sisi lain, berkembang pula desas-desus tentang adanya rencana penculikan atas diri sejumlah perwira tinggi.

Sekalipun banyak jenderal yang mengetahui informasi tentang penculikan, pemberian pelajaran, isu kudeta, dan lain-lain hal, karena ketidaklengkapan dan tidak menyeluruh, menyebabkan muncul beberapa sikap. Pola hubungan komunikasi, siapa menemui siapa dan mengatakan apa, yang baur dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan sang Panglima Besar Revolusi menjadikan sulit mengidentifikasi, apa yang sesungguhnya akan terjadi.

Sementara di dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan Panglima Besar Revolusi terdapat lingkaran-lingkaran kekuasaan lain, seperti lingkaran-lingkaran kekuasaan Letnan Jenderal A. Yani, lingkaran-lingkaran kekuasaan Jenderal A.H. Nasution di tubuh Angkatan Darat, lingkaran-lingkaran Laksamana Omar Dhani di tubuh Angkatan Udara, dan lingkaran-lingkaran kekuasaan Brigadir Jenderal Supardjo, lingkaran-lingkaran kekuasaan PKI yang direpresentasikan orang seperti D.N. Aidit ataupun Sudisman.

Darah para jenderal Angkatan Darat itu akhirnya mengalir pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Melalui penuturan anak-anak Pahlawan Revolusi yang terdokumentasikan dalam sebuah buku *Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam* (2002), Letnan Jenderal A. Yani ditembak dalam posisi membelakangi pasukan berseragam Cakra-

birawa. Sementara Jenderal Soeprapto dijemput paksa dalam keadaan masih berpakaian piyama. Mayor Jenderal M.T. Haryono ditembak juga dengan disaksikan oleh anak-anak dan istrinya.

Ada jejak-jejak komunikasi yang ditinggal dan cukup menarik untuk dicermati. Pertama, pasukan yang berseragam Cakrabirawa itu menyampaikan pesan yang sama, yakni para jenderal itu diminta menghadap Presiden Soekarno karena urusan rapat yang sangat penting.

Pesan itu merupakan perintah. Namun, dalam konteks kewajaran komunikasi, ini menimbulkan kecurigaan. Yani mempertanyakan kenapa waktunya dini hari sebagai sesuatu yang di luar kelaziman. Yani menjelaskan akan mempersiapkan diri dan mandi terlebih dahulu. Namun, mereka menolaknya dan menjadikan sang jenderal marah. Di situlah ia ditembak dari belakang.

Pertanyaannya adalah apakah memang benar, perintah itu datang dari Soekarno. Setidak-tidaknya atas sepengetahuannya. Atau apakah hal itu merupakan fitnah. Sebab, proses penculikan dan pembunuhan tersebut meninggalkan banyak saksi di antara anggota keluarga mereka. Kejadian itu meninggalkan bukti tidak hanya darah, kematian dan kejadian, tetapi juga sebuah nama: membawa perintah Presiden Soekarno untuk menghadap.

Di hari-hari awal setelah peristiwa 30 September, terdapat pertarungan wacana, opini dan tarik ulur terhadap psikologi massa yang sebenarnya merupakan klimaks dari isu tentang Dewan Jenderal yang telah beredar. Pada pukul 07.20 – 1 Oktober 1965 melalui siaran RRI, sebuah komunike yang menyebutkan diri sebagai Bagian Penerangan Gerakan 30 September muncul.

Di dalam siaran tersebut dijelaskan beberapa hal. Pertama, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan

Darat yang dibantu oleh pasukan angkatan-angkatan lainnya. Di dalam gerakan disebut sebagai Gerakan 30 September ini, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno.

Kedua, gerakan ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota dalam Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta dan kontra revolusioner yang didukung oleh CIA. Mereka telah ditangkap dan alat komunikasi vital telah dikuasai. Ketiga, gerakan 30 September memastikan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989; Aly:2002:188)

Komunike ini pada akhirnya dilawan dengan siaran RRI pula setelah stasiun radio tersebut dapat direbut oleh RPKAD. Secara garis besar isi pidato tersebut berisi: a) Gerakan 30 September merupakan gerakan kontrarevolusioner yang telah menculik perwira Angkatan Darat; b) Gerakan 30 September telah memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan Kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran; c) mengumumkan bahwa Panglima Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Paduka Yang Mulia Presiden dan Menko Hankam/Kasab (Jenderal A.H. Nasution) dalam keadaan aman dan sehat; d) menyebut Gerakan 30 September telah melakukan kudeta dengan membentuk Dewan Revolusi Indonesia dan melempar Kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner; e) menyatakan Gerakan 30 September merupakan gerakan kontrarevolusioner yang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya; f) menyatakan situasi telah dapat dikuasai dan Angkatan Darat dalam keadaan kompak bersatu dan ; g) mengajak masyarakat agar tetap tenang dan waspada (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989).

Pesan komunike Gerakan 30 September dan siaran RRI yang berisi pidato Mayor Jenderal Soeharto, sebenarnya memiliki beberapa struktur penyajian yang sama. Bila Gerakan 30 September menuduh Dewan Jenderal melakukan kudeta, maka dalam pidato Pangkostrad menyatakan bahwa Dewan Revolusi Indonesia-lah yang melakukan kudeta.

Kesamaan struktur pesan yang lain terlihat pada klaim bahwa kondisi Panglima Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam keadaan aman dan sehat walafiat, sama-sama menyatakan kontrarevolusioner dan sama-sama memberikan tuduhan telah melakukan kudeta. Isu yang dipertentangkan adalah isu Dewan Jenderal versus Dewan Revolusi Indonesia.

Gerakan 30 September ini dihadapkan pada kenyataan, bahwa apa yang mereka sebut penangkapan, justru menjadi pembunuhan. Akibatnya, secara tergesa-gesa D.N. Aidit minta diterbangkan ke Yogyakarta, Letnan Kolonel Untung dan Brigadir Jenderal Soepardjo melarikan diri, dan Laksmana Omar Dhani berlindung di bawah perlindungan Presiden Soekarno (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989).

Faktor-faktor ini pada gilirannya memberi pergeseran-pergeseran peran yang membawa implikasi pada praktik-praktik komunikasi retorika dan persuasif. Dalam acara pelantikan Letnan Jenderal Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat yang dilakukan di Istana Negara, tanggal 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno merasa bahwa bentuk-bentuk rumor, gosip, desas-desus, dan agitasi yang berkembang, memposisikan dirinya akan terlempar dari kekuasaan.

Sejak kejadian 30 September, terutama kalangan yang dinilai sebagai nekolim, pers, radio, televisi, omong-omong kosong, gosip-gosip, dan lainnya, Soekarno menunjukkan satu dari gosip tersebut bahwa "the Republik of Indonesia is

collapsing”. Indonesia dalam waktu ”one or two days, there will be no Soekarno anymore.” (Setiyono dan Triyana, 2003:21).

Menurutnya, apa yang terjadi di dalam revolusi telah beberapa kali terjadi dan bukan hanya 30 September. Fakta 30 September itu sebagai hal yang biasa, yang normal dalam revolusi. Gerakan 30 September ini dinilai sebagai *een rimplece in de oceaan* (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:137).

Asvi Warman Adam (2003) menilai bahwa Soekarno tidak ingin membubarkan PKI karena dirinya ingin memegang teguh ajaran dan menjaga gengsi. Gengsi itu terwujud dengan dikenal dirinya sebagai pemimpin dunia yang telah menjual konsep Nasakom. Dalam kesempatan dialog dengan Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno mengatakan, ”Di mana Har, saya harus menyembunyikan muka saya.” (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989: 168).

Banyak hal dan situasi yang dapat dipertimbangkan memengaruhi pembentukan isu baru yang kemudian mengarah pada isu bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan tersebut. Soekarno menyadari isu-isu yang diarahkan kepadanya. Ia menyampaikan secara ironi bahwa dalang peristiwa 30 September bukanlah Letnan Kolonel Untung, bukan pula Bambang Supeno dan bukan pula Jenderal Supardjo, melainkan dalang utamanya adalah Bung Karno (Setiyono dan Triyana, 2003: 92).

Namun, penting untuk diketahui bahwa kekuatan komunikasi khususnya komunikasi persuasif dan retorika sangat berbeda dengan keyakinan dan prinsip diri secara ideologis. Karena alasan keyakinan ideologis itu, seseorang menjadi tidak mau bergeser terhadap isu dan pemikiran yang disampaikan ketika ia berkomunikasi.

Sepanjang yang dapat dicermati, Presiden Soekarno dalam berbagai kesempatan komunikasi, tidak melakukan pergeseran terhadap isu besarnya. Ia tidak keluar dari konsep revolusioner, sikap konfrontatif dengan Malaysia, kebesarannya sebagai Panglima Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, nekolim, Nasakom, Usdek, dan pendirian tidak akan membubarkan PKI.

Padahal tingkat keberhasilan komunikasi retorika ditentukan oleh berbagai faktor seperti kredibilitas komunikator, saluran-saluran komunikasi dan yang lebih penting adalah harapan masif yang dihadapi. Ini artinya, isu semestinya dikonstruksi sesuai dengan harapan masif tersebut. Umumnya harapan masif itu telah begitu berbaur dengan emosi dan psikologi massa dan karena itu, sering kali tidak mempedulikan hal yang bersifat mendasar dan substansial yang dipertimbangkan seseorang sebagai sesuatu yang penting.

Kekuatan komunikasi akan muncul bilamana dilakukan sejalan dengan situasi dan psikologi massa. Dalam posisi ini, keyakinan dan pandangan ideologis seseorang, dalam tindakan komunikasi yang diberikan, menjadi kurang relevan.

Apalagi keyakinan ideologis tersebut telah tercabik oleh sebuah tragedi. Argumen ini menegaskan bahwa harapan masif dalam komunikasi, sering tidak sejalan dengan pendirian ideologis seseorang bahkan sekelas Presiden Soekarno yang dikenal sebagai orator ulung pun.

Bila harapan massa tidak dipenuhi karena alasan memegang keyakinan ideologis, jelas tidak ada hal yang bisa menghubungkan antara apa yang diharapkan masyarakat dan diri komunikator sebagai *common ground*. Oleh karena itu, ada kefrustrasian-kefrustrasian tertentu,

yang dihadapi Presiden Soekarno dalam melihat kepatuhan masyarakat yang ia nilai telah mengalami pergeseran.

Perasaan-perasaan kemarahan sering ditampilkan di dalam pidatonya. Menurutnya, ada pernyataan-pernyataan untuk taat kepada Bung Karno, taat pada Presiden, dan taat pada Panglima Tertinggi serta Pemimpin Besar Revolusi, namun hal itu menurutnya hanya ucapan di mulut saja. Di dalam perbuatan ia merasa "dikentutin". (*Pidato Presiden Soekarno, 23 Oktober 1965*)

Kefrustrasian juga terlihat ketika Presiden Soekarno menghendaki agar pernyataan-pernyataan komandonya dicetak di dalam surat kabar yang diberikan dari seorang Komando Tertinggi. Dalam berbagai segi dikatakan bahwa apa yang ia komandokan di samping sering tidak dicetak di surat kabar, tetapi juga tidak sesuai dengan teks yang diberikan (Setiyono dan Triyana, 2003:50).

Kondisi ini semakin parah ketika Presiden Soekarno mendengar bahwa apa yang selama ini disampaikan, bukan merupakan pidato, tetapi hanya teriak-teriak dan marah-marah (Setiyono dan Triyana, 2003: 86).

Ini merupakan indikasi bahwa kontrol perseptual yang dilakukan pemerintah Orde Lama khususnya oleh Presiden Soekarno sudah mengalami pemudaran. Peristiwa 30 September telah menggeser pembentukan isu baru, yakni perlunya sebuah babakan dan era baru, haluan baru, dan karenanya tuntutan-tuntutan yang ada perlu segera dilakukan.

Sementara Presiden Soekarno sendiri selalu mengatakan bahwa yang diperlukan adalah ketenangan agar dirinya memahami dari prolog dan epilog kejadian, sehingga ia dapat mengambil keputusan yang benar terhadap peristiwa 30 September.

Sikap ini yang menjadikan Presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI, tidak mau mendemisionerkan Kabinet Dwikora, tidak mau mengganti posisi Soebandrio, dan mengganti Oei Tjoe Tat. Respons balik yang diberikan Presiden Soekarno justru ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang menggembar-gemborkan, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, dengan plakat-plakat ataupun coretan-coretan di tembok, maupun dengan pernyataan-pernyataan akan tuntutan-tuntutan tersebut (*Pidato Presiden Soekarno*, 6 November 1965).

Dari sisi komunikasi, bentuk komunikasi semacam ini akan bertarung dengan eskalasi masif dari harapan massa, apakah sebagai implikasi dari peristiwa 30 September itu sendiri, atau pun akibat dari situasi psikologis yang traumatik yang tercipta sebelumnya yang sering menuduh secara agitatif lawan politiknya dengan sebutan antek nekolim, kontrarevolusioner, kapitalis birokrat (kabir), setan kota, dan setan desa.

Perlu dicatat bekas traumatik masa lalu ini ditinggalkan dalam bentuk aksi-aksi sepihak. Misalnya, peristiwa Jengkol di Kediri (November 1961), sebanyak 3.000 anggota Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) melakukan penyerangan terhadap Perusahaan Perkebunan Negara. Dengan dalih menegakkan Undang-Undang Pokok Hasil Bagi (UUPH) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) aksi sepihak terjadi di Indramayu (Oktober 1964), Boyolali (November 1964) dan di Bandar Betsi (Mei 1965). Sekalipun ada juga dasar kebenarannya, tetapi aksi-aksi massa yang bersifat menghakimi telah mengubah perjuangan yang menuntut keadilan menjadi peristiwa yang berdimensi anarkis dengan implikasi politik yang serius (Aly, 2006: 40).

Sumber pergeseran bentuk komunikasi ini mendapatkan momentumnya ketika Mayor Jenderal Soeharto dengan menggunakan saluran komunikasi massa (RRI) menjelaskan secara terbuka bahwa pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira pertama itu adalah PKI (Setiyono dan Triyana, 2003; Dwipayana dan Ramadhan KH, 1996). Dengan pesan itu, di bawah komandonya, angkatan darat telah menyatakan diri sebagai kekuatan yang akan menghadapi dan menumpas gerakan tersebut.

Pergeseran isu-isu komunikasi memberi peluang terjadinya pergeseran kekuasaan termasuk bisik-bisik untuk melakukan tindakan pengambilalihan terhadap kekuasaan itu sendiri. Di dalam perjalanan pasca 30 September itu sendiri, dengan berbagai sikap Presiden Soekarno yang bersikukuh tidak akan membubarkan PKI, menghampiri pula bisik-bisik itu sampai ke telinga Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan perebutan kekuasaan dengan kekerasan (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:176).

Pergeseran kekuasaan ini semakin tambah nyata ketika pada bulan Juni tahun 1966 dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS. Pertama, MPRS menetapkan pengukuhan atas Supersemar yang tadinya hanya merupakan surat perintah dari Presiden. Kedua, Ketua MPRS dipegang oleh Jenderal A.H. Nasution. Ketiga, di dalam sidang tersebut, MPRS mensahkan pembubaran PKI, melarang marxisme-leninisme dan komunisme di Indonesia dan mengusulkan dibentuknya panitia peneliti tentang ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Keempat, sidang juga mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan gelar Presiden Seumur Hidup. Kelima, Presiden diminta pertanggungjawabannya khususnya tentang sebab-sebab peristiwa 30 September dan sebab-sebab menurunnya keadaan ekonomi dan akhlak (Dwipayana dan Ramadhan K.H, 1989: 176-177).

Presiden Soekarno kemudian menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang dikenal dengan Nawaksara yang ditanggapi dengan nada tidak puas karena tidak menjelaskan sebab-sebab terjadinya Peristiwa 30 September. Pidato tersebut lebih berisikan pandangannya dalam hal kedudukannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Presiden seumur hidup dan rencana pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Hampir di dalamnya tidak menyentuh persoalan Peristiwa 30 September.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan MPRS tertanggal 10 Januari 1967, yang merupakan pelengkap pidato Nawaksara, Presiden Soekarno mengatakan bahwa G.30.S merupakan satu *complete overcompelling*.

Ia juga menjelaskan telah mengutuk Gestok (Gerakan 1 Oktober) di dalam pidatonya pada tanggal 5 Oktober 1966, dan yang salah harus dihukum. Oleh karena itu, ia membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub).

Ia juga telah memberikan otorisasi kepada kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret yang disampaikan pada malam Peringatan Isra' Mi'raj yang menyatakan bahwa dirinya telah mengutuk Gerakan 30 September (*Pidato Pelengkap Nawaksara*, 10 Januari 1967).

Namun, menurutnya bila ia harus bertanggung jawab terhadap Gerakan 30 September, Soekarno balik menggugat dengan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas usaha pembunuhan terhadap Presiden/Panglima dengan penggranatan di Cikini, dalam Peristiwa Idul Adha, pemberondongan dari pesawat udara, penggranatan di Makassar, dan pencegatan bersenjata di Gedung Stanvac.

Melalui pesan-pesan itu, Soekarno kemudian berpendapat bahwa kalau ia diminta untuk bertanggung jawab atas terjadinya G.30.S, ia berhak pula menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa

upaya pembunuhan terhadap Presiden pada masa lalu itu. Kalau bicara tentang "Kebenaran dan Keadilan", maka saya pun minta "Kebenaran dan Keadilan".¹

Dalam sidang tersebut, Letnan Jenderal Soeharto melaporkan apa-apa yang sebenarnya telah terjadi. Hal menarik di dalam laporan itu, adalah pandangannya tentang kontroversi keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa 30 September. Meskipun menurutnya, ia berusaha menghindari timbulnya emosi yang tidak diinginkan, apa yang disampaikannya memiliki implikasi dan makna serius bagi kedudukan Presiden Soekarno sendiri.

Ia berpendapat bahwa dengan latar belakang atau dengan tujuan mengamankan garis-garis besar politik, Presiden Soekarno telah membiarkan pelaku-pelaku Gerakan 30 September. Bahkan Soekarno telah melakukan tindakan yang memberi keuntungan bersifat tak langsung bagi Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI).

Bagi Soeharto bahwa tindakan Presiden Soekarno tersebut telah menunjukkan satu kenyataan dan pelanggaran undang-undang pidana, sekalipun tujuan utamanya bukanlah untuk membantu G30S/PKI, tetapi lebih untuk menyelamatkan politiknya (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989).

Setelah Sidang Umum IV MPRS tersebut, kepangkatan militer Soeharto telah menjadi jenderal penuh. Ia juga telah diangkat sebagai Ketua Presidium Kabinet/Menteri Utama Hankam. Dengan demikian, praktis ia menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Ketika menduduki posisi tersebut, Jenderal Soeharto menghapus lembaga-lembaga yang telah didirikan secara ekstrakonstitusional seperti Front Nasional, Komando Operasi Tertinggi, Komando Ganyang Malaysia, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi, dan

1 Pidato *Pelengkap Nawaksara*, 10 Januari 1967

Komando Logistik Nasional. Di dalam periode itu, upaya menormalisasi hubungan dengan Malaysia juga dilakukan. Pada bulan September 1966, akhirnya Indonesia masuk kembali ke dalam organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Peralihan dan perubahan kekuasaan terus berjalan. Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 mengadakan seminar di Bandung yang merumuskan Orde Baru. Di dalamnya ditetapkan bahwa Orde Baru menghendaki suatu tatanan yang lebih realistis dan pragmatis. Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989: 181).

Di dalam seminar ini juga dihasilkan sebuah doktrin baru. Konsep jalan tengah yang diajukan Jenderal A.H. Nasution perlu ditinggalkan demi prinsip *ing ngarso sung tulodo* di mana ABRI harus memimpin dari depan. Doktrin baru Tri Ubaya Cakti ini kelak akan membawa militer pada bidang politik sampai pada tingkat yang paling tinggi (Singh, 1995:104).

Posisi Jenderal Soeharto sendiri, semakin kuat karena Surat Perintah Sebelas Maret itu sendiri kemudian dikukuhkan oleh MPRS dan dalam perkembangannya Jenderal Soeharto menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet/ Menteri Utama Hankam. Sementara Sidang Istimewa yang digelar pada tanggal 8 Maret 1967 menyebutkan bahwa Presiden Soekarno belum dapat melaksanakan pertanggungjawaban secara konstitusional. Oleh sebab itu, MPRS melarang Presiden Soekarno mengambil bagian-bagian politik sampai pemilihan umum. Sedangkan penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan Ir. Soekarno akan diserahkan kepada Pejabat Presiden (Dwipayana dan

Ramadhan KH, 1989; Widiarto, Syafaat dan Suryokusumo, 2007:91).

Naiknya dirinya sebagai Pejabat Presiden dan menjadi Presiden penuh tidak lepas dari dorongan dan keinginan orang-orang yang mengelilinginya. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang mengantarkan dan mengubah pendiriannya. Jelasnya satu faktor yang menyebabkan kesediaannya untuk menjabat presiden adalah soal kepercayaan. Hal ini tampak begitu penting, sebab dengan dalih kepercayaan itu, ini mampu mengubah pendiriannya mau diusulkan untuk menjadi presiden menggantikan kedudukan Presiden Soekarno.

Itulah kenapa dengan dilantik dirinya sebagai presiden, menurutnya, tidak satu pun yang menang terhadap yang lain, sebab yang menang adalah kita bersama. Yang menang adalah Orde Baru (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:191).

Namun demikian, sebenarnya sewaktu-waktu kepercayaan itu dapat dicabut kembali. Untuk alasan dan situasi tertentu, kepercayaan apa pun dapat dicabut atau pun dilanjutkan. Kelak Presiden Soeharto, pada tahun 1998, ia harus mengembalikan kepercayaan itu, dengan berbagai perasaan dan emosi yang mungkin dirasakannya. Ia dijatuhkan oleh sebuah gerakan reformasi yang juga dipelopori oleh gerakan masif mahasiswa dan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok oposisi, akademisi, dan buruh. Bahkan ada di antaranya pernah menjadi pembantu-pembantu dalam sebuah kabinet pembangunan yang dibentuknya.

Sekalipun sebelum itu, ia telah mengatakan bahwa kalau pada suatu waktu, melalui jalan yang benar dan sah, mereka mencabut kembali kepercayaan itu, maka ia dengan senang hati akan menyerahkannya. Ia tidak akan

mempertahankan kedudukannya, apalagi dengan menggunakan kekuatan senjata (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:191).

Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai 1998 itu, pada kenyataannya telah menjadi drama politik yang penuh dengan intrik, tragedi, dan misteri yang menghiasi sejarah kekuasaan di Indonesia (O'Rourke, 2002). ❖



BAB 3

KARAKTERISTIK LEGITIMASI ORDE BARU

Sumber Legitimasi Orde Baru

Pemerintah Orde Baru yang panjang tidak dapat dipisahkan dari karakter sumber legitimasinya, yakni bagaimana rakyat menerima hak moral pemimpin politik untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat atas mereka. Hanya rakyat yang dapat memberi legitimasi dan bukan pemimpin yang menentukan (Andrain, 1992:203).

Pertanyaannya adalah atas dasar apa para pemimpin politik itu memerintah dan atas dasar apa orang-orang yang bukan pemimpin menerima justifikasi-justifikasi tersebut? Secara teoretik, pertanyaan ini menyangkut prinsip-prinsip legitimasi seperti keyakinan tradisional, ideologi, personal, prosedural, dan instrumental (Andrain, 1992: 207).

Untuk kepentingan kelanjutan paparan, adalah penting melihat karakter sumber-sumber legitimasi tersebut. Bagaimana menguat dan bagaimana hal itu memudar yang

kemudian menjadikan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan jatuh dari jabatannya.

Pilar Ekonomi: Transformasi Struktural di Indonesia

Kebijakan paling penting dalam pemerintahan Orde Baru adalah mengubah orientasi politik sebagai panglima kepada orientasi ekonomi pembangunan. Dalam konteks ini, kegiatan pembangunan dapat dipandang sebagai transformasi struktural (Syahrir, 1992).

Konsep pembangunan mempunyai dimensi berbeda-beda yang menunjukkan praktik-praktik yang berbeda pula. Para ahli membandingkan pertumbuhan sosio-ekonomi dengan keusangan lembaga-lembaga politik. Ada pula kajian yang menghubungkan pembangunan dengan mobilisasi sosial, seperti peningkatan kemampuan baca tulis, pendidikan, urbanisasi, dan media massa.

Di samping itu, pembangunan menyampaikan makna kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, para ahli menggambarkan pembangunan dalam kerangka pertumbuhan masyarakat, kompleksitas, dan sekularisasi. Sementara ahli lain melihat pembangunan pada peningkatan produktivitas, keluaran barang dan jasa serta mobilitas pekerjaan.

Pembangunan dapat pula mencakup acuan individual dan sosial. Ini mengacu pada sikap dan tingkah laku individu pada berbagai sektor masyarakat, seperti masyarakat politik, masyarakat ekonomi, keluarga, dan polanya, serta nilai-nilai budaya, terutama yang terungkap dalam agama, ideologi, dan mitos (Andrain, 1992:358).

Syarat-syarat mencapai pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi umumnya dicapai melalui empat tahap (Andrain, 1992: 383-384). Pertama, berkaitan dengan perubahan dalam keterampilan, sikap, dan nilai manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Untuk mencapai

perubahan keterampilan, sikap, dan nilai dalam diri manusia sebagai pelaku pembangunan, masyarakat harus memperoleh pendidikan formal, mendapatkan keterampilan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem perekonomian modern.

Kedua, pertumbuhan ekonomi perlu ditopang dengan ketersediaan infrastruktur ekonomi. Transportasi dasar, komunikasi, bendungan, waduk, irigasi, listrik, energi, dan fasilitas-fasilitas kekuasaan lain harus tersedia. Walaupun semua fasilitas ini berukuran besar dan memerlukan biaya yang besar, unit-unit ekonomi yang lain membutuhkan hal tersebut untuk tujuan-tujuan produktif baik yang diarahkan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Pembangunan ekonomi di masa yang akan datang dan kesatuan ekonomi tergantung pada pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut.

Ketiga, produktivitas pertanian harus dimaksimalkan. Dengan kondisi pertanian yang bersifat subsisten, pemerintah membutuhkan teknik baru untuk mempersubur tanah. Pertanian komersial harus menggantikan pertanian yang bersifat subsisten sampai mencapai surplus makanan. Sebab, kekurangan makanan mengharuskan pemerintah melakukan impor yang akan mengurangi devisa.

Keempat, pemerintah perlu mengumpulkan modal, yakni barang-barang nyata yang berfungsi sebagai sarana produksi yang merupakan sumber daya produktif seperti mesin, teknologi, gedung, peralatan, dan semua yang diperlukan untuk tujuan-tujuan produksi dan investasi. Semua ini diciptakan melalui cara yang menyusahkan, seperti pajak, upah yang rendah, bantuan asing dan inflasi. Bahkan diperlukan pembatasan terhadap barang-barang konsumtif.

Untuk itu, menggambarkan perubahan ekonomi sejak pemerintah Orde Baru dan segi-segi yang telah dicapai serta

dilema-dilema yang dihadapi adalah sesuatu yang diperlukan untuk menunjukkan proses transformasi struktural yang terjadi.

Seperti yang tecermin dalam bab sebelumnya, sepanjang tahun 1945 sampai tahun 1967, para pemimpin bangsa telah menghabiskan pikiran, tenaga, dan sumber daya untuk kegiatan yang berorientasi politik. Sistem politik telah diubah dari sistem parlementer sejak tahun 1950 hingga tahun 1957/1958 menjadi suatu sistem terpimpin di mana presiden memiliki porsi kekuasaan paling besar. Presiden Soekarno mendapat sebutan sebagai Panglima Besar Revolusi dan Presiden Seumur Hidup.

Sejak itu, Presiden Soekarno memusatkan perhatian pada berbagai masalah internasional dan persatuan nasional. Pembangunan ekonomi tidak memperoleh prioritas utama. Akibatnya, struktur perekonomian mengalami kemacetan. Pertumbuhan ekonomi diabaikan.

Apalagi pemerataan hasil pembangunan yang dapat mengangkat taraf kehidupan masyarakat Indonesia, juga tidak menjadi program utama kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi kira-kira sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi stagnasi dalam pertumbuhan pendapatan per kapita (Syahrir, 1992:10).

Akibat logis pertumbuhan ekonomi yang mandek adalah struktur ekonomi yang mandek. Sektor pertanian menyumbang 52 persen dari total produksi nasional dan 72 persen dari seluruh angkatan kerja di sektor tersebut sebelum Orde Baru. Pada tahun 1951, kontribusi di sektor pertanian sebesar 55,7 persen dari pendapatan nasional dan di tahun 1964, hanya turun sedikit menjadi 51,5 persen dari pendapatan nasional (Syahrir, 1992).

Sektor-sektor seperti pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, dan jasa hampir-hampir tidak bergerak.

Inflasi mencapai 650 persen (Syahrir, 1992:47). Data lain menyebut inflasi tahun 1966 mencapai lebih dari 1.130 persen dan Indonesia pada tahun 1966 merupakan contoh klasik dari apa yang disebut sebagai *low level equilibrium trap* (Prabowo, 2002: lvii).

Sejak awal, Presiden Soeharto melibatkan ahli-ahli ekonomi guna memberi pemikiran dan tindakan terbaiknya bagi mewujudkan program pembangunan yang ingin dilaksanakan. Di bawah koordinasi Widjojo Nitisastro, mereka disebut sebagai "Mafia Berkeley" sebutan yang jelas mencerminkan perasaan tidak simpatik terhadap kekuasaan mereka. Meskipun tebersit kandungan adanya rasa hormat terhadap arti penting posisi mereka dalam menentukan kebijakan ekonomi Indonesia (Syahrir, 1992:34).

Peran mereka sangat jelas dan kuat selama 25 tahun pertama. Mereka mengendalikan sejumlah departemen penting dalam perekonomian. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, J.B. Sumarlin, Saleh Afiff, dan Andrianus Mooy, secara silih berganti menduduki dua atau tiga departemen yang paling penting. Dua yang paling penting adalah menteri keuangan dan menjadi ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (Pamungkas, 1996:28).

Keterlibatan Nitisastro dalam kebijakan pembangunan di Indonesia pada 25 tahun pertama yang juga dikenal sebagai Pembangunan Jangka Panjang Tahun I (PJPT I), tidak dapat dilepaskan dari pokok-pokok pemikiran tentang pembangunan itu sendiri yang merupakan penafsiran terhadap esensi Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pandangannya, untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi, masalah pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan rata-rata tidak dapat dipisahkan. Pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan rata-rata harus dilaksanakan bersama-sama.

Pemerataan pendapatan kecuali bila disertai dengan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan rata-rata, dapat dipastikan menjadi hambatan inisiatif ekonomi dan karena itu berakibat menurunnya tingkat pertumbuhan produksi. Pada akhirnya akan terjadi pengurangan bagian yang diterima oleh masing-masing orang akibat pertambahan penduduk.

Sebaliknya, peningkatan pendapatan rata-rata tanpa disertai pemerataan pendapatan akhirnya akan menghambat kenaikan pendapatan rata-rata sebagai akibat menurunnya semangat dan sangat mungkin juga meningkatnya ketegangan sosial. Oleh karena itu, menurut Nitisastro, penafsiran Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan masalah pemerataan pendapatan ini (Pamungkas, 1996:28).

Sri Bintang Pamungkas (1996) menilai pandangan ini sangat mengagumkan karena mengandung pandangan jauh ke depan tentang sistem atau model pembangunan yang oleh para ahli ekonomi dunia pun baru dituliskan secara lengkap 20 tahun kemudian yakni pada tahun 1974, yaitu di sekitar hubungan antara pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equity*).

Dilihat dari kebijakan ekonomi yang ditempuh, Nitisastro lebih memberi tekanan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi (*growth*) dari pada pemerataan pendapatan (*equity*). Namun demikian, ia masih mengakui pentingnya pemerataan pendapatan sesuai dengan konsepsi *growth with equity*.

Ada dua resep yang digunakan untuk mencapai rekor yang mengesankan di dalam proses transformasi struktural dalam kebijakan pembangunan selama 25 tahun pertama pada masa pemerintah Orde Baru itu, yakni kontinuitas dan perubahan (Syahrir, 1992). Dalam pandangan Syahrir ada perubahan kebijakan yang berbeda dari Pelita ke Pelita

(Pembangunan Lima Tahun), namun tetap mempertahankan formulasi yang tetap, baik dari segi pengambil kebijakan atau pun yang menyangkut strategi kebijakan ekonomi.

Seperti dilihat dalam 25 tahun program pembangunan jangka panjang pertama, kelompok ekonom yang dikenal sebagai Mafia Berkeley telah mengendalikan sejumlah departemen-departemen penting dalam pemerintahan seperti Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Departemen Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Kelompok ekonom ini menerapkan instrumen kebijakan ekonomi yang berlanjut dan konsisten. Kebijakan ini mengandung segi hal yang tetap (konstan) karena dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, namun pada sisi lain mengandung segi perubahan-perubahan.

Kebijakan ekonomi yang tetap itu mencakup: a) kebijakan anggaran berimbang baik di tingkat nasional maupun daerah; b) kebijakan pengendalian inflasi melalui pengendalian uang yang beredar (MI) dan membatasi besar pengeluaran anggaran; c) kebijakan sistem devisa bebas yang disertai dengan pengelolaan defisit neraca transaksi berjalan secara hati-hati; d) bantuan dari luar negeri yang memiliki persyaratan lunak dan bunga rendah melalui konsorsium Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI) (Syahrir, 1992: 35).

Konsistensi itu disesuaikan dengan banyak hal karena kekuatan politik dalam mengendalikan sumber daya ekonomi negara tidak berada di tangan mereka. Periode awal pemerintahan Orde Baru merupakan periode transisi dan rekonstruksi. Inflasi 650 persen dapat diturunkan secara bertahap pada kisaran 40-50 persen Utang luar negeri masa Orde Lama dapat dijadwalkan kembali.

Pada periode ini, pembentukan perencanaan indikatif dilakukan, yang dikenal dengan Repelita I (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dari tahun anggaran 1969/1970 sampai tahun 1973/1974. Dalam masa itu, pertumbuhan ekonomi dicapai 8,6 persen per tahun sekalipun target yang ditetapkan hanya sebesar 5 persen per tahun (Syahrir, 1992).

Pergeseran terjadi ketika masuk Repelita II dari periode tahun 1974/1975 sampai tahun 1978/1979 yang semula di Repelita I menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka dalam Repelita II bergeser ke upaya pemerataan dan penyediaan kebutuhan dasar. Program ini dikenal dengan Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan, dan Stabilitas).

Bagian terpenting upaya pemerataan dan penyediaan kebutuhan dasar adalah munculnya Instruksi Presiden (Inpres) antara lain meliputi pembangunan sekolah dasar di seluruh Indonesia di setiap kecamatan. Syahrir (1992) berpendapat bahwa munculnya SD Inpres tidak dapat dilepaskan dari petisi 24 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menekankan pentingnya kemudahan pendidikan umum untuk seluruh rakyat yang mencerminkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Puncak gerakan dan demonstrasi mahasiswa tersebut adalah terjadinya kekacauan pada tanggal 15-16 Januari 1974 yang dikenal dengan Peristiwa Malari. Dalam peristiwa tersebut, puluhan mahasiswa dan intelektual ditangkap dan sejumlah surat kabar dan majalah diberedel (Hanazaki, 1998)

Ada hubungan langsung antara program Inpres dengan kesejahteraan, kesehatan serta tingkat pendidikan masyarakat. Karena di setiap kecamatan melalui program

tersebut diharuskan ada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan satu orang dokter. Lulusan dokter muda diwajibkan bekerja di daerah pedesaan selama 2 sampai 3 tahun.

Rasio pendidikan penduduk meningkat. Pembangunan prasarana seperti jalan, irigasi, jembatan telah meningkatkan mobilitas dan produktivitas penduduk. Indeks kualitas hidup fisik (*Physical Quality of Life Index*) semakin baik yang ditunjukkan oleh penurunan angka kematian bayi dan naiknya harapan hidup. Pengeluaran anggaran untuk program Inpres ini hanya mungkin dilakukan karena sumber-sumber yang bukan berasal dari anggaran negara, yakni karena akibat adanya *boom* minyak (Syahrir, 1992).

Pergeseran dalam periode itu, tidak saja meningkatkan upah dan kondisi kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun pula sejumlah perusahaan besar nasional berkembang melalui pengeluaran pemerintah yang dipakai untuk membangun gedung-gedung, prasarana umum dan transportasi. Pada periode ini tumbuh konglomerat yang mengakibatkan pergeseran terhadap titik berat pembangunan.

Masalah pemerintah Orde Baru pada periode ketiga adalah kelangkaan devisa. Pada periode ini, yakni tahun anggaran 1986/1987, sumber devisa minyak telah sangat berkurang. Bantuan luar negeri, menjadi beban karena penerimaan bantuan dan cicilan utang luar negeri serta bunga yang harus dibayar ternyata jauh lebih kecil dari pada utang yang harus dibayarkan. Syahrir (1992: 52) menyebut ini sebagai arus keluar devisa bersih.

Ada dua perangkat kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengatasi beban ekonomi yang semakin berat, yakni deregulasi dan kebijakan ekspor nonmigas. Kedua kebijakan tersebut saling berkaitan. Sejak tahun anggaran 1982/1983

hingga tahun anggaran 1989/1990, ekspor nonmigas memberi peningkatan signifikan terhadap total ekspor, yakni secara konsisten dari sebesar 21 persen meningkat menjadi 61,2 persen.

Bila hal tersebut dilihat dalam dollar Amerika Serikat, pendapatan ekspor nonmigas ini dari 3.928 juta dollar AS di tahun anggaran 1982/1983 menjadi 13,896 juta dollar AS pada tahun 1989/1990. Penerimaan pajak juga mengalami peningkatan dari Rp 3,8 triliun di tahun anggaran 1982/1983 meningkat menjadi Rp 14,9 triliun pada tahun anggaran 1989/1990.

Praktis dalam periode itu, pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi yang mencakup perubahan struktur produksi, perubahan struktur anggaran dan struktur ekspor yang membawa Indonesia ke dalam iklim perekonomian baru. Sementara kebijakan deregulasi dapat menjadi penjelaras tentang proses strukturisasi perekonomian dalam periode tersebut (Syahrir, 1992).

Kebijakan deregulasi telah mengalihkan peran pemerintah dalam produksi melalui investasi langsung yang bersumber dari anggaran dan perusahaan milik pemerintah serta konsumsi melalui belanja pemerintah kepada peran dan inisiatif swasta. Kebijakan ini untuk mengurangi distorsi dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Secara implisit, kebijakan ini merupakan pengakuan bahwa sumber distorsi tersebut berasal dari regulasi pemerintah.

Dalam Repelita kelima (1989/1990 sampai 1993/1994), untuk pertama kalinya di dalam dokumen perencanaan, dicantumkan mobilisasi dana yang ditargetkan Rp 239,1 triliun. Sebesar 55 persen direncanakan akan ditutup sektor swasta. Sisanya akan ditanggung pemerintah. Berbagai kebijakan deregulasi, dari deregulasi perbankan, penanaman modal sampai deregulasi industri besi ditujukan untuk

mengurangi distorsi dalam pengalokasian sumber-sumber tersebut.

Asumsi kebijakan ini adalah berkurangnya pengaruh pemerintah, baik terhadap penawaran maupun persediaan akan menyebabkan mekanisme pasar bekerja lebih efisien. Dengan perkataan lain, intervensi pemerintah dimaksudkan untuk memecahkan distorsi dan kemacetan pasar (*market failure*) yang mengakibatkan inefisiensi. Deregulasi untuk menghilangkan aturan lama yang sudah tidak cocok lagi dan menggantinya dengan aturan baru yang lebih cocok (Pamungkas, 1996:100).

Distorsi lain adalah sejumlah komoditas tertentu yang tidak dapat diimpor karena diberikan kepada perusahaan tertentu yang monopoli kewenangan untuk memasarkan komoditas tersebut. Dalam posisi itu, perusahaan mengendalikan tingkat harga komoditas itu. Distorsi ini lebih dikenal sebagai hambatan nontarif. Untuk mengurangi hambatan nontarif umumnya diperlukan tindakan dan kebijakan khusus, karena umumnya ada kelompok kepentingan yang memiliki ikatan politik yang kuat.

Menurut Syahrir (1992) jumlah komoditas yang memiliki hambatan nontarif ini mengalami peningkatan sejak tahun 1983 hingga tahun 1985/1986. Hal ini terjadi karena instrumen kebijakan memberi keuntungan kepada kelompok *vested interest* di negara ini. Karena itu, mengurangi hambatan nontarif merupakan pekerjaan yang jauh lebih sulit dibandingkan pengurangan tarif. Ini kelak yang menjadi dasar untuk menyuarakan dan membersihkan praktik-praktik monopoli, proteksi, nepotisme, kolusi, dan korupsi.

Sulit dipungkiri bahwa deregulasi yang dilakukan pemerintah telah menciptakan dimensi ekonomi baru. Ada hal yang perlu dilihat sebagai fakta dan implikasi secara

lebih teliti terutama terhadap transformasi struktural yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut.

Pertama, kebijakan pembangunan seperti deregulasi tersebut telah mengubah struktur ekspor yang memengaruhi pola hubungan antara pemerintah dan pola hubungan dengan masyarakat/pengusaha di sisi lain. Sebelumnya, pemerintah memegang kendali sepenuhnya dan telah dipakai secara langsung untuk pengeluaran anggaran.

Kedua, jelas perubahan itu mengakibatkan perubahan struktur anggaran yang membatasi kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan yang dampaknya akan dirasakan pada program-program pembangunan seperti Inpres, misalnya.

Ketiga, proses akumulasi transformasi struktural telah mencapai tingkat jenuh terhadap pertumbuhan. Sementara, pada perusahaan swasta terjadi tingkat kenaikan yang luar biasa dalam hal aset kekayaan, perputaran modal, dan nilai penjualan. Proses ini membuka dimensi ekonomi baru pula, yakni ekspos perusahaan yang akan *go public*. Secara simultan muncul isu konglomerat dan termasuk kompleksitas tambahan terhadap isu tersebut. Seperti diketahui bahwa sebagian besar para konglomerat itu adalah warga keturunan China (Syahrir, 1992).

Memang, konglomerasi, monopolisme, dan oligopolisme dalam industri selama proses pembangunan sebagai fakta dan merupakan contoh dari bentuk adikuasa ekonomi yang kontras terhadap kemiskinan. Ada yang mengabarkan bahwa 200 konglomerat terbesar di Indonesia menguasai omzet hingga lebih dari Rp 128 triliun yang berarti 77 persen dari nilai PDB untuk tahun 1992 yang mencapai sekitar Rp 225 triliun (*Info Bisnis*, Desember 1993).

Atas keberadaan konglomerat itu, ada pertanyaan yang bersifat reflektif terhadap sistem perekonomian Indonesia,

yang memotret apa yang akan terjadi pada pemerintah Orde Baru ini ke depan (Syahrir,1992). Suatu pertanyaan jauh sebelum tuntutan reformasi struktural dilakukan pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998. Pertama, bagaimana masa depan mekanisme pasar dan kapitalisme di Indonesia. Kedua, apa peran pemerintah di masa mendatang dalam upaya mengatasi ketimpangan dan penghapusan kemiskinan serta kesejahteraan kaum miskin pada umumnya.

Adalah wajar, apabila tidak semua orang sama kayanya atau sama miskinnya. Tetapi adalah tidak wajar, apabila sebagian kecil masyarakat mempunyai kekayaan yang besar, sedangkan sebagian besar masyarakat berada dalam kemiskinan (Pamungkas, 1996:293). Pameran kekayaan pada suatu negara dengan pendapatan per kapita kurang lebih 570 dollar AS dan separuh angkatan kerjanya masih setengah menganggur dipandang kalangan sebagai bom waktu yang siap meledak (Syahrir, 1992:75).

Kekhawatiran ini belum ditambah dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu, yang mempunyai ikatan politik yang kuat, sehingga memperoleh dukungan kebijakan tertentu dalam menjalankan bentuk usaha ekonomi. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini, ditempuh sepanjang mengamankan kepentingan dan hajat kehidupan masyarakat luas (Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:380). Ada keyakinan bahwa monopoli perorangan sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan, tetapi monopoli dalam arti penguasaan negara pada sektor-sektor sangat vital demi hajat hidup orang banyak, merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan.

Celah ini memicu sentimen sosial yang sering disuarakan sebagai kolusi, korupsi, nepotisme, dan monopoli. Berbagai bentuk kerusakan yang terjadi pada tahun 1996 sampai 1997, kesenjangan kemiskinan, praktik monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi tertentu sering dijadikan

hujatan terhadap Orde Baru. Pada gilirannya, isu ekonomi karena situasi tertentu, menjadi isu politik. Sebab berbagai kekurangan dalam pembangunan dijadikan dalih untuk mendelegitimasi kekuasaan Orde Baru.

Secara politis, Orde Baru menghadapi situasi yang sensitif. Pada tahun 1992, usia Presiden Soeharto adalah 71 tahun. Pada tahun 1993, ia kembali menjabat menjadi Presiden sampai tahun 1998 dengan tetap Golkar memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum tahun 1992. Pada tahun 1997, Golkar memenangkan pemilihan umum secara mutlak dengan diwarnai berbagai insiden terhadap gejolak di Jawa Tengah tentang kebijakan "kuningisasi". Presiden Soeharto sendiri menyebut tahun 1997 sebagai tahun politik.

Dalam situasi sensitif itu, Presiden Soeharto mengingatkan semua pihak untuk betul-betul meneliti apakah benar rakyat menghendaki dirinya sebagai presiden, mengingat beberapa faktor antara lain usianya yang sudah mencapai 77 tahun, ajakan untuk tidak mengkultuskan dirinya, ajakan agar tidak mempertajam isu kesenjangan sosial sebagai komoditas politik dan pertimbangan dan pertimbangan lain.

Di samping itu, kekurangan-kekurangan pembangunan yang telah dicapai telah menjadi isu politik yang sangat kuat. Pada tahun 1997 pula, fundamental ekonomi yang telah dibangun pemerintah Orde Baru mulai goyah. Nilai rupiah terkoreksi sedemikian rupa terhadap dollar AS.

Sekalipun Presiden Soeharto kembali menjabat presiden pada tahun 1998 pada akhirnya, ia menyatakan berhenti di tengah-tengah isu ekonomi yang dinilai sebagai sarat dengan kolusi, korupsi, nepotisme, dan monopoli. Struktur bangunan ekonomi pemerintah Orde Baru yang dijalankan dengan prinsip *alon-alon asa kelakon, kebat tapi kelewat* itu

(Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989:190), pada akhirnya telah diintervensi terlalu jauh dengan paradigma ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas yang hasilnya dapat kita rasakan seperti sekarang. Apakah lebih baik atau pun buruk, ternyata itu adalah pilihan.

Pokok-pokok Perdebatan: Dwifungsi ABRI

Asal-usul ABRI amat menentukan pandangan tentang peran dan tempatnya dalam masyarakat. ABRI merupakan angkatan bersenjata ciptaan sendiri dan sejauh itu melihat dirinya berada di atas politik dan dalam proses-proses politik (Singh, 1995:44). Salim Said (1993) dalam *Genesis of Power* menjelaskan empat hal pengalaman militer dalam masa revolusi. Karya ini setidaknya menjelaskan peran militer dalam bidang di luar pertahanan keamanan sebagai sesuatu yang kenapa terjadi.

Pertama, kenyataan munculnya laskar-laskar prajurit secara mandiri yang begitu saja terbentuk. Kedua, perilaku politik Jenderal Sudirman. Ketiga, lemahnya institusi dan kepemimpinan sipil yang sering dilanda perpecahan yang cenderung mementingkan diri sendiri. Keempat, pengalaman dalam pola pemerintahan militer selama perang gerilya.

Argumen Said sangat jeli yang menggambarkan sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menjelaskan tentang asal usul Dwifungsi ABRI. Memang dalam masyarakat Barat, peran militer pada dasarnya adalah untuk mendukung aspirasi politik masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Campur tangan militer dipandang secara negatif dan dengan mudah militer dapat dituduh melakukan petualangan politik.

Banyaknya tulisan Barat tentang hubungan sipil dan militer, telah menempatkan militer dalam prasangka. Sebenarnya kontrol sipil terhadap militer, muncul dari

ketakutan dan kebencian terhadap tentara sebagai ancaman bagi kebebasan rakyat pada abad ke-18 di Barat khususnya perilaku tentara dari negara-negara fasis (Lovell, 1985:11).

Bagi Barat sendiri, menurut Huntington (1957), kebanyakan para profesional militer telah menerima kekuasaan sipil sebagai sesuatu yang semestinya. Dilema hubungan sipil dan militer bagi Barat mungkin telah dikatakan selesai. Supremasi sipil merupakan masalah yang telah terpecahkan.

Namun, Indonesia mempunyai kasus dan pengalaman historis yang berbeda. Pengalaman Angkatan Bersenjata di Indonesia amat berpengaruh pada konseptualisasi dan aktualisasi dwifungsi di kemudian hari. Dalam hal ini, persepsi diri tentang peran militer tak berubah dan titik inilah yang harus diperhatikan. Dalam praktiknya, konsep ini jelas sudah ada pada waktu revolusi yang mendahului formulasi dan formalisasinya (Singh, 1995:46).

Persepsi diri mengarah pada pembangunan budaya politik yang intervensionis di mana militer melihat dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk campur tangan dan melibatkan diri dalam politik selama dan ketika militer melihat hal ini sebagai hal yang pas untuk dilakukan.

Dalam pandangan Nugroho Notosusanto (1974), perbedaan militer dan nonmiliter itu tidak sama tajamnya seperti di negara-negara Barat. Baik militer maupun nonmiliter disatukan sekurang-kurangnya secara mental oleh semangat perjuangan. Keduanya, merupakan anggota satu tim di mana satu tidak dapat bekerja tanpa yang lain. Sebuah pola pihak militer merupakan mitra senior dalam tim itu.

Asal-usul itulah yang menjadi basis norma perilaku Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI menganggap dirinya sebagai pengejawantahan dari pejuang bersenjata dari rakyat dan karena itu merupakan tentara

rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang (Singh, 1995:44).

Peran ini melampaui konsep Barat baik disengaja atau tidak. Militer sering merupakan kelompok yang sangat terorganisir, sangat nasional dan oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mereka cenderung memainkan peran politik yang besar dalam masyarakatnya.

Dalam pandangan ini sungguh diperlukan kerangka pikir baru, karena konsep dikotomis hubungan sipil-militer dengan supremasi sipil di dalamnya sekali lagi tidak memadai dalam rangka menjelaskan hubungan sipil dan militer dalam dunia ketiga termasuk di Indonesia (Singh, 1995:23).

Dalam corak hubungan yang demikian, adalah wajar peran militer, menjadi sesuatu yang legal dan kontitusional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 225 tahun 1962, misalnya, di dalamnya menyebutkan pucuk pimpinan angkatan bersenjata adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Namun, kedudukan itu tetap menempatkan seorang Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang bertugas membantu Presiden (Widiarto, Syafaat dan Kumoro, 2007:86).

Dokumen-dokumen kenegaraan menempatkan peran militer dalam kehidupan politik, tidak terbatas pada sebuah keputusan presiden saja. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dalam Bab II, Pasal 2 paragraf 1 dinyatakan bahwa MPR terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan. Sementara golongan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Dekrit Presiden Nomor 2 Tahun 1959 ada empat kelompok fungsional, yang di antaranya adalah pertahanan dan keamanan.

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante, di dalamnya juga membuka legalisasi bagi angkatan bersenjata sebagai satu kelompok fungsional untuk mengambil bagian dalam semua aspek urusan negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang asas Dasar Pertahanan dan Keamanan Negara, ABRI sebagai kekuatan sosial bertindak sebagai dinamisator dan stabilisator yang sejalan dengan kekuatan-kekuatan sosial lain. Di samping itu ABRI bertugas mengamankan dan memastikan keberhasilan-keberhasilan perjuangan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Singh, 1995: 59-61).

Seiring dengan berkuasanya Orde Baru, fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan lewat jalur kekaryaan. Banyak di antara mereka dikaryakan dengan mendapatkan jabatan sebagai menteri, gubernur, bupati, manajer perusahaan negara ataupun sebagai duta besar. Hasil konsensus dengan partai-partai politik, ABRI diberi kursi dalam badan-badan perwakilan. Pendek kata, peran sosio politik ABRI dari waktu ke waktu mengalami perluasan.

Seperti yang dikatakan Moshe Lisaak (1976) bahwa masuknya para perwira angkatan bersenjata, baik secara kolektif atau individual, telah menerabas bidang-bidang yang sangat luas seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, pelatihan tenaga sipil, memenuhi fungsi-fungsi administratif sipil dan melibatkan diri dalam berbagai bentuk politik kekuasaan. Pada saat yang bersamaan, para elite militer sering mendefinisikan diri mereka dalam dual konsepsional antara keamanan dan pembangunan yang merupakan tujuan nasional yang saling melengkapi (Singh, 1995:67).

Sampai sedemikian luas itu, terjadinya tidak berlangsung dalam satu kondisi dan seketika. Seperti diketahui bahwa

sejak semula, para pemimpin militer telah berusaha keras untuk memperkuat Angkatan Bersenjata sebagai organisasi militer yang disegani dan berusaha memiliki peran dalam bidang politik. Awalnya juga tidak dinyatakan secara jelas, kecuali militer harus memberi tanggapan dan bereaksi terhadap situasi yang terus berubah. Bahkan, konsep Dwifungsi ABRI yang dibayangkan Jenderal Sudirman, tampaknya berbeda dengan apa yang dibayangkan Jenderal A.H. Nasution dan berbeda lagi dengan apa yang dibayangkan oleh Jenderal Soeharto (Singh, 1995).

Proses gradual terhadap doktrin ABRI sepertinya berbanding lurus dengan peran-peran yang telah dicapai. Menurut Said pidato "Jalan Tengah" yang dikemukakan Jenderal A.H. Nasution di saat militer telah menduduki banyak posisi nonmiliter sebagai manajer-manajer perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Doktrin Perang Teritorial dan Pembinaan Wilayah diperkenalkan ketika jaringan aparat telah sampai ke daerah-daerah dan menempati kedudukan kunci (Singh, 1995).

Bahkan sampai tahun 1997, di mana gejala gerakan reformasi mulai kelihatan, para pemimpin militer tetap berkeyakinan bahwa pascapergantian kepemimpinan nasional, Dwifungsi ABRI tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Pada tahun 1993, sejak Jenderal Feisal Tanjung menduduki jabatan sebagai Panglima ABRI, ia sejalan dengan pikiran Soeharto yang menyatakan perlunya mempertimbangkan peran ABRI dalam iklim sosial politik yang terus berubah, tetapi hal itu tidak berarti bahwa Dwifungsi ABRI akan diubah atau ditinggalkan.

Memang, gagasan untuk meninggalkan Dwifungsi ABRI tidak muncul dalam diri ABRI sampai kerasnya tuntutan masyarakat agar ABRI melakukan reformasi dan mendefinisikan kembali perannya pada tahun 1997 sampai tahun 1999.

Menurut Nugroho Notosusanto, seandainya fungsi sosial politik ABRI dicabut dan ABRI hanya bertindak sebagai alat pemerintah, dan bila seandainya terjadi pergolakan politik di mana kekuatan-kekuatan sosial melawan satu sama lain karena kepentingan-kepentingan mereka sama sekali berbeda, maka apakah ada kekuatan potensial lain yang dapat memainkan peran sebagai moderator dan stabilisator (Singh, 1995).

Sejalan dengan pikiran itu, Ali Murtopo dan Sayidiman memiliki garis pemikiran yang tidak berbeda dengan pikiran Notosusanto. Ali Murtopo (1974:123) menegaskan bahwa ABRI terpaksa menjadi kekuatan politik dominan itu karena hingga sekarang belum ada kelompok-kelompok politik sipil dengan program-program yang jelas dan kokoh.

Menurutnya hal ini dapat berubah di masa yang akan datang. Sangat mungkin posisi dominan ABRI akan berkurang bahkan lenyap, dengan syarat jika situasi menjadi normal dan kelompok-kelompok politik sipil membebaskan diri dari unsur-unsur subversi serta dapat membuktikan bahwa mereka lebih baik.

Sayidiman menambahkan bahwa tidak ada supremasi sipil atas militer dan tidak ada supremasi militer atas sipil. Sebaliknya, keduanya memiliki hubungan yang sederajat dan harmonis (Singh, 1995:141). Sekalipun ada beberapa perubahan kualitatif terhadap Dwifungsi ABRI, ia akan tetap relevan dan perlu bagi negara.

Hal yang menarik terhadap tuntutan perubahan paradigma ABRI, justru datang dari Jenderal A.H. Nasution sendiri. Ia melihat bahwa implementasi Dwifungsi ABRI mesti dikembalikan pada semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Bab 2 yang berkaitan dengan perwakilan politik kelompok-kelompok fungsional.

Berdasarkan interpretasi tersebut, peran itu hanya ada di MPR dan bukan dalam politik negara sehari-hari. Nasution mengingatkan bahwa suatu kebutuhan untuk melakukan pemurnian makna dan implementasi konsep Dwifungsi ABRI. Terhadap hal ini, Said (1987:19) mengatakan bahwa hal yang ironi, Nasution yang membuat ideologi politik militer dan membawanya masuk ke dalam arena politik, akhirnya ia menjadi seorang pengkritik sengit terhadap implementasi gagasannya.

Bagi Nasution, keterlibatan militer dalam peran sosial dan politik, hal yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, partisipasi tersebut tidak dalam jumlah yang dilakukan Orde Baru. Jumlah yang terlalu besar akan mengubah pola dan praktik pemerintahan yang akan memengaruhi proses demokratisasi secara menyeluruh (Singh, 1995:147).

Lebih jauh, Nasution mengingatkan bahwa bagaimanapun negara telah mengalami perubahan penting, yang mencakup berakhirnya Angkatan 1945, keberhasilan pembangunan masyarakat pada umumnya, perkembangan ekonomi negara yang pesat dan perkembangan partai-partai politik dan para politisi sipil yang akan mampu memikul tanggung jawab politik nasional.

Sementara, dalam era globalisasi, negara akan menghadapi empat masalah utama, yakni peningkatan standar sosial ekonomi, peningkatan demokratisasi, komitmen terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dan perhatian pada masalah lingkungan (*Media Indonesia*, 4 Oktober 1983).

Esensi pentingnya adalah perubahan. Dalam beberapa keadaan, peran ABRI mesti disesuaikan dengan perubahan situasi yang berkembang. Pada tahun 1992, Jenderal L.B. Moerdani mengatakan bahwa tidak perlu adanya

kekhawatiran bahwa peran ABRI menjadi tidak sesuai dengan zamannya. Dwifungsi ABRI akan selalu diselaraskan dengan perwujudan demokrasi pada saat itu.¹

Dengan tajam, Moerdani mengidentifikasi tiga pandangan terhadap Dwifungsi ABRI. Pertama, interpretasi terhadap Nasution. Ia mengatakan bahwa Nasution telah meninggalkan dinas telah lama dan ia sibuk dengan bacaan filsafat yang sampai pada suatu kesimpulan. Sementara kesimpulan ini sendiri belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Kedua, ada interpretasi terhadap Dwifungsi ABRI yang dangkal yang melihatnya tidak lebih dari sekadar cara untuk menyediakan jabatan bagi personel militer dengan menempatkan mereka pada pos-pos sipil. Interpretasi ini adalah jelas salah. Sedangkan interpretasi ketiga adalah interpretasi orang yang tidak tahu apa-apa dan berbicara seolah-olah Dwifungsi ABRI tak berubah selama-lamanya (Singh, 1995:156).

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, yang patut diperhatikan adalah perubahan-perubahan yang ada di dalam pembangunan (Said, 2001). Sebagai hasil-hasil pembangunan itu, orang yang bodoh menjadi pandai, rumah jelek menjadi bagus, atau orang tidak mampu menjadi mampu. Dengan demikian, karena perubahan itu, diperlukan sistem pengaman yang lain dan sistem lain yang dinilai lebih tepat (Said, 2001: 87-88).

Ini berarti, para petinggi ABRI sendiri telah menyadari apa yang menjadi tuntutan perubahan dalam tubuh militer Mereka menyadari bahwa formulasi peran militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti senantiasa diperbarui. Dwifungsi ABRI itu sendiri memang harus diakui sering menimbulkan kecaman dan kritikan.

1 *Kompas*, 10 Juni 1992

Kecaman itu berpusat di sekitar penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa militer khususnya praktik yang berlebihan. Beberapa personel militer yang menjadi kepala desa, camat, bupati atau gubernur sering menggunakan paksaan dan metode-metode militer dalam hubungan mereka dengan rakyat di bawah wewenang mereka. Banyak pula keberadaan mereka dikritik karena tidak memiliki kemampuan dalam memegang jabatan-jabatan politik (Singh, 1995:149).

Dalam pandangan ini, ABRI dinilai sebagai rintangan bagi demokrasi. Dominasi ABRI dalam sistem politik harus dihentikan (Singh, 1995:150). Orang-orang yang percaya pada demokrasi parlementer ataupun liberal secara ideologis melawan praktik Dwifungsi ABRI karena hal ini bertentangan dengan prinsip mereka tentang supremasi sipil atas militer.

Banyak pengamat luar berpikiran bahwa karena begitu dominan personel militer di pusat dan di daerah, Indonesia tak ubahnya sebuah rezim militer. Beriringan dengan hal itu, dunia sedang mengalami gelombang demokratisasi. Ini meningkatkan kecaman-kecaman, tumbuhnya oposisi serta penolakan terhadap Dwifungsi ABRI.

Perbedaan inilah yang secara terus-menerus saling memengaruhi dalam bentuk wacana komunikasi politik. Wacana politik ini tampak dari masing-masing yang terlibat saling berargumen dan berpendapat untuk meyakinkan gagasan pokok, kesahihan, dan keabsahan terhadap konsep tentang Dwifungsi ABRI pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain argumen dan pandangan yang menentangnya.

Momentum gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 sampai periode tahun 1998, telah memberi tekanan yang sangat kuat dan tampak tidak dapat dihindarkan bagi ABRI untuk melakukan redefinisi dan memformulasikan

kembali bagaimana sebaiknya merumuskan perannya dalam bidang di luar pertahanan dan keamanan.

Karakteristik Kekuasaan Presiden: Orde Baru

Kekuasaan Presiden yang bersumber pada konstitusi memperlihatkan bidang yang sangat luas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas disebutkan kewenangan yang menjadi kekuasaan Presiden.

Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, ayat 2 menetapkan peraturan pemerintah. Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang militer (Pasal 10), menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11).

Presiden menyatakan negara dalam bahaya (Pasal 12), mengangkat duta besar dan menerima duta negara lain (Pasal 13). Di bidang peradilan dan kehakiman, Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14). Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15). Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22) serta di bidang keuangan Presiden mengajukan anggaran ke DPR, menetapkan mata uang dan pajak (Pasal 16). Selain itu, ada pasal-pasal yang implementasinya memerlukan pengaturan lebih lanjut yang memberi kewenangan Presiden bersama-sama dengan DPR seperti Pasal 23, 24, 25, 28, dan Pasal 30.

Kewenangan dan kekuasaan Presiden tersebut, telah dilakukan Presiden Soeharto yang kemudian menjadi tradisi kenegaraan secara konsisten. Menurut Gaffar (1999) presiden merupakan *primus inter pares*. Sekalipun mempunyai kedudukan yang sama dengan beberapa lembaga tinggi negara seperti DPR, DPA, BPK, dan MA, presiden mempunyai posisi yang lebih menguntungkan.

Bahkan proses rekrutmen pengisian jabatan tersebut merambah dalam keanggotaan MPR. Jabatan-jabatan seperti ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, ketua Mahkamah Agung, hakim-hakim agung serta ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan juga dilakukan presiden (Gaffar, 1999).

Mobilisasi dukungan akan terbentuk di lingkaran kekuasaan tersebut yang menentukan loyalitas kepada presiden. Bahkan sekalipun Presiden Soeharto selalu mendasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam penugasan dan jabatan tersebut, cara semacam ini tetap menimbulkan kecurigaan.

Secara implisit hal ini memunculkan dilema. Satu sisi mekanisme rekrutmen dapat menciptakan pemerintahan yang kuat, kompak, dan solid sehingga konflik antara lembaga-lembaga yang setingkat dapat dihindari. Presiden Soeharto sangat tidak menyukai apabila seorang menteri menyalahkan menteri yang lain (G Dwipayana dan Syamsudin, 1991).

Ia mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan menghindari disharmoni. Menurut Gaffar (1999) sosok presiden merupakan figur yang paling tahu tentang kriteria yang dibutuhkan untuk menjalankan kepercayaannya. Berikut petikan pidato pelantikan dan pengangkatan Fuad Hassan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

..... tugas Saudara di tahun-tahun mendatang bukan tugas yang ringan. Karena itu, dengan mengangkat Saudara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saya tidak memberi kedudukan yang enak dan nyaman kepada Saudara. Sebaliknya, saya minta kepada Saudara untuk mengemban tugas. Namun saya percaya bahwa dengan bekal pengalaman Saudara yang luas, baik di bidang pendidikan maupun di bidang politik yang Saudara arungi

selama ini, Saudara tentu akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kelembagaan presiden juga mengontrol rekrutmen dan kondisi internal partai politik. Pada tahun 1968, Partai Muslimin Indonesia mengadakan Mukhtamar Nasional pertama di Malang, Jawa Timur. Pihak pemerintah tidak menerima Mr. Mohammad Roem sebagai ketua sekalipun dipilih berdasarkan Mukhtamar.

Hal yang sama terjadi pada Partai Nasional Indonesia yang kelak menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada tahun 1969 PNI mengadakan Kongres Nasional di Semarang dan hampir dipastikan Hardi menjadi Ketua Partai. Namun dirasa Hardi tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah, melalui intervensi pemerintah, peserta kongres akhirnya memilih Hadisubeno S.H.

Bahkan keterlibatan semacam itu sampai pada tingkat kepengurusan daerah seperti yang terjadi pada tahun 1995 terhadap kepemimpinan Ketua DPD Jawa Timur. Berdasarkan keputusan kepengurusan DPP PDI, Ketua DPD Jawa Timur ditetapkan adalah Sutjipto. Namun, ketetapan DPP PDI yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 043/DPP/KPPS/IV/1994 tersebut tidak diakui oleh pemerintah Jawa Timur dan keputusan itu dianggap tidak sah dan inkonstitusional (Suparno, 1996).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk mengatasi kesenjangan terhadap pendapatan rata-rata masyarakat dan dengan maksud melakukan mobilisasi masyarakat pedesaan, Presiden Soeharto mengambil kebijakan yang menyangkut sumber pendanaan dan pembiayaan di luar anggaran seperti Inpres (Inpres Pedesaan, Inpres Kabupaten, Inpres Peningkatan Jalan, Inpres Kesehatan, Inpres Pendidikan, Inpres penghijauan, dan Inpres Desa Tertinggal).

Di luar jalur tersebut, Presiden juga mempunyai mekanisme Banpres (Bantuan Presiden) yang merupakan bantuan langsung presiden atas permohonan masyarakat. Sedangkan dalam rangka menghimpun dana untuk dikembalikan kepada masyarakat dibentuklah sejumlah yayasan seperti Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dan Supersemar.

Kelak yayasan-yayasan tersebut dipergunjingkan sesaat setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dalam Reformasi 1998. Belum lagi kekuasaan presiden diperlihatkan pada kuatnya kendali terhadap Angkatan Bersenjata. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden merupakan Panglima ABRI. Presiden berwenang mengangkat Panglima ABRI dan Kepala Staf ketiga Angkatan serta kepolisian negara.

Dengan penjelasan itu, jelas karakteristik kekuasaan presiden sangatlah besar. Namun besar dan luas kewenangan kekuasaan itu sendiri tidak merupakan kewenangan dan kekuasaan yang diada-adakan. Sebagian besar bersumber langsung dari konstitusi negara itu sendiri, dan sebagiannya merupakan hasil mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Ini merupakan implikasi logis, dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan sumber daya manusia dan ekonomi, kadangkala diperlukan terobosan-terobosan baru yang tidak terjabar dalam ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut. Tampaknya kreasi-kreasi tersebut dilakukan pemerintah dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu lebih bersifat fleksibel dan adaptatif. Karena boleh jadi, terhadap hal yang mendesak dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, penanganan yang diperlukan, tidak dapat menunggu hasil keputusan yang melingkar-lingkar.

Inilah yang secara objektif memunculkan wacana pembatasan jabatan presiden, isu yang mengarah pada penumpukan kekayaan pada diri pribadi Presiden Soeharto,

upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*), pemerintahan yang sentralistis dan sebagainya. Semua hal itu, pada akhirnya muncul sebagai alat komunikasi yang dipakai untuk mendistorsi sumber legitimasi kekuasaan dan pemerintah Orde Baru dalam sebuah gerakan masif yang disebut Gerakan Reformasi.

Sosok Soeharto: Antara Pengakuan dan Penolakan

Dalam retorika, pujian, dan hujatan mendapat posisi penting dan menarik dalam hubungannya antara komunikator dan komunikan. Apalagi hal ini terjadi di dalam kekuasaan tertentu. Pujian dan cacian memiliki fungsi dan tujuan komunikasi yang secara distingtif berbeda.

Pujian dapat merupakan penghargaan terhadap prestasi, rasa hormat, dan kekaguman pada sesuatu atau diri seseorang, tetapi pujian sekaligus cara untuk menjadikan seseorang senang. Ini memberi pengaruh tertentu bagi yang memuji. Namun dalam situasi tertentu, pujian dapat tidak sepenuhnya mencerminkan pengakuan terhadap prestasi orang lain, melainkan merupakan hanya taktik untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang dipujinya.

Sementara itu, cacian dapat digunakan untuk menyerang dan mencerminkan penolakan terhadap kedudukan seseorang. Antara dalih memberikan koreksi dan perbaikan dengan kebencian serta sikap oposisi, keduanya sering tidak dapat secara jelas dibedakan. Bagi perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan (*struggle for power*), pujian dan cacian mewarnai bentuk-bentuk komunikasi politik.

Dalam situasi di mana komunikasi saling bertarung dalam gerakan reformasi pada periode tahun 1997 sampai 1998, posisi Soeharto menjadi arena penting bagi pertarungan kekuasaan yang di sana mencerminkan adanya pengakuan dan penolakan terhadapnya. Pengakuan dan

penolakan ini mesti dipahami sebagai proses formatif dalam rangkaian waktu dan kejadian yang memberikan penilaian terhadapnya.

Formasi pengakuan dan penolakan terhadap Soeharto, bila hanya bertumpu pada periode dalam gerakan reformasi, akan mengabaikan adanya dinamika tarik ulur yang terjadi. Hal ini akan mengaburkan esensi terhadap cerita panjang dari perjuangan politik yang ada sebagai bentuk komunikasi dalam dramatisme politik.

Sebab, adakalanya seseorang pada waktu dulu memberi pujian dan kekaguman, pada kejadian yang lain justru mencerca dan mengkritiknya secara tajam. Untuk itu, pergeseran-pergeseran yang terjadi, dari memberi pengakuan dan kemudian menjadi lawan atau sebaliknya, semestinya dipertimbangkan sebagai bobot tersendiri berkaitan dengan kejadian dan konteks peristiwanya.

Perubahan-perubahan semacam itu sangat mungkin terjadi karena berbagai faktor apalagi berkaitan dengan kekuasaan. Misalnya, berkaitan dengan *share of power* dan pertimbangan rasional, dan *sense of order and hierarchy*. Dengan sikap berbalik, seseorang mungkin memproyeksikan akan masih mendapatkan bagian dari distribusi kekuasaan yang berasal dari penguasa sebelumnya yang dipastikan bakal jatuh.

Dengan orientasi ini, hal-hal yang menyangkut hubungan-hubungan yang pernah terjalin, penghargaan dan pemberian-pemberian yang pernah diterima, tidaklah terlalu dipentingkan. Di dalam politik, tidak ada kawan abadi ataupun musuh yang abadi. Oleh karena itu, segi historis sosok Presiden Soeharto, terhadap tarik ulur antara pengakuan dan penolakan, memberikan daya tarik untuk melihat kontestasi makna reformasi dalam dramatisme politik yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai periode tahun 1998.

Ada sekitar 14 menteri yang menyatakan diri tidak mau terlibat dalam upaya penyelesaian kemelut krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1998, melalui pembentukan Kabinet Reformasi yang langsung dipimpin Presiden Soeharto. Akbar Tanjung (Wawancara, 2009) menyatakan bahwa di dalam pertemuan di Bappenas, semua diminta untuk berbicara dan memberikan pemikiran dan pandangannya terhadap situasi dan perkembangan yang terjadi.

Menurutnya, diskusi tersebut mengerucut pada satu kesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi, sudah tidak sepenuhnya murni ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan politik. Oleh karena itu, pemecahannya, harus diselesaikan melalui pendekatan politik. Sedangkan persoalan politik itu bersumber pada Presiden Soeharto. Dengan perkataan lain, sumber permasalahan itu terletak pada diri Presiden Soeharto sendiri.

Seperti yang telah disinggung, Soeharto naik menjadi presiden karena tuntutan situasi (*situational demand*) dari keadaan yang *chaos*, adanya pengkultusan diri pada Presiden Soekarno, kekuasaan yang diktaktor, pengabaian pembangunan, situasi yang penuh nuansa revolusioner, dan konflik politik yang tajam yang membawa pada konflik horizontal. Ia naik menjadi presiden juga tidak lepas dari orang-orang dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di sekitarnya yang memberikan kepercayaan sebagai dukungan terhadapnya.

Soeharto hadir dalam situasi tersebut dengan membawa paradigma perubahan dari bidang politik diarahkan ke bidang ekonomi. Program pembangunan ini mendapat dukungan kalangan luas di Indonesia yang telah jemu mengalami keadaan yang serba revolusioner yang juga serba hipokrit. Dukungan ini juga diperoleh dari dunia

internasional karena mereka berkepentingan akan kemajuan Indonesia sehingga dapat menjadi mitra dagang yang baik (Suryohadiprojo, 1991:879).

Nama Soeharto sendiri tidak memiliki arti apa-apa bagi dunia dan banyak orang Indonesia kecuali hingga 1 Oktober 1965 (Roeder, 1969:7). Bahkan menurut Sayidiman Suryohadiprojo (1991:878), ketika Soeharto diangkat menggantikan Soekarno, belum banyak yang mengenalnya kecuali sebagai seorang pemimpin militer.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia memang tidak termasuk orang yang ada di lingkungan dalam, sekalipun dalam perjalanan karier militer, ia pernah disertai tugas memimpin Komando Daerah Militer Diponegoro dan Caduad (Cadangan Umum Angkatan Darat) bagi operasi Irian Barat.

Presiden Soeharto dilahirkan di Desa Kemusu, Godean, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921 dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Pendidikan umum yang pernah ditempuhnya adalah Sekolah Dasar (Ongko Loro), di Kemusu (1929-1931), Sekolah Rakyat di Wuryantoro Wonogiri (1931-1935), Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta (1935-1939), dan SMA (C) di Semarang (1956). Pendidikan militer yang pernah dilalui antara lain Pendidikan Dasar Militer KNIL (1940), Sekolah Kader Kopral (1940), Sekolah Kader Sersan (1941), Sekolah Perwira untuk Tjudancho (1944), dan Kursus C-II (1956).

Karier militernya dapat dikatakan cukup panjang. Ia terlibat secara langsung dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selama kurun waktu itu, ia menjabat sebagai Komandan Kompi, Komandan Batalion, Komandan Brigade, dan Komandan Wehr Kreise Yogyakarta. Pada tahun 1950, ia menjabat sebagai Komandan Brigade Mataram yang ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan Andi Aziz di Makassar.

Dalam momentum ini, ia bertemu dengan B.J. Habibie kecil yang masih berusia 13 tahun (Habibie, 1991). Sebagai Perwira Menengah, Soeharto pada tahun 1956 diperbantukan sebagai Kepala Staf untuk mengikuti Planning SUAD dan kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial IV Semarang.

Pada tahun 1963-1965 ia menjadi Panglima Kostrad. Pada tahun 1966 ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh dalam Gerakan 30 September. Masih di seputar tahun 1966, karena terjadinya pergolakan politik yang sangat cepat, ia berturut-turut menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera, dan Menteri Utama Hankam. Pada tanggal 22 Juli 1966 ia dipercaya menjabat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia sampai tanggal 28 Maret 1968, kemudian dipercaya penuh menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 1968 sampai tahun 1973 (Dwidjowijoto, 1997).

Munculnya kepemimpinan Soeharto pasca Peristiwa Gerakan 30 September dapat dikatakan sebagai pahlawan. Ia dilukan dalam demonstrasi-demonstrasi dengan seruan: "Hidup Pak Harto! Hidup Pak Harto!" yang merupakan bentuk komunikasi yang memberikan pujian dan pengakuan terhadapnya. Di dalam pujian-pujian tersebut juga tersanding cacian bagi rezim Orde Lama misalnya cacian yang diarahkan kepada Soebandrio sebagai Anjing Peking (G Dwipayana dan Ramadhan KH, 1996).

Sejarah kekuasaan Orde Baru yang panjang telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh yang dipuja dan diakui seiring dengan prestasi pembangunan ekonomi yang juga telah diukirnya. Dalam rentang kekuasaan yang panjang, begitu banyak tokoh yang datang dan pergi,

menghampiri pemimpin utama dalam pemerintahan Orde Baru.

Praktis, di sekeliling kekuasaan ini terbentuk lingkaran-lingkar dan jaring-jaring kekuatan, persahabatan, dan kekeluargaan di samping hubungan yang resmi dan formal sebagai sesuatu yang sangat wajar terjadi dalam dinamika pembangunan yang panjang. Namun, di luar wilayah kekuasaan tersebut, juga telah tumbuh tokoh-tokoh yang melakukan penentangan terhadap kedudukannya.

Dalam pandangan Robert Edward Elson (2001), Indonesia tampaknya ingin melupakan Soeharto, karya-karyanya dan menganggap Orde Baru sebagai penyimpangan dalam perkembangan sejarah negeri ini. Menurutnya, keinginan yang semacam itu adalah hal yang dangkal. Baginya, Presiden Soeharto merupakan tokoh yang amat penting selama abad ke-20 di Asia.

Ia secara hati-hati dan terencana telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Hanya saja, Indonesia baru yang diciptakan melalui tahap-tahap pembangunan terencana itu justru menghasilkan kekuatan baru yang menginginkan reformasi total. Lebih jauh Elson memuji, bahwa begitu besar yang telah dicapainya sehingga kerusakan karena krisis keuangan tahun 1997 sampai tahun 1998 hanya sedikit yang berpengaruh kepada keseluruhan rekornya. Tidak usah diragukan lagi bahwa warisan terbesar Presiden Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan pemerintahannya (Soempeno, 2008).

Bagi setiap orang, siapa pun dapat menempatkan posisi dan kedudukan Presiden Soeharto secara berbeda, baik menempatkan dirinya sebagai lawan politik ataupun sebagai figur yang memberikan suri keteladan dalam kepemimpinannya. Penilaian ini dapat berbeda, bagi mereka yang secara intensif terlibat di dalam proses dan perencanaan

pembangunan itu sendiri, berbeda bagi mereka yang berada di luar arena, yakni sisi luar dari tempat di mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan, dan berbeda bagi mereka yang hanya melihat dari sisi keburukan semata.

Jenderal L.B. Moerdani pernah pula menyatakan pandangannya terhadap adanya penilaian-penilaian semacam ini khususnya terhadap Dwifungsi ABRI. Menurutny ada orang yang menilai hanya berdasarkan pada bacaan filosofis yang utopia yang sulit dikerjakan. Ada orang yang menilai bahwa Dwifungsi ABRI/Orde Baru hanya merupakan tempat pembagian jabatan dan kekuasaan. Tetapi ada pula orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa yang menilai bahwa sepanjang pemerintahan Orde Baru tidak pernah dilakukan perubahan-perubahan dan yang lihat hanya keburukan dan kekurangan.

Presiden Soeharto sendiri dalam persepsi Moerdani (1991) adalah tokoh yang bercita-cita membawa rakyat dan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan kemiskinan ke arah kesejahteraan dan kemajuan yang sepadan dengan harkat dan martabat bangsa yang besar dan mendiami ruang negara dalam posisi yang sangat strategis (Hartarto, 1991).

Sementara Ginandjar Kartasasmita (1991) berkeyakinan bahwa Presiden Soeharto akan dicatat sejarah sebagai pemimpin besar yang telah membuat jasa dan karya besar bagi bangsanya. Menurutny, hanya orang yang menentang arus sejarah yang bisa mengingkari besarnya jasa Presiden Soeharto dari zaman kemerdekaan hingga sekarang.

Bagi Rudini (1991) cara bagaimana Presiden Soeharto mengambil keputusan tetaplh merupakan gaya seorang jenderal yang merakyat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah tampil ke muka pentas dunia dalam suatu kemantapan dan kepercayaan diri sendiri yang telah menarik perhatian dunia.

Seperti yang ditulis oleh seorang pengamat luar negeri: *Indonesia's days of maintaining a low profile are over. The sleeping giant is stirring, stretching and stepping back into the limelight to take her rightful place on the world stage* (Alatas, 1991:58). Fuad Hassan (1991) mengatakan bahwa orang terkadang lupa bahwa sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto bertahan sebagai Ketua Presidium selama hampir dua tahun, sekalipun desakan untuk mengambil alih jabatan kepresidenan itu terus ditujukan kepadanya. Lebih jauh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan V itu mengatakan:

Masih teringat saya pada diskusi yang terjadi di antara mereka yang mendesak pendapat perlunya Presiden Soekarno diganti Pak Harto dengan mereka yang beranggapan perlunya dipikirkan suatu cara untuk memberikan kesempatan Presiden Soekarno untuk mengubah penilaian dan sikap politiknya terhadap tragedi G 30 S yang dilancarkan PKI. Pembahasan itu berlarut-larut karena Pak Harto nampaknya tetap tidak bersedia mengambil alih jabatan presiden. Di lingkaran staf inti situasi tarik tambang ini dibicarakan dalam bahasa sandi. Hasilnya, Pak Harto bersedia sebagai pejabat Presiden dan Bung Karno tetap sebagai Presiden Non aktif. Demikianlah segala modus yang dirumuskan secara sandi itu ternyata tidak ada yang dapat diterapkan. Bahkan orang-orang yang konon adalah tokoh terdekat Pak Harto tidak tepat ramalannya (Hassan, 1991:262).

Istilah orang dekat, menurutnya, yang dapat memengaruhi pengambil keputusan seringkali lebih hasil pembentukan citra ketimbang kenyataan. Pada saat menjelang pembentukan kabinet, selalu penuh spekulasi dan ada saja orang dekat yang dianggap sebagai sumber

yang dapat dipercaya, tetapi akhirnya ternyata informasi dari orang dekat itu meleset pula.

Dalam sejarah kepemimpinannya, Soeharto pernah menolak pemberian gelar Doktor Honoris Causa baik dari universitas dalam negeri maupun luar negeri. Universitas Indonesia pernah akan memberikan gelar tersebut untuk ilmu hukum, hal ini ditolaknya. Demikian pula Universitas Gadjah Mada yang berniat akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa, juga ditolaknya (Sudharmono, 1991).

Pengakuan sekaligus mencerminkan adanya apologi, dapat ditangkap dari jejak-jejak komunikasi yang pernah ditinggalkan sebelum terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1997 sampai 1999. Menurut J.B. Sumarlin (1991) apa yang sekarang dianggap wajar dan selalu tersedia di mana-mana, pada waktu itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan langka. Sebagai contoh, antri beras, antri kain, angkutan yang sulit, listrik yang redup dan sering padam, harga yang melonjak dari hari ke hari, pertentangan politik yang tajam antara golongan satu dan golongan lain.

Sumarlin menyebutkan semua ini sama sekali bukan untuk bernostalgia, akan tetapi untuk mengingatkan sendiri agar melihat keadaan dan persoalan yang dihadapi saat ini secara proporsional dan dalam perspektif yang wajar. Menurutnya, perlu disadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto telah menghasilkan perbaikan-perbaikan nyata bagi kehidupan rakyat.

Gaffar (1999: 81) berpendapat bahwa di dalam diri Presiden Soeharto, ia memiliki sejumlah otoritas personal yang merupakan salah satu sumber legitimasi kekuasaan. Pertama, sebutan sebagai Pengemban Supersemar. Ia adalah satu-satunya yang menerima warisan kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Kedua, sebutan

Bapak Pembangunan. Tidak ada institusi atau figur lain yang dianggap telah membawa masyarakat mengalami transformasi sosial yang sangat mendasar menuju masyarakat modern. Menurut Gaffar (1999) Indonesia yang dikenal seperti sekarang ini adalah Indonesia yang sudah jauh berubah dibandingkan dengan seperempat abad lalu. Menurutnya, hal itu harus diakui sebagai hasil dari sebuah proses di mana Presiden Soeharto merupakan tokoh kunci untuk memberikan dorongan atas perubahan tersebut.

Namun demikian, di tengah-tengah pengakuan dan penghargaan terhadap Presiden Soeharto seperti di atas, juga telah tumbuh tokoh-tokoh yang melakukan penentangan terhadap kedudukannya. Tokoh seperti Ariel Heryanto, Arief Budiman, Budiman Sujatmiko, George Junus Aditjondro, A.M. Fatwa, Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, Amien Rais, Adi Sasono, Megawati Soekarnoputri, Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain adalah tokoh-tokoh yang bersikap kritis dan tajam terhadap jalannya pemerintahan Orde Baru. Dari sisi komunikasi, mereka mengembangkan berbagai teknik komunikasi yang sangat bervariasi terkait dengan pencitraan Soeharto.

Ada yang menggambarkan bahwa selama dalam masa pemerintahannya, Soeharto telah membantai komunis mencapai angka kisaran 2 sampai 5 juta orang. Penggambaran semacam ini sering dilakukan tanpa penjelasan yang proporsional terhadap situasi yang telah tercipta sebagai akibat manuver-manuver politik dan agitatif dari PKI sebelumnya termasuk pula konflik horizontal yang terjadi.

Dalam berkomunikasi mereka memanfaatkan celah-celah kebijakan pembangunan untuk melakukan pencitraan yang bersifat kontraproduktif. Dari kesenjangan ekonomi sebagai akibat tingkat pemerataan pendapatan yang belum

tercapai, keterlibatan anak-anak Soeharto dalam bisnis dan perdagangan, pemberedelan sejumlah media massa, corak pemerintahan yang militeristik, kebijakan *shock treatment* terhadap para residivis kambuhan yang merampok dan merampas milik rakyat dengan menembak mereka secara misterius sampai pada pembentukan opini tentang praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Di sinilah dinamika komunikasi politik yang sangat menarik terhadap pola komunikasi yang memberi pengakuan dan penolakan terhadap pribadi Soeharto. Pergeseran dan perubahan antara pengakuan dan penolakan dan sebaliknya, dapat mencerminkan dan menginformasikan banyak hal, seperti daya tahan, loyalitas, pengkhianatan, kebencian, dendam, persahabatan, kekeluargaan, dan kekuasaan.

Suatu hal yang menarik, Presiden Soeharto pernah mengatakan kepada Fuad Hassan dalam kaitannya dengan tugas yang akan dijalaninya. Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan itu jangka panjang, hasilnya pun tidak dapat dialami segera. Sedangkan hasil dari setiap tahapnya pun akan menumbuhkan harapan dan tuntutan baru. Menurutny, kita harus sabar dan tabah menghadapinya (Hassan, 1991). Sampai pada tingkat kesabaran dan ketabahan itu, akhirnya Soeharto menyerahkan jabatan pada tuntutan reformasi di tahun 1998. ❖



BAB 4

RETORIKA DAN REFORMASI

Karakteristik Reformasi 1998

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperlihatkan gerakan mahasiswa memiliki peran penting bagi perubahan politik di samping Venezuela, Kuba, China, dan Vietnam (Habermas, 1971). Meskipun demikian, mahasiswa bukan satu-satunya dan tidak cukup memadai bila ingin mewujudkan perubahan secara sukses.

Mahasiswa merupakan kelompok yang relatif permanen dalam menentang pemerintahan diktator. Tetapi, mereka sendirian tidak mungkin dapat menumbangkan sistem pemerintahan yang otoriter. Tidak adanya dukungan kelompok-kelompok lain, risiko yang mereka hadapi sangat besar. Di Yunani pada November 1973, mereka ditembaki. Demikian pula yang terjadi di Myanmar pada September 1988 dan di Republik Rakyat China pada Juni 1989.

Gerakan mahasiswa dari tahun 1966 sampai 1998, hanya dua gerakan yang dinilai berhasil menumbangkan

rezim pemerintahan, yakni pada tahun 1966 dan 1998 dengan sejumlah perbedaan. Kondisi masyarakat pada tahun 1966 terpecah secara diametral.

Militer ada yang berpihak kepada Orde Lama seperti Cakrabirawa dan ada yang berpihak kepada Orde Baru seperti RPKAD dan Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi. Partai politik mengalami hal yang sama, yakni ada yang berpihak Orde Lama seperti PKI dan PNI ASU dan ada partai politik yang Orde Baru seperti partai-partai agama dan PNI Osa Usep. Di kalangan pemuda, ada Barisan Serba Guna NU yang bertempur melawan Pemuda Rakyat (Sarwono, 1998).

Sedangkan gerakan mahasiswa tahun 1998, tidak didasari pandangan ideologis sehingga tidak terjadi polarisasi yang ekstrem seperti tahun 1966.¹ Gerakan 1998 lebih bersifat pragmatis dan tidak memiliki paradigma gerakan yang sama kecuali keinginan menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru sebagai rezim yang dinilai represif.

Keberadaan gerakan (politik) mahasiswa sering dipandang sebagai gerakan moral dari pada gerakan politik praktis yang mencerminkan kapasitas tertentu (*universitas magistrotum et scholarium*). Dalam pandangan Habermas (1971) ada tiga fungsi strategis perguruan tinggi secara umum. Pertama, mempunyai tanggung jawab memastikan lulusannya dibekali dengan kualifikasi minimum kemampuan yang bersifat ektrafungsional di bidang yang digeluti. Kedua, mempunyai tugas menstransmisikan, menginterpretasikan, dan mengembangkan tradisi kultural masyarakat. Ketiga, membentuk kesadaran politik bagi mahasiswa.

Dalam proyeksi itu, mahasiswa dapat memandang diri sebagai elite masa depan bangsa. Mereka tidak hanya mempersiapkan peran yang mempunyai signifikansi politik,

1 Wawancara, 22 Juni 2009

tetapi sekaligus menempatkan sebagai agen perubah sosial (Habermas, 1971). Di berbagai kesempatan, mereka dapat mengaktualisasikan diri melalui kegiatan politik seperti demonstrasi, deklarasi, dan mendatangi tempat-tempat yang disimbolisasikan sebagai pusat-pusat kekuasaan.

Namun, peran politik itu umumnya sangat terbatas. Bahkan peran ini dapat diambil alih oleh elite politik yang memang memiliki "resources" untuk melakukan penetrasi perubahan. Sementara mahasiswa, hanya demonstrasi di jalan-jalan, mendatangi lembaga-lembaga yang memang mensimbolisasikan kekuasaan dan kepentingan tertentu, atau mengirimkan delegasi perwakilan untuk menemui tokoh-tokoh sentral yang dianggap memperjuangkan agenda politik mahasiswa.

Setelah itu mereka dipaksa keluar dari tempat yang mereka datangi atau yang telah mereka duduki. Apakah dalam keadaan yang mereka perkirakan sebagai kemenangan ataupun kekalahan. Walaupun tampaknya mereka puas dengan apa yang mereka capai karena memberikan tekanan terhadap pemerintah yang mereka nilai diktaktor, secara keseluruhan mereka berhenti di situ.

Dalam reformasi sendiri, gerakan mahasiswa merupakan fron terdepan yang membawa kepentingan-kepentingan lain masuk. Termasuk menyeret kelompok kriminal dan penjahat (Ibrahim, 2006). Setiap perubahan dan apalagi revolusi, memang selalu terdapat masyarakat lapis paling bawah yang tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Kelompok ini dengan mudah memanfaatkan situasi kekacauan untuk mendapatkan kebutuhan yang paling dasar dengan melakukan penjarahan dan perampokan.

Seperti yang dikatakan Arendt (1972:111) ketika ada struktur kekuasaan yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi, akan ada kekuatan politik yang dengan hal itu,

kerusuhan muncul. Artinya, selalu terdapat skenario untuk menciptakan kerusuhan sebagai manifestasi perlawanan terhadap struktur kekuasaan dengan cara mendiskreditkan rezim melalui tindakan anarkis, kriminal, dan penjarahan.

Arendt (1972:120-121) mengingatkan di dalam praktik-praktik kerusuhan, retorika, dan kekerasan sebagai teknik untuk menjungkirbalikkan kekuasaan sekaligus. Ini berarti, kerusuhan merupakan bagian subversif yang bersifat instrumentasi dalam melakukan persuasi untuk memantapkan perubahan yang dicari.

Ada contoh gerakan di pelbagai negara dunia dalam upaya mereka menjadikan pemerintahan otoriter menjadi demokratis. Pemerintahan otoriter dapat merupakan pemerintahan satu partai seperti China dan Vietnam, dan dapat pula pemerintahan militer seperti Birma. Diktaktor per-orangan seperti Irak dan Kuba, dan oligarki rasial seperti di Afrika.

Spainyol, Portugal, dan Yunani merupakan negara-negara yang menjalankan demokratisasi disebabkan telah lelahnya pemerintahan militer yang berkuasa dan hilangnya dukungan rakyat. Di samping itu, adanya tekanan dari masyarakat Eropa yang mensyaratkan harus membangun sistem demokrasi apabila ingin menjadi bagian masyarakat Eropa (Bhakti, 2000:70).

Di Amerika Latin, Peru, Ekuador, Argentina, Cile, Brasil, dan Bolivia juga melakukan demokratisasi dengan berbagai alasan. Antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1990, gelombang demokratisasi juga terjadi di negara komunis Eropa Timur seperti di Jerman Timur yang kemudian bergabung dengan Jerman Barat dan menjadi Jerman. Di Asia gelombang demokratisasi dapat dilihat dari Aljazair di sekitar tahun 1989 sampai 1991. Mesir, Jordania, Tunisia,

Filipina, dan Haiti diterpa gelombang demokratisasi pada tahun 1990-an. Korea Selatan terjadi pada tahun 1987.

Perubahan di Indonesia khususnya pada tahun 1997 sampai 1998 tidak dapat disamakan dengan proses perubahan yang terjadi di Spanyol dan Brasil atau negara-negara lainnya yang dilakukan secara transformatif. Sekali-pun ada situasi-situasi tertentu yang memiliki kemiripan.

Di Brasil, tidak ada oposisi yang berarti, tidak terjadi krisis ekonomi, dan aparat yang koersif tidak tumbang. Transisi di Brasil merupakan liberalisasi dari atas. Proses ini diawali di akhir masa pemerintahan Medici tahun 1973 yang berlanjut pada masa pemerintahan Geisel dan Figueredo yang dipercepat dengan dilantiknya presiden dari kalangan sipil pada tahun 1985 (Huntington, 1995).

Di Indonesia, pemerintah Orde Baru ditumbangkan, baru upaya melakukan perubahan dilakukan. Pada tahap berikutnya, masalah transisi lebih merupakan bagaimana elemen-elemen pembaru bekerja sama dengan elemen-elemen lama yang dapat diajak melakukan perubahan secara menyeluruh. Sebagai drama perjuangan, keruntuhan pemerintahan otoriter yang berlangsung secara damai, memunculkan euforia kemenangan. Kegembiraan yang luar biasa tampak secara ekspresif karena mereka telah merasa menang dalam perjuangan yang panjang dan luar biasa.

Bersamaan dengan itu, kejatuhan pemerintahan otoriter membawa konsekuensi bagi aktor-aktor lama yang sedang berkuasa. Misalnya, Ferdinand Marcos dan Caetano dipaksa menyingkir di pengasingan. Ceasescu dieksekusi tanpa belas kasihan. Pejabat-pejabat militer di Yunani dan Argentina diadili dan dipenjara (Huntington, 1995). Dalam reformasi, pejabat-pejabat lama sering dihadapkan pada proses pengadilan. Penggugatan terhadap harta kekayaan dan mempermasalahkan sejumlah yayasan yang pernah dikelola.

Setiap proses pergantian, ada situasi krusial, yakni situasi yang menghubungkan antara pergantian pemerintahan lama dan baru. Situasi kevakuman kekuasaan, dapat menggoda berbagai pihak untuk melakukan perebutan kekuasaan. Demikian pula, kevakuman kekuasaan dapat terjadi karena perlunya mempertimbangkan siapakah yang paling legitimasi dalam memimpin dan melakukan perubahan tersebut.

Bibit perpecahan kelompok demokrasi dan oposisi umumnya dimulai dari proses peralihan tersebut. Misalnya, di saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti, sebagian memandang, perjuangan telah selesai. Sebagian memandang bahwa Presiden B.J. Habibie merupakan bagian dari pemerintah Orde Baru. Sebagian mempertentangkan dengan kelompok Islam dan kelompok lain.

Menurut Burke (1969) aktor-aktor dipersatukan oleh hasrat yang besar untuk menjatuhkan rezim atau pemimpin rezim tersebut. Namun setelah terwujud, timbul perselisihan di antara mereka mengenai distribusi kekuasaan dan sifat rezim baru yang akan diwujudkan. Memang awalnya gerakan ini dapat memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya, menghentikan komposisi dan kinerja Kabinet Pembangunan VII. Namun pada perkembangan berikutnya, banyak aktor lama masih berperan dengan aktor-aktor pembaru di dalam perubahan tersebut. Mereka dapat melakukan kerja sama di dalam perubahan yang tidak jelas lagi apakah perubahan ini merupakan model transformatif atau merupakan perpaduan.

Penyebab jatuhnya pemerintah otoriter tidak sama dan bahkan berbeda sama sekali dengan faktor pencipta demokratisasi. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru jatuh karena kerasnya rezim terhadap sikap kritis masyarakat, kegagalan ekonomi, dan praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Shively (1993:132) menyebutkan "loyo dan kepayahan karena terlalu lama berkuasa; tekanan internasional, desakan dari masyarakat dan harapan terhadap perkembangan ekonomi.

Pada tingkatan paling sederhana, demokratisasi mensyaratkan tiga hal, yakni berakhirnya sistem otoriter, dibangunnya pemerintah demokratis dan pengkonsolidasian sistem demokratis (Huntington, 1995:45). Namun sesungguhnya di dalam proses itu selalu terdapat tautologi. Ketika aktor-aktor politik menggulingkan pemerintah otoriter, ada pertanyaan bagi mereka: mengapa mereka melakukan penggulingan? Jawabannya karena mereka mempunyai kepentingan, nilai, dan tujuan. Mereka menggulingkan pemerintah otoriter, karena mereka bertindak, didorong pada persepsi tentang kepentingan, nilai dan tujuan mereka. Ini berarti demokrasi dapat diciptakan, sekalipun rakyat tidak menghendakinya.

Bagaimanapun penciptaan demokrasi mensyaratkan pada level elite, untuk mencapai sebuah konsensus prosedural mengenai aturan main. Pada tahap ini, para aktor reformasi gagal mengartikulasikan ketika mereka berhadapan dengan kekuatan lama atau tidak dapat menyatukan perbedaan kepentingan di antara mereka sendiri sehingga konsensus dan aturan main itu dilakukan secara tentatif dengan cara pasang cabut serta karut-marut.

Pengalaman ini memberi simpulan bahwa sulit untuk mencari faktor yang sama dalam semua kasus misalnya seperti India, Kosta Rika, Turki, Brasil, Yunani, dan Jepang yang mungkin memainkan peran penting dalam menjelaskan perkembangan politik di masing-masing negara yang berbeda itu. Penyebab demokratisasi berbeda sangat nyata dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Faktor tunggal tidak memberi penjelasan yang memadai

terhadap proses tersebut. Demokratisasi di tiap-tiap negara merupakan kombinasi dan simultansi dari berbagai faktor penyebab. Sedangkan berbagai penyebab dapat memproduksi bentuk demokrasi yang berbeda.

Runtuhnya Orde Baru dan jatuhnya Soeharto harus dipandang dalam pengertian di atas. Krisis ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya faktor penyebab jatuhnya pemerintah Orde Baru. Gerakan mahasiswa juga tidak dapat menjelaskan secara memadai proses tersebut. Berbagai bentuk kerusuhan baik yang bersifat kriminal, subversif, dan rasial juga tidak cukup kuat untuk menjelaskan hal ini.

Berbagai lokasi yang merupakan sentrum di mana para aktor-aktor politik dan intelektual berada, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sebelas Maret, dan di pondok-pondok pesantren yang menghendaki proses tersebut, sekali lagi tidak dapat menjelaskan demokratisasi di Indonesia, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain.

Tidak kurang penting adalah sejak kapan Orde Baru dipandang sebagai rezim otoriter. Orde Baru secara historis sering diartikan sebagai tatanan baru dan sebagai koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang disepakati dan diterima secara luas pada saat itu.

Bahkan orde ini merupakan harapan banyak pihak sebagai sistem pemerintahan yang berbeda dengan sebelumnya. Sistem baru ini sekaligus mengakhiri corak pemerintahan yang juga bersifat sentralistis yang bertumpu pada figur Presiden Soekarno. Bila dilihat memang, bahwa legitimasi kekuasaan yang dipegang Orde Baru berakar dari sana. Sedangkan memudarnya legitimasi ini sejalan dengan perkembangan kekuasaan itu sendiri.

Secara teoretik, sumber legitimasi kekuasaan yang otoriter pun dapat lebih dari satu faktor. Dalam konteks ini, sering disinggung bahwa sumber legitimasi itu adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. Efektivitas terhadap sumber legitimasi sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pemerintah untuk membuktikannya.

Orde Baru akhirnya pun jatuh ketika ia tidak mampu mengendalikan fluktuasi rupiah terhadap dollar yang pada pertengahan bulan Mei 1998 mencapai Rp 12.200 per dollar AS², membengkaknya utang swasta terhadap pihak asing, meningkatnya pengangguran, perbankan yang tidak sehat, inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, jatuh tempo pengembalian utang yang dilakukan pihak swasta dan pemerintah yang mencapai 110 miliar dollar AS³; terjadinya defisit transaksi sektor jasa terutama di sektor jasa perhubungan, asuransi, tenaga kerja dan jasa profesional⁴, dan lemahnya regulasi yang mengatur perbankan.

Faktor ini bersimultan dengan kerusuhan seiring tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang pada gilirannya meruntuhkan sendi ekonomi yang paling dasar. Aksi kerusuhan dan kekerasan seperti yang dijelaskan Arendt (1972) tidak sekadar kekacauan dan ketidakpatuhan terhadap tertib sosial, melainkan sebagai taktik persuasi yang memberi tekanan terhadap pemerintah yang dinilai otoriter.

Data-data tersebut menjelaskan perubahan kekuasaan yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Sejak awal bagi Orde Baru, paradigma pembangunan menjadi tema sentral di hampir semua kebijakan yang ditempuh dalam Rencana

2 *Kompas*, 19 Mei 1998

3 *Kompas*, 22 Februari, 1997

4 *Kompas*, 8 Januari 1997

Pembangunan Lima Tahun. Dengan Trilogi Pembangunan, Orde Baru menekankan tiga segi, yakni stabilitas politik keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Namun, pilar-pilar ini tidak kuat ketika krisis ekonomi yang menimpa Indonesia bersimultan dengan elemen-elemen lain yang menghendaki perubahan secara signifikan. Bersamaan dengan meningkatnya tekanan para oposisi, tuntutan mahasiswa, ketidakpuasan elemen masyarakat terhadap prestasi kerja pemerintah dalam mengatasi krisis.

Sampai bulan Februari tahun 1997, Soeharto masih menegaskan bahwa stabilitas nasional dan asas persatuan kesatuan tetap merupakan unsur penting dalam pembangunan sebuah negara. Tanpa stabilitas ekonomi, pelaksanaan pembangunan akan mengalami berbagai hambatan (Dwipayana dan Ramadhan, 1996; *Kompas*, 19 Februari 1997)

Sebelumnya prestasi pembangunan ini telah susah payah dilakukan. Pada tahun 1984, Orde Baru berhasil meraih surplus produksi beras dan swasembada pangan dan mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO sebagai badan dunia PBB untuk urusan pangan dan pertanian.

Huntington (1995) mengatakan bahwa efek kumulatif dari variabel bebas selama kurun waktu tertentu menghasilkan perubahan pada variabel lain. Stagnansi ekonomi selama tiga tahun tertentu boleh jadi tidak akan menimbulkan jatuhnya kekuasaan. Ketimpangan ekonomi pada periode tertentu, juga mungkin tidak akan menimbulkan gejolak ketika kesadaran dan tingkat pendidikan penduduknya belum tinggi dan merata.

Namun, ketika kesadaran politik telah merata, ketimpangan ekonomi dapat memicu gejolak dan ketidakpuasan.

Dengan perkataan lain, corak pembangunan yang dilakukan berhasil membawa perbaikan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Tetapi hasil perbaikan itu menjadi penyebab faktor jatuhnya kekuasaan. Mereka memiliki kesadaran tentang hak-hak politik yang dirampas pemerintah.

Belum lagi dihadapkan pada wacana dan isu serta hasutan yang berkembang⁵. Misalnya, aksi corat-coret yang berisi hasutan memboikot pemilu, mendiskreditkan pemerintah dan mengancam Dwifungsi ABRI. Corak kekuasaan Orde Baru tak urung memunculkan pihak-pihak yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Kondisi ini memunculkan bentuk-bentuk komunikasi tendensius dan agitatif yang menandakan proses delegitimasi dan pembusukan terjadi.

Pada akhirnya perlu dikatakan bahwa dalam model transisi yang seperti apa pun, tindakan komunikasi politik dari para aktor yang terlibat dalam tarik ulur kepentingan bagi *struggle for power* tersebut tecermin dalam *struggle for communication*. Setiap upaya melakukan perubahan pasti memanfaatkan kekuatan komunikasi sebagai elemen penting dalam setiap gerakan.

Dari beragaman isu yang berkembang tampak adanya dinamika, pergeseran, dan tujuan-tujuan komunikasi. Perubahan isu dan dinamika komunikasi politik yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998 merefleksikan adanya kompetisi dan pertarungan komunikasi yang sedang mencari pengaruh, kekuasaan, dan perubahan.

Gerakan Reformasi: Fase Krisis

Kontrol perseptual seperti yang tecermin dalam berbagai pernyataan pemerintah agar tidak membesar-besarkan

⁵ Kompas, 25 September 1997

kesenjangan sosial, agar pemberitaan tidak mengganggu stabilitas sosial, dan keamanan serta menangkap mahasiswa yang menghasut pemboikotan pemilihan umum 1997, merupakan respons terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat kontraproduktif yang dapat memperbesar krisis sehingga mengganggu krida pembangunan yang merupakan kebijakan penting pemerintah.

Ada dua arah bagaimana krisis tersebut mengalami perkembangan. Pertama, krisis dapat menjadi pulih segera. Kedua, krisis menjadi besar dan merusak sendi-sendi dasar bangsa dan bernegara yang akan membawa pada kehancuran (Birowo, 2002:145). Krisis berhubungan dengan rasa ketakutan, dan terkait dengan situasi yang tidak pasti yang menunjuk pada titik perubahan dari sebuah penyakit (Millar and Beck, 2004: 153).

Tindakan komunikasi dibutuhkan karena satu atau lebih pihak-pihak tertentu dapat mengontrol *chaos* di dalam usahanya memenangkan kepercayaan publik dan memenuhi standar etik mereka. Kegiatan ini dapat diarahkan untuk dua tujuan sekaligus, yakni restorasi atau dipakai untuk melakukan penghancuran.

Bagi mereka yang menghendaki perbaikan, komunikasi digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan sistem yang sedang berjalan (*status quo*). Sebaliknya, bagi mereka yang menghendaki keruntuhan, komunikasi dimanfaatkan untuk memperkuat distorsi yang semakin akut agar timbul ketidakpercayaan dan kehancuran. Krisis sudah barang tentu dapat menimbulkan rumor, isu, provokasi, argumentasi emosional dan tidak berdasar yang dapat menimbulkan kerusakan (*damage*) dan letupan terhadap sendi-sendi dasar berorganisasi dan bermasyarakat.

Analisis terhadapnya dapat dilihat dari segi lingkup (*magnitude*), berapa lama krisis tersebut berlangsung

(*duration*), faktor yang menjadi penyebab (*locus of cause*), tanggung jawab (*locus of responsibility*), jenis respons (*emergency respon*) dan persoalan perbaikan (*restoration/resolution*) (Heath and Millar, 2004: 4).

Masalahnya adalah bahwa krisis sering tidak memberi tanda-tanda awal atau kurang segera direspons dengan tindakan-tindakan yang mendasar. Kenapa demikian? Karena banyak pihak dikelabui oleh sikap percaya diri yang berlebihan terhadap kemampuan mengatasi persoalan yang muncul.

Selama tahun 1997 di berbagai daerah telah terjadi kerusuhan antara lain, terjadi Sanggau Ledo di Kalimantan Barat, Situbondo di Jawa Timur, kerusuhan di Tasikmalaya dan Rengasdengklok di Jawa Barat, kerusuhan yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, dan kerusuhan Tanah Abang di Jakarta dan seterusnya. Pihak militer dan Komnas HAM menilai bahwa kerusuhan yang terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya, ada aktor intelektual yang menggerakkannya. (*Kompas*, 8 Januari 1997; Birowo: 2002)

Ada pula analisis yang menjelaskan bahwa kerusuhan-kerusuhan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang dihubungkan oleh pihak ketiga yang mencerminkan permainan dari para elite politik⁶. Sementara itu, Komisi Nasional HAM juga menyatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan itu terjadi karena semakin lebarnya kesenjangan ekonomi dan adanya ketidakadilan politik serta hukum⁷.

Akumulasi tekanan terhadap Orde Baru semakin meningkat sudah dapat dilihat sepanjang tahun 1996 (Liddle and Mallarangeng, 1997). Awal tahun 1996, sangat jelas bahwa oposisi anti Presiden Soeharto telah terbentuk, dengan PDI Megawati Soekarnoputri sebagai komponen utama, Abdurrahman Wahid yang memiliki kedekatan

6 *Kompas*, 19 Februari 1997

7 *Kompas*, 17 April 1997

Nahdlatul Ulama, Muchtar Pakpahan dengan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Goenawan Mohammad dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) serta Partai Rakyat Demokratik sebagai kelompok oposisi yang yang dimotori Budiman Sudjatmiko.

Pada tahun 1996 pula, Sri Bintang Pamungkas mendirikan sebuah partai politik yang tidak pernah diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan nama Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Bintang menantang Soeharto dalam sebuah pemilihan presiden langsung yang ia nyatakan pada bulan Oktober 1996, menolak Pemilihan Umum tahun 1997 dan menolak Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia (Pamungkas, 2008).

Pada tahun 1997, pemilihan umum diselenggarakan guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga legislatif yang kemudian akan bersidang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih serta menetapkan presiden dan wakil presiden.

Ada keinginan kuat Golkar untuk mengembalikan perolehan suara yang turun pada Pemilihan Umum pada tahun 1987 yang mendapat 73 persen yang turun pada Pemilihan Umum tahun 1992 menjadi 68 persen (Liddle and Mallarangeng, 1997). Obsesi sangat kuat diperlihatkan oleh Ketua Umum Golkar Harmoko, yang bermaksud mengembalikan penurunan 5 persen tersebut pada Pemilihan Umum pada tahun 1997.

Keinginan ini menimbulkan berbagai perlawanan karena cara-cara yang digunakan dinilai tidak adil yang datang dari Megawati Soekarnoputri yang pada mulanya secara terbuka mengajak golput (golongan putih) kemudian berubah untuk ikut, tetapi mesti mengawasi jalannya pemilihan dengan dibentuk dan memperbanyak saksi. Fenomena Megabintang dan masalah pengecatan warna

kuning bagi tempat atau fasilitas umum yang diperintahkan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo yang dikenal kuningisasi menjadi wacana dan konflik yang tajam⁸.

Wacana ini memperlihatkan front terbuka yang men-sinyalir adanya pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan pandangan. Presiden Soeharto sendiri mengingatkan untuk mewaspadaikan kelompok yang menghendaki kerusuhan⁹; di Jakarta dibuat Posko Kewaspadaan Nasional yang ditempatkan di enam Kodim yang diresmikan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyoso; di Yogyakarta ada 24 mahasiswa yang ditangkap di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada yang berdemonstrasi dan mengajak memboikot pemilihan umum. Mereka menamakan dirinya sebagai Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia¹⁰. Aparat keamanan menangkap mereka karena mereka menghasut untuk memboikot pemilihan umum. Dalam poster mereka tertulis: *Pemilu No, Boikot dan Golput Yes*.

Pada Maret 1997, di Kabupaten Boyolali, Presiden Soeharto menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan turun dari jabatan selaku presiden. Ia tidak akan mempertahankan jabatan yang diemban selama ini asalkan semua itu ditempuh melalui cara-cara yang konstitusional. Dalam kesempatan itu, Soeharto mengatakan bahwa siapa pun dalam persoalan ini yang melanggar hukum, ia tak segan-segan untuk "menggebuk" betul-betul¹¹.

Pernyataan itu muncul justru di tengah berbagai dukungan bagi Soeharto agar ia menjabat sebagai presiden untuk masa bakti 1998 sampai 2003¹²; dukungan dari Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi

8 *Kompas*, 26 Februari 1997

9 *Kompas*, 3 April 1997

10 *Kompas*, 3 April 1997

11 *Kompas*, 1 Maret 1997

12 *Kompas*, 2 Januari 1997

Selatan¹³; dukungan dari Organisasi Kemasyarakatan Taman Iskandar Muda¹⁴; dukungan dari ABRI dan dukungan Golkar, Kosgoro, dan pandangan-pandangan masyarakat secara luas yang menginginkan Presiden Soeharto memimpin kembali.

Tarik ulur pencalonan Soeharto tersebut mengemuka di dalam bingkai isu lain seperti usia Soeharto yang telah mencapai usia 77 tahun¹⁵, isu kesehatan¹⁶; harapan Presiden Soeharto agar tidak mengkultuskan dirinya¹⁷, soal kepemimpinan sipil dan militer¹⁸; dan seruan untuk merenungkan kembali pencalonannya dirinya¹⁹.

Di saat wacana tentang calon presiden yang hanya bertumpu pada figur Soeharto, Amien Rais menyatakan kesediaan dan siap menjadi calon presiden. Ini terjadi di tengah spekulasi dari berbagai pernyataan Soeharto sendiri untuk mempertimbangkan kembali apakah ia pantas menjadi presiden padahal usianya telah 77; apakah benar rakyat menghendaki dirinya kembali menjadi presiden; himbauannya agar jangan mengkultuskan dirinya; serta pernyataan Siti Hardiyanti Rukmana yang secara pribadi tidak menghendaki ayahnya menjadi presiden kembali untuk periode 1998 sampai 2003.

Tahun 1998 tanda-tanda krisis semakin jelas ketika fundamental ekonomi Orde Baru mulai goyah dan tidak mampu mengatasi krisis moneter. Ketika krisis keuangan terjadi di Thailand di sekitar bulan Mei 1997, Pemerintah sangat yakin bahwa krisis *baht* tidak akan berpengaruh pada rupiah. Rupiah di pasar uang spot antarbank pada bulan yang sama di kisaran Rp 2.440-Rp 2.442 per dollar

13 *Kompas*, 10 Maret 1997

14 *Kompas*, 18 Maret 1997

15 *Kompas*, 3 April 1997

16 *Kompas*, 4 April 1997; *Kompas*, 19 April 1997

17 *Kompas*, 21 April 1997; *Kompas*, 15 Oktober 1997

18 *Kompas*, 9 September 1997

19 *Kompas*, 20 Oktober 1997

AS²⁰. Di bulan Agustus, nilai rupiah terhadap dollar AS telah menembus Rp. 3.020.

Sementara itu, Bank Dunia dalam laporan tahunannya yang berjudul *Sustaining High Growth with Equity* mengingatkan ancaman memburuknya defisit transaksi berjalan pada tahun 1998 yang mengundang pelarian modal ke luar negeri²¹. Di samping itu, pinjaman utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo bulan Maret 1998 mencapai 9,6 miliar dollar AS.

Ditinjau dari struktur utang luar negeri negara ASEAN yang tercatat pada akhir tahun 1996, utang luar negeri pemerintah sebesar 109,3 miliar dollar AS yang mencapai 48 persen dari Gross Domestic Product (GDP), jauh lebih besar dari utang pemerintah Thailand yang mencapai 76,5 miliar dollar AS yang mencapai 43 persen dari GDP pemerintah Thailand.

Akibat krisis ini, sebanyak 786 pengembang yang merupakan anggota Real Estate Indonesia harus runtuh yang memberi dampak berlipat bagi sistem perekonomian pemerintah Orde Baru. Berbagai proyek strategis mengalami penundaan. Ada 16 bank dilikuidasi, terjadi pengetatan kebijakan keuangan dan naiknya harga-harga bahan pokok makanan yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan bahkan dalam keadaan negatif. Bersamaan dengan itu, muncul tekanan-tekanan keras baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari pihak-pihak internasional yang berkepentingan.

20 *Kompas*, 19 Mei 1997

21 *Kompas*, 26 Juni 1997

Tabel 1
Kronologi Gejolak Kurs Rupiah
Periode Juli- Agustus 1997

No	Kronologi	Deskripsi Situasi
1.	21 Juli	Kurs rupiah mulai dihantam spekulasi terimbas gejolak baht. Sebelumnya kurs rupiah berada di antara Rp 2.450-Rp 2.500 per dollar AS. Tetapi serangan spekulasi 21 Juli menekan rupiah ke Rp 2.650 per dollar AS.
2.	21 Juli-14 Agustus	Kurs rupiah terus bergolak sebagai lanjutan dampak krisis baht.
3.	14 Agustus	Puncak serangan spekulasi yang dipicu kekalutan masyarakat domestik, setelah kegagalan Bank Indonesia melakukan intervensi menjual dollar AS sebesar 1 miliar dollar AS. Setelah gagal, Bank Indonesia melaps kurs dan mengambangkan kurs rupiah di pasar. Cadangan devisa selamat.
4.	15 Agustus	Masyarakat panik dan terus menjual rupiah karena kebingungan dengan situasi kurs mengambang yang baru pertama kali dalam sejarah moneter Indonesia.
5.	16 Agustus	Pidato kenegaraan Presiden Soeharto di DPR
6.	18 Agustus	Kepanikan masih terus terjadi.
7.	19 Agustus	Kurs masih bergejolak dan mencapai puncak. Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad diisukan meninggal.
8.	20 Agustus	Isu bank kalah kliring ditiupkan yang ditebarkan oleh para spekulasi.
9.	21 Agustus	Kurs rupiah kembali ke kurs sebelum 14 Agustus, sebagai dampak dari penyedotan rupiah termasuk penarikan dana BUMN Rp 2 triliun dari sistem perbankan sehingga rupiah langka

Sumber: *Kompas*, 22 Agustus 1997 dengan modifikasi peneliti

Seperti pada tahun 1997, tahun 1998 kerusuhan terjadi di mana-mana, namun intensitasnya lebih masif dan destruktif. Kerugian fisik akibat kerusuhan di Jakarta saja diperkirakan oleh Ginandjar Kartasasmita mencapai Rp 2,5 triliun lebih belum termasuk isinya. Dengan penuh kegetiran, Kartasasmita mengatakan, "Sekarang kita ketambahan beban, yang bagi ekonomi kita berat sekali. Dan saya belum bisa memperkirakan dampak jangka menengah dan jangka panjangnya."

Tercatat untuk kerusuhan di Jakarta ada 4.939 bangunan yang rusak. Sebanyak 4.204 bangunan seperti mal, swalayan, toko, bengkel, hotel, dan restoran rusak. Ada 13 unit pasar juga rusak. Sebanyak 535 bangunan bank juga dirusak massa. Belum kantor swasta, pom bensin, tempat ibadah, rumah penduduk yang dibakar dan dijarah.

Sebelumnya, amuk massa di Medan juga terjadi. Kerusakan dan kerugian menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Klaim Panglima Kodam I/Bukti Barisan (Mayjen TNI Ismed Yuzairi) menyatakan kerusuhan yang terjadi di Medan sudah bersifat rasialis, brutal, dan anarkis. Dalam kerusuhan tersebut, setidaknya ada 168 ruko dan 8 unit mobil dirusak dan dibakar massa. Kejadian-kejadian serupa juga terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Padang, Solo, dan Ujungpandang²².

Tekanan-tekanan lain muncul dari demonstrasi mahasiswa yang juga terjadi di mana-mana. Sering kali aksi ini berakhir ricuh dengan aparat keamanan karena mahasiswa memaksakan diri turun ke jalan. Sementara dalam perspektif aparat keamanan, bahwa setiap aksi demonstrasi turun ke jalan, dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dan berpotensi menimbulkan kerusuhan dan dimanfaatkan pihak ketiga. Jalanan kejadian dan peristiwa

22 *Kompas*, 6 Mei 1998

satu dengan peristiwa yang lain membawa situasi krisis yang sangat kompleks.

Seperti yang telah diuraikan, bahwa proses demokratisasi dapat dipicu oleh sejumlah faktor. Faktor ekonomi tidak dapat dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan proses tersebut secara utuh. Namun, memang harus diakui bahwa stagnasi dan kemorosotan di bidang ekonomi, menimbulkan krisis multidimensional.

Para pengamat melihat akar permasalahan ini umumnya mengklasifikasikan ke dalam dua hal utama. Pertama, menyangkut defisiensi fundamental. Misalnya Thailand, beberapa akar permasalahannya dimainkan oleh masalah-masalah makroekonomi tradisional khususnya defisit anggaran berjalan. Defisiensi ini berasal dari interaksi antara institusi keuangan yang lemah dengan besarnya arus modal yang masuk (*large capital inflows*). Berdasarkan situasi ini, terdapat praktik pemakaian modal tersebut secara keliru, investasi yang berlebihan pada proyek-proyek yang tidak produktif dan sarat dengan masalah *moral hazard*.

Kedua, terdapat masalah struktural dan makroekonomi. Krisis secara luas terjadi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari kepanikan finansial. Paling banyak, negara-negara yang kena dampak krisis adalah mempunyai rasio yang tinggi terhadap utang jangka pendek terhadap produk domestik bruto.

Ciri yang membedakan krisis Asia adalah luasnya masalah makroekonomi yang menyebar. Seperti diketahui bahwa negara-negara yang terkena krisis, arus modal yang masuk sangat menggembirakan. Korea pada tahun 1990-an arus modal yang masuk berkisar 3 persen dari GDP (*Gross Domestic Product*) atau produk domestik bruto.

Malaysia memiliki arus modal yang masuk sebesar 12,1 persen dari GDP, Indonesia sebesar 3,5 persen dan Thailand dan Filipina masing-masing 9,5 persen dan 3,3 persen dari GDP-nya (Berg, 1999). Arus modal yang masuk ini sering diasosiasikan dengan "booming" investasi bagi negara-negara tersebut. Besarnya investasi yang umumnya berasal dari pinjaman tidak disertai dan didukung regulasi institusi yang kuat.

Struktur keuangan korporat yang ada menciptakan sejumlah masalah-masalah pemerintahan, antara lain banyaknya kasus konsentrasi kepemilikan yang tinggi, rendahnya daya saing dalam pasar uang, pengawasan yang tidak efektif dan keterlibatan pemerintah yang mendasar.

Kombinasi kelemahan sektor keuangan dengan arus modal masuk yang kuat menciptakan dua hal yang saling terkait, yakni inefisiensi terhadap investasi dan rapuhnya sektor korporat keuangan. Di Indonesia, pada bulan tahun 1997 secara terbuka diakui bahwa ada sejumlah Bank yang bermasalah. Termasuk adanya upaya mengatur kembali investasi di bidang perumahan. Tanda-tanda krisis keuangan sebenarnya telah muncul pada tahun 1997 ini. Rupiah pada tahun 1997 juga mengalami gejolak. Indonesia, Korea, dan Thailand umumnya juga menghadapi masalah berkaitan dengan rasio cadangan modal terhadap utang jangka pendek.

Aksentuasi, sifat keberlangsungan, dan kompleksitas krisis yang terjadi turut dibentuk oleh iklim komunikasi politik. Ini dapat ditelusuri dari berbagai jejak pernyataan tentang kondisi tersebut. Misalnya, imbauan agar pemberitaan menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas²³; kounter pernyataan yang menjelaskan bahwa keadaan Indonesia tidak seburuk yang diberitakan di surat kabar²⁴;

²³ *Kompas*, 7 Maret 1997

²⁴ *Kompas*, 5 April 1997

peringatan dari pemerintah agar mengendalikan diri dalam menghadapi isu yang menimbulkan saling curiga. Dengan demikian, secara jelas krisis membutuhkan dua hal sekaligus, yakni persoalan teknis manajerial dan kebutuhan komunikasi untuk menghadapi bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat distortif dan agitatif.

Dimensi Retorika Reformasi

Sejarah tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi spekulasi terhadap jejak-jejak tersebut dapat didasarkan pada pola-pola yang dideteksi melalui jejak-jejak komunikasi. Kita dapat belajar sejarah melalui apa yang pernah diucapkan pada masa lalu. Bowers and Ochs (1971) merumuskan retorika, agitasi, dan kontrol dipakai sebagai alat untuk mengamati konflik sosial yang terjadi selama gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an atau gerakan antiperang Vietnam tahun 1970-an yang tentu saja dapat digunakan untuk mengkaji reformasi di Indonesia.

Retorika diartikan sebagai "*the rationale of instrumental symbolic power*". Sedangkan agitasi diartikan sebagai orang-orang yang berada di luar pengambilan keputusan normal menyuarakan perubahan sosial dan melawan pengambil kebijakan yang umumnya menggunakan kekuatan simbolik tadi. Kontrol merujuk pada respons terhadap pengambilan keputusan terhadap agitasi (Saunders, 2004: 142).

Dalam hal ini, kedua belah pihak, yang saling bertenangan harus mengasumsikan bahwa apa pun jenis agitasi yang dilakukan akan menghasilkan dampak buruk. Kedua kelompok yang bersaing itu harus mempersiapkan langkah-langkah balik dalam menghadapi agitasi terhadap jenis dan tipe "*the rationale instrument of symbolic powers*".

Dengan posisi itu, efektivitas kontrol ditentukan oleh kekuasaan (*power*), ideologi, dan retorika. Seberapa jauh masyarakat dapat dihasut untuk menerima atau menolak berbagai informasi yang berbaur dengan isu, ditentukan oleh kontrol. Kalau kontrol bersifat efektif terhadap agitasi, hasutan tidak dapat berjalan secara luas. Tetapi jika kekuatan agitasi sangat kuat, kontrol tidak dapat bekerja, maka hasutan akan mudah diterima (Saunders, 2004: 144-145).

Dalam satuan entitas terkecil, apakah individu, kelompok, organisasi hingga sampai pada pemerintah, krisis apalagi yang bermuatan konflik menimbulkan ketidaknyamanan tertentu karena muncul banyak sekali hasutan-hasutan. Bagi Orde Baru, krisis moneter dan politik membutuhkan kontrol dan pengelolaan guna menjamin keberlangsungan dari sistem organisasi pemerintahan itu sendiri, dihadapkan pada bentuk-bentuk agitasi.

Krisis membentuk keadaan darurat yang memerlukan satu atau lebih pihak yang bertanggung jawab yang bertindak melakukan kontrol dalam menghadapi ketidakpastian dan dalam upayanya memenangkan kepercayaan kunci terhadap masyarakat serta memenuhi standar etik mereka (Heath, 2004: 167). Karena itu, di dalam menghadapi krisis diperlukan pilihan-pilihan untuk memerangi atau meredakan kerusakan. Dalam pendekatan retorika, bahwa tanggung jawab terhadap krisis, yang meliputi seberapa luas dampak yang ditimbulkan dan seberapa lama sifat keberlangsungan krisis, sebenarnya merupakan kontestasi terhadap bentuk komunikasi yang mengemuka (Heath and Millar, 2004: 5).

Hal ini tampak pada berbagai bentuk perkembangan komunikasi dan penyajiannya sebagai bagian respons dan pernyataan terhadap hasutan-hasutan dalam krisis. Peranan

informasi, pembingkai, dan interpretasi memainkan peran penting. Masalah retorika muncul ketika keadaan darurat seperti kejadian-kejadian kerusuhan, pembakaran, fluktuasi mata uang yang tidak lazim dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang serta mendelegitimasi pemerintah membutuhkan sebuah pernyataan dari satu atau lebih mereka yang ada di dalam organisasi itu (Bitzer, 1968: 6).

Retorika memberi ciri terhadap proses-proses komunikasi dan usaha-usaha yang mendefinisikan bersama tentang makna-makna di seputar kejadian yang membantu orang-orang yang dipengaruhi atau melakukan pernyataan balik terhadap orang-orang yang ingin memengaruhi. Bentuk retorika itu, dengan demikian dapat digunakan bagi persiapan, penampungan, dan perbaikan terhadap kejadian-kejadian yang merusak.

Elite pemerintah memerlukan penanganan yang bersifat teknis dan penanganan yang bersifat simbolik. Orang menggunakan retorika untuk memberikan atribusi pada penyebab dan motif dari setiap peristiwa. Respons terhadap peristiwa dituntun oleh konteks di mana krisis terjadi dan tindakan apa yang tepat bagi situasi yang dihadapi.

Respons ini dapat mencakup *blame placing* apakah hal ini dilakukan secara jujur atau akurat, tetapi juga dapat merupakan *blame accepting*. Dalam situasi tertentu kadang-kadang menerima kesalahan dan meminta maaf dapat meredakan krisis (Heath and Millar, 2004). Namun, penerimaan diri sebagai pihak yang bersalah dapat pula menjadi pintu masuk yang lebih besar bagi penyerangan yang lebih tajam dan keras terhadap situasi yang terjadi.

Seperti pada semua peristiwa—krisis merupakan subjek interpretasi. Semua pihak yang terlibat cenderung melakukan interpretasi terhadap peristiwa, mengevaluasi, dan

mengambil kesimpulan. Masalah retorika kemudian memfokuskan pada platform terhadap fakta, nilai, dan kesimpulan bahkan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diumumkan secara resmi untuk mencapai restorasi, mitigasi (meredakan) dan penanggulangan. Kompetisi terhadap interpretasi seperti itu yang terjadi di dalam dan di luar organisasi pemerintah memperluas tantangan yang membentuk masalah retorika (Heath and Millar, 2004:11).

Sebuah krisis tidak hanya sebuah interpretasi terhadap sebuah naratif komunikasi yang merupakan aktivitas normal bagi suatu kegiatan, misalnya bagi pemerintah. Dalam konteks naratif itu, dalam keadaan darurat diperlukan pengelolaan tindakan dan pernyataan-pernyataan retorika atau mendemonstrasikan secara persuasif yang menunjukkan organisasi memahami krisis dan mempunyai sumber daya seperti kapasitas intelektual, manajerial, finansial, retorika, dan etik yang berguna untuk memperbaiki kembali sehingga menjadi sesuatu yang dapat diterima. Setiap naratif terdiri dari dramatisasi terhadap pola dasar peran organisasi (Mitroll and Pearson, 1993:11).

Nasib pahlawan atau tragedi dikembangkan melalui sebuah pernyataan balik yang suksesif, setiap pernyataan balik dapat merepresentasikan prinsip-prinsip yang berbeda dan setiap prinsip tersebut sedemikian rupa mengarahkan pada kulminasi berikutnya (Heath, 2004: 172-173).

Jika hal ini dilihat dalam gagasan dramatik, tindakan-tindakan aktor berhubungan dengan karakteristik aktor tersebut. Langkah suksesif terhadap plot drama dapat direduksi ke dalam perkembangan gagasan, sedangkan aktor dan konteks di mana kejadian tersebut berlangsung merepresentasikan personalitas dan motivasi.

Motif memberikan kerangka kerja di mana anggota-anggota pemerintah dapat mengevaluasi potensi organisasi

mereka bagi bencana, tragedi ataupun krisis. Konsep hierarki dan rasionalisasi ilmiah menciptakan dasar teoretik bagi model antisipatif terhadap krisis manajemen. Jantung dramatisme manusia adalah dorongan alamiah bagi kesempurnaan.

Seperti yang dikatakan Ruekert (1982) bahwa dalam sensitivitas secara umum, hierarki adalah jenis tatanan apapun, tetapi lebih tepat ini semacam gradasi, struktur nilai di mana objek-objek, pekerjaan-pekerjaan, orang-orang, tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan memiliki hierarki atau ranking (Olaniran and Williams, 2004: 76). Karena individu yang berjuang ingin meningkatkan hierarki yang secara simultan bertarung dengan pihak yang mencegah kepantasan mereka di dalam tatanan tersebut.

Secara umum naratif komunikasi dikenal sebagai cara menyusun dan menyajikan pandangan terhadap realitas dunia melalui deskripsi sebuah situasi tertentu yang mencakup karakter, tindakan, dan konteks/setting (Foss, 1996:400). Ia adalah bingkai terhadap pengalaman, berfungsi sebagai argumen terhadap pandangan dan dapat digunakan untuk memahami dunia melalui cara tertentu.

Melalui cara ini, dunia dan tindakan orang-orang mencerminkan sesuatu yang logis yang menjelaskan apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang membuat terjadi dan kapan terjadi serta bagaimana seharusnya merespons kejadian tersebut. Dipandang dalam sudut perspektif ini, analisis retorika yang bertumpu pada cerita-cerita di seputar krisis ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintah Orde Baru mengasumsikan bahwa orang-orang memilih di antara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang menjelaskan sebuah kejadian tertentu (Heath, 2004).

Dengan demikian, tema komunikasi sebuah kelompok dapat menjadi pernyataan balik terhadap tema komunikasi

kelompok yang lain bahkan dapat merupakan koreksi terhadap tema komunikasi yang lain. Cerita yang berhubungan dengan krisis yang disajikan oleh pemerintah misalnya, dapat ditolak karena cerita itu dinilai berbeda oleh elemen-elemen masyarakat kunci. Dengan demikian, naratif komunikasi memberikan sebuah praktik komunikasi yang rasional sebab bentuk komunikasi ini sangat erat berhubungan dengan cara-cara orang-orang berpikir dan bertindak (Heath, 2004: 175). ❖



BAB 5

REFORMASI: PERTARUNGAN BAHASA POLITIK

Kontestasi Makna Reformasi

Reformasi sebagai istilah dalam periode waktu tertentu telah memunculkan perdebatan yang melibatkan berbagai aktor politik yang sangat luas. Sementara kontroversi terjadi, karena mereka dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan fakta, nilai, dan kebijakan (Vancil, 1993:26).

Kontroversi terjadi dikarenakan tidak satu pun yang terlibat, mampu membebaskan diri sepenuhnya dari masalah apa yang benar dan apa yang salah, yang baik dan apa yang jelek, yang ideal dan apa yang cacat, serta apa yang etik dan yang tidak etik dalam suatu lingkup sosial yang luas, di mana kenyataan itu tampak sebagai hal yang tidak pernah lengkap dan benar-benar pasti. Dengan demikian, secara inheren, melekat segi ketidaksepakatan terhadap maknanya.

Apakah reformasi sebagai gerakan politik atau gerakan moral. Apakah reformasi sebagai tujuan atau sebagai

tindakan. Apakah reformasi sebagai epos sejarah atau semata-mata sebagai alat serta lain-lain hal yang menjadikan banyak pihak tidak menyepakatinya?

Dalam konteks ini, reformasi, tidak dapat dipisahkan dari perebutan pengaruh dan kendali terhadap masyarakat secara luas dalam upaya mempertahankan kekuasaan atau mengubah distribusi kekuasaan yang baru. Artinya, ada pihak-pihak yang mengajukan usulan perubahan, memberi evaluasi dan melakukan kritik, mengembangkan isu yang lebih luas dan kompleks. Namun, ada pula pihak-pihak yang mengingatkan bahwa usulan perubahan itu, harus berada dalam koridor konstitusi yang telah disepakati bahkan mungkin menyatakannya sebagai hal yang tidak berlandaskan sama sekali.

Jadi, sangat penting menjelaskan pertentangan antara pihak-pihak yang bersaing itu. Sementara pertarungan ini sendiri terjadi dalam ruang lingkup politik dan kekuasaan. Persaingan ini dipengaruhi dan memengaruhi kekuatan-kekuatan politik yang secara nyata menginginkan perubahan atau berusaha mempertahankannya.

Konteks Pertarungan Kepentingan

Tahun 1997-1998 merupakan fase genting bagi Orde Baru terkait munculnya tuntutan perubahan. Meskipun, keberhasilan gerakan itu masih disangsikan. Mochtar Pabottingi (2008) menyebut gerakan ini sebatas "upaya" reformasi. Sejak 21 Mei 1998 yang dipandang sebagai tonggak perubahan pun, tidak pernah ada *clean regime change* seperti yang dilakukan Orde Baru terhadap Orde Lama.

Pada tahun-tahun tersebut, aktivitas-aktivitas politik yang tengah berlangsung menjelaskan dinamika politik khususnya bagaimana kepentingan-kepentingan didefinisi-

kan. Politik, seperti dikatakan Paul Chilton (2004) memiliki keberagaman situasi dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Sebagai "*struggle for power*" politik memperlihatkan aktor-aktornya mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Kegiatan politik juga mencakup rekonsiliasi terhadap perbedaan melalui interaksi, argumentasi, dan persuasi. Jadi, komunikasi memegang peran sentral bagi politik itu (Hague, Harrop and Breslin, 1998:3-4). Proses-prosesnya pada hakikatnya adalah persoalan persuasi dan tawar-menawar. Sebab itu mengapa praktik komunikasi menghasilkan efek terhadap otoritas, kekerasan, legitimasi, konsensus, kerusuhan atau pun konflik.

Tahun 1997 seperti yang dikatakan Presiden Soeharto merupakan tahun politik. Ini ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang panas, transisi politik penuh intrik, integrasi masyarakat global, krisis moneter, demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan. Periode ini, memberi tensi yang menunjukkan bentuk bahasa politik yang mengemuka, mendistorsi sumber legitimasi Orde Baru, menggeser kepercayaan terhadap Soeharto dan akhirnya memaksanya berhenti.

Jejak-jejak pesan yang ada menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain saling bersaing dan bertentangan, sekaligus menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk melakukan seleksi, refleksi, dan defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Bab ini, secara khusus dimaksudkan memberi analisis terhadap masalah yang mencerminkan pertarungan kepentingan melalui bahasa politik. Pertama, pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden masa bakti 1998-2003. Kedua, krisis ekonomi yang memaksa pemerintah meminta bantuan kepada IMF. Ketiga, aksi dan demonstrasi

mahasiswa. Keempat, kerusuhan-kerusuhan massa. Kelima, posisi ABRI dalam perubahan politik yang terjadi.

Pemilihan Presiden: Ambisi atau Kearifan?

Pada pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan bulan Mei 1997, Golkar memenangkan pemilihan dengan mengantongi 74,51 persen suara yang dinyatakan sebagai kemenangan mayoritas. Meski dimaknai sebagai kesuksesan, tak urung, pemilu ini menampilkan wajah buram yang diwarnai dengan kerusuhan yang terjadi di Solo dan Pekalongan¹.

Pemilu bagi Orde Baru merupakan krida (kerja dan perbuatan) nasional dan konstitusional yang merupakan amanat UUD 1945. Pemilu merupakan alat politik untuk memantapkan siklus dan mekanisme kepemimpinan nasional serta menyegarkan strategi dan kebijakan pembangunan nasional². Seperti yang dikatakan Harmoko (Ketua Umum Golkar) bahwa tolok ukur keberhasilan Golkar dalam pemilu itu diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, tetap terjaminnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tetap terjaminnya kelanjutan pembangunan nasional. Ketiga, tetap terjaminnya kepemimpinan nasional³.

Di awal 1997 kursi kepresidenan itu sudah panas. Pada Maret 1997, usai meresmikan Asrama Haji Donohudan Boyolali, Soeharto mengatakan bahwa kalau memang DPR menganggapnya tidak "becus", MPR dapat menariknya melalui Sidang Istimewa. Ia tidak keberatan turun dan tidak akan mempertahankannya, asalkan ditempuh melalui cara-cara konstitusional. Namun, bila hal ini dilakukan dengan

1 *Kompas*, 10 Oktober 1997

2 *Kompas*, 26 Februari 1997

3 *Kompas*, 19 Februari 1997

melanggar hukum, ia tidak segan-segan akan menggebuknya⁴.

Dengan posisi sebagai sentral dari banyak kepentingan, pesan ini menimbulkan polemik. Abdurrahman Wahid melihatnya lebih sebagai cerminan kekhawatiran⁵. Ada pula yang mengartikan "gebuk" sebagai cara untuk menghindari pengertian represif dan keras yang sudah lazim distigmatisasikan kepada Orde Baru⁶.

Pada gilirannya apa yang disampaikan Soeharto itu, telah meningkatkan pernyataan provokatif. Banyak aparat dalam pesan-pesan mereka menuding kelompok-kelompok inkonstitusional itu sebagai pengacau negara, disintegrator bangsa, dan orang-orang yang melakukan seruan-seruan menyesatkan.

Pada pidato yang disampaikan di hari Ulang Tahun Kostrad ke-36, Soeharto mengingatkan bahwa di dalam masyarakat tetap akan ada golongan-golongan yang aksi-aksinya menimbulkan disintegrasi nasional. Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang mengizinkan Bergeraknya golongan-golongan tersebut secara bebas dan leluasa⁷.

Di hadapan para Manggala Angkatan XV dan XXVI di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Soeharto kembali menyatakan bahwa banyak kelompok masyarakat yang kurang memahami mekanisme kepemimpinan di Indonesia yang berlangsung dalam pola lima tahunan. Mekanisme ini tidak memilih orang per orang secara langsung berdasarkan pada program yang ditawarkan oleh calon itu sendiri, melainkan disusun sebagai hasil musyawarah. Karena itu, tak ada satu lembaga apalagi perorangan yang mampu menghadapi perubahan secara sendirian.

4 *Kompas*, 1 Maret 1997

5 *Kompas*, 7 Maret 1997

6 *Kompas*, 5 Maret 1997

7 *Kompas*, 7 Maret 1997

Dalam perkembangannya, Golkar, ABRI, dan Birokrasi secara terbuka membicarakan kepemimpinan nasional ini. Syarwan Hamid memastikan bahwa ABRI sepakat dengan rakyat untuk mencalonkan Soeharto untuk periode 1998-2003⁸. Doa politik dan kebulatan tekad muncul dengan berbagai nuansa kepentingan yang melatarbelakanginya. Dewan Pimpinan Majelis Dakwah Indonesia menyatakan bahwa hendaknya kepemimpinan nasional Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berlanjut⁹.

Hal yang sama dilakukan Kosgoro dan KNPI serta akhirnya semakin lengkap ketika Harmoko di berbagai kesempatan memuji kepemimpinan nasional yang ada. *Kompas* pun memberi pengakuan bagi Soeharto ini. Dituliskan bahwa:

Masuk akal, baik karena periode pemerintah yang lama, namun juga karena posisi dan peranannya sebagai figur sejarah bagi bangsa Indonesia, amatlah sentral kedudukan serta peran Pak Harto. Justru berkat posisi sentral dan periode pemerintahan yang cukup lama, kita telah sempat membangun sistem, kelembagaan serta budaya khususnya budaya politik yang memperkuat kebiasaan musyawarah untuk mufakat.

Di luar pesan itu, pandangan kritis yang menilai belum ada mekanisme yang tepat yang mampu memunculkan kader-kader pemimpin yang tangguh juga menyebar¹⁰. Menurut Siswono Yudo Husodo dalam banyak hal demokrasi musyawarah mufakat, yang terjadi mufakat terlebih dahulu dari pada musyawarahnya¹¹.

Perdebatan tentang suksesi semakin berkembang, ketika Soeharto menyatakan untuk mempertimbangkan pen-

8 *Kompas*, 2 September 1997

9 *Kompas*, 2 Januari 1997

10 *Kompas*, 7 Januari 1997

11 *Kompas*, 28 Agustus 1997

calonan dirinya. Pertama, agar pencalonan itu perlu memperhatikan usianya yang telah mencapai usia 77 tahun. Kedua, perlu memikirkan adanya tuduhan bahwa pencalonan ini merupakan rekayasa untuk mempertahankan *status quo* atau menjadikan presiden seumur hidup¹².

Di lingkaran terdekat kekuasaan Soeharto, mereka mengabaikan anjuran tersebut. Menurut mereka, pernyataan itu tidak bisa diartikan jika Soeharto tidak mampu dan tidak mau dicalonkan kembali¹³. Hari Sabarno mengatakan bahwa kemampuan Presiden Soeharto tak perlu diragukan. Daya nalarnya masih logis¹⁴. Sedangkan Harmoko menjelaskan bahwa Golkar tidak akan menafsirkan pernyataan tersebut sebagai isyarat tertentu. Golkar sudah memiliki kriteria dan patokan¹⁵.

Dalam pemikiran Handrawan Nadesul¹⁶ bahwa ucapan Soeharto itu memuat makna yang menyangsikan biopsikososial selain refleksi kerendahan hati dan sekaligus buah kerisauan psikopolitik. Dari sekian dimensi itu, hanya dimensi biologis yang tidak mungkin diselesaikan dengan keputusan politik.

Menurut Nadesul, karisma dan popularitas sering melebihi kapasitas. Cacat moral terabaikan oleh riwayat prestasi. Gangguan kesehatan sering dihalalkan sebagai faktor yang kurang dominan bila dibandingkan dengan kewibawaan dan kenegarawanan. Di atas kondisi itu, ada kepentingan-kepentingan yang tampak ingin dipertahankan. Dari pendapat yang sedemikian sarat dengan persaingan, sebagian besar mereka yang berkuasa memastikan untuk mencalonkan Soeharto untuk periode tahun 1998 sampai 2003.

12 *Kompas*, 3 April 1997

13 *Kompas*, 3 April 1997

14 *Kompas*, 3 April 1997

15 *Kompas*, 4 April 1997

16 *Kompas*, 12 April 1994

Di samping soal usia, Soeharto juga mengajak untuk tidak mengkultuskan dirinya. Hubungan kultus individu, dengan nilai keagamaan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain kultus individu dengan corak kekuasaan, saling berpengaruh satu dengan yang lain¹⁷.

Lagi-lagi, pesan ini tidak mengubah pendirian. Ismail Hasan Metareum bahkan mengatakan pengkultusan ini terlepas dari masalah pencalonan dan hal ini berbeda dengan pencalonan itu sendiri. Syarwan Hamid mengatakan bahwa ia tidak melihat sebagai sinyal. Harmoko berpandangan bahwa kultus individu dan kepercayaan rakyat adalah dua hal yang berbeda. Katanya bahwa pernyataan itu tidak mengubah keputusan Golkar untuk mencalonkannya sebagai presiden¹⁸.

Di tengah hasrat besar itu, Frans Seda melihat sisi lain soal suksesi kepemimpinan nasional tersebut. Seda mengatakan bahwa proses kultus individu sesuai pengalaman politik sejarah bangsa, bisa berawal dari ambisi perorangan yang dipaksakan atau diindroktinasikan kepada masyarakat politik. Namun hal ini juga dapat berawal dari masyarakat atau gerakan politik yang dipaksakan pada seorang pemimpin yang dijadikan simbol dari gerakan sistem politik.

Seda menilai bahwa kultus bukan sekadar masalah ajaran agama. Bahkan kultus individu merupakan embrio kediktatoran. Kultus individu dapat berfungsi sebagai simbol kekuasaan antidemokrasi¹⁹. Dalam pencermatannya, justru ketika Soeharto telah menyatakan tidak ingin dikultuskan, reaksi elite politik yang berkuasa tidak menanggapi sebagai nilai moral atau koreksi terhadap budaya politik yang berlaku.

17 *Kompas*, 24 April 1997; *Kompas*, 15 Oktober 1997

18 *Kompas*, 16 Oktober 1997

19 *Kompas*, 23 Oktober 1997

Mereka lebih disibukkan melakukan pengamanan terhadap pencalonan presiden dengan mengatakan bahwa ucapan itu jangan disalahartikan sebagai penolakan. Sebuah cara, yang memang akan sangat memengaruhi nasib politik, kedudukan, dan rezeki dari banyak orang di lingkaran kekuasaan itu sendiri²⁰.

Wacana kepemimpinan nasional sempat dikejutkan oleh pernyataan Juwono Sudarsono yang menyangsikan peluang sipil menerima tampuk kepemimpinan nasional²¹. Berbagai kalangan, mengoreksinya bahwa hal itu tidak benar. Ada yang menilai bahwa dikotomi antara sipil dan militer adalah sesuatu yang tidak baik. Sementara yang lain mengingatkan bahwa di dalam demokrasi Pancasila tidak ada sesuatu yang eksklusif. Tetapi bagaimana pun ruang lingkup ketidaksepakatan itu, secara tersamar dikotomi antara sipil dan militer itu memang ada²².

Meskipun, soal usia dan kultus individu telah diingatkan, nyatanya suksesi hanya di sekitar pribadi Soeharto. Di tengah kebekuan suksesi itu, Amien Rais mengatakan: "Insya Allah saya berani karena kita mempunyai cita-cita yang sama." Sebelumnya Sri Bintang Pamungkas telah menyerukan pemilihan presiden langsung pada bulan Oktober 1996 untuk bersaing dengan Soeharto bahkan melakukan penolakan terhadap Pemilu 1997 (Pamungkas, 2008).

Ada catatan menarik dari Franz Magnis-Suseno berkaitan kesediaan Rais tersebut. Suseno mengatakan bahwa Rais tidak bicara tentang situasi kepresidenan saat itu, melainkan tentang yang akan datang. Karena itu, ia ingin mendobrak ketabuan di sekitar personalia pimpinan negara. Dalam sudut pandangnya, Rais memiliki keyakinan bahwa

20 *Kompas*, 22 Oktober 1997

21 *Kompas*, 9 september 1997

22 *Kompas*, 9 September 1997

kehidupan politik bangsa Indonesia yang kompleks dan majemuk hanya dapat menjadi mantap kalau kekuasaan dapat dibicarakan secara terbuka, tenang, dan rasional. Dengan kesediaan itu, Rais telah melakukan sesuatu yang penting bahwa mencalonkan diri sebagai presiden adalah sesuatu yang biasa, wajar, dan tidak mengancam siapa-siapa serta tidak perlu dikomentari macam-macam²³.

Rais sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya keinginan apalagi ambisi menjadi presiden atau wakil presiden. Katanya, "Saya hanya ingin mendobrak sesuatu yang selama ini ditabukan. Saya ingin mendobrak dua pintu pencalonan sekaligus"²⁴. Meski kelak ini tidak menjadi dalih lagi ketika di tahun 2004, ia mencalonkan diri sebagai presiden, meskipun gagal. Selalu ada apologia ketika kontradiksi-kontradiksi terjadi.

Kondisi objektif pencalonan presiden periode 1998-2003 jelas mencerminkan budaya politik Orde Baru. Musyawarah untuk mufakat, mekanisme konstitusional, menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan sumber-sumber kekuasaan yang besar yang dimiliki presiden yang secara formal berasal dari ketentuan-ketentuan pokok yang ada di dalam UUD 1945 sendiri, memengaruhi sebagian besar aktor politik dalam mendefinisikan pencalonan presiden.

Pesan-pesan Soeharto sendiri sering diartikulasikan dengan makna yang sumir. Usia yang sudah mencapai 77 tahun dan ketidakinginannya untuk dikultuskan memang tidak berarti Presiden Soeharto sendiri tidak ingin lagi dicalonkan. Sementara pernyataan usia yang 77 tahun dan kultus diri pun sering dipinggirkan dengan wacana kepercayaan dan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta amanat konstitusional.

²³ *Kompas*, 4 Oktober 1997

²⁴ *Kompas*, 12 Januari 1998

Puncaknya, saat Presiden Soeharto menghadiri HUT Golkar yang ke-33 di Balai Sidang, Jakarta. Di hadapan para tokoh utama Golkar, para duta besar negara sahabat yang diundang, dan para pemimpin partai politik negara-negara sahabat, kembali Soeharto mengingatkan soal pencalonannya. Dalam pidato ia menggambarkan implikasi politik yang jelas, ke depan dan terhadap dirinya yang menyangkut kejujuran, kesejatian, dan pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan.

Menurutnya masih ada waktu untuk memikirkan kembali pencalonan itu dari Oktober 1997 sampai Maret 1998. Di tengah harapan besar pendukungnya, Soeharto secara implisit menyangsikan beberapa hal. Pertama, apakah benar rakyat masih mempercayainya. Kedua, jika ya. Apakah benar bahwa kepercayaan itu bukan yang dipaksakan dan semu sifatnya. Ketiga, apakah benar kepercayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Tampak ada kepekaan yang tecermin dari ungkapannya: *ngulad sariro hangrasa wani* yang tidak saja peka, tetapi juga tahu diri. Di dalam pencalonan itu, ia tidak ingin dituduh dengan bermacam-macam tuduhan seperti penghalang suksesi, penghalang regenerasi dan orang tidak tahu diri karena menjadi presiden sampai tujuh kali²⁵.

Dalam kesempatan itu, Soeharto telah menunjukkan jalan bila ia tidak lagi dipercaya dengan mencontohkan model suksesi pewayangan. Ia akan *lengser keprabon mandeg pandito* yang mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan mendidik anak cucu dan cicit agar menjadi orang berguna. Dalam kedudukan yang demikian, kepada masyarakat ia dapat memberi saran, dan kepada penguasa ia dapat memosisikan diri sebagai Tut Wuri Handayani.

25 *Kompas*, 20 Oktober 1997

Pesan ini pada suatu tingkatan tertentu mencerminkan kesiapan Soeharto untuk berhenti, pada sisi lain pesan itu dapat dicurigai sebagai cara Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan saja. Soemitro mengatakan, "Jika kita mencermati pidatonya. Kita akan terharu. Beliau ingin menularkan kepada generasi muda. Dia sudah tahu waktunya kapan untuk selesai, untuk berhenti".²⁶

Seda juga mengatakan bahwa Soeharto telah mengambil jarak untuk membersihkan dari kemungkinan unsur kultus individu dalam pencalonan itu, untuk menguji apakah rakyat benar di dalam dukungan Golkar itu, apakah tidak ada paksaan atau kepercayaan semu. Menurut Seda, justru Soeharto mau mendengar pendapat dan sikap rakyat seluas-luasnya juga dari mereka yang menuduhnya sebagai penghalang suksesi, penghalang regenerasi, dan tidak tahu diri. Tuduhan-tuduhan yang oleh pembantu-pembantunya dianggap subversi dan aksi PKI ini tetap diperhitungkannya sebagai aspirasi dari sebagian rakyat dan masyarakat.

Seda mengatakan bahwa lagi-lagi terdapat diskrepansi antara sikap politik Pak Harto dan para pembantu/elite politik. Misalnya, tecermin dari pernyataan Akbar Tanjung yang menegaskan bahwa permintaan Presiden Soeharto untuk meneliti kembali itu tidak akan menjadikan Golkar mundur dari mencalonkannya. Sementara Harmoko mengatakan, "Saya tidak menangkap satu kata pun atau satu makna pun dari apa yang diucapkan itu menolak pencalonan. Tidak ada."

Dalam rangkaian itu, akhirnya Soeharto menerima pencalonan itu. Kesediaan itu dinyatakan setelah Harmoko, Yogie S. Memet, dan Feisal Tanjung menyampaikan hasil penelitiannya tentang kepercayaan rakyat sebagaimana yang dimintanya²⁷. Kelak kurang lebih dua bulan setelah

²⁶ *Kompas*, 22 Oktober 1997

²⁷ *Kompas*, 21 Januari 1998

Soeharto dilantik sebagai presiden untuk periode tahun 1998-2003, aktor-aktor yang semula begitu meyakinkan dan begitu mendukungnya, justru memintanya untuk mundur dari jabatannya serta menolaknya untuk bekerja sama.

Sebuah cara yang tidak saja mencerminkan bagaimana mereka menyelamatkan diri dalam kondisi kritis, tetapi juga cara bagaimana mereka meninggalkan seorang tokoh dan pemimpin nasional yang menurut mereka adalah negarawan dan mempersatukan bangsa dan negara. Dari jejak pesan-pesan yang tertinggal itu, mereka menggunakan bahasa untuk melakukan seleksi, refleksi, dan defleksi terhadap realitas. Mereka melarikan diri dari apa yang pernah mereka nyatakan dan perjuangkan serta meninggalkan tokoh utama yang mereka perjuangkan sendirian dalam menerima hujatan dan cacian.

Dengan bahasa politik yang apologis, mereka berusaha mencapai kepentingan, mempertahankan kepentingannya, menyerang pihak lawan dan mempertimbangkan diri dengan balutan moral dan rasional. Ini segi pertarungan bahasa politik yang nantinya akan mengarah pada gerakan reformasi di Indonesia secara menyeluruh yang memaksa Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya yang kemudian tidak berbicara lagi di panggung politik hingga meninggal dunia.

Orde Baru-IMF: Sebuah Perlawanan

Sebagaimana dipaparkan bahwa pilar kekuasaan Orde Baru ditopang prestasi ekonomi. Usaha keras Orde Baru terletak pada usaha menyelaraskan antara stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling terkait. Perubahan pada salah satu darinya akan memengaruhi perubahan pada

yang lain. Satu sama lain dapat saling meruntuhkan baik bagi tatanan politik yang telah dibangun ataupun fundamental ekonomi yang telah diletakkan selama kurun waktu 30 tahun.

Orde Baru dalam periode waktu tahun 1997-1998 selain menghadapi suksesi kepemimpinan, dihadapkan pula dengan krisis ekonomi, suatu fase yang menguji apakah sesungguhnya fundamental ekonomi Orde Baru memang kuat. Krisis ekonomi yang terjadi sangat kompleks dan rumit. Bahkan Soeharto mengatakan bahwa di dalam krisis itu, ada latar belakang politik global dan tersembunyi. Krisis moneter tidak hanya semata-mata kegiatan bisnis yang mencari keuntungan yang ditambah dengan *gambling*. Namun dibalik itu, ada tujuan politik yang lebih besar²⁸.

Di awal 1997 diketahui bahwa sistem moneter pemerintah tengah mengalami defisit transaksi berjalan. Untuk tahun anggaran 1996/1997 defisit transaksi berjalan ini mencapai 8,823 miliar dollar AS atau sekitar 4 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Sedangkan pada tahun anggaran 1997/1998 diperkirakan naik menjadi 9,798 miliar dollar AS.

Saleh Afiff (Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan) mengatakan bahwa kondisi ini dapat dikendalikan. Bahkan Mar'ie Muhammad (Menteri Keuangan) memberi komparasi defisit ini dengan negara Malaysia (7-8 persen) dan Thailand sampai 9 persen yang jauh melampaui angka 2 persen.

Kedua menteri tersebut juga menyinggung Debt Service Ratio (DSR), yakni kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran utang berikut bunga terhadap total nilai ekspor. Di sektor pemerintah, DSR mengalami penurunan dari 14,1 persen di tahun 1996/1997 sedangkan

²⁸ Kompas, 10 Februari 1998

di tahun 1997/1998 tinggal 11,8 persen. Namun, hal ini tidak diikuti sektor swasta. Utang swasta cenderung meningkat di tahun 1996/1997 sebesar 15,5 persen menjadi 17,8 persen di tahun 1997/1998. Kondisi ini pada gilirannya memperparah krisis ketika utang sektor swasta jatuh tempo, dollar mengalami kelangkaan dan rupiah terkoreksi sedemikian rupa.

Sejauh itu, krisis moneter memang belum terjadi. Sementara posisi Indonesia di mata Bank Dunia masih dinilai sebagai pengutang terbaik dan menggunakan dana bantuan dengan tepat. Direktur Pelaksana Bank Dunia Gautam S. Kaji menilai bahwa tidak ada alasan untuk mengubah posisi Indonesia dan pemerintahan di mata Bank Dunia²⁹.

Ini memberi sentimen positif bagi transaksi di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang tembus pada 700 poin di sesi perdagangan awal bulan Februari 1997 sebagai petanda kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang semakin mantap³⁰. Bahkan politik panas (pemilu) yang sering memberi efek negatif bagi iklim investasi, tidak cukup berpengaruh terhadap tingginya minat berinvestasi di Indonesia³¹.

Di luar masalah defisit transaksi berjalan dan meningkatnya utang swasta yang memengaruhi rasio utang dengan cadangan devisa, sistem perekonomian tidak sepenuhnya steril dari masalah baik makro atau pun sektor riil terutama adanya ketimpangan struktur ekonomi.

Masalah ini telah menjadi wacana cukup lama dan ekstensif antara struktur ekonomi yang timpang dengan intervensi politik. Ada anggapan bahwa banyak pelaku ekonomi yang berhasil karena ditunjang kemudahan dan

29 *Kompas*, 8 Maret 1997

30 *Kompas*, 13 Februari 1997

31 *Kompas*, 24 Maret 1997

fasilitas pemerintah. Pelaku ini tidak tumbuh secara alami kecuali karena adanya koneksi, ulah kelompok penekan atau karena pertimbangan politis³².

Akibatnya, struktur dunia usaha yang menyokong sistem perekonomian secara keseluruhan tidak kukuh dan tidak mencerminkan cita-cita demokrasi ekonomi. Kegiatan perekonomian didominasi oleh pengusaha yang jumlahnya sedikit dengan aset yang besar. Perubahan ini memperluas ekonomi dengan para pelaku yang semakin beraneka ragam sehingga kepentingan ekonomi pun tumbuh dengan berbagai aspirasi³³. Isu fundamental ekonomi pemerintah, juga ditandai munculnya peringatan (*warning*) bahwa ekonomi nasional semakin bergerak ke arah integrasi global. Dalam situasi itu, perekonomian Indonesia menjadi semakin peka terhadap berbagai gejolak, baik yang berasal dari perkembangan ekonomi atau nonekonomi di dalam dan di luar negeri.

Sementara bisnis pasar keuangan dunia yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, pasar valas, dan pasar komoditas merupakan bisnis yang bersifat *snowballing* yang besar melindas yang kecil. Perdagangan valas pun sudah tidak murni berkaitan indikasi ekonomi ekspor impor atau untuk kepentingan riil, tetapi sudah menjadi ajang judi sebagaimana praktik di pasar uang maupun di pasar modal sehingga istilah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang menjadi kabur batasnya.

Sekalipun pemerintah mempunyai cadangan devisa 20 miliar dollar AS, menurut Kartasasmita, masih memerlukan dana luar negeri terutama dalam bentuk penanaman langsung jangka panjang. Perlu diingat bahwa indikasi-indikasi yang telah diumumkan dalam RAPBN 1997/1998 telah memicu wacana terhadap prediksi perekonomian di

32 *Kompas*, 4 Maret 1997

33 *Kompas*, 10 Maret 1997; *Kompas*, 4 Maret 1997

masa mendatang. Satu sisi utang yang sangat besar mencapai 103 miliar dollar AS, defisit transaksi berjalan mencapai 9,5 miliar dollar, sedangkan sisi lain dihadapkan persoalan mendapatkan pemecahan bagi peningkatan pendapatan³⁴.

Dalam pandangan Djojohadikusumo siapa pun, akan semakin menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan demi kepentingan nasional ketimbang membiarkan negara ini dimanipulasi oleh komplotan yang lebih banyak termotivasi oleh kepentingan picik. Sumber masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi berasal dari kebijakan pemerintah yang salah. Masalahnya terletak pada lembaga-lembaga pemerintah yang sangat menghambat arus barang reguler ke pasar domestik dan perdagangan internasional.

Kenyataannya determinasi politik bagi rekomendasi dan solusi, bagaimana pun tetap akan ada, namun yang dihadapi pemerintah tidak lagi persoalan-persoalan kepentingan ekonomi murni, tetapi telah berkembang pada persoalan ekonomi politik. Tindakan pemihakan terhadap pengusaha nasional ternyata tidak berhasil mendewasakan sebagian dari mereka. Tindakan ini sekali lagi, lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan kurang didasarkan pada rasional ekonomi³⁵.

Sering digambarkan bentuk-bentuk inefisiensi, transparansi, akuntabilitas, monopoli, proteksionisme, pemihakan pemerintah dalam bentuk-bentuk kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan, merupakan isu-isu yang mengkhawatirkan masa depan perekonomian secara keseluruhan.

Fluktuasi yang mengarah volatilitas nilai rupiah terhadap dollar AS akhirnya terjadi juga. Gejala ini awalnya memang belum memicu tuntutan-tuntutan yang lebih keras. Wacana

34 *Kompas*, 25 Juni 1997

35 *Kompas*, 7 Maret 1997

yang berkembang masih berkisar pada komposisi simpanan dollar terhadap rupiah serta perhatian para ekonom terhadap ada dan tidaknya pengalihan simpanan masyarakat ke dalam bentuk dollar AS menyusul isu serta unsur *capital flight* ke luar negeri.

Apa yang menimpa rupiah pada April, Mei, dan Juni 1997 yang melemah terhadap dollar AS, masih membuat para ekonom, politisi, dan pemerintah meyakini, fundamental ekonomi yang dibangun masih kuat. Syahrir, melihat pembelian dollar AS yang relatif tinggi hanya merupakan upaya *safe pre-caution*, yakni tindakan berjaga-jaga atas gejolak sosial politik yang mungkin terjadi.

Memang, dalam periode itu suhu politik cukup tinggi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan bulan Mei 1997. Munculnya isu kesehatan Presiden Soeharto yang dikabarkan sakit bahkan sampai meninggal dunia turut memengaruhi tingkat stabilitas rupiah terhadap dollar. Dalam kaca mata Syahrir, pembelian dollar yang relatif tinggi itu masih wajar. Ia membandingkan dengan tingkat depresiasi sepanjang empat bulan pertama tahun 1997 berkisar 2 persen yang masih berada dalam sasaran indikatif di kisaran 5-6 persen pertahun³⁶.

Rupiah mengalami gejolak seiring terjadinya krisis moneter di Thailand. Saat krisis moneter itu terjadi diperkirakan pemerintah Thailand telah melakukan intervensi pasar sebesar 6 miliar dollar AS untuk meredam para spekulasi. Krisis ini memberi efek terhadap kondisi perekonomian negara tetangga termasuk Indonesia karena lebih disebabkan otoritas moneter lambat mengantisipasi situasi perekonomiannya. Ketidakleluasaan bergerak ini disebabkan karena pengaruh politik di mana intervensi terhadap kebijakan dinilai terlalu banyak³⁷.

³⁶ *Kompas*, 26 April 1997

³⁷ *Kompas*, 19 September 1997

Menurut Eki Syachrudin, keadaan yang dialami Indonesia merupakan fakta bahwa *insible hand* menunjukkan banyak yang salah. Sepanjang sejarah Orde Baru, kesalahan-kesalahan bukan tidak dilihat. Menurutnyanya, tidak ada yang menjadi rahasia di negara ini soal berbagai kelemahan seperti korupsi dan kolusi. Krisis ini dapat merupakan era peralihan dari perekonomian yang didasarkan pada asas pertemanan atau kekuasaan ke arah perekonomian berdasarkan kekuatan pasar³⁸.

Keadaan krisis yang dihadapi dalam kenyataannya, upaya untuk mempertahankan kurs pada suatu tingkat tertentu oleh otoritas moneter tidak efektif. Pemerintah kemudian membiarkan nilai rupiah ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan rupiah terhadap dollar AS dan sebaliknya³⁹. Jadi, seperti yang diungkap Kwik Kian Gie, perekonomian Orde Baru sedang dihadapkan pada suasana serba krisis⁴⁰. Pemerintah, pada akhirnya meminta bantuan IMF untuk turut serta mengatasi krisis moneter. Pertama, rupiah telah mengalami guncangan (*volatile*) dan sudah *overshoot*. Sejak Januari 1997, rupiah telah terdepresiasi sebesar 46 persen. Kedua, sejumlah besar pengusaha sedang mengalami kesulitan memperpanjang utang luar negerinya.

Jumlah utang luar negeri swasta yang jatuh tempo akhir tahun 1997 mencapai 10 miliar dollar AS. Lemahnya rupiah tidak perlu dipertanyakan lagi karena menyangkut fundamental ekonomi yang tidak sesuai dengan opini pasar betapapun pemerintah telah berusaha meyakinkan bahwa fundamental ekonominya adalah kuat⁴¹.

Memang yang paling penting dari bantuan itu adalah paket reformasi, tetapi sebenarnya paket reformasi yang

38 *Kompas*, 10 Oktober 1997

39 *Kompas*, 15 Agustus 1997

40 *Kompas*, 25 Agustus 1997

41 *Kompas*, 22 Oktober 1997

menjadi pikiran IMF itu telah berulang-ulang disuarakan oleh para pakar yang ada di Indonesia sendiri. Menurut Kwik Kian Gie, utang kepada IMF hanyalah memperbesar inti masalah, yakni memperbesar *saving-investment gap* yang berarti memperbesar defisit transaksi berjalan.

Dengan sangat terbuka Kwik Kian Gie mengatakan:

Saya berani mengatakan rasanya tidak ada orang yang lebih sedih dari saya menyaksikan betapa kita sungguh-sungguh mau menjalankan nasihat orang bule ketimbang mewujudkan aspirasi para ahli yang sebangsa yang isinya sama. Tetapi inilah kenyataannya, kita agaknya sudah terbiasa sejak tahun 1966 menjalankan nasihat-nasihat para ahli IMF, Bank Dunia dan Harvard Advisory Team. Maka kita bulatkan saja ketergantungan kita pada IMF dan lembaga-lembaga asing lainnya sampai masalah yang kita hadapi sekarang dapat dibereskan⁴².

Bantuan itu ada biayanya dan biayanya tidak kecil. Biaya lain yang mesti ditanggung adalah pengorbanan harga diri.

Dalam perkembangannya, pemerintah menunjuk Widjojo Nitisastro untuk melakukan langkah dan koordinasi guna memimpin perundingan dengan IMF serta memastikan agenda-agenda perekonomian yang perlu dilakukan dalam reformasi ekonomi yang disepakati. Michel Camdessus berkilah bahwa syarat-syarat itu bukan dari IMF. Namun, syarat-syarat yang ditentukan oleh Indonesia sendiri di mana IMF terlibat dalam beberapa program pemerintah yang merupakan atas nama masyarakat dunia⁴³.

Deputi Menteri Luar Negeri Strobe Talbot, AS juga mengatakan bahwa peran pemimpin AS dalam lembaga seperti IMF dan Bank Dunia adalah menjamin penyediaan

42 *Kompas*, 27 Oktober 1997

43 *Kompas*, 13 November 1997

bantuan finansial yang dibutuhkan. Dengan bantuan itu Indonesia tidak menjual kedaulatannya. Apa yang dialami Indonesia bukan krisis keuangan, tetapi krisis kepercayaan⁴⁴.

Michel Camdessus menambahkan jika Indonesia menginginkan kepercayaan, pemerintah itu sendiri perlu transparansi. Sisi lain, keberadaan IMF, dapat merupakan *blessing disguise* pada mereka yang selama ini menginginkan reformasi baik di kalangan pemerintahan, partai politik ataupun organisasi sosial kemasyarakatan⁴⁵.

Paket bantuan IMF yang diberikan menyertakan Bank Dunia dan Asia Development Bank (ADB) dengan paket dana yang diberikan sebesar 23 miliar dollar AS. Ini di luar bantuan yang sifatnya multilateral ataupun bilateral. Bantuan yang bersifat multilateral berasal dari China, Hongkong, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, dan Singapura. Diperkirakan bisa mencapai 40 miliar dollar AS. Menurut Michel Camdessus, setidaknya ada dua tujuan utama dari paket bantuan IMF yang menyertakan Bank Dunia dan ADB ini, yakni memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan menstabilkan pasar keuangan regional.

Untuk menunjukkan komitmen itu, Pemerintah pada tanggal 3 November mengeluarkan Paket Deregulasi 3 November. Pemerintah melakukan deregulasi terhadap impor gandum dan tepung terigu, kedelai, dan bawang putih. Penghapusan Harga Pedoman Setempat (HPS) terhadap semen, penghapusan PPh atas impor emas batangan, standar konversi penggunaan bahan baku, pengenaan PPN 0 persen untuk ekspor tidak langsung, melikuidasi 16 bank yang bermasalah, penyederhanaan perizinan dan prosedur impor. Ketentuan ini terus merambah ke persoalan monopoli Bulog, Mobil Nasional (Mobnas) dan Industri Pesawat

44 *Kompas*, 10 Oktober 1997

45 *Kompas*, 27 Oktober 1997

Terbang Nusantara (IPTN). Michel Camdessus mengatakan bahwa paket reformasi itu banyak mengikutkan keputusan sulit. Namun, justru di dalam keputusan itu menjadi bukti bagi pemerintah memiliki komitmen terhadap kebijakan fiskal ketat.

Sekalipun begitu, reaksi pasar masih negatif. Stephen Rogers (Pimpinan Riset UBS Securities) menilai bahwa langkah-langkah yang diumumkan hanya isyarat tanda, sedangkan perincian mendetail dari program restrukturisasi sebagai kunci kesehatan perekonomian jangka panjang masih harus ditunggu. Dikhawatirkan ada saat, di mana pengumuman itu justru menuntun pemerintah pada sebuah pemikiran salah, yakni mengulur waktu dalam menerapkan reformasi ekonomi karena tekanan keuangan sudah .

Presiden AS Bill Clinton mengingatkan bahwa dengan terjadinya krisis adalah saat yang tepat untuk meyakinkan AS tentang hubungannya dengan Asia di masa depan. Krisis, menurutnya, merupakan momentum bersama untuk melakukan perubahan⁴⁶.

Perbedaan pandangan terjadi antara pemerintah dengan IMF, mulai terlihat ketika pemerintah mengumumkan RAPBN 1998/1999 terkait ekspansi anggaran sebesar 32,1 persen dan menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen. Bila *review* yang dilakukan IMF ternyata tidak memuaskan, besar kemungkinan dana 3 miliar dollar AS tambahan yang akan dicairkan bulan Maret 1998, tidak akan jadi. Sementara ketika ketegangan hubungan pemerintah dengan IMF panas, rupiah tembus pada level psikologis, yakni di angka Rp 10.000 per dollar AS di awal Januari 1998 di bursa Valuta Singapura.

Jubir Departemen Luar Negeri AS James Rubin pun berpendapat bahwa beberapa langkah memang telah

⁴⁶ *Kompas*, 25 November 1997

ditempuh termasuk penutupan 16 bank. Namun, hal itu belumlah cukup untuk memulihkan kepercayaan internasional dan menstabilkan nilai rupiah. Oleh karena itu, jauh lebih banyak dari hanya sekadar penutupan 16 bank yang dinilai bermasalah itu, yang harus dikerjakan berkaitan dengan paket reformasi yang telah disepakati yang implementasinya sedang ditunggu-tunggu.

Inilah tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang diperlihatkan oleh berbagai pihak yang tampak dalam bahasa politik yang mereka nyatakan. Setiap aktor dalam kepentingannya memberikan pandangan melalui bentuk-bentuk kegiatan komunikasi. Mereka mengkritik, bertahan, menyerang, mendapatkan, mengoreksi, dan memojokkan.

Presiden Soeharto pada akhirnya berbicara mengenai tekanan-tekanan dan penilaian-penilaian terhadap sistem perekonomian Indonesia. Soeharto membeberkan beberapa kondisi yang memperlihatkan hubungan pemerintah Indonesia dengan IMF itu tidak sepenuhnya lancar berkaitan dengan pandangan-pandangan tertentu yang memang berbeda.

Menurutnya setelah tercapai kesepakatan, RAPBN 1998/1999 tidak lagi mencantumkan pertumbuhan 4 persen melainkan nol persen, laju inflasi dipatok 20 persen dengan kurs dollar diasumsikan Rp 5.000 untuk tiap satu dollarnya. Dalam ini, Presiden Soeharto menyatakan menerima apabila RAPBN 1998/1999 itu dinilai IMF sedikit ambisius.

Lebih jauh dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pemerintah dan IMF mengenai subsidi. Pemerintah telah merencanakan subsidi tersebut akan dihilangkan. Perbedaannya terletak pada waktu, kapan subsidi akan dicabut. Soeharto juga mengatakan bahwa dalam rangka meliberalisasi perdagangan, pemerintah menghapus monopoli gula, tepung, terigu, dan kedelai. Badan Urusan Logistik

(Bulog) hanya mengurus beras. Kebijakan ini termasuk terhadap tata niaga cengkeh. Meskipun dalam pandangannya, cengkeh itu sebenarnya bukan monopoli hanya difungsikan untuk membantu KUD-KUD dalam menguasai stok dan mempunyai *buffer stock* yang dimiliki KUD sendiri.

Soal IPTN, Soeharto menyampaikan bahwa secara faktual hal ini dapat dirasakan manfaatnya. Menurutnya ekspor satu pesawat terbang ekuivalen dengan 3.000 mobil dan menjual pesawat dengan model *counter purchase* dengan ketan. Ini bukan persoalan menjual teknologi dengan ketan, melainkan di dalam transaksi itu ada arus modal yang terjadi. Lagi pula pesawat produksi IPTN itu diminati negara lain seperti Emirat Arab, Malaysia, Thailand, dan Brunei.

Demikian halnya dengan mobnas disepakati, tetap jalan, tetapi tanpa fasilitas apa pun dari pemerintah. Soeharto mengatakan bahwa IMF tidak sekadar memberikan modalnya, tetapi penilaian terhadap Indonesia. Penilaian inilah yang menurutnya akan memengaruhi investasi di Indonesia⁴⁷.

Secara sederhana kebijakan yang menetapkan pertumbuhan ekonomi nol persen memberi akibat pada kelesuan perekonomian. Paket reformasi tersebut merupakan pukulan bagi dunia kerja karena bertumpu pada *pro efficiency policy*. Berbagai implikasi kebijakan tersebut mulai dirasakan dampaknya dari merosotnya daya beli masyarakat, stagflasi, lesunya pasar hingga resesi yang akan menimbulkan banyak perusahaan tutup.

Menurut Bomer Pasaribu tambahan pengangguran meningkat 4,6 juta, sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), rasionalisasi, merger, dan konsolidasi perusahaan. Kondisi ini ditambah dengan angkatan kerja

47 *Kompas*, 16 Januari 1998

baru sebanyak 2,7 juta orang. Diperkirakan jumlah pengangguran terbuka mencapai 13,5 juta atau 14,7 persen dari seluruh angkatan kerja⁴⁸. Letupan sosial dalam kondisi demikian, tinggal hanya menunggu waktu saja.

Apa yang diminta IMF jelas memberi pengaruh pada stabilitas politik yang selama ini telah dibangun oleh Orde Baru. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, *good governance* jelas ditujukan untuk mengubah tatanan-tatanan politik yang dinilai sebagai penghambat perdagangan bebas yang memang secara terus-menerus disuarakan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan organisasi perdagangan dunia (WTO).

Presiden Bank Dunia sendiri mengatakan bahwa secara pribadi ia memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sayangnya, ia tidak dapat berbicara mengenai politik dan hak asasi manusia karena di antara masalah yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia adalah persoalan ketidakadilan, intransparansi, korupsi, dan keadilan sosial⁴⁹.

Kejadian di beberapa arena sosial dalam periode tahun 1997-1998 membentuk eskalasi terhadap bidang-bidang tertentu. Stabilitas ekonomi yang gonjang, mengakibatkan stabilitas politik suhunya meningkat. Persoalan pertahanan, keamanan dan ketertiban sosial juga menjadi terganggu. Hubungan sebab akibat ini pada akhirnya tidak lagi mudah ditentukan mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibat. Apakah persoalan ekonomi yang mengakibatkan guncangan dalam politik atau persoalan politik yang mengakibatkan gonjangan dalam ekonomi.

Soeharto beberapa kali mengeluhkannya. Ia mengatakan bahwa berbagai isu yang berkembang serta aksi spekulasi yang muncul sejalan dengan isu-isu yang membuat kurs

48 *Kompas*, 26 Januari 1998

49 *Kompas*, 5 Februari 1998

rupiah melemah terhadap dollar AS⁵⁰. Ia mensinyalir bahwa ada gejala yang secara sengaja ingin membuat kurs dollar sampai Rp 20.000 per dollar AS dengan maksud menghancurkan landasan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan akan hancur yang berarti ada PHK. Mereka mudah dihasut yang akan menghilangkan semua yang telah dihasilkan selama 30 tahun.

Di tengah pertarungan kepentingan itu, Presiden Soeharto mengemukakan keinginannya untuk menerapkan Currency Board System (CBS) bagi rupiah. Melalui Steve H. Hanke dari John Hopkins University, Soeharto memberi sinyal positif bahwa CBS memiliki risiko yang lebih kecil bagi pengaturan keuangan di Indonesia. Namun, belum sampai sistem ini diwujudkan, Michel Camdessus mengancam bahwa jika usulan dewan mata uang yang diterapkan dalam keadaan sekarang, dirinya tidak dapat memberikan rekomendasi pada Dewan IMF guna meneruskan program yang disetujui.

Peringatan keras juga datang dari Menteri Keuangan Australia Peter Costello yang akan menarik kembali bantuannya yang telah diberikan⁵¹. Menteri Keuangan Jerman Juergen Stark mengatakan bahwa bantuan IMF yang diberikan Indonesia tidak sepadan dengan usulan CBS yang diusulkan Presiden Soeharto.

Tidak jelas apakah kesepadanan itu adalah target-target kepentingan mereka yang ingin diwujudkan ke dalam kebijakan perekonomian di Indonesia ataukah jumlah yang diperkirakan mencapai 40 miliar dollar AS tidak mencukupi untuk menopang penerapan CBS. Di hadapan para Menteri Keuangan Uni Eropa di Belgia, Michel Camdessus juga mengatakan bahwa keputusan pemerintah menerapkan CBS

50 *Kompas*, 10 Februari 1998

51 *Kompas*, 15 Februari 1998

tanpa konsultasi dengan IMF merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan IMF.

Berbagai kalangan di Indonesia sendiri, memberi kecaman terhadap cara-cara Michel Camdessus menyampaikan ketidaksenangannya terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan CBS. Kecaman ini dipicu oleh bocornya surat pribadi Michel Camdessus yang ditujukan Presiden Soeharto di kalangan media massa Amerika Serikat dan telah menjadi perbincangan di mana-mana.

Dalam perkembangannya, tarik-menarik kepentingan yang mewarnai hubungan pemerintah dengan IMF, membuat rencana penerapan CBS dibatalkan. Adalah Michel Camdessus sendiri yang menjelaskan bahwa CBS tidak jadi diterapkan. Sebagai penegasan, pemerintah akan menepati janjinya untuk melaksanakan reformasi ekonomi 50 poin yang telah disepakati bersama.

Presiden Soeharto di tengah gelombang permasalahan yang dihadapi, ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan mengandalkan masa depannya dengan belas kasihan. Di sisi lain, ia mengakui bahwa ketahanan ekonomi yang selama ini dilakukan ternyata belum kuat. Sementara, para ekonom umumnya sepakat bahwa dalam pelaksanaan reformasi, terbuka lebar kemungkinan adanya rebut-merebut di antara kelompok-kelompok kepentingan di mana yang kuat akan memindahkan beban berat dan pahit akibat reformasi itu kepada pihak lain.

Seperti yang telah diperkirakan, reformasi ekonomi akhirnya menyentuh reformasi politik. Tanda awalnya dapat dicermati dari pernyataan Menteri Keuangan Inggris Robert Brown yang mengatakan dukungan internasional akan lebih besar bagi Indonesia jika ada reformasi politik⁵².

52 *Kompas*, 7 Mei 1998

Dalam berbagai pesan komunikasi tentang perekonomian Indonesia memperlihatkan adanya kompetisi dalam merumuskan langkah-langkah apa yang terbaik buat Indonesia. Dalam setiap krisis, selalu muncul dua segi, yakni segi teknis-manajerial yang menyangkut tindakan perencanaan dalam mengatasi krisis, sedangkan segi kedua adalah dimensi komunikasi, yakni kontrol komunikasi terhadap isu, rumor dan bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat agitatif dan kontraproduktif yang dapat memperparah krisis.

Keadaan ini merupakan arena di mana bentuk-bentuk pesan saling bersaing antara mereka yang menginginkan perubahan dengan mereka yang ingin menjamin pelaksanaan pembangunan dan kepemimpinan nasional. Ketika semua faktor terjalin seperti tekanan dunia internasional, kerusuhan yang terjadi di mana-mana, aksi demonstrasi yang merata, melemahnya dukungan kekuatan-kekuatan yang ada yang membuat Presiden Soeharto tidak lagi mampu mengendalikannya. Ia telah mengambil keputusan untuk menyatakan berhenti, yang mungkin membuat banyak orang gembira, frustrasi, dan berlindung diri atas keputusan tersebut

Memahami Arah Demonstrasi Mahasiswa

Pesan tuntutan yang mewarnai demonstrasi mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari bentuk komunikasi yang dinyatakan oleh sejumlah kalangan, baik organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik sampai lembaga keuangan internasional menyangkut reformasi ekonomi dan reformasi politik.

Soal proteksionisme, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, penilaian terhadap RAPBN 1998/1999, likuditas 16 bank, mobnas, IPTN, penghapusan monopoli atas

gandum, terigu, kedelai, gula, bawang putih dan cengkeh merupakan isu-isu sensitif yang menjadi arena persaingan antara pemerintah, berbagai elemen masyarakat dengan IMF.

Hal yang menarik adalah tampaknya bukan kebetulan bila agenda-agenda kepentingan itu dan yang menjadi isu-isu sensitif memiliki jalinan dengan tuntutan yang dinyatakan dalam aksi, unjuk rasa ataupun demonstrasi mahasiswa. Semula corak pesan dalam demonstrasi mahasiswa terbatas. Topiknya masih terbatas pada persoalan dan implikasi penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).

Kemudian muncul penilaian bahwa kampus yang secara tradisi memiliki otonomi, namun karena di bawah sistem kebijakan Orde Baru, tradisi otonom ini telah menjadi "pabrik" yang berfungsi menstransfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan politik. Hariman Siregar menganalogikannya seperti pompa bensin yang melayani banyak keperluan, tetapi tidak dapat diharapkan lagi menjadi agen pengubah sosial.

Sedangkan Eros Djarot mencurigai, ketidakpekaan mahasiswa terhadap persoalan-persoalan politik, karena kampus telah dikuasai oleh orang-orang luar yang diwujudkan dalam personifikasi rektor. Menurutnya, yang lebih serius dari itu adalah ada ketidakmampuan berpikir dan mentalitas tidak merdeka yang menjadikan mahasiswa tidak peka terhadap persoalan-persoalan politik yang terjadi⁵³.

Pada batas itu, kebijakan Orde Baru dijadikan sasaran (*scapegoat*) atas kondisi objektif yang mematikan otonomi kampus. Kebijakan ini ditempuh, dikarenakan pemerintah

53 *Kompas*, 29 September 1997

Orde Baru dicurigai khawatir dan takut terhadap mahasiswa. Setidaknya ada yang melihat, langkah ini merupakan cermin bahwa sebagai kekuasaan, Orde Baru memiliki ingatan terhadap legitimasi yang diperolehnya yang juga bersumber dari gerakan mahasiswa.

Kesadaran bahwa kekuatan mahasiswa sangat besar dan dapat menjatuhkan ataupun membawa kekuasaan itu hancur, maka ada upaya agar kehidupan kampus mesti diletakkan pada fungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional bagi pembangunan. Dengan asumsi itu, kampus sedapat mungkin, disterilkan dari persoalan-persoalan politik praktis.

Menurut Arbi Sanit, depolitisasi kehidupan kampus merupakan keberhasilan Orde Baru, meski dari sisi demokratisasi ini merupakan kegagalan. Bahkan di level wacana, isu-isu yang diangkat dalam aksi-aksi mahasiswa, dalam nyatanya dikontrol, yang mengakibatkan mahasiswa kehilangan konteks dan kontak dengan masyarakat⁵⁴.

Atas keadaan itu, Emil Salim mengatakan bahwa jangan berilusi mempunyai kekuatan nyata⁵⁵. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan ini dimaksudkan untuk menerima keadaan dan tidak berbuat apa-apa. Ataukah pernyataan itu dimaksudkan sebagai motif untuk mewujudkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan nyata yang mampu membawa perubahan yang diinginkan.

Di kalangan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa yang menggejala, dinilai tidak mengakar, dan karena itu, mereka melihat perlunya mempertalikan gerakan ini di kampus dengan gerakan masyarakat secara luas. Ada yang menilai bahwa di tengah kekuatan negara yang begitu dominan, akumulasi dendam dan kebencian dapat memicu perubahan. Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa hanya salah satu

54 *Kompas*, 14 Januari 1998

55 *Kompas*, 2 Februari 1998

dari kekuatan pengubah yang mesti berkaitan dengan elemen-elemen perubah yang lain. Menurut Agus Supriyatna (Ketua Senat Mahasiswa IKIP Jakarta), ada prinsip di balik demonstrasi yang tengah diperjuangkan ini, yakni menunjukkan independensi dan diperhitungkan sebagai agen perubahan⁵⁶.

Sebenarnya, cara mereka mendefinisikan gerakannya, tecermin adanya ambivalensi yakni pandangan yang menempatkan gerakan itu sebagai gerakan moral (*moral forces*) yang akan menentukan perubahan, namun di sisi lain, perubahan itu membutuhkan tindakan atau aksi. Bila demonstrasi mahasiswa hanya dipandang sebagai gerakan moral, kekuatannya kurang memberi pengaruh secara nyata bila tidak dilakukan sebuah aksi massa.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanudin Muhammad Asri, melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terjadi merupakan gerakan moral yang hanya berpusat di kampus dan tidak memiliki ikatan formal dengan kekuatan di luar kampus. Apa yang menjadi tuntutan perubahan yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk retorika radikal tanpa ada kaitan dengan kekuatan sosial politik di luar kampus, pada akhirnya membatasi kemampuan mereka menggerakkan massa untuk mendukung mereka.

Dari sisi ini, terlihat perkembangan demonstrasi mahasiswa. Mereka telah membentuk jaringan-jaringan di luar kampus serta menggerakkan bentuk-bentuk demonstrasi yang bersifat masif. Idhan Januardana dan Habiburahman misalnya, keduanya adalah aktivis mahasiswa Universitas Lampung, mendeklarasikan bahwa gerakan mereka adalah gerakan politik.

56 *Kompas*, 21 Januari 1997

Mereka memastikan bahwa langkah yang mereka tempuh adalah langkah politik dengan menggerakkan massa. Dengan langkah itu, menurut mereka reformasi pasti terjadi. Harapan ini akan terwujud bila seluruh kekuatan dan energi masyarakat bersatu melakukan perubahan. Sedangkan energi paling kuat untuk melakukan perubahan adalah menggerakkan aksi massa. Bila rakyat bersatu, maka kekuatan ini tak bisa dikalahkan⁵⁷.

Penggalangan gerakan mahasiswa yang merangkul rakyat nyata ditujukan untuk terciptanya embrio *people power* dan membentuk opini yang lebih luas ketika jargon reformasi dan reformasi ekonomi dinilai tidak efektif. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa, akan disinergikan antara aksi massa yang memberikan pengaruh pada situasi psiko-sosio-politis, dengan praktik-praktik komunikasi yang bersifat persuasif, argumentatif, agitatif, dan provokatif.

Daniel T. Sparingga memberi gambaran tentang karakteristik gerakan mahasiswa dalam periode tahun 1997-1998 ini, sebagai gerakan yang secara distingtif berbeda dengan gerakan mahasiswa sebelumnya terutama gerakan mahasiswa tahun 1966⁵⁸. Menurutnya, gerakan mahasiswa ini telah mereproduksi isu-isu, kalimat-kalimat, yel-yel yang menyerang pribadi-pribadi penguasa yang mereka teriakkan di atas panggung aksi mereka yang tidak pernah terjadi lima tahun sebelumnya.

Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia Fitra Arsil memprediksikan bahwa momentumlah yang akan menyatukan gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia ke dalam sebuah format tertentu. Sedangkan menurut Rama Pratama, setiap gerakan ditentukan oleh aksi-aksi yang dilakukan di lapangan. Bagaimanapun hal ini telah dimulai.

57 *Kompas*, 4 April 1998

58 *Kompas*, 4 April 1998

Gerakan ini sudah tidak lagi menjadi gerakan milik mahasiswa, melainkan telah berkolaborasi menjadi gerakan akademis seperti dosen dan kaum intelektual reformis.

Seperti yang dapat dicermati, tidak jarang tokoh-tokoh akademisi, dosen, dan para guru besar berada di tengah-tengah aksi mahasiswa tersebut. Di samping fungsinya dapat memfasilitasi kebuntuan-kebuntuan negosiasi dan komunikasi dengan aparat keamanan, menyusul timbulnya ketegangan-ketegangan tertentu, mereka secara aktif terlibat dan melakukan orasi dan komunikasi politik.

Dalam aksi damai yang dilakukan di Universitas Indonesia misalnya, di tengah-tengah aksi tersebut terlihat sejumlah dosen, para guru besar, dan mantan Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono. Pada tanggal 5 dan 11 Februari 1998 demonstrasi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada, di tengah-tengah aksi tersebut terlihat Prof. Ichlasul Amal, Prof. Teuku Jacob, Dr. Amien Rais, Dr. Riswanda Imawan, Dr. Afan Gaffar dan Prof. Koento Wibisono⁵⁹.

Hubungan antara gerakan moral dan aksi nyata ini, pada gilirannya menimbulkan polemik serius, ketika mahasiswa terlibat dalam benturan keras dengan aparat keamanan. Bahkan pada level kebijakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar (Kabinet Pembangunan VII) melarang dilakukannya politik praktis mahasiswa di kampus.

Namun, bagi para pejabat universitas yang diundang untuk membicarakan persoalan tersebut, umumnya tidak memiliki kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan politik praktis itu. Seperti yang dikatakan Amien Rais, ia menghimbau Wiranto Arismunandar agar bersikap hati-hati mengenai larangan bagi mahasiswa melakukan kegiatan politik di kampus. Dalam pandangannya, apa yang

59 *Kompas*, 4 Februari 1998

dituntut mahasiswa seperti perbaikan ekonomi dan menuntut reformasi sama sekali tidak dapat disebut sebagai politik praktis, melainkan aksi tersebut merupakan politik tinggi (*politics par excellence*), yakni aktivitas politik yang dilandasi oleh tataran etika dan moral yang tidak digerakkan semata-mata ingin memperoleh kekuasaan.

Jadi, situasi objektifnya memang rawan. Mahasiswa tidak bisa dihardik atau ditakut-takuti dengan sanksi diskor atau dipecat. Amien Rais mengatakan, "Percayalah kalau mahasiswa tidak bisa lagi berdemonstrasi di kampus, mereka akan mencari saluran lain yang semakin tidak terkendali dan menuju anarki."⁶⁰

Demikian pula yang dikatakan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Indonesia Umar Mansur, bahwa kalau untuk keprihatinan, siapa saat ini yang tidak prihatin. Hal yang penting adalah aksi-aksi itu tidak dilakukan secara anarki. Pembantu Rektor III Universitas Airlangga Puruhito mengatakan bahwa politik praktis dilakukan bukan di kampus. Menurutnya, tidak mungkin ada kegiatan politik praktis di kampus. Praktik-praktik seperti itu hanya berlangsung di DPR, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Mahasiswa hanya melakukan di kampus, sehingga tidak dapat disebut sebagai politik praktis.

Sekalipun demikian, Wiranto Arismunandar mengatakan bahwa larangan itu tidak dicabut dan terus berlaku. Menurutnya, kampus bukan arena politik. Apa yang dimaksud dengan politik praktis ialah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut melaksanakan atau memengaruhi secara langsung atau tidak langsung pada pengambilan keputusan politik.⁶¹

60 *Kompas*, 6 April 1998

61 *Kompas*, 6 April 1998

Menurutnya, apa yang ia sampaikan telah diartikan keliru oleh beberapa pihak dan media massa tanpa melihatnya secara utuh. Pertama, ia tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan mahasiswa dengan aksi unjuk rasa dan demonstrasi sebagai kegiatan politik praktis. Apa yang dilakukan adalah meminta para rektor agar dapat memberikan hukuman dan putusan yang tepat dalam kaitannya kegiatan mahasiswa tersebut. Sebab kegiatan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan gerakan moral atau mengandung muatan politik. Kegiatan itu dapat memiliki motif ekonomi, sosial, kultural, moralitas, dan tidak menutup kemungkinan kriminalitas.

Kedua, ada hal yang perlu ditegaskan oleh semua pihak dalam melihat peran dan kedudukan kampus dalam visi ke depan dan tidak hanya ditentukan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek yang terbatas. Dalam konteks ini, Wiranto Arismunandar bertanya, "Apakah benar kampus ingin dijadikan arena politik yang membuka peluang dan kesempatan semua pihak untuk melakukan kepentingan politiknya di kampus?"

Jawabannya untuk memastikan diperlukan dunia akademik dan wilayah kampus, dapat dipolitisir di balik alasan otonomi kampus dan kebebasan akademik. Apakah kampus mau diputuskan secara politis sebagai arena politik yang terbuka dan hal itu diputuskan secara nasional atau tidak. Jika jawabannya adalah ya, tidakkah hal ini dipikirkan dampaknya?

Ketiga, di dalam demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus, terdapat suasana dan moral yang tidak menguntungkan bagi proses belajar dan mengajar yang gangguannya hanya dapat dirasakan 5 sampai 10 tahun ke depan. Presiden Soeharto mengatakan bahwa kampus dibangun dan berfungsi untuk mendidik dan mempersiapkan

pemimpin-pemimpin bangsa mendatang. Bila di dalam kampus ada kegiatan unjuk rasa, kegiatan itu akan mengganggu pelaksanaan proses belajar mengajar.⁶²

Pikiran dan pertentangan itu, mencerminkan bagaimana berbagai kalangan yang berkepentingan di dalam soal demonstrasi mahasiswa, telah melakukan tawar-menawar, tarik ulur, berargumentasi, dan menunjukkan alasan-alasan rasional, politis, sosiologis, serta psikologis.

Meskipun dalam pengertian semacam itu, sebenarnya terlihat, pada satu sisi ada aktor-aktor yang berupaya membuka ruang yang lebih luas dan besar agar kegiatan aksi mahasiswa yang terjadi di universitas-universitas Indonesia terus berlanjut. Sedangkan di sisi lain, ada aktor-aktor politik, yang berasal dari aparat pemerintah untuk melokalisir dan mempersempit kegiatan aksi tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bagi stabilitas politik dan ketertiban sosial.

Kesan ini dirasakan Stanley Roth, Pembantu Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Pasifik dalam kunjungannya ke Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan pejabat-pejabat pemerintah, jelas sekali, terlihat adanya itikad mereka untuk mempertahankan stabilitas.⁶³

Pada bulan April 1997, jauh sebelum maraknya aksi dan unjuk rasa dilakukan seperti pada empat bulan pertama di tahun 1998, sebanyak 24 mahasiswa yang berdemonstrasi di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada ditangkap⁶⁴. Padahal partisipasi mahasiswa yang berdemonstrasi sangat terbatas, tidak menimbulkan benturan keras dan kerusakan, dan tidak menggelar poster yang menyerang pribadi-pribadi pejabat dan pemimpin nasional.

62 *Kompas*, 18 April 1998

63 *Kompas*, 18 April 1998

64 *Kompas*, 2 April 1997

Dengan penangkapan itu Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sleman Letkol (Pol.) R. Andi Djaka M. mengatakan bahwa kampus bukan hal yang tidak boleh dimasuki kalau sudah menyangkut keamanan negara. Tindakan penangkapan tersebut adalah benar dan berada pada kaidah-kaidah normatif keamanan negara.

Menurut Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel (Inf.) A.R. Gaffar, aksi tersebut diduga kuat didalangi oleh Partai Rakyat Demokrat (PRD). Demonstrasi ini sendiri telah menghasut masyarakat untuk memboikot pemilu. Poster-poster yang mereka bentangkan: "*Pemilu No, Boikot dan Golput Yes, Pemilu tak Layak Diteruskan*". Mereka menamakan diri Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia untuk Megawati dan Demokrasi. Karena itu, mereka ditangkap.

Drama ketegangan antara aparat keamanan dan mahasiswa terhadap demonstrasi mahasiswa tidak berhenti di situ. Di Solo, bentrok antara aparat keamanan dan mahasiswa, pecah. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta Kol. (Pol.) Imam Soewangsa menyatakan bahwa ada indikasi kuat bahwa pengunjuk rasa itu disusupi PKI yang ada kaitannya dengan sejumlah nama yang pernah aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang merupakan *onderbauw* PRD. Sementara di Universitas Lampung unjuk rasa keprihatinan di kampus yang menuntut harga diturunkan dan reformasi politik, ekonomi dan hukum, sempat diwarnai pemukulan yang dilakukan mahasiswa terhadap petugas yang dicurigai sebagai intel.⁶⁵

Demonstrasi yang diselenggarakan Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta yang semula dilakukan di dua tempat yakni Universitas Gadjah Mada dan IKIP Yogyakarta, setelah keduanya berbaur menjadi satu di kampus Universitas

65 *Kompas*, 26 Maret 1998

Gadjah Mada, berubah menjadi kerusuhan. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Kolonel (Pol.) Bani Siswono mengatakan:

Rekan-rekan wartawan lihat sendiri di lapangan ya. Kami menahan diri cukup lama meski dilempari batu. Enam anggota kami luka-luka antara lain hidung patah dan gigi pecah karena dilempar batu. Kondisi kami sesalkan. Kami tahu tuntutan mahasiswa, tapi mohonlah terkendali. Anda lihat sendiri petasan sebesar kepala diledakkan mahasiswa. Kalau itu mengenai orang pasti luka-luka.⁶⁶

Kerusuhan bermula dari tidak adanya titik temu antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang menginginkan *long march* ke alun-alun keraton untuk menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan maksud akan menyampaikan tuntutan reformasi. Dalam kerusuhan itu, tercatat ada lima anggota aparat kepolisian terluka, 12 mahasiswa terluka, seorang pegawai Koperasi Mahasiswa (Kopma) UGM terluka, 25 kendaraan bermotor rusak, kafe Koperasi Mahasiswa UGM pecah dan berantakan.

Kejadian semacam itu memiliki mata rantai yang bertalian. Di Universitas Udayana ada aksi mahasiswa melakukan pembakaran karena marah atas perlakuan aparat. Di Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin (Ujungpandang) mahasiswa menggelar mimbar bebas. Di Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat) mahasiswa berunjuk rasa menolak berdialog dengan siapa pun dan dari instansi mana pun.

Kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan dapat digunakan untuk memberikan tekanan bagi rezim Orde Baru. Dengan kerusuhan ini, aparat menunjukkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa telah melanggar ketentuan yang ada. Aparat menyangsikan

⁶⁶ Kompas, 4 April 1998

siapa dan apa yang menjamin bahwa aksi mahasiswa yang turun ke jalan tidak akan ada tindakan kerusuhan dan anarki.

Adanya ketegangan-ketegangan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa, membuat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto berinisiatif menyelenggarakan dialog dengan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Sebagai gagasan, ide dialog ini menimbulkan pro dan kontra. Ketua Senat Mahasiswa UI Rama Pratama menilai bahwa lembaga mitra dialog yang efektif hanyalah lembaga kepresidenan atau MPR selaku lembaga tinggi negara. Juru Bicara Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Anton Sulistianto mengkhawatirkan bahwa dialog tersebut diperalat kalangan tertentu.

Menurut Rama Pratama, pada saat krisis, yang pokok bukan dialognya, melainkan itikad bahwa reformasi akan dijalankan secara serius. Selama hal ini tidak dilakukan, aksi-aksi mahasiswa akan terus berlanjut. Sedangkan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan bahwa KAMMI tidak antialog, tetapi jika tujuan dialog hanya ingin mengamankan mahasiswa, KAMMI akan terus menuntut perubahan.⁶⁷

Tentu saja, keinginan dialog langsung dengan Presiden mendapat tanggapan yang beragam. Ada yang melihatnya sebagai hal yang tidak mungkin karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut⁶⁸. Hal yang menarik dari wacana ini adalah sensitivitas yang tinggi ketika bagian dari tujuan dialog menyangkut pergantian kepemimpinan nasional. Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigadir Jenderal (TNI) Abdul Wahab Mokodongan melakukan teguran terhadap harian *Kompas* yang terbit

⁶⁷ *Kompas*, 31 Maret 1998

⁶⁸ *Kompas*, 4 April 1998

tanggal 1 April 1998. Mokodongan mengatakan apa yang ditulis *Kompas* menyangkut pergantian kepemimpinan nasional merupakan pernyataan *Kompas* sendiri.

Koreksi pihak militer itu tidak menghentikan pertanyaan tentang pergantian kepemimpinan nasional. Dalam sebuah dialog yang dilakukan Menteri Kehakiman Muladi yang sekaligus Rektor Universitas Diponegoro pertanyaan tersebut mencuat. Muladi melihat, kalau unjuk rasa yang isinya menolak Sidang Umum MPR dan kepemimpinan nasional, maka aksi semacam itu hanyalah mencari musuh saja, karena suka atau tidak suka hal itu harus dihormati sebagai keputusan yang konstitusional.⁶⁹

Dalam dialog yang digelar oleh Jenderal Wiranto dengan mahasiswa, OKP, dan ABRI di Kemayoran, mencuatkan kembali keinginan mahasiswa mengganti kepemimpinan nasional. Daniel T. Sparingga, dosen Universitas Airlangga, mempertanyakan tuntutan demonstrasi mahasiswa yang menghendaki Presiden Soeharto mundur. Di samping tuntutan-tuntutan untuk melakukan reformasi ekonomi, politik, penegakan hukum, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Wiranto menjelaskan bahwa proses pemilihan kepemimpinan nasional telah melalui proses konstitusional yang panjang yang kriterianya telah disusun jauh sebelum Sidang Umum MPR 1998.

Hubungan rumit antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa, terhadap demonstrasi mahasiswa, ditambah tekanan-tekanan ekonomi yang berat, menjadikan situasi bertambah panas, ketika terbetik kabar sejumlah aktivis hilang. Dimiyati Hartono menilai bahwa pemerintah harus menindaklanjuti dan memberikan penjelasan resmi seputar hilangnya beberapa aktivis mahasiswa.

⁶⁹ *Kompas*, 13 April 1998

Karena dicurigai, militer membantah bahwa ABRI tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus hilangnya sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa. Menurut Mokodongan (Kapuspen ABRI), tidak mungkin ABRI melakukan operasi penculikan. ABRI menghargai hak setiap warga negara di mata hukum dan hal ini merupakan hal yang utama, sehingga tidak dilakukan dengan main culik.

Mokodongan juga menegaskan bahwa semestinya ada juga opini bahwa hilangnya sejumlah aktivis tersebut merupakan bagian dari rekayasa besar untuk memojokkan ABRI di mata dunia internasional sebagai pelanggar HAM. Beberapa nama yang disebutkan hilang antara lain: Andi Arief (Ketua Umum SMID) yang diculik di Bandar Lampung, Desmond J. Mahesa (Direktur LBH Nusantara Bandung), Pius Lustrilanang (Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat), dan Haryanto Taslam (Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Megawati).

Gerakan mahasiswa yang semula hanya dipercayai sebagai gerakan moral, pada tingkat kematangan tertentu, telah tumbuh menjadi gerakan massa yang menggandeng kekuatan-kekuatan lain, sehingga menimbulkan benturan-benturan yang keras dengan aparat keamanan. Di samping tuntutan-tuntutan reformasi ekonomi dan politik, gerakan ini juga semakin keras menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Aksi mahasiswa ini dapat diibaratkan sebagai "gerbong" perubahan yang di dalamnya tertampung penumpang-penumpang lain yang berbaur, yang menjadikan aroma politik gerakan itu menjadi semakin kuat dan sangat jelas di dalam berbagai cara mereka mengkomunikasikannya. Inilah tampaknya, yang memberi keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan akan memetik kemenangan seperti yang terlukis dari apa yang disampaikan Anas Urbaningrum

pada pembukaan kegiatan Studi Nasional ke-3 PB HMI yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat pemerintah termasuk Wakil Presiden di Taman Mini Indonesia Indah.

Anas Urbaningrum mengatakan bahwa upaya untuk meredam dan gerakan mahasiswa yang muncul tidak akan pernah efektif karena sifatnya yang melawan kodrat dan semangat zaman. Ia mengatakan bahwa justru gerakan ini mesti dipandang secara positif sebagai potensi sosial yang kritis untuk tetap menjaga perjalanan bangsa ini pada rel kerakyatan dan kemanusiaan.

Gerakan ini, bersifat mengingatkan yang lupa, membangunkan yang tidur, meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang cacat dan cela. Jadi, gerakan ini merupakan gerakan yang konstruktif, memperbaiki, dan menyempurnakan. Apa yang dilakukan tidak lain merupakan pantulan idealisme dan bentuk dari rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam posisi demikian, Anas Urbaningrum mengatakan, bahwa apa yang dibawa mahasiswa itu adalah nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Pada saat kebenaran itu berjalan, maka tidak ada kekuatan apa pun yang akan berkuasa membendungnya. Orde Sosial yang tidak mempunyai keberanian untuk memperbaiki diri sendiri akan ditimpa hukum penuaan dan kekeroposan dan akhirnya kebangkrutan.

Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap diri yang diusahakan. Pada satu sisi, gerakan mahasiswa itu, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, nilai tinggi dan agung, tanggung jawab moral, nasionalisme tinggi, politik tinggi, tanpa pamrih, gerakan moral, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain, gerakan itu digambarkan sebagai gerakan yang

akan menabrak stabilitas keamanan negara, rambu-rambu konstitusional, tertib sosial, anarki, kerusuhan, nilai-nilai gradual dan bertahap, serta perlunya menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

Di dalam nuansa tersebut, jelas ada bentuk retorika yang menunjukkan kualitas komunikasi, teknik komunikasi, nilai yang menjadi dasar berkomunikasi, moral yang menjadi dasar tanggung jawabnya, sumber legitimasi yang menjadi pijakan, dan tatanan tertentu yang dikontestasikan dalam tindakan-tindakan komunikasi mereka dalam mendayagunakan semua simbol komunikasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Seperti yang dikatakan Cooms dan Holladay (2004:95) setiap situasi memberi pengaruh penting pada seleksi strategi-strategi komunikasi. Situasi memberi dan memengaruhi seseorang menginterpretasikan dan memproduksi pesan-pesan komunikasi. Sementara strategi-strategi komunikasi yang diperlihatkan, tidak lain merupakan instrumentasi komunikasi yang dipakai untuk memberikan indikasi pada hierarki dan kedudukan, prinsip-prinsip yang meneguhkan kedudukan, kewenangan, konsensus, dan ketidaksepakatan itu sendiri. Dalam situasi semacam itu, kondisi ini membuka arena di mana segala potensi suatu isu berkembang menjadi sebuah kompetisi yang sangat ketat.

Kerusuhan-kerusuhan Massa

Seperti yang dikatakan Hannah Arendt (1972:111) bahwa di mana ada struktur kekuasaan negara yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi yang rapuh, di dalamnya akan ada kekuatan politik, yang dengan hal itu, kerusuhan akan muncul. Artinya, selalu terbuka skenario oleh siapa pun atau kemungkinan untuk menciptakan kerusuhan sebagai manifestasi perlawanan

terhadap struktur kekuasaan yang dominan, sementara tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sangat memprihatinkan.

Dengan demikian, prestasi ekonomi sebenarnya dapat dijadikan kompensasi terhadap kuatnya struktur negara yang dominan. Bila hal itu terjadi secara bertolak belakang, maka kerusuhan dapat muncul sebagai bentuk perlawanan. Arendt (1972:120-121) mengingatkan bahwa di dalam praktik-praktik kerusuhan tersebut, terdapat persoalan retorika sebagai: *force and violence are likely to be successful techniques of social control and persuasion when they have wide popular support.*

Dengan ini, jelas kerusuhan merupakan bagian integratif dan bersifat instrumen bagi tindakan simbolik dalam melakukan persuasi yang dipakai untuk memantapkan perubahan yang dicari. Dengan kondisi semacam itu, kejadian yang ada, dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan teknik yang sukses bagi persuasi dan kontrol sosial ketika aktor-aktor pencetusnya mendapat dukungan populer yang sangat luas.

Kerusuhan sosial dan aksi massa ini membentuk rangkaian yang saling sambung-menyambung di beberapa daerah yang berbeda-beda. Dari kerusuhan 27 Juli 1996, kerusuhan Situbondo (10 Oktober 1996), kerusuhan Tasikmalaya (26 Desember 1996), kerusuhan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (3 Januari 1997), kerusuhan Tanah Abang (Januari 1997), kerusuhan Rengasdengklok (akhir Januari 1997), kerusuhan Pekalongan (Maret 1997), kerusuhan Wonosobo dan Banjarnegara (April 1997), dan kerusuhan di Jakarta, Solo, Tangerang, Bogor, Bekasi, Ujungpandang, dan Padang yang semua terjadi di bulan Mei 1998, yakni bulan di mana Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.

Kerusuhan ini sendiri merupakan kontraproduktif terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan. Pada tingkat ekstrem, kerusuhan merupakan cara mendistorsi sumber legitimasi Orde Baru. Sebab pada hampir di setiap kerusuhan selalu disertai pengrusakan, penjarahan, pembakaran, dan sering kali menimbulkan korban jiwa yang dipicu oleh berbagai isu-isu rasial.

Hal menarik dari bentuk kerusuhan semacam ini, bila dicermati adalah tidak adanya penilaian dan pengertian yang sama. Perbedaan paham ini menyangkut akar masalah, aktor penggerak, pengkambinghitaman, sampai pada esensi kekerasan guna menarik hubungan antara kerusuhan sosial dengan kekerasan negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru, di samping menghasilkan perubahan dan perbaikan, ada segi kekerasan sebagai hal yang tidak dapat dihindari dari konsekuensi pembangunan itu sendiri⁷⁰. Satjipto Rahardjo pun mengatakan bahwa⁷¹ kekerasan dapat dilakukan jajaran pemerintah kendati pun tidak nyata-nyata berupa kekerasan telanjang. Putusan-putusan yang diambil oleh seorang menteri, gubernur, bupati, dan aparat birokrasi dapat menimbulkan efek kekerasan.

Negara memonopoli kekuasaan dengan sendirinya memonopoli kekuatan dan penggunaan paksaan serta kekerasan. Kekerasan yang digunakan pemerintah biasanya diselubungi pertimbangan rasional dan moral seperti demi pembangunan, demi kepentingan umum, dan demi kesejahteraan umum.

Harian *Kompas* (6 Februari 1997) menyajikan pikiran dari berbagai pakar seperti komunikasi, psikologi sosial, kriminologi, politik, sosiologi, dan hukum serta perspektif

70 *Kompas*, 6 Februari 1997

71 *Kompas*, 24 Februari 1997

aparatus keamanan yang melihat kerusakan sosial ini. Hasilnya bahwa kerusakan ini jauh lebih kompleks dari sebatas persoalan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan terhadap dominannya negara. Ada kekerasan yang bersifat insidental, permanen, dan sistemis. Namun, ada pula kekerasan yang muncul begitu saja secara spontan serta ada pula kekerasan yang dilembagakan.

Namun demikian, menurut Kuntowijoyo, potret perubahan sosial yang terjadi pada rentang 1990 sampai 1995, lebih ditentukan tiga kekuatan pengubah, yakni industrialisasi, urbanisasi, dan internasionalisasi. Industrialisasi sebagai proses telah mengubah desa menjadi desa ekonomi dengan ikatan-ikatan sosial yang melonggar sehingga mereka bekerja telah kehilangan basis agraris dan menjadi proletariat tulen yang sangat mudah sekali bertindak emosional. Industrialisasi dalam bingkai ini merupakan *the great transformation*. Sedangkan urbanisasi yang terjadi telah menularkan gaya hidup kota ke desa.

Bersamaan dengan itu, dinamika masyarakat internasional mengalami perubahan yang dapat memicu gerakan luar secara gradual yang apa oleh William R. Liddle disebut sebagai gejala *globalution*⁷². Menurutnya, proses perubahan sosial di tingkat dunia sedang menciptakan *new political resources* yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan reformis termasuk demokratisasi.

Sudut pandang lain, melihat akar kerusakan sosial yang terjadi secara tali-temali di berbagai daerah itu, dilakukan dengan menyalahkan perilaku aparat pemerintah dan capaian program pembangunan yang dikatakan tidak merata dan tidak adil. Kesenjangan sosial, ketidakpuasan, perilaku aparat yang korup dan kolusi, merupakan

72 *Kompas*, 6 Januari 1998

persoalan-persoalan yang disalahkan karena merupakan faktor-faktor yang menjadi sebab.

Sebuah pesan yang mencerminkan serangan seperti disampaikan Ismail Hasan Metareum. Dalam pernyataannya pada acara HUT PPP ke-24 di Kemayoran, memaparkan adanya hubungan antara situasi emosional masyarakat yang mudah meledak dalam kerusuhan massal dengan perilaku aparat pemerintah secara keseluruhan. Menurutnya, aparat negara maupun aparat keamanan saatnya menyadari situasi emosi masyarakat yang mudah meledak dan menjadi kerusuhan sosial tersebut. Kesadaran itu harus diikuti sikap untuk menghentikan perilaku korupsi, kolusi dan penyalahgunaan wewenang, hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, depolitisasi rakyat serta sikap mau menang sendiri.

Sumber pokok terjadinya krisis dan kerusuhan, dalam pandangannya adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan; arogansi kekuasaan dan kekayaan; korupsi dan kolusi; kebohongan yang tidak malu-malu mengatasnamakan kepentingan bangsa demi kejayaan kelompok; serta menggumpalnya tekanan batin rakyat yang tidak puas, akibat tergusur, kehilangan pekerjaan, diperlakukan kasar dan tidak manusiawi serta diskriminatif⁷³. Ryaas Rasyid mengatakan bahwa kerusuhan massa itu, diabsahkan oleh pandangan bahwa mereka merupakan korban pembangunan (*victim of development*), dan bukan merupakan seratus persen dari kegagalan mereka sendiri.⁷⁴

Ryaas Rasyid sampai pada sebuah kesimpulan jika menilik gejala besar yang menyertai perjalanan politik dan ekonomi Orde Baru selama tahun 1997, tidak berlebihan jika kerusuhan massa dapat ditafsirkan sebagai gangguan langsung ke jantung legitimasinya karena selama ini yang

⁷³ Kompas, 6 Januari 1997

⁷⁴ Kompas, 19 Desember 1997

menjadi sumber legitimasi bertitik tolak dari stabilitas politik dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Bahkan Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa para pelaku anarki itu sedang melakukan penghancuran terhadap simbol-simbol kekuatan ekonomi dan sosial yang menindas mereka secara akumulatif. Menurutnya, ini merupakan bentuk *civil disobedience* sebagai pembangkangan terselubung oleh masyarakat sipil.⁷⁵

Lebih jauh Ryaas Rasyid menilai bahwa ketika massa secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, meremehkan kehadiran petugas keamanan dan melecehkan harga diri sesama warga negara, maka pada saat itu sesungguhnya tidak ada lagi pemerintahan di dalam benak mereka. Karena pemerintahan pada tingkat pertama adalah sebuah sistem hukum, maka adanya pengingkaran terhadap pemerintahan itu, walaupun berlangsung hanya beberapa jam, harus diwaspadai sebagai gangguan yang serius.⁷⁶

Pejabat tinggi militer menilai kerusuhan-kerusuhan yang terjadi bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan terpisah-pisah serta spontan. Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung melihat bahwa ada aktor-aktor intelektual di balik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada kelompok-kelompok ekstrem atau kalangan elite yang senang menggunakan penghasutan dan mengetahui cara-cara menghindari perangkap hukum⁷⁷. Tanjung menunjuk pelaku kerusuhan sebagai antipemerintah⁷⁸. Soeharto sendiri mengungkapkan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan instabilitas yang strategi gerakannya mengikuti strategi Mao Ze Dong dengan strategi dan teori desa-kota.⁷⁹

⁷⁵ *Kompas*, 17 Januari 1997

⁷⁶ *Kompas*, 19 Desember 1997

⁷⁷ *Kompas*, 8 Januari 1997

⁷⁸ *Kompas*, 1 Februari 1997

⁷⁹ *Kompas*, 18 Januari 1997; *Kompas*, 1 Februari 1997

Sejalan dengan hal itu Sudomo (Ketua DPA) mengatakan bahwa bentuk-bentuk kerusuhan yang meningkat karena memang ada kepentingan yang ingin mendiskreditkan pemerintah⁸⁰. Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (Pangdam II/Sriwijaya) juga menyerukan untuk mewaspadaai ada kelompok yang berkeinginan melakukan perombakan terhadap tatanan dan sistem politik yang berlaku.

Menurut Yudhoyono, pihak ketiga itu selalu ada dan merupakan individu, kelompok, dan organisasi yang tidak puas terhadap pemerintah atau memiliki kepentingan sendiri yang berhubungan dengan kekuasaan politik. Pihak ketiga ini dapat menyiapkan sendiri dan menggerakkan pemicu sendiri namun dapat pula mengeksploitasi kerusuhan yang dipicu oleh pihak lain⁸¹.

Mereka yang mengambil bentuk kerusuhan itu, dapat saja dipahami sebagai cara mempertahankan keadaan, kesinambungan sistem, keberlangsungan kebijakan dan platform politik. Tekanan yang diciptakan dengan mengambil bentuk kerusuhan, telah menimbulkan akibat-akibat serius. Seperti yang dikatakan Ryaas Rasyid bahwa kerusuhan massal merupakan bentuk pembangkangan sipil, sebagai bentuk ketidakpatuhan dan tidak mempedulikan dasar-dasar yang sah bagaimana pemerintah itu harus ditaati.

Sebaliknya, kerusuhan menjadi dasar pendistorsian terhadap kedudukan dan peran pemerintah. Pemikiran-pemikiran ini melihat bahwa kerusuhan, merupakan pantulan langsung bagaimana pemerintah telah melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap warga negaranya. Kerusuhan hanya merupakan kausal dari kekerasan yang bersifat prosedural dan sistematis yang dijalankan pemerintah. Jadi, dalam kutub ini, kerusuhan merupakan

80 *Kompas*, 15 Januari 1997

81 *Kompas*, 5 Februari 1997, *Kompas*, 11 Januari 1997

refleksi dari perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai penyelewengan birokrasi pemerintah seperti korupsi, kolusi, ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan dan ketidakadilan penerapan hukum.⁸²

J.E. Sahetapy (Guru Besar Universitas Airlangga) berpendirian bahwa meskipun negara Indonesia dirumuskan dan merupakan negara hukum—bukan sebagai negara kekuasaan, kekerasan struktural telah dijalankan dengan efektif dalam sistem hukum dan pemerintahan. Kekerasan struktural bukanlah kekerasan fisik melainkan sesuatu gejala yang berdampak psikis, misalnya pada pernyataan-pernyataan para pejabat pemerintah seperti gebuk, *mbalelo* atau Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Kekerasan struktural ini juga dapat dicermati pada hegemoni pikiran dan bahasa yang memberikan penafsiran atas realitas yang terjadi.⁸³

Perdebatan semacam itu, masih menyisakan masalah, siapa yang secara riil menjadi aktor dan tokoh intelektualnya, serta massa yang seperti apa yang melakukan kerusuhan. Seperti yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono bahwa ketidakjelasan tentang siapa sesungguhnya yang menunggangi kerusuhan massal, menjadi jalan pintas dengan menunjuk kambing hitam.⁸⁴

Kwik Kian Gie mengatakan, "Yang jelas adalah golongan yang tertinggal dalam pembangunan."⁸⁵ Menurutny, ada tiga golongan yang mempunyai potensi melakukan kekerasan karena mereka relatif berani menanggung risiko masuk penjara atau meninggal dunia dalam kerusuhan.

Pertama, mereka adalah kaum buruh dan pengangguran yang mengerti masalah dan perutnya lapar. Dalam pandangannya, kedua golongan ini mengerti bahwa kemampuan bangsa untuk meningkatkan taraf hidup

82 *Kompas*, 20 Januari 1997

83 *Kompas*, 20 Januari 1997

84 *Kompas*, 22 Januari 1997

85 *Kompas*, 6 Januari 1997

mereka, tetapi hal itu tidak terjadi karena kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok kecil orang. Sedangkan golongan ketiga adalah mahasiswa yang menurutnya merupakan golongan yang relatif berani karena idealisme yang disertai romantisme pergerakan.⁸⁶

Argumentasi semacam itu ternyata juga belum memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap apa, siapa dan bagaimana kerusuhan massa terjadi. Misalnya, Abdurrahman Wahid, menuding bahwa kerusuhan di Tasikmalaya melibatkan Humanika yang mengait-kaitkan nama Adi Sasono dan Egi Sujana. Tudingan ini kemudian dibantah Bursah Syarnubi (Humanika) bahwa Humanika didirikan empat organisasi Cipayung (HMI, PMII, PMKRI, dan GMNI) untuk mewadahi diskusi tentang berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat dan tidak pernah merekomendasikan kerusuhan.⁸⁷

Jenderal R. Hartono juga menuding ada anggota legislatif yang berasal dari Jawa Timur terlibat dalam kerusuhan di Kalimantan Barat. Tudingan ini juga dibantah Ismail Hasan Metareum. Sebab yang dimaksud tuduhan itu adalah anggota legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yakni K.H. Amin Sukron dan Abdullah Schal yang mengadakan kunjungan ke Kalimantan Barat sebelum terjadinya kerusuhan.

Jenderal Feisal Tanjung juga menuding Partai Rakyat Demokartik, Partai Uni Demokrasi Indonesia dan Majelis Aliansi Rakyat Indonesia sebagai kelompok-kelompok oposan yang melakukan politik praktis yang kegiatan-kegiatannya memiliki kaitan dengan kerusuhan. Kelompok-kelompok ini menurutnya menggunakan kerusuhan sebagai upaya memutarbalikan fakta, oposan, mengekspos eksesekses negatif pembangunan dan menuntut perubahan lima

⁸⁶ *Kompas*, 6 Januari 1997

⁸⁷ *Kompas*, 30 Januari 1997

undang-undang politik tanpa memperhitungkan situasi nyata kehidupan masyarakat.⁸⁸

Adalah menarik, ketika Ahmad Bagja (Sekjen PBNU), Bambang W. Soeharto, dan Effendi Jusuf (Kosgoro) memberikan pandangan bahwa kerusuhan massa itu merupakan bias dari permainan elite politik dan fragmentasi elite politik⁸⁹. Pandangan memberi pencitraan bahwa Presiden Soeharto telah menurun kemampuannya dalam mengontrol perilaku para elite politik yang menjadi bawahannya.

Menurut mereka, kerusuhan massa disebabkan adanya keretakan struktural dan fragmentasi politik yang terjadi pada elite politik. Karena fragmentasi dan keretakan ini mereka mengkooptasi kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.⁹⁰

Bob S. Hadiwinata mengatakan bahwa kebangkitan masyarakat sipil (madani) di Indonesia dipengaruhi oleh politik sektarian yang dikobarkan oleh pelbagai kalangan kepentingan yang menggunakan sentimen SARA dalam rangka penggalangan massa untuk ikut dalam perebutan kekuasaan.

Ada tiga bentuk gerakan sosial yang diidentifikasikannya. Pertama, resistensi simbolik yang meliputi tindakan langsung untuk mengontrol dominasi negara. Kedua, resistensi pragmatis sebagai reaksi langsung terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, resistensi simbolik pragmatis yang berupa aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial politik yang lebih baik.

Dari kondisi yang berkembang, elite politik melihat kebangkitan masyarakat sipil sebagai momentum yang dapat mempercepat proses pergantian kepemimpinan nasional. Suksesi kemudian dianggap sebagai topik yang

88 *Kompas*, 22 Februari 1997

89 *Kompas*, 10 Januari 1997; *Kompas*, 3 Februari 1997

90 *Kompas*, 4 Maret 1997

mendesak untuk dibicarakan. Persaingan dalam rangka suksesi ini membuat sejumlah pemimpin secara perlahan, tetapi pasti telah meninggalkan atribut sebagai administrator, bergerak menjadi *solidarity makers* yang menggalang dan menyatukan kekuatan untuk melawan pemerintahan.⁹¹

Beberapa faktor yang disebut-sebut menjembatani terbentuknya kelompok massa dan menimbulkan kerusuhan massa seperti keyakinan kolektif potensial, adanya informasi yang menyesatkan, insinuasii pihak lain, adanya kerumunan, terbentuknya deindividuasi, munculnya situasi pemicu, pencarian simbol yang merepresentasi musuh, kondisi situasional yang memungkinkan pengrusakan dan penjarahan, penggalangan massa dan berujung pada kekerasan massa.

Ketika perasaan tidak puas yang lama terpendam itu menemukan momentumnya dan meledak dalam bentuk aksi kekerasan masyarakat yang bersifat massa-anomi, maka sasarannya tidak lagi menjadi penting. Apa saja yang dijumpai massa yang tengah emosional dapat menjadi sasaran pengrusakan seperti motor, mobil, pom bensin, bank, toko, kantor, gereja, masjid, rumah penduduk bahkan kantor-kantor pemerintah.

Sebagai contoh, kerusuhan di Tasikmalaya, tercatat jumlah toko yang dirusak sebanyak 68 buah, 43 di antaranya dibakar termasuk swalayan Matahari, jumlah pabrik yang dibakar ada 4 pabrik dan 7 kendaraan dibakar⁹². Kerusuhan di Rengasdengklok tercatat ada 26 mobil dirusak sebagian di bakar, 77 rumah rusak, 4 pabrik dibakar, 73 toko rusak, 1 sekolah rusak, 1 bioskop rusak, 2 bank dirusak, satu motor dibakar, 4 geraja dibakar dan 1 vihara dibakar⁹³. Kerusuhan di Jakarta, di Mal Ciputra ada sekitar 15 mobil

91 *Kompas*, 6 Agustus 1997

92 *Kompas*, 2 Januari 1997

93 *Kompas*, 31 Januari 1997

dibakar, rambu-rambu lalu lintas dicabuti dan dirusak, satu bus dibakar, hotel dibakar, sebuah truk diluncurkan tanpa pengemudi yang menewaskan dua orang seketika, massa juga melempari aparat keamanan dengan batu dan botol-botol.⁹⁴

Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk kerusuhan massa itu kerap kali menyatu dalam gerakan dan aksi mahasiswa. Dua situasi antara demonstrasi mahasiswa dan kerumunan massa, dalam interaksi yang terjadi sering menjadi pemicu kerusuhan massa. Akibatnya, pada tingkatan tertentu, tidak mudah lagi dibedakan antara kerusuhan massa dan demonstrasi mahasiswa.

Banyak sekali aksi dan demonstrasi yang dilakukan dengan mahasiswa mengalami perubahan menjadi kerusuhan massa yang tidak terkendali. Lokasi-lokasi kerusuhan itu sendiri sering berdekatan dengan universitas atau kampus-kampus di mana para mahasiswa berdemonstrasi seperti Universitas Katolik Atmajaya (Jakarta) dan Trisakti, misalnya.

Syarwan Hamid (Wakil Ketua DPR/MPR) menunjuk para perusuh dan penjahar yang terlibat dalam kerusuhan massa sebagai pencoleng. Menurutnya, opini harus dibentuk bahwa pencoleng adalah pencoleng. Menurutnya, reformasi perlu terus dilakukan, tetapi harus dibedakan yang berjuang untuk kepentingan reformasi itu adalah mahasiswa, sedangkan yang melakukan pembakaran, pengrusakan dan penjarahan adalah pencoleng.⁹⁵

Dalam situasi yang semakin tak terkendali, dengan pola kerusuhan massa telah menjalar ke mana-mana, berbagai bentuk tekanan terhadap Orde Baru muncul secara simultan. DPP KNPI misalnya, yang sebelumnya begitu percaya memberikan dukungan terhadap kepemimpinan nasional

94 *Kompas*, 14 Mei 1998

95 *Suara Karya*, 15 Mei 1998

Soeharto untuk masa bakti 1998-2003 telah mendesak DPR untuk meminta MPR agar menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Mandataris/MPR⁹⁶. Ini merupakan petanda awal yang mengarah langsung pada kedudukan Soeharto. Hal yang sama dilakukan Kosgoro, Kelompok Cipayung, dan GMNI.

Demikian pula Majelis Amanat Rakyat yang dibentuk Amien Rais dengan sedikitnya 50 tokoh nasional yang ada di dalamnya seperti Dawam Raharjo, Emha Ainun Nadjib, Faisal Basri, Sujana Sapiie, Rizal Ramli, Ali Sadikin, Arifin Panigoro, K.H. Mustofa Bisri, Ichlasul Amal, Emil Salim, Hendaridi, dan lain-lain mengeluarkan tiga butir pernyataan. Satu di antaranya adalah meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri.⁹⁷

Peristiwa demi peristiwa pada akhirnya mempertegas wujud dan gambar asli arah tujuan gerakan-gerakan politik yang ada, yang menyatukan secara bulat berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, buruh, termasuk banyak pula dari mereka yang sebelumnya memangku jabatan pada masa Orde Baru. Pesan-pesan yang menyuarakan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya semakin keras dan terbuka di samping tuntutan-tuntutan lain tentang apa yang mereka maksudkan sebagai Reformasi Total.

Posisi Dilematis ABRI

Ketika konsep ketentaraan dan keprajuritan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diartikan sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, maka di dalamnya, muncul dilema-dilema, manakala militer dihadapkan pada pilihan. Apakah ia akan memihak pada

96 *Kompas*, 15 Mei 1998

97 *Kompas*, 15 Mei 1998

rakyat, atau ia akan memihak pada pemerintah ketika antara rakyat dan pemerintah berkonflik.

Sementara di dalam UUD 1945 sendiri, presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan pemerintahan, merupakan atasan langsung dari kelembagaan tentara dan karena itu harus dijaga kehormatannya. Masalahnya akan dilematis ketika misalnya apakah mempertahankan kepala negara dan pemerintahan lebih penting dari membela rakyat. Dalam keadaan normal, antara rakyat dan pemerintah tidak perlu dipertentangkan sepanjang sumber-sumber legitimasi sebagai hak untuk memerintah diterima oleh rakyat.

Dalam posisi itu, seperti yang terlihat dalam gerakan reformasi tampak jejak-jejak pesan yang memperlihatkan persoalan memihak dan mempertahankan pemerintah termasuk Soeharto atau mendukung tuntutan reformasi yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Kebimbangan ini pada akhirnya menimbulkan dilema.

Cara bagaimana mereka mengkomunikasikan pikiran tentang gerakan reformasi dapat dipakai untuk melihat indikasi, di mana ABRI menempatkan diri dari dua ketegangan itu. Dalam kaitan ini, kiranya tidak berlebihan, untuk melihat hal ini pada tiga persoalan sekaligus, yakni pendirian ABRI pada soal pencalonan Soeharto masa bakti 1998-2003, pikiran; pendirian terhadap demonstrasi mahasiswa dan pendirian terhadap kerusuhan-kerusuhan massa.

Sejak awal, ABRI melihat bahwa Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 dipandang sebagai dua peristiwa yang sangat penting yang akan menjamin keberlangsungan sistem politik yang telah berjalan. Jenderal (TNI) Feisal Tanjung (Pangab) telah mengingatkan bahwa setiap upaya yang mengganggu dan menggagalkan Pemilu

1997 dan Sidang Umum MPR 1998 agar ditindak tegas dan tidak dapat ditawar-tawar.⁹⁸

ABRI sendiri di tengah perubahan sosial dan politik, telah menyadari perlunya kembali melihat perumusan Dwifungsi ABRI. Kesadaran ini bahkan dihasilkan dalam sebuah Rapat Pimpinan ABRI tahun 1997. Brigadir Jenderal (TNI) S. Supriadi (Kepala Pusat Penerangan ABRI) mengatakan bahwa rapat menghasilkan kesepakatan untuk memikirkan upaya-upaya mereaktualisasikan konsep Dwifungsi ABRI untuk penyesuaian tugas dan peran agar ABRI tidak tertinggal dalam arus perkembangan.

Menurutnya dinamika sosial dan politik akan terus meningkat dan diwarnai oleh berbagai kegiatan yang berpengaruh terhadap sistem demokrasi Pancasila, suhu politik yang meningkat, serta adanya nuansa persaingan antarorganisasi sosial politik.⁹⁹

Di dalam perubahan tersebut, ABRI sangat percaya diri yang tampak pada keinginan untuk menyukseskan Pemilihan Umum dan Sidang Umum MPR serta mencalonkan kembali Soeharto untuk menjabat sebagai presiden untuk masa bakti 1998-2003. Pernyataan Wakil Gubernur Lemhanas Juwono Sudarsono yang menjelaskan bahwa untuk lima tahun mendatang, belum ada pemimpin sipil yang mampu tampil dalam panggung kepemimpinan nasional kecuali dari ABRI adalah bentuk lain dari kepercayaan diri tersebut.¹⁰⁰

Sedemikian tinggi kepercayaan diri ABRI juga tecermin dari ucapan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Z.A. Maulani bahwa peran sosial politik ABRI tidak akan menjadi kempis di pasca kepemimpinan Presiden Soeharto. Peranan ABRI tidak akan berubah banyak, karena ABRI dalam sejarah

⁹⁸ *Kompas*, 7 Maret 1997

⁹⁹ *Kompas*, 5 April 1997

¹⁰⁰ *Kompas*, 9 September 1997

kehidupannya sampai sekarang tetap menjalankan perannya sebagai pemersatu bangsa. Bentuk akhir peran sosial politik ABRI menurutnya akan ditentukan oleh rakyat, sebab peran ABRI yang ada merupakan hasil konsensus MPR tahun 1969. Demikian pula konsep tentang stabilitas, perlu didefinisikan tentang cara bagaimana bangsa Indonesia menegakkan stabilitas nasional.¹⁰¹

Dalam skala kecil dan sporadis, ABRI bertindak cepat dengan melakukan penangkapan terhadap aksi-aksi demonstrasi yang menyerukan pemboikotan pemilu dan golput yang dilakukan mahasiswa sekalipun ini dilakukan di dalam kampus Universitas Gadjah Mada pada bulan April 1997.¹⁰²

Seperti juga demonstrasi yang dilakukan di UNS Solo pada bulan Maret 1998, Letnan Kolonel (Pol.) Soewangsa (Kapolres Surakarta) menilai bahwa aksi tersebut telah disusupi PKI. ABRI, sedemikian jauh tetap berpendirian bahwa apa yang dilakukan aparat keamanan merupakan bentuk pengendalian massa dan belum merupakan tindakan represif yang berniat melumpuhkan.¹⁰³

Tetapi, arah perkembangan demonstrasi dan kerusuhan semakin rumit. Pertama, tindakan penangkapan tidak menyurutkan gerakan itu sendiri. Bahkan aksi ini terjadi hampir di setiap kampus yang ada di Indonesia. Kedua, pola interaksi yang terjadi sering diwarnai dengan bentrokan. Ketiga, aksi massa itu dimatangkan dengan kondisi krisis ekonomi. Keempat, aksi itu sendiri telah melibatkan tokoh-tokoh yang banyak dikenal luas dalam masyarakat dan mereka berada di tengah-tengah aksi mahasiswa.

Misalnya, secara terbuka Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa NU tidak menghendaki dipertahankannya

101 *Kompas*, 27 Februari 1997

102 *Kompas*, 2 April 1997

103 *Kompas*, 9 April 1998

status quo dalam panggung politik nasional. Menurutnya, munculnya gerakan yang terjadi di mana-mana yang menuntut kebebasan, mau tidak mau pihak keamanan harus berunding dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat.¹⁰⁴

Amien Rais juga menyatakan bahwa proses demokratisasi telah bergerak di masyarakat luas. Bila pimpinan MPR tidak membuka mata dan telinga untuk melihat keinginan demokratisasi itu, kondisi ini hanya akan mempertegas sikap rakyat yang selama ini dianggap lemah¹⁰⁵. Pernyataan itu, dapat memberi motivasi bagi suatu tindakan tegas rakyat, yang dapat mengarah pada kekerasan, aksi massa atau *people power* itu sendiri. Disadari atau tidak ini merupakan cara yang membuka ruang bagi tindakan-tindakan yang menimbulkan penentangan itu sendiri.

Jenderal (TNI) Wiranto menilai bahwa dari pada demonstrasi dan kerusuhan, dialog merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa untuk saling mengerti, saling memahami, dan akhirnya ada kesesuaian, ada kesatuan visi untuk melanjutkan pembangunan. Dialog ini dalam bingkai keinginan Wiranto bukan hanya suatu penyerapan tetapi pengertian mengenai posisi masing-masing, visi masing-masing yang akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa bila bersinergi¹⁰⁶. Letnan Jenderal (TNI) Arie Kumaat seperti memberi kepastian bahwa dialog tidak sebatas bertujuan merumuskan konsep reformasi, melainkan ABRI siap memberi andil dalam melaksanakan hasil dialog tersebut.

Nyatanya, memenuhi tuntutan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya, merupakan permintaan yang sangat tidak mungkin¹⁰⁷. Itu pun ada jenderal yang mengatakan

104 *Kompas*, 24 November 1997

105 *Kompas*, 25 November 1997

106 *Kompas*, 9 April 1998

107 *Kompas*, 2 April 1998

bahwa jangan berharap banyak dari dialog sehingga berpikir bahwa dengan dialog lantas semuanya selesai.

Sampai pada tingkatan yang paling kritis dan genting pun ABRI secara konsisten berupaya agar kepemimpinan Presiden Soeharto tetap dipertahankan. Wiranto dalam upaya terakhirnya di tengah tuntutan agar Soeharto mundur yang datang silih berganti termasuk dari Ketua DPR/MPR Harmoko, tetap berpendirian menjaga kursi kepresidenan.

Ini paradoks-paradoks terkait dengan pernyataan-pernyataan yang terkesan melupakan terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya tentang kepemimpinan nasional dan soal pencalonan kembali Presiden Soeharto untuk masa bakti 1998-2003. Bagaimanapun, ini hal yang sulit apalagi mengingat hubungan-hubungan kekuasaan yang pernah terjalin yang lama. Pernyataan itu, sedikit banyak telah mengingkari keyakinan-keyakinan mereka sebelumnya.

Di penghujung waktu pada saat-saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, terhadap situasi-situasi genting yang berkembang, Wiranto mengatakan bahwa masih hangat dalam ingatan kita, perusakan, pembakaran, penjarahan yang dilakukan secara kalap masyarakat yang lupa diri, termakan hasutan, dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok tertentu.

Dikatakannya, betapa berat risiko dari suatu komunitas yang kehilangan kontrol sesaat, atas dirinya mengingkari agama, etika, dan hukum. Mereka lupa atau bahkan tidak ambil peduli terhadap korban jiwa dan harta benda masyarakat, hukum, dan konstitusi¹⁰⁸. Wiranto menilai bahwa pendapat Harmoko yang menyarankan agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri demi

¹⁰⁸ Kompas, 18 Mei 1998; *Angkatan Bersenjata*, 18 Mei 1998

persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan pendapat yang tidak mempunyai ketentuan hukum.

Pendirian ABRI yang seperti itu tidak terlalu mengejutkan. Menurut Crouch, ABRI akan selalu loyal kepada pemerintah. Crouch menilai bahwa mereka mengagumi Presiden Soeharto, menghormati dan merasa amat berjasa bagi Indonesia. Namun begitu, ABRI dinilainya tidak menyukai tindak kekerasan, tetapi juga tidak menyukai instabilitas, karena ideologi mereka adalah tentara rakyat (Ailit, 1998:207). Dengan demikian, pola merapat dan ingin mengetahui secara dekat, dari hati ke hati, terhadap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, sejauh itu pun tidak mengubah pendirian ABRI bahwa reformasi harus dilakukan secara gradual dan konstitusional.

Demikian pula pendirian ABRI terhadap berbagai bentuk kerusuhan yang terjadi, mereka mengelola persoalan ini secara persuasif dan retorik melalui pengembangan pernyataan tentang adanya auctor intelektual, penegakan hukum dan konstitusi, persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas politik, adanya ekstrem, dan sampai pula menghubungkan soal kerusuhan itu dengan PKI.

Sementara pesan-pesan yang harus dihadapi dan menyerang pemerintah adalah pernyataan-pernyataan aktual dan yang mendiskreditkan pemerintah. Pemerintah dihadapkan pada sejumlah pandangan yang menyerang kedudukan dan sumber legitimasinya. Dikatakan bahwa kekerasan dan kerusuhan merupakan akibat dari kekerasan negara, dan merupakan dampak langsung dari proses pembangunan.

Pandangan ini dirangkai dengan pesan-pesan lain seperti penggusuran, ketidakadilan ekonomi, kolusi, korupsi, nepotisme, krisis kepercayaan, keterbukaan, demokratisasi, reformasi ekonomi, reformasi politik, pengangguran yang tinggi sebagai bentuk kegagalan pemerintah, ditambah dengan

krisis ekonomi yang menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi selama ini telah dijalankan secara keliru. ❖



BAB 6

DRAMA JATUHNYA SOEHARTO

Posisi Menjelang Jatuh

Secara keseluruhan pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut kepemimpinan nasional, tidak dapat dilepaskan dari konteks pribadi Soeharto. Mekanisme pencalonan kepemimpinan nasional tidak mampu menghasilkan pemimpin nasional selain Soeharto. Kondisi ini telah diperkirakan akan menghasilkan sebuah transisi kepemimpinan yang menimbulkan krisis.¹

Disadari atau tidak, siapa pun yang akan menjabat sebagai presiden untuk masa bakti 1998-2003 sebenarnya telah terbentuk bayang-bayang, beban dan tanggung jawab yang akan dipikul sangat berat. Masalah-masalah itu berkembang secara simultan seperti krisis ekonomi, kerusuhan massa, dan demonstrasi mahasiswa yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

¹ *Kompas*, 3 September 1997

Melalui krisis ekonomi yang gejalanya mulai terlihat pada bulan Mei 1997, banyak pihak mulai terbuka menunjuk pada praktik-praktik monopoli, proteksionisme, kolusi, dan nepotisme sebagai akar penyebabnya². Struktur perekonomian dikatakan sebagai perekonomian yang rapuh dan tidak kukuh serta tidak mencerminkan demokratisasi ekonomi, intervensi kebijakan yang salah arah, regulasi yang tidak tepat, monopoli, proteksionisme yang bercampur subsidi, serta industri yang tidak efisien dan merugi.

Di dalam kontroversi itu, ada pencampuradukan antara fakta objektif dengan tujuan subjektif dari keinginan-keinginan untuk melakukan pergantian kekuasaan. Ada kontradiksi-kontradiksi yang berkembang dan dikembangkan. Krisis ekonomi dikatakan bukan merupakan soal fundamental ekonomi yang jelek, tetapi lebih merupakan krisis kepercayaan³. Dengan mengalihkan krisis sebagai krisis kepercayaan, maka dengan sendirinya, terbuka dalih untuk mencari-cari sumber-sumber penyebab krisis kepercayaan itu.

Dengan demikian, tindakan apa pun yang dilakukan untuk memperbaiki krisis, tidak akan mempunyai arti apa-apa. Karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah tidak akan menghentikan mereka yang menyerukan perubahan dan pergantian. Tema-tema yang berkembang di seputar krisis kepercayaan ini mencakup antara lain korupsi, monopoli, proteksi, kolusi, subsidi, inefisien, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi ekonomi, reformasi ekonomi serta reformasi politik.

Dengan tuntutan-tuntutan itu, satu per satu kebijakan yang telah ditempuh dan berakar, tiba-tiba dicabut. Apa yang mereka sebut sebagai reformasi struktural dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat secara

2 *Kompas*, 4 Maret 1997

3 *Kompas*, 18 Agustus 1997

keseluruhan. Kerusuhan dan amuk massa sebagai akibat implementasi kebijakan yang disyaratkan itu, menjadi pintu berikutnya untuk meminta lebih jauh, yakni melakukan reformasi politik termasuk meminta Soeharto mundur dari jabatannya.

Mahasiswa dalam melakukan aksi dan demonstrasi sebagai respons terhadap situasi sosial, politik dan budaya yang mereka hadapi, menyuarakan hal yang sama. Mereka tidak hanya mempersiapkan peran yang mempunyai signifikansi politik, tetapi sekaligus menempatkan diri sebagai agen perubah sosial (Habermas, 1971).

Desain gerakan mahasiswa ini telah dikomunikasikan sedemikian jauh, antisipatif, heroik, dan futuristik. Dengan pola aksi dan demonstrasi yang terjadi secara tali-temali dan hampir serentak di kampus-kampus yang ada di seluruh wilayah Indonesia, benturan-benturan dengan aparat keamanan, tidak dapat dihindarkan. Korban baik yang meninggal dunia atau pun yang luka-luka, menjadi tidak terhindarkan yang disertai adanya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana fisik. Sekalipun menteri pendidikan dan kebudayaan melarang dilakukannya politik praktis oleh mahasiswa, larangan ini tidak berjalan efektif. Termasuk upaya yang ditempuh Jenderal Wiranto untuk melakukan dialog.

Ada yang curiga bahwa desain dialog hanyalah diperuntukkan untuk meredam tuntutan-tuntutan reformasi yang tengah berlangsung karena dialog tersebut hanya diperalat oleh kalangan tertentu. Dialog ini pada akhirnya terselenggara tanpa dihadiri perwakilan-perwakilan mahasiswa dari universitas-universitas besar di Indonesia yang selama ini menjadi barometer gerakan dan aksi mahasiswa seperti UI, UGM, dan ITB. Di dalam dialog itu pun, mencuat pertanyaan mengenai tuntutan mahasiswa yang meng-

hendaki Presiden Soeharto mundur dari jabatannya selain tuntutan reformasi ekonomi dan politik.

Di dalam rangkaian perjalanan aksi dan demonstrasi mahasiswa, ada keluasan lingkup yang diperdebatkan untuk saling memenangkan persaingan kepentingan. Ada pihak-pihak yang menunjukkan dukungan terhadap aksi dan gerakan itu, tetapi ada pula pihak-pihak yang menghendaki aksi dan demonstrasi itu berhenti. Antara keinginan untuk memberi dukungan dan menghambatnya, masing-masing memiliki pertimbangan rasional, etis, dan moral yang mencerminkan berbagai dimensi manusia dan kapasitas yang dimilikinya.

Kejadian-kejadian kerusuhan massa tidak dapat dilepaskan dari kejadian-kejadian lain seperti aksi dan demonstrasi mahasiswa, krisis ekonomi, dan kepemimpinan nasional yang mengkonstruksi tema-tema komunikasi yang membentuk sebuah drama perubahan serta tuntutan tentang reformasi.

Menurut Burke (1969) ciri dari drama adalah pengkambinghitaman yang menunjukkan tensi dramatis dari suatu krisis atau tragedi tertentu. Sebagai drama, reformasi terbentuk melalui proses formatif dari berbagai kejadian, di dalam setiap kejadian ditandai adanya tindakan-tindakan komunikasi yang mencerminkan motif-motif tindakan secara keseluruhan. Seperti pada peristiwa-peristiwa lain, masing-masing pihak berusaha menentukan "*definition of critical*" terhadap isu yang diperdebatkan dalam upayanya memenangkan persaingan komunikasi.

Tidak semua orang berpikir dan bertindak dalam cara yang sama. Dalam perspektif ini, di dalam peristiwa itu orang-orang akan memilih di antara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang menjelaskan sebuah kejadian tertentu. Cerita-cerita itu yang akan menyusun dan me-

nyajikan sebuah pandangan terhadap realitas dunia yang merupakan seleksi, refleksi atau defleksi melalui deskripsi sebuah situasi tertentu yang mencakup karakter, tindakan dan konteks yang mengelilinginya (Foss, 1996:400).

Secara umum, perdebatan melihat dua hal. Apa yang menjadi sebab-sebab kerusuhan massa dan siapa yang menjadi pelaku kerusuhan massa tersebut. Ada aktor-aktor politik yang melihat kerusuhan-kerusuhan massa, sebagai produk kekerasan negara yang telah berlangsung lama sebagai kekerasan struktural. Apa yang penting dari pernyataan semacam ini adalah adanya tujuan suasisif bahwa sumber kesalahan dalam radikalisme massa, adalah pemerintah itu sendiri. Kekerasan yang termanifestasikan dalam kerusuhan dinyatakan sebagai pantulan langsung dari cara pemerintah melakukan berbagai kekerasan terhadap warga negaranya.⁴

Dalam pandangan ini dikuatkan dengan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat; penyalahgunaan wewenang dan jabatan; arogansi kekuasaan dan kekayaan; serta soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerusuhan diabsahkan oleh pandangan mereka, yang melihatnya sebagai korban dari pembangunan.⁵

Kerusuhan-kerusuhan massa yang disertai dengan penjarahan, pembakaran, pengrusakan serta sering menimbulkan korban luka-luka dan kematian itu juga dinyatakan sebagai penghancuran terhadap simbol-simbol kekuatan ekonomi serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pemerintah.

Pembicaraan lain sebagai penyebab kerusuhan tersebut tampak dari pernyataan yang melihatnya sebagai akibat adanya keretakan struktural dan fragmentasi elite politik. Karena keretakan dan fragmentasi ini, timbul bias permainan

⁴ *Kompas*, 20 Januari 1997

⁵ *Kompas*, 19 Desember 1997

politik yang menimbulkan kerusuhan. Dengan demikian, kerusuhan merupakan sebuah desain sebagai akibat sejumlah elite politik telah melakukan kooptasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai kepentingan politiknya yang kemudian memanfaatkan isu SARA, kesenjangan sosial, ketidakadilan, kolusi, korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Karena itu, pemerintah sering menyatakan bahwa di balik kerusuhan massa, ada aktor-aktor intelektual yang menghasut dan antipemerintah. Mereka adalah sekelompok kecil kaum terpelajar yang berkecukupan yang selalu menghembuskan situasi pesimis⁶. Ada pertentangan yang sekaligus menunjukkan persaingan dari satu pernyataan ke pernyataan yang lain, yang satu sisi melihat sumber penyebab itu terletak pada pemerintah, sedangkan di sisi lain, melihatnya adanya permainan elite politik atau aktor-aktor intelektual yang antipemerintah.

Dalam pendekatan retorika, diakui bahwa tanggung jawab terhadap krisis, yang meliputi seberapa luas dampak yang ditimbulkan dan seberapa lama sifat keberlangsungan krisis tersebut, sebenarnya merupakan kontestasi terhadap berbagai bentuk komunikasi yang mengemuka (Heath and Millar, 2004: 5).

Peran informasi, pembersihan dan interpretasi memainkan peran penting. Masalah retorika muncul ketika keadaan darurat seperti kejadian-kejadian kerusuhan, pembakaran, volatilitas rupiah dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang serta mendelegitimasi pemerintah membutuhkan sebuah pernyataan dari satu atau lebih orang-orang atau mereka yang ada di dalam pemerintah itu (Bitzer, 1968: 6).

Bila dicermati, pernyataan-pernyataan yang disampaikan ABRI menunjukkan usahanya untuk mengendalikan

6 *Kompas*, 3 Juni 1997

tuntutan-tuntutan perubahan yang telah mengarah tindakan destruktif dan anarkis. Pernyataan-pernyataan yang ada cukup beragam, termasuk ciri umum ABRI melakukan pernyataan yang bersifat *blame placing*. Tema-tema seperti adanya pihak ketiga, aktor intelektual, disusupi PKI, stabilitas politik dan keamanan, merupakan tema-tema yang secara konsisten dipegang teguh untuk menjamin keberlangsungan krida pembangunan nasional yang diyakini juga berdasarkan prinsip perubahan dan konsistensi.

Sikap ABRI semakin dilematis, ketika gerakan dan tuntutan telah menjadi begitu masif yang datang dari beberapa arah, yakni berbagai kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, purnawirawan, ABRI, dan ulama (Wiranto, 2003: 79). Kondisi ini tidak mungkin, ABRI akan mengambil tindakan represif yang akan menimbulkan jatuh korban. Meskipun pengingkaran terhadap pemerintah telah diperlihatkan begitu nyata, namun sampai sejauh itu ABRI mampu menahan diri serta tidak melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi dan demonstrasi.

Seperti yang dikatakan Harold Crouch (2003), meskipun mahasiswa waktu itu mengatakan "Soeharto harus turun", "Gantung Soeharto", dan macam-macam kalimat keras lain, Jenderal Wiranto yang kala itu menjadi Menhankam/Pangab menjelang Presiden Soeharto mengundurkan diri, masih mentolerir dengan mengatakan mahasiswa bisa berdemonstrasi asal tidak di luar kampus.

Sampai pada akhir upaya ABRI untuk tetap mempertahankan kedudukan Soeharto, Wiranto masih menunjukkan konsistensi itu. Dalam konferensi pers, Jenderal TNI Wiranto membuat pernyataan yang mencerminkan kegusaran yang dalam, keprihatinan serta kedukaan yang jelas, namun tetap konsisten untuk tetap berusaha memelihara dan menjaga stabilitas negara dan pemerintahan

betapa pun musykilnya saat itu ketika kerusuhan dan perilaku anarkis menjadi-jadi.

Ia mengatakan bahwa masih hangat dalam ingatan kita, perusakan, pembakaran, penjarahan yang dilakukan secara kalap masyarakat yang lupa diri, termakan hasutan dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok tertentu. Betapa berat dan mahal risiko dari suatu komunitas yang kehilangan kontrol sesaat, atas dirinya mengingkari agama, etika, dan hukum. Mereka lupa atau bahkan tidak ambil peduli terhadap korban jiwa dan harta benda masyarakat, hukum dan konstitusi.⁷

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, "Belum dingin bara api yang melalap bangunan pemerintah, toko-toko dan rumah penduduk. Belum selesai berbagai pihak memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kesalahan dan kealpaannya, ada sebagian masyarakat yang mencoba kembali melakukan kegiatan menumpuk massa besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 nanti yang akan memiliki potensi kerawanan dan risiko yang sama dengan peristiwa menyedihkan yang baru saja kita alami. Bangsa yang tidak menghormati dan mengingkari konstitusinya niscaya tidak akan pernah tenang bahkan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran."

Pada akhirnya, rencana aksi massa yang akan dikonsentrasikan pada tanggal 20 Mei 1998 itu dibatalkan. Secara umum, telah diketahui siapa yang dimaksud dalam pernyataan ini yang ingin melakukan penumpukan massa itu serta dengan motif yang bagaimana. Di sela-sela pernyataan itu pun Wiranto mengingatkan cara-cara Harmoko yang dinilainya merupakan pandangan pribadi

⁷ *Kompas*, 18 Mei 1998; *Angkatan Bersenjata*, 18 Mei 1998

ketika meminta Soeharto untuk mengundurkan diri secara arif dan bijaksana (Habibie, 2006:16).

Dengan gambaran itu, ABRI telah mengambil upaya untuk melakukan kendali terhadap situasi dan wacana yang berkembang. Bahkan ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pun kembali Jenderal Wiranto mengatakan bahwa sebagai sikap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, ABRI akan tetap menjaga kehormatan dan keselamatan para mantan presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk Bapak Soeharto beserta keluarga. Seperti diketahui, ABRI telah mengambil tindakan penjagaan secara ketat di sekitar Jalan Cendana, tempat mantan Presiden Soeharto dan keluarganya tinggal di tengah derasnya tuntutan untuk mengadilinya bahkan seruan untuk dilakukan pengadilan rakyat.

Seperti yang Wiranto katakan, langkah itu ditempuh untuk mencegah terjerembabnya bangsa Indonesia sebagai bangsa barbar, yakni menghabisi mantan presiden dan keluarganya dengan cara mereka, pasti akan sangat keji dan brutal (Wiranto, 2003: 72). Seperti pula yang dikatakan oleh Huntington (1995) bahwa kejatuhan pemerintahan otoriter melalui proses pergantian membawa konsekuensi bagi aktor-aktor lama yang berkuasa. Di Filipina, Ferdinand Marcos dipaksa menyingkir di pengasingan, Ceasescu dieksekusi tanpa belas kasihan serta pejabat-pejabat militer di Yunani dan Argentina diadili dan dipenjarakan.

Di dalam arus besar perubahan itu, ABRI telah menunjukkan loyalitasnya terhadap pemerintahan dan konstitusi, meski sebagai institusi, keberadaannya, juga berada di dalam tuntutan perubahan itu sendiri terhadap peran-perannya pada masa lalu yang sering dinilai sebagai represif dan arogan. Oleh karena itu, berbagai pernyataan menyertakan tuntutan reformasi internal dalam tubuh ABRI

yang antara lain menyangkut peran sosial politik dan jatah kursi di lembaga legislatif.

Presiden Soeharto: "Saya ... menyatakan berhenti..."

Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto diambil sumpahnya untuk kembali menjabat untuk masa bakti 1998-2003. Di dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto sempat mengatakan bahwa lima tahun nanti, ia akan sampaikan pertanggungjawaban. Sebuah perkiraan, janji atau kepercayaan diri, yang kemudian tidak pernah terpenuhi, karena ia harus menyatakan berhenti kurang dari 80 hari saja dari masa jabatan yang seharusnya diselesaikannya.

Seperti yang telah diuraikan, tahun 1997 yang disebutkan sendiri oleh Presiden Soeharto sebagai tahun politik, keberlangsungan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintah telah mendapatkan tekanan-tekanan yang berat. Dorongan-dorongan yang sangat kuat datang dari elite-elite politik Golkar, pejabat-pejabat militer serta birokrat-birokrat pemerintah, untuk kembali mencalonkan Presiden Soeharto masa bakti 1998-2003.

Berkali-kali pesan yang disampaikan Presiden Soeharto, seperti soal usia yang telah lanjut, kultus individu, *lengser keprabon madeg pandhito*, agar dirinya tidak dituduh tidak tahu diri, tidak menerima sebuah kepercayaan semu, atau menghalang-halangi suksesi, tidak pernah ditangkap sebagai tanda bahwa Presiden Soeharto memiliki keinginan untuk berhenti.

Tekanan berat yang lain datang dari krisis ekonomi dan volatilitas nilai rupiah yang memporakporandakan fundamental ekonomi Indonesia yang banyak orang menilai bersumber dari krisis kepercayaan. Satu per satu landasan ekonomi yang diproyeksikan sebagai cikal bakal sebagai

struktur ekonomi yang kuat dan tangguh harus dicabut untuk mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan IMF.

Struktur ekonomi ini dibongkar tiba-tiba yang membawa akibat langsung pada segi kehidupan masyarakat luas. Bahan-bahan kebutuhan menjadi melonjak, perusahaan-perusahaan ditutup, dan pengangguran meningkat yang membawa ketegangan masyarakat menjadi mudah dipicu untuk melakukan bentuk-bentuk kerusuhan massa yang disertai penjarahan, pembakaran, dan pengrusakan. Situasi ini ditambah gerakan dan aksi mahasiswa yang bersifat massal yang bergerak pada lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerusuhan-kerusuhan serta bentrok dengan aparat keamanan.

Dalam sebuah pertemuan silaturahmi dengan pimpinan DPR/MPR, pimpinan orsospol (organisasi sosial politik), pimpinan Fraksi DPR dan para pejabat ABRI, Presiden Soeharto merespons tuntutan reformasi itu dengan mengatakan bahwa reformasi bukan sesuatu yang baru. Reformasi sudah dilaksanakan sejak proklamasi kemerdekaan bahkan sepanjang jalannya Republik ini. Namun karena dari Sidang Umum MPR 1998, rakyat sudah memiliki pedoman, maka reformasi hanya bisa dilakukan untuk tahun 2003.⁸

Pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan ulang oleh Menteri Dalam Negeri R. Hartono yang didampingi Menteri Penerangan/Kepala BP7 Pusat M. Alwi Dahlan usai pertemuan silaturahmi itu, pada akhirnya diluruskan kembali setelah *headline* surat-surat kabar serta *wire service* dalam berita yang diterbitkan seolah-olah mengesankan bahwa Presiden Soeharto tidak menginginkan reformasi sampai tahun 2003.

⁸ *Kompas*, 2 Mei 1998; *Kedaulatan Rakyat*, 2 Mei 1998, *Media Indonesia*, 2 Mei 1998

Pernyataan ini pun dipertanyakan dan menjadi polemik. Misalnya, apakah yang dimaksud reformasi itu hanya bisa dilakukan setelah tahun 2003 ke atas atau sekarang pun diperbolehkan untuk memikirkannya serta dibicarakan untuk kemudian ditawarkan dalam Pemilu 2002 dan diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR 2003. Atau apakah pernyataan itu berarti reformasi untuk periode 1998-2003 harus dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Sidang Umum MPR 1998 sehingga untuk melakukan reformasi selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Sidang Umum MPR berikutnya.⁹

Benar bahwa amanat-amanat Reformasi itu sudah ada di dalam GBHN 1998. Pertanyaannya adalah apakah ada jaminan komitmen dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan nyata masyarakat. Tidakkah pengalaman menunjukkan keinginan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah ditetapkan sejak GBHN 1973, tetapi kenyataannya korupsi bukannya berkurang, namun sebaliknya semakin merajalela¹⁰. Pernyataan-pernyataan suasif yang menimbulkan kesangsian dan ketidakpercayaan itu terus bergulir dan ditemukan dari berbagai kalangan, seperti pengamat, akademisi, tokoh nasional, mahasiswa, dan aktor-aktor politik lainnya.

Dalam rentang satu bulan, yakni di bulan Mei 1998, berbagai bentuk kerusuhan dan bentrok dengan aparat keamanan terjadi di mana-mana antara lain kerusuhan di Medan, Tebing Tinggi, Siantar, Padang, Jakarta, dan sekitarnya (insiden Trisakti), dan Solo. Kerugian fisik akibat kerusuhan di Jakarta saja diperkirakan Rp 2,5 triliun.

Atas situasi dan perkembangan yang terjadi di Indonesia, Presiden Soeharto mempersingkat satu hari lebih cepat

9 *Kompas*, 3 Mei 1998

10 *Suara Pembaruan*, 3 Mei 1998

kunjungan kenegaraannya ke Mesir dalam rangka pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G-15. Kedatangannya di Jakarta, telah disambut tuntutan untuk diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR termasuk oleh organisasi-organisasi yang dulu mendorong-dorongnya untuk mau dicalonkan kembali menjadi presiden seperti Maulana Isman dari DPP KNPI dan Bambang W. Soeharto dari Kosgoro¹¹. Tuntutan Sidang Istimewa juga disampaikan oleh Kelompok Cipayung, Ketua FKP Irsyad Sudiro, serta Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR/MPR.

Sementara itu, Amien Rais telah memprakarsai berdirinya Majelis Amanat Rakyat (MAR) yang dibentuk untuk mewadahi kerja sama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen untuk reformasi untuk demokrasi. Organisasi-organisasi dengan berbagai sebutan pada situasi tersebut tumbuh sangat subur, tetapi tampaknya organisasi-organisasi semacam itu merupakan eksperimen politik sebagai respons terhadap situasi yang terus berkembang yang tujuannya untuk memberi tekanan-tekanan terhadap pemerintah. Wadah-wadah dengan berbagai sebutan itu, dalam perkembangannya mengalami sublimasi politik, cepat menguap ketika tujuan jangka pendeknya tercapai.

MAR sendiri dibentuk tidak kurang dari 50 tokoh nasional ikut bergabung di dalamnya seperti Amien Rais, Toety Heraty, Emha Ainun Nadjib, Dawam Raharjo, Arbi Sanit, Faisal Basri, Mudji Sutrisno, Adnan Buyung Nasution, Tjuk Sukiadi, Sujana Saphiie, Franz Magnis-Suseno, Haryono Tjitroseobono, Adi Sasono, A. Syafii Ma'arif, Rizal Ramli, Ulil Absar Abdalla, Hotman M. Siahaan, Goenawan Moehammad, Karlina Leksono, Ali Sadikin, Syamsudin Haris, Husein Umar, Arifin Panigoro, Laksamana Sukardi, Ongkongham, Rizal Panggabean, Frans Seda, Emil Salim,

¹¹ *Kompas*, 15 Mei 1998; *Suara Pembaharuan*, 15 Mei 1998

Siswono Yudo Husodo, Daniel Sparingga, Hendardi, Sayuti, Heri Akhmadi, Ichlasul Amal, Moedrick Sangidu, Mochtar Mas' oed, K.H. Mustofa Bisri, Bambang Sudibyo, Ratna Sarumpaet, Sumitro Djodjohadikusumo, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan sebagainya.

MAR menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan damai. Bila tuntutan itu terakbul, Amien Rais mengakui bahwa hal yang tidak mungkin dalam waktu dekat mendapatkan figur yang dapat menggantikan Presiden Soeharto dengan penerimaan luas dari rakyat. Dalam pikirannya, bila Presiden Soeharto mengundurkan diri akan digantikan dengan kepemimpinan kolektif¹².

Apa yang dinyatakan Amien Rais, merupakan cerminan bahwa aktor-aktor politik yang memperjuangkan perubahan tersebut, digerakkan oleh imajinasinya masing-masing untuk meyakinkan proses perubahan itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sedemikian banyak tokoh yang bergabung dalam MAR yang tampaknya bersatu dalam sebuah tujuan yang sama, namun ketika dihadapkan pada persoalan siapa dan bagaimana pengisian kekosongan jabatan presiden, rekatan mereka umumnya rapuh.

Burke (1969) mengatakan bahwa sebelum keruntuhan pemerintahan otoriter, aktor-aktor tersebut dipersatukan oleh hasrat yang besar untuk merealisasikan menjatuhkan rezim atau pemimpin rezim tersebut. Namun setelah hasrat tersebut terwujud, timbul perpecahan dan perselisihan di antara mereka mengenai distribusi kekuasaan dan sifat rezim baru yang akan diwujudkan.

Kedatangan Presiden Soeharto ke tanah air juga disambut adanya kontroversi tentang pernyataannya di

12 *Kompas*, 15 Mei 1998

Kairo bahwa dirinya siap mengundurkan diri. Ada nuansa bahwa kontroversi itu telah berbaur dengan politisasi isu yang menjadi konsumsi politik paling diminati. Pernyataan itu telah menjadi dalih berbagai kalangan untuk menekan dan mempercepat proses suksesi yang ditujukan kepada pimpinan DPR/MPR bagi kepemimpinan Presiden Soeharto. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa proses ini harus mencari jalan pintas dan cepat, tidak perlu bicara panjang lebar, serta bukan basa basi.¹³

Dalam konteks kontroversi itu, seperti yang disampaikan Menteri Penerangan/Kepala BP7 M. Alwi Dahlan, bahwa pesan Presiden Soeharto yang disampaikan di Kairo adalah soal kepercayaan. Presiden Soeharto menyatakan bahwa kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan, sebenarnya tidak apa-apa. Ia akan *madeg pandhito* dan tidak akan mempertahankannya dengan kekuatan bersenjata.

Bila ini dicermati, pesan semacam itu, bukan merupakan pesan baru atau sekali dua kali disampaikan, melainkan telah berkali-kali disampaikan yang pada prinsipnya menekankan pada mekanisme konstitusional terhadap kepercayaan rakyat itu. Pesan ini kembali diulangi ketika Presiden Soeharto menerima delegasi para guru besar Universitas Indonesia yang dipimpin Rektor Universitas Indonesia Asman Boedisantoso Ranakusuma yang antara lain juga menyampaikan tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Untuk menanggapi berbagai tuntutan reformasi, Presiden Soeharto telah berencana akan melakukan perombakan terhadap susunan Kabinet Pembangunan VII dengan membentuk Kabinet Reformasi. Namun belum sampai rencana itu terlaksana, Pimpinan DPR/MPR Harmoko, Syarwan

¹³ Kompas, 15 Mei 1998, *Kedaulatan Rakyat*, 15 Mei 1998

Hamid, Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad, telah meminta Presiden Soeharto mundur.

Selain itu ada 20 anggota FKP yang mendesak pimpinan DPR untuk menyiapkan Sidang Istimewa yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan mereka. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Abdul Latief juga, secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri jabatannya dengan alasan keluarga dan desakan dari anak-anaknya (Habibie, 2006:14). Pernyataan terbuka dari beberapa kejadian ini telah menimbulkan histeria politik di kalangan mahasiswa.

Hal yang menarik adalah penyampaian rencana Presiden Soeharto untuk melakukan perombakan Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi disampaikan pada hari yang sama dengan pernyataan dari para pimpinan DPR/MPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Putusan ini ditempuh melalui pertemuan-pertemuan dan rapat. Keputusan para pimpinan DPR/MPR yang meminta Presiden Soeharto yang dinyatakan secara terbuka, dirumuskan dalam Pertemuan Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi yang diselenggarakan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sedangkan penyampaian pesan perombakan kabinet oleh Presiden Soeharto juga disampaikan dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan dan ulama seperti Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Nurcholish Madjid, Ali Yafie, Abdul Malik Fajar, Sutrisno Muchdan, Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Bagja yang juga dihadiri sejumlah pejabat ABRI.

Hasilnya, kedua pertemuan itu tidak menguatkan kedudukan Presiden Soeharto. Ketika Presiden Soeharto masih sebagai Mandataris MPR telah menyatakan akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin, menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya,

merampungkan undang-undang pemilu baru, undang-undang kepartaian, susunan DPR/MPR dan DPRD, undang-undang antimonopoli, undang-undang antikorupsi, melaksanakan Sidang Umum MPR berdasarkan hasil pemilu tersebut, memilih Presiden dan wakilnya serta ketetapan-ketetapan MPR lainnya, serta dirinya tidak bersedia dicalonkan lagi sebagai Presiden dalam proses ini justru dalam waktu yang hampir bersamaan Ketua DPR/MPR telah menyatakan secara terbuka agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat, cendekiawan dan ulama itu, Presiden Soeharto menyatakan bahwa jabatan Presiden yang ia terima atas pencalonannya dalam Sidang Umum MPR 1998, bukan karena kedudukannya, melainkan karena tanggung jawabnya. Untuk itu, ia tidak bisa meninggalkan begitu saja dengan mengundurkan diri dari situasi krisis yang masih berada di dalam masa tanggung jawabnya.

Ini berarti sama saja dengan *tinggal glanggang colong playu*. Sampai batas yang dapat ia upayakan, tampaknya Presiden Soeharto tetap ingin berada dalam lingkup itu, meskipun satu per satu para pembantunya dan orang-orang yang pernah berada dekat di sekelilingnya, telah meninggalkan dirinya.¹⁴

Di sisi lain, bila dicermati di dalam rangkaian pesan yang ia sampaikan di hadapan para ulama, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat tersebut, ia mengkhawatirkan timbulnya preseden di tata kehidupan berbangsa dan bernegara bila ia mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengatakan bahwa secara konstitusional bila ia mengundurkan diri, maka jabatan ini akan diserahkan kepada wakil presiden. Presiden Soeharto mengatakan bahwa apakah ini

14 *Solo Pos*, 20 Mei 1998

merupakan jalan penyelesaian. Tidakkah hal ini juga memungkinkan hal yang sama, wakil presidennya dituntut mundur.

Dari sisi komunikasi, ini lebih mencerminkan kekhawatiran, ketimbang menyangsikan kemampuan wakil presidennya seperti yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang yang berada di sekitar Wakil Presiden B.J. Habibie atau kesan yang ditangkap Habibie sendiri. Bahkan ada yang menyebut apa yang disampaikan Presiden Soeharto itu telah mengkhianati B.J. Habibie, mengabaikan berlakunya Pasal 8 UUD 1945, serta tidak mempercayai wakil presiden. (Habibie, 2006:28)

Kabinet Reformasi rencananya akan diumumkan pada tanggal 21 Mei 1998 dan pada tanggal 22 Mei 1998 Kabinet Reformasi itu akan dilantik. Namun, di dalam upaya itu, ada 14 Menteri yang telah menyatakan ketidaksediaannya untuk duduk di dalam Kabinet Reformasi yang disusun Presiden Soeharto.

Dalam penjelasan Ginandjar Kartasasmita kepada B.J. Habibie, ia mengatakan bahwa Menko Ekuin dan bersama 13 menteri lainnya, tidak bersedia lagi untuk duduk di dalam Kabinet Reformasi. Namun, sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII, mereka akan tetap melaksanakan tugas masing-masing, sampai Kabinet Reformasi terbentuk. (Habibie, 2006; *Wawancara*, 17 Maret 2009)

Bagi Soeharto pernyataan itu bila dikaji tidak memberikan pilihan baginya. Pertama, Presiden Soeharto telah menyatakan secara terbuka, bahwa dirinya akan melakukan perombakan terhadap Kabinet Pembangunan VII sehingga tidak mungkin memperlambat atau berlama-lama untuk tidak segera melakukannya karena tuntutan reformasi sangat keras dan liar.

Kedua, adalah tidak mungkin mempertahankan Kabinet Pembangunan VII meski dengan pertimbangan agar 14 menteri itu tidak mundur dan tetap melaksanakan tugas masing-masing di dalam kabinet itu. Dengan kondisi itu, ada dua keadaan dilematis. Pertama, mempertahankan Kabinet Pembangunan VII, dapat dinilai tidak responsif, sedang merombak kabinet ini, ada sejumlah menteri yang sudah sejak lama dipercayanya, tidak percaya lagi kepada dirinya. (Habibie, 2006:34)

Pada akhirnya, Presiden Soeharto tidak jadi mengumumkan Kabinet Reformasi yang dijanjikannya. Dalam kenyataannya, satu per satu kebijakan yang telah ditempuh pemerintah telah dicabut melalui tekanan-tekanan yang dilakukan IMF dan tekanan di tanah air sendiri yang ditambah dengan satu per satu pula elemen-elemen yang mendukung pemerintahan ini surut dan meninggalkannya.

Burke (1969) menggambarkan kondisi ini dengan mengatakan: *The Strongest man in the world is he who stands most alone*. Orang yang paling kuat di dunia adalah orang yang paling kesepian. Pada titik kulminasi itu pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

Presiden Soeharto menyatakan, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998."¹⁵

Di dalam pidato pengunduran diri itu, ada segi penting yang dapat dicermati. Pertama, ada keinginan Presiden Soeharto untuk melaksanakan reformasi secara tertib, damai dan konstitusional yang diawali dengan pembentukan Kabinet Reformasi. Kedua, karena tidak ada tanggapan yang memadai, maka kabinet reformasi itu tidak dapat

¹⁵ Kompas, 22 Mei 1998, *Media Indonesia*, 22 Mei 1998, Habibie, 2006; *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 1998

terbentuk sehingga perubahan di dalam Kabinet Pembangunan VII tidak diperlukan lagi. Ketiga, dengan kenyataan itu, tugas pemerintah negara dan pembangunan menjadi sulit untuk dijalankan. Keempat, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Kelima, menyerahkan jabatan Presiden ini kepada wakil presiden untuk dilanjutkan.

Kelima hal itu merupakan pernyataan penting yang merangkum cerminan situasi yang terjadi, pertimbangan moral yang menjadi dasar, ungkapan penghargaan dan kerendahan diri untuk meminta maaf, serta visi yang memikirkan kelanjutan nasib bangsa dan negara. Namun, sekalipun pengunduran diri ini telah ditempuh, euforia perubahan dan kebebasan itu, sampai rentang waktu selanjutnya, mengemuka dalam bentuk pengkambinghitaman (*scapegoat*) baik terhadap dimensi personal dan kebijakan masih terjadi yang terlihat dari berbagai bentuk komunikasi.

"Scapegoat" dalam Dramatisme Politik

Bagi Burke (1969), ciri drama berada di dalam gagasan tindakan dan prinsip viktimisasi. Viktimisasi sendiri merupakan bentuk penebusan kesalahan atau dosa (*redemption*) yang umumnya mengambil dua bentuk, yakni pertama *mortification*—mengembalikan terjadinya *guilt* (kesalahan) pada diri sendiri dan kedua adalah *scapegoat*, yakni mencari faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab. Ini dapat ditimpakan ke individu, kelompok sosial atau pun disfungsi dari sebuah sistem sosial, politik, ekonomi atau sistem budaya tertentu. Faktor ini membantu secara radikal dalam mendefinisikan elemen apa yang diviktimisasikan (dikorbankan).

Viktimisasi Personal

Seperti yang telah dijelaskan secara definitif *scapegoat* diartikan sebagai: *a device that unifies all those who share the same enemy*. Dalam drama politik yang terjadi, Presiden Soeharto adalah aktor utama yang ditempatkan dan diposisikan sebagai sebagai akar dari permasalahan sehingga ia disalahkan, dihujat dan didiskreditkan.

Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme sering dihubungkan secara pribadi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang mengarah pada keluarga Cendana, termasuk aset kekayaan, perusahaan, dan yayasan-yayasan yang dikelolanya. Presiden Soeharto dicitrakan sebagai sosok pemimpin yang otoriter, menerapkan kebijakan yang represif, menghalang-halangi kebebasan berpendapat, dan keras.

Seperti yang dikatakan Nurcholish Madjid bahwa Presiden Soeharto adalah target dari reformasi¹⁶. Ada penilaian bahwa seolah-olah kekayaan negara telah dirampok oleh Soeharto yang memunculkan kontroversi mengenai pengusutan kekayaannya, serta ada cemoohan dan hujatan¹⁷. Sisi lain ada pernyataan-pernyataan yang mengupayakan agar Soeharto dihadapkan pada proses pengadilan guna mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya selama dirinya berkuasa 30 tahun itu. Dalam harapan massa yang diliputi oleh emosi itu, Presiden Soeharto dicitrakan dengan berbagai penggambaran yang tidak pantas yang dinyatakan dalam berbagai kesempatan.

Viktimisasi Kebijakan

Di samping persoalan pribadi yang tertuju pada pribadi Presiden Soeharto yang merupakan sasaran dari reformasi,

¹⁶ *Tempo*, Edisi 12, 03,-23 Mei 1998

¹⁷ *Neraca*, 29 Mei 1998; *Kompas*, 2 Juni 1998

viktimisasi terhadap kebijakan juga terjadi. Di bidang ekonomi misalnya, kegiatan ini dinilai terlalu diwarnai tingginya intervensi pemerintah, adanya praktik proteksionisme, monopoli, korupsi, nepotisme, dan kolusi.

Perekonomian Indonesia disebut sebagai perekonomian yang semu. Struktur ekonomi ini juga disebut sebagai struktur perekonomian yang timpang karena dikuasai oleh segelintir orang yang disebut sebagai konglomerat. Dalam perekonomian ini terdapat kesenjangan sosial yang nyata. Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri telah menimbulkan kekerasan negara terhadap rakyatnya.

Dengan viktimisasi yang mencakup segi-segi yang luas itu, tuntutan reformasi di bidang ekonomi tertuju pada penghapusan monopoli, pembentukan undang-undang antimonopoli, liberalisasi pasar, swastanisasi, pemerintahan yang bersih (*good governance*), yang semua itu untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di bidang politik, viktimisasi terjadi pada peran dan dominannya tentara dalam kehidupan sosial dan politik, adanya arogansi kekuasaan, campur tangan dan kontrol pemerintah terhadap partai politik, massa mengambang, masa jabatan presiden yang tidak jelas, rekrutmen politik yang diwarnai *like and dislike*, dan stabilitas politik yang represif. Karena itu sumber-sumber tuntutan mencakup pencabutan terhadap paket Undang-Undang Politik, amandemen UUD 1945, dan penghapusan Dwifungsi ABRI yang dipakai untuk membuka proses demokratisasi politik yang luas.

Semua tersebut di atas sebagai cara untuk melakukan viktimisasi terhadap pemerintah sebagai kondisi negatif yang penerapannya terlihat dari berbagai bentuk antitesis yang dikembangkan dalam mereka berkomunikasi dengan mem-

produksi pernyataan-pernyataan. Ini merupakan suatu istilah yang dipakai sebagai perlawanan dan sekaligus konsep yang dinilai ideal dari situasi krisis (Griffin, 2000).

Dalam konteks gerakan reformasi ini, Payne (1990:350) mengatakan bahwa banyak gerakan sosial dapat sukses karena menggunakan prinsip negativisme, hierarki dan *state of perfection* dan menggunakan taktik motivasional dengan menempatkan tatanan ideal, surga, dan masyarakat utopia dan menempatkan lawan sebagai sesuatu yang tidak ideal, diktator, represif, tidak demokratis, otoriter serta penyebutan lain yang memiliki arti sebagai antitesis dan negatif.

Unsur publik dan kompetitif dalam persuasi menjadikan persuasi sebagai sesuatu yang penting karena retorika bekerja pada level opini di dalam bentuk-bentuk komunikasi politik khususnya. Sebuah situasi di mana hasrat prasangka lebih dominan, retorika menjadi lebih efektif dari pada memberikan pertimbangan alasan-alasan tertentu yang rasional.

Dalam situasi tersebut, seorang dapat menjawab argumen dengan argumen, emosi dihadapkan dengan emosi yang berlawanan, menggerakkan kebencian terhadap lawan, dan merespons balik rasa belas kasih dengan hasutan kebencian. Jadi, viktimisasi merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Akibatnya, hubungan antara kebenaran dan jenis opini tertentu di mana retorika bekerja sering disalahartikan.

Ada semacam antitesis ketika istilah-istilah yang saling bertentangan tersebut secara bersamaan dilihat sebagai pasangan dialektik. Opini secara etik dan moral dapat menjadi bias terhadap keberadaan kebenaran (*truth*). Seorang bisa benar dan bisa palsu di dalam mengidentifikasi

seseorang lain melalui simbolisasi berdasarkan sifat dan karakternya. Seorang dapat mengatakan bahwa orang lain itu memiliki sifat dan karakter tertentu melalui simbolisasi.

Jika seorang sukses membuat khalayak percaya terhadap apa yang ia katakan, maka sebenarnya yang dilakukannya adalah adanya pertukaran antara opini dengan kebenaran sebagai *ground of rhetoric*. Retorika tidak semata-mata persoalan verbal, tetapi merupakan kajian terhadap objek-objek, tatanan universal, panduan dalam memberikan pada pilihan terhadap tujuan-tujuannya (Burke, 1969).

Konsolidasi Kekuasaan dalam Reformasi

Setelah peralihan jabatan, pertama-tama yang dilakukan Presiden B.J. Habibie adalah menyatakan diri sebagai presiden yang telah menggantikan Presiden Soeharto secara konstitusional berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 dan telah mengucapkan sumpah presiden seperti yang terlihat sebagaimana berikut:

Dengan pernyataan berhenti Bapak Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, saya secara konstitusional telah menggantikan kedudukan sebagai Presiden dan telah mengucapkan Sumpah Presiden pada hari ini..." (*Media Indonesia*, 22 Mei 1998)

Sementara di lain kesempatan, Presiden B.J. Habibie pernah mengungkapkan bahwa secara konstitusional, ia berhak untuk menjalankan pemerintahan sampai tahun 2003. Namun hal ini tidak ia lakukan, karena ia memiliki komitmen untuk mengantarkan reformasi ini secara konstitusional dengan memastikan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR dan pelaksanaan Pemilu untuk menentukan

wakil-wakil rakyat yang *legitimate* di dalam lembaga legislatif.

Ungkapan tersebut merupakan pernyataan awal di masa jabatannya. Untuk berbagai motif, deklarasi semacam itu, tampaknya diperlukan untuk menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Presiden Republik Indonesia yang sah. Dengan perkataan lain, peralihan jabatan, yang diteruskan dengan sumpah jabatan Presiden oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, dirasa belum cukup mengkomunikasikan bahwa ia adalah seorang presiden. Tetapi di sisi lain, ungkapan semacam itu juga dapat mencerminkan upaya untuk mengendalikan pandangan-pandangan yang mulai muncul bahwa proses peralihan itu sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

Melalui ungkapan itu tergambar, ada upaya untuk meletakkan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai *common ground*—yang menerapkan pemahaman dasar dan umum untuk mengajak masyarakat mengungkap kesamaan di dalam keanggotaannya. (Burke, 1969; Tancred, 1991)

Melalui cara ini, ada empati dan simpati, yang mengejawantahkan peluruhan harapan itu selaras dengan apa yang diharapkan massa. Oleh karena itu, secara cermat Presiden B.J. Habibie, telah meletakkan proporsi semacam ini dengan mengatakan bahwa aspirasi-aspirasi yang memperjuangkan reformasi secara menyeluruh telah ditunjukkan, sedangkan tugas dirinya adalah menindaklanjutinya dengan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai kaidah pemerintahan yang dikehendaki bersama.

Namun, apa yang menjadi komitmen Presiden B.J. Habibie dalam pemerintahannya, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Presiden Soeharto ketika ia bertemu dan di hadapan para ulama,

tokoh masyarakat dan petinggi ABRI sebelumnya. Presiden Soeharto mengatakan bahwa ia akan melakukan tuntutan reformasi itu, dengan melakukan perombakan Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi, Pemilu dipercepat, pencabutan undang-undang politik, susunan DPR/MPR serta DPRD, undang-undang antimonopoli serta memastikan bahwa dirinya tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden. Dalam perkembangan yang terjadi, komitmen itu tidak mendapat tanggapan yang memadai.

Selepas pengunduran diri Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi antara lain memperbarui perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik, di bidang hukum akan meninjau kembali Undang-Undang Subversi serta di bidang ekonomi akan mempercepat undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi, komitmen Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie tidaklah jauh berbeda.

Pertanyaannya adalah kenapa dengan komitmen semacam itu, Presiden Soeharto tidak mendapat tanggapan yang memadai sedangkan komitmen yang disampaikan Presiden B.J. Habibie sebaliknya? Ada beberapa premis yang dapat dibangun terhadap kondisi ini. Pertama, Presiden Soeharto tidak mempunyai ruang lagi dalam mengendalikan kekuasaannya. Tekanan dari IMF, kerusuhan massa yang terjadi di mana-mana, aksi, dan demonstrasi mahasiswa yang rusuh dan histeria, tuntutan dari organisasi sosial kemasyarakatan, pengunduran dan ketidaksediaan para pembantu-pembantunya, fragmentasi dan permainan elite-politik, sampai tuntutan mundur dari DPR/MPR sendiri, tidak memberi celah sedikit pun bagi dirinya untuk melakukan konsolidasi pengendalian terhadap situasi yang dihadapi untuk melaksanakan komitmen reformasi itu.

Kedua, dari perspektif retorika segi *goodwill*, *good moral character*, dan *good sense* telah direduksi secara luar biasa dengan penggambaran yang menempatkan Presiden Soeharto sebagai sumber dari segala sebab terjadinya krisis multidimensi sebagai akibat kesalahan-kesalahan akumulatif yang lama. Dengan cara itu, kredibilitas Presiden Soeharto sebagai komunikator telah dipudarkan dengan berbagai bentuk isu, satu di antaranya yang krusial adalah krisis kepercayaan.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Presiden Soeharto sebagai komitmen itu tidak mendapat tanggapan yang memadai. Proses distorsi terhadap kredibilitas terhadap kapasitas Presiden Soeharto itu telah sangat matang dengan adanya penggabungan antara kekuatan *appeal to reason* dan *appeal to emotion* dalam bentuk-bentuk komunikasi yang muncul yang memang sengaja dilakukan untuk melakukan perubahan (Tancred, 1991).

Sedangkan Presiden B.J. Habibie, sekalipun dirinya sering dinilai sebagai bagian dari Orde Baru, kedudukannya diuntungkan oleh terjadinya fragmentasi di kalangan aktor-aktor politik yang menyuarakan reformasi. Ada pihak-pihak yang mendukung kepemimpinan ini, tetapi juga ada pihak-pihak yang menilai pemerintahan ini tidak sah. Di tengah fragmentasi itu, Presiden B.J. Habibie memiliki kesempatan dan ruang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan itu melalui dukungan-dukungan yang diberikan.

Bahkan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa perwujudan kesepakatan itu agak sulit di tengah suasana "pesta" yang menghinggapi masyarakat atas tumbangannya Presiden Soeharto¹⁸. Effendi Gazali mengatakan bahwa sejarah mengajarkan, pada saat belenggu dan tirani

18 *Pikiran Rakyat*, 31 Mei 1998

terkuak, berhamburan impuls-impuls progresif dan regresif secara bersamaan.¹⁹

Mereka yang berpendapat bahwa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie tidak konstitusional, menilai perlunya pembentukan presidium atau menyatakan pemerintahan transisi atau perlunya pembentukan Dewan Reformasi. Penyerahan jabatan Presiden kepada wakilnya tanpa melalui Sidang Istimewa MPR merupakan pelecehan kedaulatan rakyat. Pengembalian mandat itu mesti diserahkan kepada pemberi mandat dan tidak diserahkan langsung kepada wakilnya. Kelompok-kelompok ini cukup beragam misalnya mereka yang menamakan Gerakan Reformasi Nasional dengan tokoh-tokoh utamanya seperti Soebroto, Dimiyati Hartono, dan Selo Soemardjan, PNI Baru, PCPP, YKPK, Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat, Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah, delegasi mahasiswa dari UKSW, dan GMNI

Bahkan bentuk pertentangan yang lebih konfrontatif dapat dilihat ketika massa yang mengaku berasal dari Tanjungpriok, Tanah Abang, dan Pendekar Banten berusaha mengambil alih pendudukan gedung DPR/MPR yang dilakukan mahasiswa yang menghendaki diselenggarakan Sidang Istimewa MPR.

Massa pendukung Presiden B.J. Habibie ini terlihat antara lain A. Sumargono dari KISDI dan Fadly Zon (*Institute for Policies Studies*) serta dari Humanika ditambah dukungan dari Gerakan Pemuda Islam, Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia, Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, Gerakan Pemuda Anshor, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Persatuan Pelajar Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Indonesia.

¹⁹ *Kompas*, 31 Mei 1998

Sementara itu, Amien Rais mengakui telah melakukan pertemuan di rumah Presiden B.J. Habibie. Ia sendiri mengatakan bahwa mudah-mudahan Habibie membuktikan komitmennya dan kita tidak skeptis terlebih dulu. Berilah kesempatan kepadanya. Secara apologis Amien Rais mengatakan bahwa daripada melawan fakta lebih baik kita pakai akui pemerintahan Habibie sambil terus memintanya secepatnya menyelenggarakan pemilu yang jujur. (Alit, 1998:355)

Dari fragmentasi aktor-aktor politik yang satu pihak mendukung kedudukan Presiden B.J. Habibie, sedang di pihak lain ada yang menolak dasar legitimasi tersebut, situasi ini setidaknya masih memberi ruang gerak bagi Presiden B.J. Habibie untuk melakukan konsolidasi pemerintahannya.

Di dalam konsolidasi pemerintahan itu, terlihat ada pola maju dan mundurnya beberapa figur di dalam Kabinet Pembangunan VII. Dari 14 menteri dalam Kabinet Pembangunan VII yang menyatakan diri tidak bersedia duduk dalam Kabinet Reformasi yang akan dibentuk Presiden Soeharto, ternyata sebanyak 10 orang yang bersedia atau dipilih kembali oleh Presiden B.J. Habibie untuk duduk di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini.

Kesepuluh menteri itu adalah Ginandjar Kartasmita sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; Rahardi Ramelan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo sebagai Menteri Pekerjaan Umum; A.M. Hendropriyono sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Justika Syarifudin Baharsjah sebagai Menteri Sosial; Akbar Tanjung sebagai Menteri Sekretaris Negara; Theo L. Sambuaga sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman; dan

Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Semua menteri ini adalah nama-nama yang pada menjelang pembentukan Kabinet Reformasi yang akan dijalankan Presiden Soeharto termasuk yang menyatakan tidak bersedia (Habibie, 2006; Alit, 1998). Kabinet ini diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan.

Paradoks-paradoks semacam ini juga ditunjukkan adanya kenyataan bahwa proses penggodokan undang-undang dan ketetapan-ketetapan MPR yang dihasilkan untuk mewujudkan tuntutan reformasi dan pemilihan umum, dilakukan oleh anggota-anggota MPR yang merupakan hasil pemilu tahun 1997. Adalah merupakan ironi, untuk mengatakan bahwa proses ini sepenuhnya reformis, dengan menerima produk hukum dan ketetapanannya, sementara mereka mengatakan dengan sengit bahwa pemilu dan keanggotaan DPR/MPR hasil pemilu 1997 itu penuh kroni.

Di dalam pemerintahan yang dijalankan Presiden B.J.Habibie, ia ditoleransi dengan waktu. Ia diberi kesempatan dan dikatakan jangan skeptis terlebih dahulu, sedangkan bagi Presiden Soeharto dikatakan telah habis dan tamat. Meskipun dalam kenyataannya, seluruh perangkat politik yang digunakan Presiden B.J. Habibie untuk mewujudkan tuntutan reformasi itu, tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan apa yang digambarkan serta akan dilakukan Presiden Soeharto melalui tahap pembentukan Kabinet Reformasi itu.

Kwik Kian Gie²⁰ mengatakan bahkan ditinjau dari sudut perilaku, kondisi psikologis para anggota DPR dan MPR sangat mengerikan, karena bisa berbalik haluan 180 derajat hanya dalam waktu dua bulan. Dari gegap gempita menyetujui diangkatnya Pak Harto sebagai Presiden, dalam dua bulan berubah menjadi tuntutan turunnya Pak Harto

20 *Merdeka*, 10 Juni 1998

sebagai Presiden. Syarwan Hamid bahkan mengepalkan tangannya ketika mengumumkannya kepada pers. Dengan demikian, pikiran yang minta supaya MPR yang ada bersidang, berarti menerima kepalsuan MPR.

Pernyataan itu merupakan kritik sangat tajam karena menilai bahwa di dalam instrumen-instrumen politik yang digunakan Presiden B.J. Habibie itu sudah tidak ada yang murni. Menurut Kwik Kian Gie, yang murni adalah pernyataan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998 yang sama sekali mengabaikan MPR yang ada. Dengan Komite Reformasi, lembaga ini harus mengantarkan rakyat Indonesia pada pembentukan MPR yang baru sama sekali melalui pemilihan umum yang jujur (jujur dan adil) dan luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) yang akan memilih presiden dan wakilnya. Tetapi, keputusan ini dicurigai sebagai licik dan tipu muslihat. Ini dianggap sebagai mengulur waktu agar mempunyai kesempatan untuk memperkokoh dan melanggengkan kedudukannya.

Namun, ketika ada kesepakatan-kesepakatan antara pimpinan DPR/MPR dan Presiden B.J. Habibie untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR pada akhir tahun 1998 dan pemilunya baru diselenggarakan pada bulan Mei 1999²¹, Kwik Kian Gie mempertanyakan, kenapa hal ini tidak ada kecurigaan bahwa hal ini juga tipu muslihat dan membeli waktu yang juga dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan dan kedudukan.

Ini merupakan paradoks-paradoks yang muncul dalam periode-periode awal bagaimana konsolidasi kekuasaan dijalankan di saat-saat proses transisi demokrasi itu dilakukan sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Di dalam paradoks-paradoks itu, melalui sebuah Ke-tetapan MPR No XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan

21 *Kompas*, 29 Mei 1998

Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998, nama Presiden Soeharto diabadikan sebagai target pemberantasan KKN. Disebutkan di dalam ketetapan tersebut:

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan dengan tegas terhadap siapa pun juga baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia (Tap MPR No XI/MPR/1998)

Di dalam konsolidasi pemerintahan yang semacam itu, pembicaraan-pembicaraan tentang pembentukan partai politik mulai ramai dibicarakan apalagi Presiden B.J. Habibie sendiri telah menggulirkan persoalan ini secara terbuka. Menurutnya siapa saja boleh membentuk partai politik dengan ketentuan semua harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak dinyatakan sebagai partai terlarang berdasarkan Tap MPR.²²

Hasilnya, dalam periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie tercatat ada 48 partai politik baik yang menyatakan sebagai partai politik yang nasionalis religius atau pun partai politik yang religius nasionalis. Pembentukan partai-partai politik ini telah mempercepat terjadinya fragmentasi elite politik dengan lebih nyata.

Apalagi pembentukan partai politik itu tidak dapat dilepaskan pada persoalan basis massa yang dimiliki, kepentingan dan orientasi politik, serta nilai-nilai ideologis tertentu yang turut mewarnai di dalam pembentukan-pembentukan semacam itu (Ananta, Arifin and Suryadinata, 2005).

²² *Kompas*, 30 Mei 1998; BJ Habibie, 2006:169

Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (Deklarasi 23 Agustus 1998), sementara Megawati Soekarnoputri dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangannya (PDI-P) yang juga berbeda dengan Abdurrahman Wahid (PKB), sedangkan Sri Bintang Pamungkas dengan PUDI-nya.

Belum aktor-aktor politik yang lain yang tersebar pada sejumlah partai politik yang berbeda, seperti Yusril Ihza Mahendra, Ryaas Rasyid, Siswono Yudo Husodo, Muchtar Pakpahan, Budiman Sudjatmiko, Eros Djarot, Adi Sasono, Syahrir, dan sebagainya. Sedangkan Golkar mengubah dirinya sebagai sebuah partai politik yang akan bersaing dengan partai-partai politik yang baru didirikan.

Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1999 itu, yang muncul sebagai partai pemenang adalah PDI-P yang memperoleh suara sebanyak 33,12 persen. Partai Golkar yang di tengah-tengah tuntutan reformasi sering disalah-salahkan ternyata masih mampu berada pada urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 25,97 persen. Partai Amanat Nasional yang didirikan Amien Rais sebagai aktor yang dinilai banyak orang paling berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru, hanya berada di dalam urutan kelima dengan perolehan suara 7,36 persen. Sedangkan di urutan ketiga dan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan (Ananta, Arifin dan Suryadinata, 2005). Dengan komposisi ini, tidak satu pun partai politik dapat membentuk sebuah pemerintahan yang mandiri.

Dengan proses konsolidasi kekuasaan yang semacam itu, drama politik ini telah bergeser. Pembicaraan-pembicaraan tentang betapa kuat dan sentralistisnya corak pemerintahan Orde Baru yang selama tuntutan reformasi disuarakan telah bergeser pada pembicaraan-pembicaraan mengenai lobi-lobi politik yang dilakukan oleh petinggi-

petinggi partai politik, pembagian jatah kursi melalui kompromi-kompromi politik, pembagian kursi menteri, siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presidennya, siapa yang menjadi ketua DPR, serta siapa yang menjadi ketua MPR.

Bahkan, partai politik yang keluar sebagai pemenang pemilu yang semestinya mendapat prioritas menjadi presiden, harus menerima kedudukan sebagai wakil presiden dan baru menerimanya setelah ada semacam *impeachment* dari DPR. Ini pun disertai kemarahan dan amuk massa yang terjadi di Solo yang juga diwarnai aksi pembakaran dan pengrusakan.

Di dalam pemerintahan era reformasi ini telah menggeser pula perbincangan-perbincangan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto, keluarga Cendana dan konglomerat, kepada pembicaraan-pembicaraan korupsi, kolusi, dan nepotisme ke berbagai lokasi kekuasaan yang tersebar seperti lembaga legislatif, lembaga penegak hukum, lembaga perbankan yang menjalar sampai pada gubernur dan bupati. Pemberantasan KKN seperti yang dituduhkan sangat keras terhadap pemerintah Orde Baru sampai sejauh tidak pernah benar-benar mampu dilaksanakan.

Justru di dalam era reformasi ini terkesan dipraktikkan secara terbuka dan menjalar ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Drama politik ini juga telah mampu menggeser pembicaraan-pembicaraan mengenai peran sosial dan politik ABRI, paradigma stabilitas politik dan keamanan kepada kebebasan berpendapat, berekspresi serta berserikat sehingga muncul bentuk-bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bertindak berlebihan atas nama kebebasan dan berekspresi itu. ❖



BAB 7

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai studi komunikasi politik yang meneliti bahasa politik dalam pertarungan kepentingan reformasi yang terjadi dalam periode tahun 1997 sampai tahun 1998, didapat simpulan-simpulan yang tidak saja menarik, tetapi juga pelajaran berharga bagi kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara.

Pertama, reformasi memiliki makna yang mencakup tema yang luas, menampilkan pernyataan beragam seperti argumen, antitesis, perbandingan, metafora, hingga ke dalam bentuk pertentangan dan kontroversi. Interpretasi terhadap tuntutan reformasi di Indonesia, tidak dapat dipahami sebatas upaya untuk melakukan perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kebersinergian kejadian-kejadian sebagai setting yang dimatangkan tindakan-tindakan dari berbagai kalangan yang menyertakan motif yang memberi tekanan terhadap pemerintah Orde Baru.

Melalui kejadian-kejadian itu, suatu konteks tertentu (*scene*) memunculkan perkembangan tema-tema yang mencerminkan tuntutan perubahan itu sendiri yang dikenal sebagai agenda-agenda reformasi. Dengan perkataan lain, keberhasilan agenda-agenda reformasi ditentukan oleh kejadian-kejadian yang dimatangkan oleh suatu tindakan (*act*) untuk berubah. Pada gilirannya konteks satu dengan konteks yang lain mematangkan gagasan suatu tindakan dari para aktor politik untuk melakukan tuntutan reformasi.

Pada sisi lain, kondisi objektif yang mencerminkan keinginan untuk berubah digunakan untuk mendistorsi konteks yang dibangun pemerintah Orde Baru sebagai dasar dan sumber legitimasi untuk berkuasa seperti stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, makna reformasi tergambar di dalam kontestasi terhadap konteks-konteks yang ada dan berkembang yang saling bertarung dari berbagai aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya.

Reformasi sering dinyatakan ke dalam berbagai cara yang menunjukkan motif-motif tertentu dari pemakaian simbol-simbol komunikasi. Tuntutan reformasi itu sendiri tidak dilepaskan pada kondisi objektif Orde Baru sebagai *scene* yang digambarkan sebagai rezim yang diktator, yang diwarnai oleh kebijakan politik yang represif, pemerintahan yang tidak bersih, dan dipertahankan melalui cara-cara yang melihat oposisi sebagai manifestasi pengganggu stabilitas, subversi, dan cerminan dari bahaya laten komunisme.

Motif-motif tindakan dari pemakaian simbol-simbol dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi objektif yang memengaruhi motif-motif lain yang menempatkan reformasi pada posisi yang berbeda. Gambaran ini menegaskan adanya konteks pemerintahan yang otoriter berhadapan dengan konteks pemerintahan yang bersih,

konteks pemerintah yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik berhadapan dengan konteks pemerintahan yang demokratis; konteks pemerintahan yang militerisme berhadapan dengan pemerintahan yang menegakkan *civil society* dan seterusnya.

Jadi, pencalonan presiden untuk masa bakti 1998-2003; krisis ekonomi; aksi dan demonstrasi mahasiswa, dan posisi ABRI dalam menghadapi tuntutan reformasi, adalah *scene* yang merupakan kondisi objektif yang menjelaskan situasi bagaimana tuntutan-tuntutan reformasi tersebut dilakukan secara keseluruhan yang memunculkan tema-tema reformasi seperti menjatuhkan Presiden Soeharto, amandemen UUD 1945, pencabutan Dwifungsi ABRI dan militerisme; pemberantasan KKN, penegakan HAM, pengusutan harta kekayaan Presiden Soeharto, pencabutan monopoli Bulog, pembatalan proyek mercusuar mobil nasional, deregulasi, swastanisasi, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dan sebagainya.

Kedua, sebagai tuntutan, keberhasilan reformasi lebih dikarenakan telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai *a device that unifies all those who share the same enemy*. Tuntutan reformasi disatukan oleh satu tujuan yang sama yang menempatkan Presiden Soeharto sebagai sasaran dan target. Dalam hal ini ada dua pola yang dikembangkan, yakni melakukan pengkambinghitaman (viktimisasi personal) terhadap diri pribadi Soeharto dengan mengatakan dirinya seorang diktator, represif, mengeruk kekayaan negara, mengembangkan kroni, dalam lingkup keluarga Cendana dan sebagainya.

Pola kedua adalah dengan melakukan pengkambinghitaman terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh seperti monopoli, proteksionisme, dan kolusi.

Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan itu tidak dapat dilepaskan unsur emotif yang sering lepas kendali dan berlebihan. Tuntutan reformasi telah berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dan rezim pemerintah Orde Baru, tetapi gagal menguasai kekuasaan politiknya.

Proses-proses politik perubahan tetap dijalankan oleh kekuatan-kekuatan lama. Demikian pula, tuntutan reformasi telah berhasil menghapus Dwifungsi ABRI tetapi gagal menghapus bisnis militer secara keseluruhan dan peran teritorial TNI yang tecermin dari Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam. Pada kenyataannya, mereka yang dituduhkan sebagai pelanggar HAM semua dinyatakan bebas serta pengusutan terhadap kekayaan Presiden Soeharto tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Sebagai keberhasilan lain yang dapat diklaim adalah adanya kebebasan berpolitik dan menyatakan pendapat dengan munculnya banyak partai politik, meski Golkar sebagai bagian dari rezim pemerintah Orde Baru, masih tetap dapat berkiprah dalam kancah perpolitikan nasional setelah melakukan perubahan dengan menyatakan diri sebagai partai politik dan memutuskan hubungan dengan birokrasi pemerintah dan dukungan militer.

Ketiga, terdapat paradoks-paradoks yang tidak dapat dihindarkan yang muncul dari soal penilaian subjektif personal, dalam kaitannya dengan fakta serta kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Karena paradoks-paradoks inilah, banyak aktor-aktor politik terlihat tidak konsisten serta bersikap secara tidak adil terhadap apa yang mereka nyatakan tentang Orde Baru dan Soeharto, dengan kenyataan yang dihadapinya, terutama menyangkut formulasi-formulasi ideal yang mereka rumuskan.

Keempat, sebagai implikasi adanya berbagai paradoks itu sendiri, yang mencerminkan adanya perbedaan penilaian

subjektif personal, dalam kaitannya dengan fakta dan kebijakan yang terjadi, aktor-aktor politik yang memperjuangkan perubahan, mengalami fragmentasi orientasi kepentingan dan kekuasaannya. Akibatnya, cara bagaimana konsolidasi kekuasaan dilakukan, telah menimbulkan perpecahan di kalangan mereka sendiri.

Keretakan kepentingan semakin nyata ketika Presiden Habibie membuka lebar-lebar pembentukan partai politik yang melalui proses seleksi telah melahirkan 48 partai politik sebagai peserta pemilu pada tahun 1999. Pada akhirnya komponen-komponen utama penggerak reformasi telah membangun dan mendirikan partai politik yang didukung oleh basis massa yang mereka miliki. Agenda-agenda reformasi dengan demikian, telah tergantikan bila tidak dikatakan terlupakan sama sekali, dengan agenda-agenda politik mereka sendiri berkaitan dengan tujuan-tujuan pendirian partai politik.

Kelima, secara umum, pertarungan terhadap makna reformasi dalam dramatisme politik menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah kekuatan penentu (*determinant forces*) yang menentukan pencitraan terhadap praktik-praktik pemerintahan Orde Baru, sekaligus memfasilitasi bentuk-bentuk koreksi, evaluasi, kritik, dan pendistorsian terhadap sumber-sumber legitimasi pemerintah Orde Baru seperti prestasi ekonomi, Dwifungsi ABRI, dan paradigma pembangunan.

Melalui kekuatan bahasa politik, para aktor politik melakukan seleksi, refleksi, dan defleksi terhadap realitas untuk memberikan batas-batas kritis terhadap tuntutan-tuntutan yang mereka artikulasikan. Dalam pengertian itu, berbagai jalinan pernyataan tentang reformasi itu membentuk iklim pemikiran yang memberi alasan bagi dorongan untuk melakukan perubahan dan mengganti

rezim pemerintah Orde Baru. Iklim pemikiran itu sendiri telah memberi tekanan yang besar yang menghasilkan banyak tindakan yang secara nyata telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah Orde Baru.

Keenam, secara esensial, tuntutan reformasi tidak menghapuskan sifat dasar kekuasaan yang dinilai tidak ideal, melainkan hanya menggeser ke sisi lain dari persoalan kekuasaan misalnya kekuasaan yang sentralistis, menjadi ada pembagian ke dalam partai-partai politik, KKN di seputar Presiden Soeharto bergeser pada KKN di sejumlah lembaga negara dan pemerintah bahkan lebih luas dan terbuka. Kenyataan ini memicu penilaian bahwa esensi reformasi sebenarnya gagal dicapai terutama harapan bahwa reformasi juga membawa pada perbaikan dan tingkat kesejahteraan rakyat. Sejak awal disadari bahwa reformasi tidak memberi jaminan bahwa tingkat perbaikan dan kesejahteraan rakyat akan lebih baik. Jaminan itu tidak ada, kecuali hanya memberi pilihan dari kondisi-kondisi sulit yang mesti ditempuh di dalam menghadapi berbagai masalah yang mendesak seperti krisis ekonomi, amuk massa, demonstrasi mahasiswa dan krisis kepercayaan.

Implikasi terhadap Simpulan

Meski otentisitas merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas sejarah, jejak-jejak komunikasi yang pernah dinyatakan oleh aktor-aktor politik sebagai pelaku sejarah, dapat dijadikan titik tolak bagi penelusuran lebih lanjut. Sejarah bangsa dapat dipandang sebagai sejarah bagaimana para aktor tersebut berkomunikasi.

Ini tidak hendak dikatakan bahwa jejak-jejak komunikasi yang tersajikan adalah sesuatu yang lengkap dan sempurna, melainkan ingin dijelaskan bahwa jejak-jejak komunikasi yang pernah dinyatakan pada periode waktu sebelumnya

yang membentuk iklim pemikiran atau konteks zaman, memberi gambaran bagaimana sejarah perubahan, pengetahuan, moral dan etik seperti apa yang pernah berkembang pada suatu periode tertentu itu. Konteks zaman yang mencerminkan gagasan dan pikiran yang berkembang dapat dipahami melalui jejak-jejak komunikasi. Tentu saja, persoalan otensitas dan kesahihan itu perlu dikaji dalam perspektif dan kajian sejarah itu sendiri.

Dalam Lingkup Kajian Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan itu mencerminkan kekuatan simbol. Dalam kapasitas itu, manusia mendayagunakan simbol (*the symbol using animal*). Aktor-aktor politik itu melakukan produksi dan reproduksi pesan-pesan yang menampilkan pernyataan-pernyataan yang suasif, argumentatif, provokatif, memuji, memaki, mendiskreditkan, mengkambinghitamkan, mendorong-dorong, membujuk, dan sebagainya. Melalui penggunaan itu pula, manusia melakukan persaingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, komunikasi dan kekuasaan adalah sesuatu yang vital karena *communication is power*.

Retorika memberi penjelasan bagaimana persuasi dan argumentasi memiliki kekuatan untuk melakukan rentangan waktu, pencitraan, antitesis, dan mengeksploitasi emosi dan rasionalitas masyarakat secara luas bagi tujuan persuasi. Gerakan sosial, revolusi, kampanye, dan untuk tujuan-tujuan bisnis seperti pemasaran dan periklanan, merupakan bidang-bidang kajian yang relevan. Aspek persuasi yang menempatkan simbol sebagai instrumen.

Kajian Politik

Persentuhan dengan politik, terlihat pada kedudukan retorika yang diartikan sebagai *a rational instrument of symbolic power*. Sementara, kajian pokok politik adalah *power* itu sendiri. Bahwa jejak-jejak komunikasi di dalam suatu gerakan demokratisasi mampu menjabarkan gagasan politik yang diusulkan dan atau dipertahankan, menunjukkan persentase sosial, nilai, dan harapan dari aktor-aktor politik yang terlibat.

Kajian politik dapat mengambil titik tolak melalui pesan-pesan yang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan mereka, seberapa jauh mereka konsisten dalam menyuarakan perubahan, serta seberapa jauh paradoks-paradoks itu terjadi. Masalah-masalah seperti konsensus, sosialisasi, legitimasi, konflik, otoritas, dan kekuasaan yang merupakan kajian-kajian krusial dalam bidang ilmu politik, dapat dilakukan melakukan jejak-jejak komunikasi dan bagaimana muatan komunikasi tersebut dibicarakan.

Kajian Sejarah

Kajian sejarah melihat kejadian-kejadian masa lalu. Sedangkan kejadian-kejadian itu selalu dibingkai dan diselubungi oleh tindakan-tindakan komunikasi. Dengan demikian, berbagai pernyataan yang mencerminkan kontestasi makna terhadap reformasi itu adalah konstruksi sejarah perubahan yang terjadi pada tahun tersebut. Sejarah pengetahuan, kekuasaan dan etik dapat diteliti melalui jejak-jejak komunikasi yang ditinggalkan dalam suatu kurun waktu krusial yang dinilai sebagai momentum sejarah. Setiap zaman dan periode memberikan bobot pada iklim komunikasi yang tidak dapat disamakan dengan periode dan zaman yang berbeda.

Telaah yang perlu dikembangkan lebih jauh sebagai implikasi bagi kajian sejarah adalah menguji otensitas pernyataan-pernyataan yang terekam sehingga segi-segi ini dapat mencerminkan sejarah perubahan kekuasaan yang sebenarnya penuh ironi. Jejak-jejak komunikasi dapat dikembangkan lebih jauh untuk menguji persentase sosial dari aktor-aktor politik yang terlibat, nilai-nilai yang diperjuangkan, segi-segi perubahan itu sendiri, dan konstelasi kekuatan dan kekuasaan yang terbentuk yang berguna bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.

Implikasi Praktis

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tulisan ini dapat dijadikan dasar bagi evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah dapat diwujudkan dan hal-hal apa yang perlu dipikirkan lebih lanjut bagi kehidupan berbangsa dan negara. Segi kemanfaatannya sangat jelas karena perubahan-perubahan kekuasaan semestinya diarahkan pada perbaikan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis yang pada gilirannya memberi kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan partisipasi rakyat di dalam kekuasaan. Harus dibedakan mana yang merupakan tataran utopia sebagai absurditas yang hanya menarik dalam tataran retorik dan mana yang memang logis untuk diwujudkan.

Saran

Keberlangsungan babakan sejarah perubahan, tidak terhenti pada periode tahun 1997 sampai 1998, melainkan proses konsolidasi demokrasi terus berjalan. Pasca tahun 1998, masih terdapat banyak momentum-momentum pen-

ting mengenai bagaimana gagasan tentang perubahan dan bagaimana menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya pengembangan penelitian yang melihat waktu-waktu krusial yang menentukan misalnya proses konsolidasi dan perbedaan pandangan terhadap kekuasaan pada periode tahun 1999 sampai 2004.

Ada kejadian-kejadian penting yang melibatkan perbedaan kepentingan yang kuat antara komponen-komponen penggerak reformasi itu sendiri dengan kekuatan lama. Seperti yang diketahui bahwa pemilu tahun 1999 masih memunculkan Partai Golkar sebagai kekuatan yang cukup signifikan dalam parlemen. Pergeseran-pergeseran kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid yang dijatuhkan dan kemudian digantikan Presiden Megawati Soekarnoputri, merupakan lingkup kajian yang dapat dikatakan kelanjutan dari proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. ❖



INDEKS

A

- Abdalla, Ulil Absar 187
Abdul Gafur 189
Abdul Hakim Garuda Nusantara 188
Abdullah Schal 163
Abdul Latief 190
Abdul Malik Fajar 190
Abdurrahman Wahid 8, 83, 98, 117, 163, 170, 190
ABRI 63, 172, 173
Adi Sasono 83, 163, 187, 207
Adnan Buyung Nasution 187
Ahmad Bagja 164, 190
A.H. Nasution 18, 33, 35, 41, 65, 67
Aidit 29
Akbar Tanjung 9, 76, 124, 203
aksi penjarahan 1
Ali Murtopo 66
Ali Sadikin 167, 187
Ali Wardhana 51
Ali Yafie 190
A.M. Fatwa 83
A.M. Hendropriyono 203
Amien Rais 8, 83, 100, 121, 145, 167, 171, 187
Anas Urbaningrum 153
Andi Arief 153
Andrew Jakubowicz 11
Andrianus Mooy 51
Angkatan '66 25
antek nekolim 40
anti-Nasakom 29
Anton Sulistianto 151
Arbi Sanit 187
Arie Kumaat 171
Ariel Heryanto 83
Arif Budiman 83
Arifin Panigoro 167, 187
Asia Development Bank (ADB)

- 133
 Asian Development Bank 6
 Asman Boedisantoso Ranakusuma 189
 A. Sumargono 202
 A. Syafii Ma'arif 187
 auctor intelektual 181
 A. Yani 33
- B**
- Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia 202
 Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia 202
 Badan Pembina Jiwa Revolusi 26
 Bambang Sudibyo 188
 Bambang Supeno 37
 Bambang W. Soeharto 164
 Bank Dunia 133
 Bill Clinton 134
 B.J. Habibie 11, 78, 90, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 206
 Bob S. Hadiwinata 164
 Budiman Sudjatmiko 98, 207
 Budiman Sujatmiko 83
 Budi Utomo 25
 Bung Tomo 25
 Bursah Syarnubi 163
- C**
- Camdessus 132, 133, 138, 139
 CGI 53
- D**
- Daniel Sparingga 188
 Daniel T. Sparingga 144, 152
 Dawam Raharjo 167, 187
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 64
 Demokrasi Terpimpin 26, 27
 Desmond J. Mahesa 153
 Dewan Jenderal 30, 31, 32, 34, 36
 Dewan Revolusi Indonesia 30
 Dimiyati Hartono 152, 202
 Dipa Nusantara Aidit 29
 D.N. Aidit 33, 36
 doktrin ABRI 65
 Dwifungsi ABRI 4, 17, 18, 61, 66, 68, 69, 80, 169
- E**
- Effendi Gazali 201
 Effendi Jusuf 164
 Egi Sujana 163
 Eki Syachrudin 130
 Emha Ainun Nadjib 167, 187, 190
 Emil Salim 167, 187
 Era Reformasi 25
 Eros Djarot 141, 207
- F**
- Fadly Zon 202
 Faisal Basri 167, 187
 Faisal Tanjung 65
 FAO 94
 Fatimah Achmad 189
 Feisal Tanjung 124, 160, 163, 168
 Ferdinand Marcos 89
 Fitra Arsil 144
 Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat 202
 Frans Seda 120, 187
 Franz Magnis-Suseno 121, 187
 free fight liberalism 20

Fuad Hassan 71, 84

G

G30S/PKI 17

Gautam S. Kaji 127

genetic marker 9

George Herbert Mead 2

George Junus Adtjondro 83

gerakan mahasiswa 143

gerakan moral 86, 143, 147, 153

Gerakan Pemuda Anshor 202

Gerakan Pemuda Islam 202

Gerakan Pemuda Islam Indonesia 202

gerakan reformasi 168

Gerakan Reformasi 74

Gerakan Reformasi Nasional
202

Ginandjar Kartasasmita 192,
203

Ginanjjar Kartasasmita 80, 103

Goenawan Moehammad 187

Goenawan Mohammad 98

Golkar 116, 119

golput 99

H

H. Agus Salim 22

Hamka 30

Hannah Arendt 155

Harga Pedoman Setempat
(HPS) 133

Hariman Siregar 83, 141

Hari Sabarno 119

Harmoko 116, 118, 119, 120,
172, 189

Haryanto Taslam 153

Haryono Tjitroseobono 187

Hendardi 167, 188

Heri Akhmadi 188

Himpunan Mahasiswa Indonesia 202

historie recite 2

Hotman M. Siahaan 187

Husein Umar 187

I

Ichlasul Amal 145, 167, 188

Idhan Januardana 143

IGGI 53

Ignas Kleden 3

Ignas Kleiden 3

Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah 202

IKIP Yogyakarta 149

IMF 6, 131, 133, 134

Indonesia, Dewan Revolusi 36

insiden Trisakti 1

International Monetary Fund
(IMF) 6

IPTN 136

Ismail Hasan Metareum 120,
163, 189

Ismed Yuzairi 103

J

Jakob Oetama 2

James Rubin 134

J.B. Sumarlin 51, 82

J.E. Sahetapy 162

Josep E. Stiglitz 22

Juergen Stark 138

Justika Syarifudin Baharsjah
203

Juwono Sudarsono 121, 169

K

Kabinet Reformasi 192, 193,

- 203
 Kabinet Reformasi Pembangunan 203
 kapitalis birokrat (kabir) 40
 kapitalisme semu 5
 Karlina Leksono 187
 kebebasan akademik 147
 Kertosudiro 77
 kerusuhan 1
 kerusuhan 27 Juli 1996 156
 kerusuhan di Jakarta 156
 kerusuhan Rengasdengklok 156
 kerusuhan Sanggau Ledo 156
 kerusuhan Situbondo 156
 kerusuhan Tanah Abang 156
 kerusuhan Tasikmalaya 156
 kerusuhan Wonosobo dan Banjarnegara 156
 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 151
 K.H. Amin Sukron 163
 K.H. Mustofa Bisri 167, 188
 KISDI 202
 KNPI 118
 Kogam (Komando Ganyang Malaysia) 27
 Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia 149
 kontrarevolusioner 29, 40
 Kosgoro 118
 krisis moneter 100
 kuningisasi 99
 Kuntoro Mangkusubroto 203
 Kuntowijoyo 158
 Kwik Kian Gie 131, 162, 204
- L
- Laksamana Sukardi 187
- Lama, Orde 86
 L.B. Moerdani 68, 80
 Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta 149
- M
- Mafia Berkeley 53
 Mahar Mardjono 145
 Majelis Aliansi Rakyat Indonesia 163
 Majelis Amanat Rakyat 167
 Majelis Amanat Rakyat (MAR) 187
 M. Alwi Dahlan 185, 189
 Manipol 29
 Mar'ie Muhammad 126
 Ma'ruf Amin 190
 mberontakan PKI Madiun 17
 Megawati Soekarno putri 8
 Megawati Soekarnoputri 83, 98
 Michel Camdessus 132, 133, 138, 139
 Mochtar Lubis 30
 Mochtar Mas'ood 188
 Mochtar Pabottingi 114
 Moedrick Sangidu 188
 Mohammad Hatta 15, 22, 26
 Mohammad Natsir 30
 Mohammad Roem 72
 M.T. Haryono 34
 Mochtar Pakpahan 83, 98, 207
 Mudji Sutrisno 187
 Muhammad Asri 143
 Muladi 152
- N
- Nasakom 26, 37
 Nawaksara 42
 negara bangsa (nation-state) 15

- negara neopatrimonialisme 6
 negara pejabat 6
 NKK/BKK 141
 NKRI 16
 Nugroho Notosusanto 62, 66
 Nurcholish Madjid 190, 195
- O**
- Oei Tjoe Tat 40
 Omar Dhani 33, 36
 Ongkongham 187
 Orde Baru 24, 25, 26, 44, 47,
 53, 60, 61, 64, 79, 116,
 125, 141
 Orde Lama 24, 26, 39, 86
 Organisasi Tanpa Bentuk
 (OTB) 162
 otonomi kampus 147
- P**
- Paket Deregulasi 3 November
 133
 Partai Amanat Nasional 207
 Partai Golkar 207
 Partai Kebangkitan Bangsa 207
 Partai Rakyat Demokartik 163
 Partai Rakyat Demokrat (PRD)
 149
 Partai Uni Demokrasi Indone-
 sia 163
 pasar bebas 21
 PCPP 202
 PDI-P 207
 Pekalongan, kerusuhan 156
 Pemberontakan DI/TII 17
 people power 144, 171
 Peristiwa 30 September 1965
 31
 Peristiwa Malari 54
- Persatuan Pelajar Islam Indone-
 sia 202
 Peter Costello 138
 Petrus Kanisius Ojong 25
 pihak ketiga 181
 Pius Lustrilanang 153
 PKI 28, 29, 30, 31, 33
 PNI Baru 202
 politik praktis 145, 146
 politik tinggi 145
 primus inter pares 71
 Puruhito 146
- R**
- Rachmadi Bambang Sumadhijo
 203
 Rahardi Ramelan 203
 Rama Pratama 144, 151
 Ratna Sarumpaet 188
 reformasi 178, 185, 186, 187,
 210, 214
 Reformasi 1998 73
 reformasi ekonomi 176
 reformasi politik 176
 reformasi struktural 176
 Republik Maluku Selatan
 (RMS) 17
 rezim Orde baru 11
 rezim Orde Baru 5, 7
 R. Hartono 163, 185
 Riswanda Imawan 145
 Rizal Panggabean 187
 Rizal Ramli 167, 187
 Robert Brown 139
 Robert Edward Elson 79
 Rod Palmer 11
 Ryaas Rasyid 159, 160, 207
- S**

- Saleh Afiff 51, 126
 Sarlito Wirawan Sarwono 162
 Satjipto Rahardjo 157
 Satjipto Raharjo 157
 Sayidiman 66
 Sayuti 188
 scapegoat 194
 SD Inpres 54
 Selo Soemardjan 202
 setan desa 40
 setan kota 29, 40
 Siswono Yudohusodo 118
 Siswono Yudo Husodo 118,
 188, 207
 Siti Hardiyanti Rukmana 100
 Soebandrio 40
 Soebroto 202
 Soeharto 1, 2, 3, 6, 9, 16, 36,
 37, 41, 43, 44, 45, 48, 51,
 60, 61, 65, 70, 71, 73, 75,
 76, 77, 79, 82, 83, 84, 90,
 92, 94, 99, 115, 117, 119,
 122, 124, 135, 136, 137,
 139, 140, 147, 152, 168,
 171, 175, 183, 191
 Soekarno 15, 16, 19, 22, 26, 27,
 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39,
 42, 50, 76, 83, 92
 Soepardjo 36
 Soepomo 22
 Soeprapto 34
 Soetandyo Wignjosoebroto 160
 Sri Bintang Pamungkas 83, 98,
 121
 Sri Mulyani Indrawati 201
 Sri Sultan Hamengku Buwono
 X 150
 S. Supriadi 169
 Stanley Roth 148
 Stephen Rogers 134
 Strobe Talbot 132
 Sudirman 16
 Sudisman 33
 Sujana Saphiie 187
 Sujana Sapiie 167
 Sukirah 77
 Sumitro Djodjohadikusumo
 188
 Sumpah Pemuda 25
 Supardjo 33, 37
 Supersemar 41
 Sutan Syahrir 30
 Sutiyoso 99
 Sutrisno Muchdan 190
 Syahrir 207
 Syamsudin Haris 187
 Syarwan Hamid 117, 120, 166,
 189
- T
- Tanri Abeng 203
 Taufik Abdullah 1
 Teuku Jacob 145
 Theo L. Sambuaga 203
 Tjuk Sukiadi 187
 Toety Heraty 187
 Tri Ubaya Cakti 44
- U
- Ulil Absar Abdalla 187
 Umar Mansur 146
 UNDP 6
 Univeristas Andalas 150
 Universitas Airlangga 146, 152
 Universitas Diponegoro 152
 Universitas Gadjah Mada 145,
 148, 149
 Universitas Hasanuddin 150
 Universitas Indonesia 145

Universitas Lampung 149
Universitas Udayana 150
Untung 36, 37
Usdek 29

V

viktimisasi 194, 197

W

Widjojo Nitisastro 51, 132
William R. Liddle 158
Wiranto 151, 152, 171, 172,
181, 183
Wiranto Arismunandar 145,
146
World Bank 6
World Bank (WB) 6

Y

YKPK 202
Yogie S. Memet 124
Yusril Ihza Mahendra 190, 207

Z

Z.A. Maulani 169



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik, "Pengantar" dalam Idi Subandy Ibrahim (Ed). 2003. *Wiranto di Tengah Badai*. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Adam, Asvi Warman, "History, Nationalism and Power" in Vedi R. Hadiz and Daniel Dhakidae. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Pasir Panjang: ISEAS
- Alatas, Ali, "Kemantapan dalam Keseimbangan" dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada
- Aly, Rum. 2006. *Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Ananta, Aris. Arifin, Evi Nurvidya, and Suryadinata. 2005. *Emerging Democracy in Indonesia*. Pasir Panjang: ISEAS.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Arendt, Hannah. 1972. *Crises of The Republic*. Florida: Harcourt Brace and Company.

- Babbie, Earl, "Truth, Objectivity and Agreement" in O'Brien, Jodi and Peter Kollock. 2001. *The Production of Reality*. California: Pine Forge Press.
- Barton, L. 1993. *Crisis in Organization: Managing and Communicating in the Heat of Chaos*. South Western: Cincinnati OH.
- Bartley, Robert, et.all. 1993. *Democracy and Capitalism*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies.
- Baswir, Revrison. 2006. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhakti, Ikrar Nusa, "Berbagai Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto" dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi SK. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Banneti, W. Lance, and Barber, James David. 1980. *Public Opinion in American Politics*. NY: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Bechler, Curt, "Reframing the Organizational Exigency: Taking a New Approach in Crisis Research," in Dan P. Millar and Robert L. Heath. 2004. *Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Communication*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bitzer, Lloyd F., "Political Rhetoric" in Dan D. Nimmo and Keith R. Sanders. 1981. *Handbook of Political Communication*. Beverly Hill, CA: Sage Publication
- Biesecker, B. 1997. *Addressing Postmodernity: Kenneth Burke, Rhetoric and a Theory of Social Change*. Tuscaloosa: University of Alabama.
- Bitzer Lloyd F., Political Rhetoric, "in Dan D. Nimmo and Keith R. Sanders, (Ed.). 1981. *Handbook of Political Communication*. Beverly Hill, CA: Sage Publication.
- Bottomore, T.B. 1976. *Elites and Society*. Maryland: Penguin Books.
- Buber, Martin. 1958. *I and Thou*. New York: Charles Scribners's Son.
- Burke, Kenneth. 1945. *A Grammar of Motives*. California: Prentice Hall.
- , "Dramatism" in D. L Sills (Ed.). 1968. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 7. New York: Macmillan.

- , 1972. *Dramatism and Development*. MA: Clark University Press.
- , 1966. *Language as Symbolic Action*. California: University of California Press.
- , 1969. *A Rhetoric of Motives*. California: University of California Press.
- Chilton, Paul. 2004. *Analysing Political Discourse*. London: Routledge.
- Corcoran, Paul E., "Language and Politics" in David L. Swanson and Dan Nimmo. 1990. *New Direction in Political Communication A Resource Book*. California: Sage Publication.
- Crouch, Harold. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Darsono, Amat. 2002. *Berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI di Tengah Gelombang Tuntutan Reformasi*. Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Dienaputra, Reiza D., "Militer di Tengah Suksesi Kepemimpinan Nasional Eksistensi dan Peran Militer dalam Suksesi 1967 dan Suksesi 1998" dalam Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara. 2000. *Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 1991. *Manajemen Presiden Soeharto Penuturan 17 Menteri*. Jakarta: Yayasan Bina Generasi Bangsa.
- Dwipayana, G. dan K.H., Ramadhan. 1989. *Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Edelman, Murray. 1971. *Politics as Symbolic Action*. Chicago: Markham Publising.
- Feith, Herbert and Castle, Lance., (Ed.). 1998. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Fontana, Andrea and James H. Frey, "Interviewing: The Art of Science" in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oak: Sage Publication.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gonggong, Anhar, "Ketika Kekuatan Pemuda–Mahasiswa Memulai: Ketika Kekuatan Lain Meraih Untung, dalam Rum Aly. 2006, *Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Griffin, Em. 2002. *A First Look at Communication Theory*. Boston: McGrawHill.
- Gusfield, J. 1981. *The Culture of Public Problem: Drinking-Driving and the Symbolic Order*. Chicago: University of Chicago Press.
- Graber, Doris A., "Political Language", in Dan D. Nimmo and Keith R. Sanders, (Ed.). 1981. *Handbook of Political Communication*. Beverly Hill, CA: Sage Publication.
- Habermas, Jurgen. 1987. *The Theory of Communicative Action, Volume Two*. Boston: Beacon Press.
- , 1969. *Toward A Rational Society*. London: Hainemann Educational Book.
- Habibie, B.J. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan*. Jakarta: THC Mandiri.
- , "Menyatu dengan Aspirasi Bangsa" dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Lamtoro Gung Citra Persada.
- Handoko, Creszentia Nina. 2007. *Komunikasi Korporat Dalam Krisis*. Jakarta: Disertasi-UI.
- Harmoko, "Manajemen yang Terbuka dan Transparan dengan Penuh Kearifan, dalam Riant Nugroho Dwidjowijoto (Ed.). 1997. *Manajemen Presiden Soeharto Penuturan 17 Menteri*. Jakarta: Yayasan Bina Generasi Bangsa.
- Hart, Roderick P. 1989. *Modern Rhetorical Criticism*. Illinois: L Scot, Foresman and Scot and Company.
- Hartarto, "Wawasan Jauh ke Depan, dalam Dwipayana, G dan Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Hasan, Fuad, "Meramu Intelegensi dengan Intuisi, Penalaran dan Perasaan, dalam G Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Lamtoro Gung Citra Persada.
- Heath, Robert L., and Millar, Dan P., "A Rhetorical Approach to Crisis Communication, Management, Communication

- Processes, and Strategic Responses,” in Robert L. Heath and Dan P. Millar. 2004. *Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication*, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Heath, Robert L., ”Crisis Preparation: Planning For The Inevitable, ” in Dan P. Millar and Robert L. Heath. 2004. *Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Crisis Communication*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- , ”Telling a Story: A Narrative Approach to Communication During Crisis, ”in Dan P Millar and Robert L. Heath. 2004. *Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Crisis Communication*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Hidayat, Dedy N., dkk. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Honna, Jun. 2006. *Serdadu Memburu Hantu Ideologi Kewaspadaan di Senjakala Kekuasaan Orde Baru*. Yogyakarta: Center for Information Analysis.
- Huntington, Samuel. 1995 (terj.). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Press.
- , ”American Democracy in Relation to Asia, ” in Robert Bartley, et. all. 1993. *Democracy and Capitalism*. Pasir Panjang: ISEAS.
- , 1957. *The Soldier and the State*, Cambridge. Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
- Ibrahim, Idi Subandy (Ed.). 2003. *Wiranto di Tengah Badai*. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Indrawati, Sri Mulyani, ”Kapitalisme Global dan Krisis Kepercayaan terhadap Rezim Soeharto” dalam Dedy N. Hidayat, dkk. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwan, Alexander, ”Institutions, Discourses and Conflict in Economic Thought,” in Vedi R Hadiz and Dhaniel Dhakidae. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing.
- Isaak, Alan C. 1981. *Scope and Method of Political Science*. Illinois: The Dorsey Press.
- Jackson, Karl D. and Lucian W Pye. 1978. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: California University Press.

- Janowitz, Morris. 1964. *The Military in the Political Development of New Nations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Kartasasmita, Ginandjar, "Pikiran Modern dalam Pribadi Jawa," dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Lamtoro Gung Citra Persada.
- Kunio, Yoshihara (terj.). 1990. *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Lijphart, Arend. 2002. *Patterns of Democracy Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. London: Yale University Press.
- Lisaak, Moshe. 1976. *Military Roles in Modernization: Civil-Military Relation in Thailand and Burma*. Beverly Hill, California: Sage Publication.
- Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*. CA: Wadworth.
- Littlejohn, Stephen W., and Kathy Domenici. 2007. *Communication, Conflict and Management of Difference*. Illinois: Waveland Press.
- Lovell, John P., "Civil-Military Relations: Traditional and Modern Concepts Reappraised," in Charles L. Cochran (Ed.). 1985. *Civil-Military Relations: Changes Concepts in Seventies*. New York: The Free Press.
- Miller Katherine. 2002. *Communication Theories Perspectives, Processes and Context*. Boston: McGraw Hill.
- McGillivray, Mark and Morrissey, Oliver, "Economic and Financial in Indonesia Prospects for Sustained and Quitable Economic and Social Recovery", in Arif Budiman, Hartley, Barbara and Kingbury. Damien. 1999. *Reformasi Crisis and Change in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute.
- . "Krisis Ekonomi dan Finansial Indonesia: Prospek Pemulihan dan Sosial, dalam Arief Budiman, dkk. 2000. *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- McVey, Ruth, (terj.). 1998. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Millar, Dan P., "Exposing the Errors: An Examination of the Nature of Organizational Crises," in Robert L. Heath and

- Dan P. Millar. 2004. *Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication*. NJ: Lawrence Erlbaum.
- Moerdani, L.B., "Negarawan Saptamarga yang Cermat dan Teguh pada Prinsip Perjuangan, dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Murtopo, Ali. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, CSIS.
- Notosusanto, Nugroho. 1974. *Some Effects of the Guerilla on the Armed Forces and Society in Indonesia, 1948-49*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI.
- Nugroho, Heru., "The Political Economy of Higher Education: The University as an Arena for Struggle for Power", in Vedi R Hadiz and Daniel Dhakidae. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Pasir Panjang: ISEAS.
- O'Donnel, Guillermo and Schmitler, Phillipe C. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Oetama, Jacob, "Pengantar" dalam Sulastomo. 2003. *Reformasi antara Harapan dan Realita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation State The Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Olaniran, Bolande A., and Williams, David E., "Burkian Counternature and the Vigilant Response: An Anticipatory Model of Crisis Management and Technology," in Dan P. Millar and Robert L.Heath. 2004. *Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Communication*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- O'Rourke, Kevin. 2002. *Reformasi The Struggle for Power in Post-Soeharto*. NSW: Allen and Unwin, Ltd.
- Pabotinggi, Mochtar, "Pengantar, "dalam Fransiskus Surdiasis, Ulin Ni'man dan Rusdi Mathari. 2008. *Bakti Untuk Indonesia Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.
- , 1997. *Saya Musuh Politik Soeharto*. Jakarta: Pijar Indonesia.

- . 2008. *Menantang Seorang Diktator Perjalanan di Jerman*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Payne, D. 1990. *Coping with Failure: Theurapeutic Uses of Rhetoric*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Prabowo, "Sketsa Ekonomi Politik Pemerintahan Soekarno: Jembatan Emas Menuju Kehancuran, " dalam Rum Aly. 2006. *Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Rachman, M. Fadjoel, "Peran Politik, Territorial dan Bisnis TNI/ POLRI, dalam Dedy N.Hidayat, dkk. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rais, M. Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Roeder, O.G. 1969. *The Smiling General President Soeharto of Indonesia*. Djakarta: Gunung Agung Ltd.
- Robinson, Richard. 1986. *Indonesia The Rise of Capital*. Sydney: Allen and Unwin Ltd.
- , "Indonesia: Tension in State and Regime, in Kevin Hewison, Richard Robinson and Garry Rodan (Ed.). 1993. *Authoritarian, Democracy and Capitalism*. New South Wales: Allen and Unwin, Ltd.
- Rudini, "Prajurit Pejuang," dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Rukmana, Siti Hardiyanti. (Ed.). 1990. *Butir-Butir Budaya Jawa*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.
- Said, Salim. 1993. *Genesis of Power General Sudirman and The Indonesian Military in Politics 1945-49*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- . 2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 2006. *Soeharto's Armed Forces Problems of Civil Military Relations in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 2006. *Legitimizing Military Rule Indonesian Armed Forces Ideology 1958-2000*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Salam, Aprinus., Dewi, Shinta Ari., dan Faruk. 2001. *Wacana Reformasi di Media Massa*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM.
- Sembiring, Garda dan Sutedjo, Harsono. 2004. *Gerakan 30 September 1965 Kesaksian Letkol (PNB) Heru Atmodjo*. Jakarta: People's Empowerment Consortium.
- Singh, Bilveer. 1995. *Dwifungsi ABRI Asal Usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siune, Karen and Kline, F. Gerald, "Communication, Mass Political Behavior and Mass Society, in Steven H.Chaffee (Ed.). 1975. *Political Communication Issues and Strategies for Research*, Beverly Hills: Sage Publication.
- Soebandrio. 2001. *Kesaksianku tentang G-30-S*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total.
- Soempeno, Femi Edi. 2008. *Mereka Mengkhianati Saya*, Yogyakarta: Galang Press.
- Sulasdi, Paulus. 2001. *Konstruksi Pemikiran Kompas tentang Reformasi Berdasarkan Tajuk Rencana Selama Pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie*. Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Sulastomo. 2003. *Reformasi antara Harapan dan Realita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumarlin, J.B., "Arif Bijaksana dan Rendah Hati", dalam Dwipayana, G dan Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Suryana, Daniel. 2008. *Indonesia Dalam Transisi Politik*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Its Discontent*, London: Penguin Book.
- Sudharmono, "Beberapa Kesan Saya Mengenai Pak Harto," dalam G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Diantara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, "Pemimpin Militer dan Negarawan," dalam G. Dwipayana dan Nazarudin Syamsudin (Ed.).1991. *Di antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

- Syahrir. 1992. *Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1962-1992*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tanjung, Akbar. 2008. *The Golkar Way*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Redaksi. 2008. *Soeharto Di Mata Kawan dan Lawan*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Tancred, H.C Lanson. 1991. *Aristotle The Art of Rhetoric*. London: Penguin Book.
- Turner, Jonathan H. 1998. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont CA Wadworth Publishing Company.
- Tuturan Anak-Anak Pahlwan Revolusi. 2002. *Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam*. Jakarta: Keluarga Pahlwan Revolusi.
- Vancil, David L. 1993. *Rhetoric and Argumentation*. Boston: Allyn and Bacon.
- Widiarto, Aan Eko., Syafaat, M.Ali., dan Suryokumoro, Herman. 2007. *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: in Trans Publishing.

Jurnal-jurnal

- Crawford, Gordon and Yulius P. Hermawan. 2002. *International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia*. Contemporary Southeast Asia, Volume 24, Issue 2.
- Heath, R. 1979. *Kenneth Burke on Form*. Quaterly Journal Speech, Vol.65.
- Hidayat, Dedy N. 2002. *Don't Worry, Clinton is Megawati's Brother' The Mass Media Rumor Economic Structural and Deligitimation of Soeharto's New Order*. Gazzette TheInternational Journal for Communication Studies, 2002, Volume 24. Issue 2.
- Jakubowicz, Andrew and Rod Palmer. 2002. *Framing Soeharto Australian Media Accounts of the Fall from Power, "* Gazzette The International Journal for Communication Studies, Volume 24. Issue 2.
- Kivimaki, Timo. 2000. *U.S-Indonesia Relationship during the Economic Crisis: Where Has Indonesia's Bargaining Power Gone ?*, Contemporary Southeast Asia, Volume 22, Issue 3.

Liddle, William R and Mallarangeng. 1997. *Indonesia in 1996 Pressures from Above and Below*, Asian Survey, February, Vol. XXXVII, No.2.

Paper

Berg, Andrew. 1999. *The Asia Crisis: Causes, Policy Responses and Outcomes*- IMF Working Paper, 138.

Camdessus, Michel, *Economic and Financial Situation in Asia: Latest Developments*, Paper- Asia-Europe Finance Minister Meeting, Frankfurt, January, 16, 1999.

Williamson, John.1993. *Democracy and The Washington Consensus*, World Development, Vol. 21.

Situs Internet

Fostum-UMB, (1998, 5 Mei), *Surat Terbuka Buat Pak Harto*, 21 Juni 2008, <http://indoprotest.tripod.com/050504/htm>.

Susanti, Fransisca Ria, (2003, 21 Mei), *Demokrasi Setengah Hati, Reformasi Mati Suri*, 14 April 2008, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0305/21/sh04.htm>.

Merenungi Nasib Reformasi Kita (2002), 7 Maret 2008, http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/06.htm.

Artikel-artikel

Amal, Ichlasul, (1998, 5 April), *Dialog, Reformasi dan Kasus Radisson*, Republika, hal. 2.

Gie, Kwik Kian, (1997, 6 Januari), *Diagnosis Ekonomi, Gejolak Kerusuhan*, Kompas, hal. 1.

Lewar, Pieter Sanga, (1998, 27 Mei), *Reformasi Sebagai Patron Demokrasi*, Kedaulatan Rakyat, hal. 2.

Laksono, R Agung, (1998, 6 April), *Tanpa Disuruh pun Reformasi Sudah Dijalankan*, Republika, hal. 8.

Loqman, Loebby, (1998, 30 April), *Gagasan Reformasi Sim pang Siur*, Republika, hal. 2.

Liddle, R William, (1998, 1 Juni), *Revolusi Dari Luar*, Kompas, hal. 4.

Lubis, T Mulya, (1998, 16 Juni), *Mencari Keseimbangan Baru*, Kompas, hal. 4.

Nugroho, Aloys Agus, (1998, 8 Juni), *Reformasi Total sebagai Reformasi Kultural*, Kompas, hal. 4.

- Rasyid, M. Ryaas, (1997, 19 Desember), *Politik Tahun 1997/1998*, Kompas, hal. 4.
- Raharjo, Satjipto, (1997, 24 Februari), *Siapa Melakukan Kekerasan*, Kompas, hal. 4.
- Rasuanto, Bur, (1998, 14 April), *Reformasi*, Republika, hal. 6.
- Soeharto, (1998, 20 Mei), *Penjelasan Presiden Soeharto soal Reformasi*, Solo Pos, hal. 4.
- Sumartana, Th, (1998, 30 Mei), *Moral Reformasi Berimpit Rekonsiliasi dengan Moral*, Kompas, hal. 4.
- Suny, Ismail, (1998, 26 Mei), *Reformasi Politik*, Kompas, hal. 4.
- Tobing, Jakob, (1988, 9 Mei), *Reformasi*, Suara Pembaharuan.
- Yudohusodo, Siswono, (1998, 4 Mei), *Beberapa Pemikiran tentang Reformasi*, Media Indonesia, hal. 4.



TENTANG PENULIS



Basuki Agus Suparno, lahir di Sragen, 6 Mei 1971. Lulus sarjana program Ilmu Komunikasi Massa UNS Surakarta tahun 1996. Setahun kemudian (1997), memulai karier sebagai dosen komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan tersebut. Magister ilmu komunikasinya diselesaikan tahun 2005 yang juga dari UNS. Sedangkan gelar Doktornya diperoleh dari Departemen Ilmu Komunikasi UI Jakarta pada awal tahun 2010.

Pengalaman mengajar terfokus pada Perspektif dan Teori Komunikasi, Statistik Sosial, Filsafat Komunikasi, Etika Komunikasi, dan Perencanaan Media Periklanan.

Perguruan tinggi yang pernah disinggahi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara lain, Universitas Indonesia, Universitas Mercubuana (Jakarta), London School Public Relations (Jakarta), Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi

Bisnis Tarakanita (Jakarta), Universitas Slamet Riyadi (Surakarta), Universitas Respati (Yogyakarta), Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta) dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta).

Aktivitas ilmiahnya mengikuti seminar dalam dan luar negeri, menjadi pembicara, dan melakukan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan strategis seperti terkait dengan disinformasi berita politik, garis pemikiran dan gerakan politik mahasiswa, atau seperti deradikalisasi terhadap kelompok sosial keagamaan. Pernah terlibat dalam beberapa penyusunan buku *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia (Kompas) dan Cerita Pendek: Penyombong Kelas Satu*. Aktif menulis di beberapa media dan jurnal ilmiah.

Pernah dilibatkan dalam penyusunan dan peninjauan kembali terhadap P3-SPS Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tahun 2009 sebagai tenaga ahli. Pada tahun yang sama (2009) pernah pula dilibatkan sebagai tenaga ahli dalam rangka Pemanfaatan Uji Coba Rating Alternatif Departemen Komunikasi dan Informatika. Kini rutinitas kesehariannya, mengajar dan memberi konsultasi kepada mahasiswa di Program Studi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta.

REFORMASI

JATUHNYA SOEHARTO

Gia ipic tem quam haruptaquam, illaboreiur, corem qui dolest, se eatemque nost venim quaturem cor aut opta eos di arum utem nem quibusc imporeptas natur, num voloreriscit aut que con estrumet adis nos duciis etur adit et et eiciducium hari cust aut eosapid que et eos ex es dit audi ut dolendi ssimperrovit int excerro id eium nem faccum sandem volorporunt qui dolut voloria volor rae. Quibusandit, natus, tem quunti quo offictatius dolore cus ma doloreribus, imus recus esequa quissit vid ea quo maximet, options equibus sequatur?

Volum faciis ut is ipis remposam, ut acitium quiberovitis erspisit utatus rerovit quis aturia im eossitatur, idioritibus volorum et ipicia nam, a voloren delitis cimosapedio. Um vel illor rectorum aspiendipsam rati dit evel idusti ad ma volecte ndiate volupta quiam num ea si tem aboresti ipis accuptatiam expla dem es et, que simodigenda voluptatur?

Sa quas esequis tiumentias mostiasperum quaerum quiam esti as et verum re, volorio. Et ant eturepuda dolestium intio blander ferat.

Agnis untur aliatio. Ut officiatem ea soluptatibus nihit untotat aut velisin ctisque exerfer ionsed que ipsum non pratur, seroremporro minvel ex et es aut od ut quam, tessint.

Laborio nectur magnam doloris ut haribus vendit volupta nobit aut dis rere nimi, voluptur? Qui optaeca eptati re dolorep erunditem vollam iur, simus alique demporero quatis et, sum rat ommolut estis suntota speribu sdant, cus dolup-



KOMPAS

Penerbit Buku
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com
Telp. (021) 5347710, ext. 5601